



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

RKPD

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah**

2027





BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);



- 2 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);



-3-

16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2026 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 4 (empat) tahun.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.



- 4 -

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
- BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- BAB VII : Penutup

Pasal 5

- (1) RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 memuat :
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 berpedoman pada RKP Tahun 2027 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.
- (3) Penyusunan rencana kerja dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menggunakan rencana kerja OPD sebagai bahan masukan.

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 dituangkan dalam APBD Tahun 2027 sesuai dengan ketersediaan dana.



-3-

Pasal 7

RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 3 Juli 2026

BUPATI BENGKULU TENGAH,



RACHMAT RIYANTO

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 3 Juli 2026



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

MARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN
2026 NOMOR 10



SAMBUTAN BUPATI BENGKULU TENGAH

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya lah saya menyambut gembira atas tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Bengkulu Tengah. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2027 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat Pusat dan dokumen perencanaan tingkat Provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di Kabupaten/Kota di Bengkulu sehingga terjadi sinergitas perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan penyusunan dokumen rencana kerja dan mengevaluasi pelaksanaan kerja daerah agar pelaksanaan pembangunan di daerah akan semakin lebih baik.

RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun ketiga dari aktualisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029, yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam mendukung terwujudnya Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2025-2029 adalah: *“Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah Yang Maju, Sejahtera, Bahagia, Dan Berkelanjutan”*.

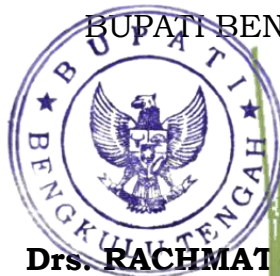
RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan pagu dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. RKPD akan memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Tengah, serta kepada semua pihak yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam penyusunan dokumen ini.

Demikian, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih dan Semoga Allah SWT selalu meridhoi kita dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bengkulu Tengah, 3 Juli 2026,

BUPATI BENGKULU TENGAH,



Drs. RACHMAT RIYANTO, ST. MAP

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SAMBUTAN BUPATI BENGKULU TENGAH	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
PERATURAN BUPATI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	BAB I 1
1.1 LATAR BELAKANG	BAB I 1
1.2 LANDASAN HUKUM	BAB I 7
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	BAB I 10
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	BAB I 12
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD	BAB I 12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	BAB II 1
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	BAB II 1
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2027	BAB II 42
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	BAB III 1
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	BAB III 1
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	BAB III 2
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	BAB IV 1
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	BAB IV 1
4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027	BAB IV 7
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	BAB V 1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	BAB VI 1
BAB VII PENUTUP	BAB VII 1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Luas Daerah dan Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah, 2025	BAB II	2
Tabel	2.2	Jumlah Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah	BAB II	2
Tabel	2.3	Luasan Bentuk Wilayah Daratan Kabupaten Bengkulu Tengah	BAB II	3
Tabel	2.4	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Bengkulu di Provinsi Bengkulu, 2025	BAB II	5
Tabel	2.5	Rencana Pola Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032	BAB II	7
Tabel	2.6	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah, 2025	BAB II	9
Tabel	2.7	PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020-2025	BAB II	11
Tabel	2.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021-2025	BAB II	12
Tabel	2.9	Perkembangan IPM Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 – 2025	BAB II	12
Tabel	2.10	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020-2025	BAB II	13
Tabel	2.11	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah, 2022 – 2025	BAB II	15
Tabel	2.12	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah 2025	BAB II	15
Tabel	2.13	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2021 s/d 2025 Kabupaten Bengkulu Tengah	BAB II	16
Tabel	2.14	Jumlah Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025/2026	BAB II	16
Tabel	2.15	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019-2025	BAB II	17
Tabel	2.16	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Tengah, 2019-2025	BAB II	17
Tabel	2.17	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkulu Tengah, 2025	BAB II	18

Tabel 2.18	Dimensi Jaringan Irigasi Kabupaten Bengkulu Tengah	BAB II	19
Tabel 2.19	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2011 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu (persen), 2022–2024	BAB II	23
Tabel 2.20	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Bengkulu Tengah (rupiah), 2024 dan 2025	BAB II	24
Tabel 2.21	Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Bengkulu Tengah (ton), 2024 dan 2025	BAB II	26
Tabel 2.22	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Bengkulu Tengah (Kwintal) Tahun 2024 dan 2025	BAB II	27
Tabel 2.23	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Kabupaten Bengkulu Tengah (ha), 2025	BAB II	31
Tabel 2.24	Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah (ekor), 2025	BAB II	32
Tabel 2.25	Luas Area Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Bengkulu Tengah (ha), 2025	BAB II	33
Tabel 2.26	Potensi Cagar Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Tengah	BAB II	37
Tabel 2.27	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Bengkulu Tengah (km), 2023–2025	BAB II	39
Tabel 2.28	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkulu Tengah (km), 2023–2025	BAB II	39
Tabel 2.29	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah, 2025	BAB II	39
Tabel 2.30	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Bengkulu Tengah, 2025	BAB II	40
Tabel 2.31	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkulu Tengah, 2025	BAB II	40
Tabel 2.32	Jumlah Tindak Pidana Menurut Bulan Di Kabupaten Bengkulu Tengah 2025	BAB II	41
Tabel 2.33	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	BAB II	42
Tabel 3.1	Perkembangan Indikator Makro kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024-2025	BAB III	2
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Bengkulu	BAB III	2

Tengah Tahun 2027

Tabel	3.3	Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2026 dan Rancangan RKPD Tahun 2027	BAB III	4
Tabel	3.4	Anggaran Belanja Daerah Tahun 2027	BAB III	8
Tabel	3.5	Jumlah Pembiayaan Tahun 2027	BAB III	9
Tabel	4.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029	BAB IV	2
Tabel	4.2	Tujuan, Sasaran, dan Strategi	BAB IV	3
Tabel	4.3	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027	BAB IV	6
Tabel	4.4	Daftar Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027	BAB IV	11
Tabel	4.5	Rumusan Usulan Program dan Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok Pokok Pikiran DPRD pada RKPD Tahun 2027 Berdasarkan Aplikasi SIPD RI	BAB IV	26
Tabel	4.6	Rumusan Usulan Aspirasi Masyarakat pada RKPD Tahun 2027 Berdasarkan Aplikasi SIPD RI	BAB IV	28
Tabel	5.1	Konsistensi Program Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2027	BAB V	1
Tabel	5.2	Rekapitulasi Rencana Kebutuhan Pendanaan Indikatif Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2027	BAB V	6
Tabel	5.3	Keselaran Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027	BAB V	9
Tabel	5.4	Keselaran Pro-Sn/Tematik Pembangunan Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027	BAB V	103
Tabel	6.1	Target Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027	BAB VI	1
Tabel	6.2	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027	BAB VI	2

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Hubungan Keterkaitan Antara RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Lainnya	BAB I	11
Gambar	2.1	Peta Administrasi Kabupaten Bengkulu Tengah	BAB II	1
Gambar	2.2	Perkembangan NTP dan NUP Provinsi Bengkulu, Februari 2023 – Februari 2024 (2018=100)	BAB II	39
Gambar	4.1	Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029	BAB IV	7
Gambar	4.2	Kerangka Pikir Arah Kabujakan Wilayah Tahun 2027	BAB IV	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan yang berorientasi ke arah perbaikan dan kemajuan secara berkelanjutan, meliputi berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan infrastruktur, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia dalam masyarakat. Proses pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sebagai penjabaran RPJMD 2025-2029, RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain daripada itu, RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 juga merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027.

RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2027 dalam

penyusunannya merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP, RPJPD dan RPJMD Provinsi Bengkulu, serta RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan tujuan untuk memastikan terbangunnya sinkronisasi dan keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.

Disamping itu, RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumber daya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 disusun melalui proses musrenbang, konsultasi publik, dan forum komunikasi lintas perangkat daerah. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara substansi, dokumen RKPD ini memuat rencana kerja, program dan indikasi kegiatan dalam satu tahun anggaran yang terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi/sub fungsi pembangunan serta dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Sesuai dengan amanat undang-undang, penyusunan RKPD dilakukan dengan metode perencanaan partisipatif yang mengutamakan keterlibatan seluruh *stakeholder* pembangunan. Perencanaan partisipatif inilah yang kemudian diwujudkan melalui rangkaian musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten, konsultasi publik, serta forum lintas perangkat daerah.

RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2027 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratis (strategis dan berbasis kinerja). Perencanaan dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang merupakan suatu proses pemikiran strategis. Pendekatan ini tercermin dari: a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu; b) Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini; c) Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD; d) Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan; e) Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah); f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan OPD berbasis kinerja; g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan; h) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya; i) Kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
2. Pendekatan demokratis dan partisipatif Peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan dimaksudkan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta dapat menciptakan rasa memiliki. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam RKPD berupa: a) Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD; b) Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan; c) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan; d) Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marginal; e)

Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD; f) Pelibatan media; g) Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif; h) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting dalam pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan serta prioritas program.

3. Pendekatan Politis. Pendekatan politis tercermin pada RKPD berupa: a) Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan kepala OPD membahas hal-hal strategis yang berkembang baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023; b) Keterlibatan aktif DPRD dalam Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten/RKPD termasuk sinergitas hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD; c) Kedudukan RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan RKPD sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan termasuk RAPBD.
4. Pendekatan *Top Down* Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/ rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin pada RKPD berupa adanya: a) Sinergi dengan RKPD dan RENJA SKPD Provinsi Bengkulu, RKP dan Renja Kementerian/Lembaga; b) Konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Bengkulu Tengah; c) Konsistensi dengan RTRW Daerah; d) Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem; e) Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals (MDGs)*, *sustainable development*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya.
5. Pendekatan *Bottom Up* Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin dari adanya: a) Penjangkaran aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kabupaten Bengkulu Tengah; b) Memperhatikan hasil proses

Musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah. c) Mempertimbangkan hasil Forum OPD.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan (mainstreaming) dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini harus dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Penyusunan RKPD merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam jangka waktu satu tahun.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka perhatian yang besar harus diberikan sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Dokumen RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan RKPD

Tahap persiapan penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 meliputi:

- a. Penyusunan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027;
- b. Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota tim untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Tahap penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

a. Perumusan rancangan awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 mencakup:

- 1) Analisis gambaran umum kondisi Daerah;

- 2) Analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - 3) Analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - 4) Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - 5) Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - 6) Penelaahan terhadap sasaran RPD;
 - 7) Penelaahan terhadap arah kebijakan RPD;
 - 8) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - 9) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - 10) Perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - 11) Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- b. Penyajian rancangan awal RKPD
- Rancangan awal RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- 1) Pendahuluan;
 - 2) Gambaran umum kondisi daerah;
 - 3) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - 4) Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - 5) Rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - 6) Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - 7) Penutup.
3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
- Musrenbang RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan tersebut mencakup:
- a. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
 - b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPD di Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - c. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah provinsi;
 - d. Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
 - e. Sinergi dengan RKP Tahun 2027.
4. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Perumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2027 dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah.

5. Penetapan RKPD

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP dan RKPD Provinsi Bengkulu ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar ada keselarasan antara perencanaan di tingkat pusat, provinsi dan daerah.

Tersusunnya RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah. Pencapaian target-target pembangunan pada Tahun 2027 melalui pendekatan *Common Goals* serta kewilayahan dengan melakukan evaluasi tahun sebelumnya serta penetapan anggaran untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran NRI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NRI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395).

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Pergub Nomor 7 Tahun 2026 tentang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2027, Tanggal 24 Juni 2026;
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 – 2032;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 11).
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 - 2045;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029.
36. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 10 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027.

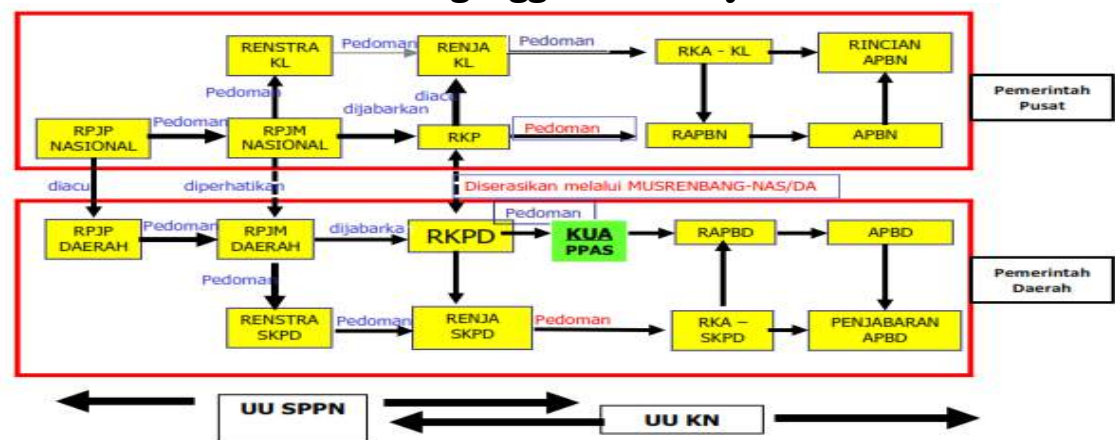
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen pada level yang lebih tinggi menjadi acuan bagi penyusunan dokumen pada level yang lebih rendah. Dengan demikian, dalam hal ini penyusunan dokumen perencanaan daerah

level kabupaten mengacu pada dokumen perencanaan di level provinsi dan nasional. Kemudian dari segi jangka waktu pelaksanaan, dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Adapun periodisasi dalam dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) selama 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) selama 5 tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan rencana kerja tahunan yang secara operasional siap untuk diimplementasikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dijabarkan bahwa perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian proses perencanaan pembangunan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam penyusunan RKPD, maka sinkronisasi dan integrasi harus memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-OPD, (4) RKPD dan (5) Renja OPD. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Hubungan Keterkaitan Antara RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Lainnya



Sumber : Undang- undang no 25 Tahun 2004

- Mengacu pada gambar diatas dapat diketahui bahwa:
- RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah disusun melalui mekanisme Musrenbang dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional dan RKPD Provinsi Bengkulu;

- RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang di dalamnya memuat Misi dan arah Pembangunan Kepala Daerah;
- RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi pedoman bagi penyusunan Renja OPD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap OPD;
- RKPD menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang meliputi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Bengkulu Tengah. Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2027 yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan kerangka operasional dalam rencana pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2027;
2. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan pembangunan daerah tahun 2027;
3. Menjadi acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja OPD) Tahun 2027;
4. Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Dasar Hukum Penyusunan
1.3	Hubungan Antar Dokumen
1.4	Maksud dan Tujuan
1.5	Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2027
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1	Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun

		Berjalan dan Realisasi Renja PD
	2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah
BAB	III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB	IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
	4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027
	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2027
BAB	V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB	VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB	VII	PENUTUP
	7.1	Kaidah Pelaksanaan
	7.2	Kesimpulan

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

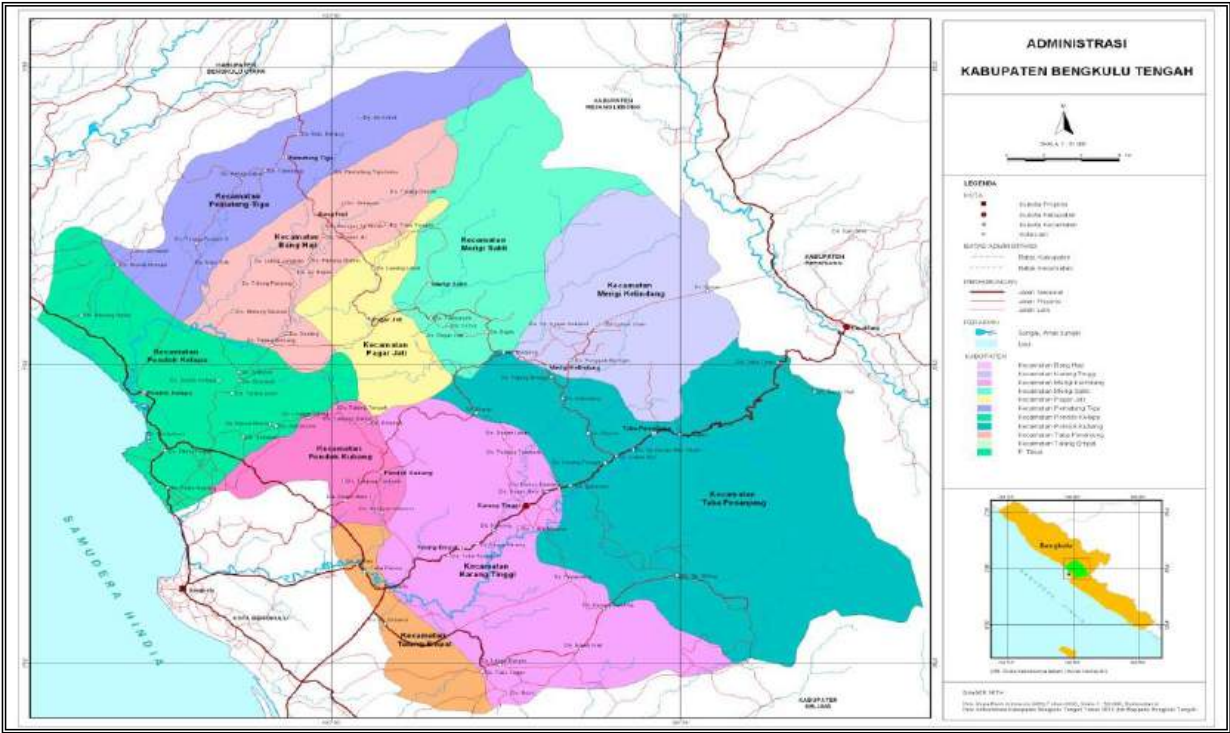
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bengkulu Tengah dengan ibukota Karang Tinggi secara administratif merupakan bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bengkulu Utara
- Sebelah Timur : Kabupaten Kepahiang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu
- Sebelah Barat : Samudera Hindia

Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari 11 kecamatan dengan total luas wilayah mencapai lebih kurang 122.394 hektar atau 1.223,94 kilometer persegi. Ibukota Kabupaten Bengkulu Tengah terletak di Karang Tinggi. Adapun gambaran dan rincian luas masing-masing kecamatan terdapat pada gambar 2.1 dan tabel 2.1.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Bengkulu Tengah



Sumber : RTRW Kabupaten. Bengkulu Tengah Tahun 2012 – 2032

Tabel 2.1
Luas Daerah dan Ibu Kota Kecamatan di
Kabupaten Bengkulu Tengah, 2025

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Talang Empat	Kembang Seri	53,91
2	Semidang Lagan	Lagan Bungin	80,59
3	Karang Tinggi	Ujung Karang	110,59
4	Taba Penanjung	Bajak I	134,38
5	Merigi Kelindang	Lubuk Unen Baru	98,42
6	Pagar Jati	Keroya	188,57
7	Merigi Sakti	Arga Indah II	99,93
8	Pondok Kelapa	Pekik Nyaring	165,20
9	Pondok Kubang	Pondok Kubang	92,00
10	Pematang Tiga	Pematang Tiga	129,64
11	Bang Haji	Sekayun	70,71
Bengkulu Tengah		Karang Tinggi	1.223,94

Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026

b. Letak dan Kondisi Geografis

Jika dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Bengkulu Tengah di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu, di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang. Sedangkan secara astronomis, Kabupaten Bengkulu Tengah terletak antara 2°15’ LS sampai 4°00’ LS dan antara 101°32’BT sampai 102°08’BT.

Kabupaten Bengkulu Tengah berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada garis pantai sepanjang lebih kurang 21,8 kilometer. Bagian timurnya berbukit-bukit dengan ketinggian 541 m dpl, sedangkan pada bagian baramerupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan diselingi daerah yang bergelombang. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki 142 desa dan 1 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1.	Taba Penanjung	12 Desa dan 1 Kelurahan
2.	Karang Tinggi	13 Desa
3.	Talang Empat	10 Desa
4.	Pagar Jati	14 Desa
5.	Pondok Kelapa	17 Desa
6.	Pematang Tiga	13 Desa
7.	Merigi Kelindang	13 Desa
8.	Merigi Sakti	15 Desa
9.	Pondok Kubang	12 Desa
10.	Bang Haji	12 Desa

No	Kecamatan	Jumlah Desa
11.	Semidang Lagan	11 Desa
Total		142 desa 1 Kelurahan

Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026

Desa-desanya di Kabupaten Bengkulu Tengah menyebar di seluruh wilayah kabupaten. Akan tetapi, sebagian besar desa-desa tersebut terletak di wilayah pedalaman dengan aksesibilitas yang masih rendah karena kondisi infrastruktur jalan belum memadai. Jalan penghubung antar desa masih didominasi oleh jalan batu atau koral, bahkan di beberapa desa masih terdapat jalan tanah.

c. Kondisi Topografi

Secara topografis wilayah ini sebagian besar merupakan dataran rendah. Sekitar 70 persen wilayah ini berada pada ketinggian kurang dari 250 meter di atas permukaan laut. Lainnya, kurang lebih 29 persen menempati daerah dengan ketinggian 250-1000 meter di atas permukaan laut, dan hanya kurang lebih 1 (satu) persen yang berada pada daerah dengan ketinggian lebih besar dari 1.000 meter di atas permukaan laut.

Adapun bentuk wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagian besar (lebih besar dari 78 persen) merupakan daerah datar dan landai dengan kelerengan 0-15 persen yang dapat dijumpai di tiap-tiap kecamatan. Sedangkan lainnya lebih besar dari 21 persen berupa lahan dengan bentuk wilayah agak berbukit dengan kelerengan 15-40 persen, dan hanya kurang dari 1 (satu) persen yang merupakan lahan dengan bentuk wilayah berbukit curam dengan kelerengan lebih besar dari 40 persen yang dijumpai di 4 (empat) kecamatan, yakni Karang Tinggi, Merigi Kelindang, Merigi Sakti, dan Taba Penanjung.

Tabel 2.3
Luasan Bentuk Wilayah Daratan
Kabupaten Bengkulu Tengah

No	Kecamatan	0-8%		8-15%		15-25%		25-40		> 40%	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1.	Bang Haji	7.288,0	6,0	1.473,6	1,2	804,2	0,7	35,2	0,0	-	-
2.	Karang Tinggi	15.045,5	12,3	2.909,1	2,4	760,9	0,6	356,7	0,3	56,5	0,1
3.	Merigi Kelindang	3.725,9	3,0	3.179,4	2,6	3.483,8	2,9	1.585,7	1,3	110,3	0,1
4.	Merigi Sakti	4.643,0	3,8	3.278,4	2,7	3.500,9	2,9	940,3	0,8	150,0	0,1
5.	Pagar Jati	5.051,5	4,1	263,8	0,2	74,6	0,1	-	-	-	-
6.	Pematang Tiga	6.316,3	5,2	2.605,1	2,1	2.045,2	1,7	589,8	0,5	-	-

No	Kecamatan	0-8%		8-15%		15-25%		25-40		> 40%	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
7.	Pondok Kelapa	13.098,1	10,7	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Pondok Kubang	4.661,6	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Taba Penanjung	10.828,3	8,9	8.113,2	6,6	7.354,2	6,0	3.934,8	3,2	243,0	0,2
10.	Talang Empat	3.812,9	3,1	101,5	0,1	-	-	-	-	-	-
Total		74.471,1	60,8	21.897,1	17,9	18.023,7	14,7	7.442,5	6,1	559,7	0,5

Sumber: RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 – 2032

d. Kondisi Geologi

Dari segi geologi, wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah berada di Pulau Sumatera yang merupakan wilayah rawan terhadap bencana alam gempa bumi. Hal ini dikarenakan Pulau Sumatera berada pada jalur pertemuan antara Lempeng Eurasia dengan Lempeng Indo-Australia dimana pertemuan antara dua lempeng tersebut berada di Samudera Indonesia dan merupakan daerah subduksi berpotensi sebagai sumber gempa bumi tektonik. Apabila gempa bumi terjadi dengan pusat gempa (*epicentrum*) di lautan, maka dapat berakibat terjadinya tsunami, mengingat letak wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan garis pantai sepanjang 38 KM. Sementara itu di daratan Pulau Sumatera juga terdapat sumber gempa tektonik lainnya, berupa Patahan Semangko pada bagian Barat dari Pulau Sumatera membujur dari arah utara ke arah selatan. Selain itu secara vulkanik, Kabupaten Bengkulu Tengah juga rawan terhadap bencana gempa bumi vulkanik yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi yang ada di Pulau Sumatera.

e. Kondisi Hidrologi

Penelaahan aspek hidrologi mencakup sisi ketersediaan dan pemanfaatan sumbar-sumber air di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Ketersediaan air dapat diidentifikasi terutama dari aliran masuk (*run-in*) atau aliran permukaan (*surface run-off*). Sedangkan sisi pemanfaatannya tergantung dari jenis pemakaian (irigasi,sumber energi, konsumsi penduduk, serta faktor kehilangan air (*discharges*) secara alami. Hidrologi di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki karakteristik aliran sungai dengan pola berbentuk paralel. Sungai-sungai tersebut mengalir dari kawasan perbukitan di sebelah utara menuju kearah selatan dan bermuara ke Samudera Indonesia. Diantara sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini ada dua sungai yang cukup besar dan berair sepanjang tahun, yakni: Air Palik dan Air Bengkulu. Sedangkan sungai-sungai lainnya umumnya berair pada musim

hujan, tetapi debitnya mengalami penurunan secara drastis pada musim kemarau. Secara hidrologis sungai-sungai di kawasan ini sudah tergolong kritis. Pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian perkebunan sawit dan karet, serta pembukaan lahan untuk kegiatan pertambangan batu bara di kawasan hulu sungai ini ikut bertanggung jawab atas kemerosotan fungsi hidrologis sungai-sungai tersebut.

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki suhu rata-rata adalah 26,73°C, suhu minimum 23,89°C, suhu maksimum 30,7°C dengan tingkat kelembaban udara rata-rata 84,08%. Curah hujan di Kabupaten Bengkulu Tengah rata-rata 365,25 mm. Dengan melihat pola hujan demikian dan sesuai dengan pola iklim global, maka wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah tergolong kepada wilayah dengan Iklim Tropis Basah yang relatif tanpa musim kering. Dengan tipe iklim tropis basah ini, maka potensial bagi pengembangan pertanian. Namun dengan karakter topografi/morfologi wilayah di atas, sangat diperlukan upaya pelestarian kawasan lindung dalam rangka konservasi sumber daya air dan memberikan perlindungan kawasan bawahannya, khususnya kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air.

f. Kondisi Klimatologi

Letak geografis Kabupaten Bengkulu Tengah sangat berpengaruh terhadap kondisi cuacanya. Sebagian wilayah berada dipesisir Samudera Hindia yang memiliki putaran angin yang kuat, dan sebagian lagi merupakan daratan dengan topografi wilayah yang berbukit. Seperti daerah lain di Provinsi Bengkulu, di Kabupaten Bengkulu Tengah juga sering terjadi hujan. Meskipun termasuk musim kemarau, hujan tetap turun meskipun dengan intensitas yang jarang. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Bengkulu di Provinsi Bengkulu tahun 2025 pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Bengkulu di Provinsi Bengkulu, 2025

Bulan	Suhu/Temperatur (°C)			Kelembaban/Humidity (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	23,10	28,35	33,10	62	81,24	98
Februari	22,90	28,84	35,00	57	79,48	99
Maret	22,00	28,92	33,40	64	80,13	100
April	23,50	28,86	33,20	68	81,35	98
Mei	23,60	29,85	33,80	59	77,90	97
Juni	23,00	29,38	35,80	51	79,42	99
Juli	22,60	29,06	33,20	69	81,85	100
Agustus	21,50	28,75	33,30	60	80,30	100

Bulan	Suhu/Temperatur (°C)			Kelembaban/Humidity (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
September	22,70	28,49	33,30	62	82,49	100
Oktober	21,80	29,07	36,20	51	79,82	100
Nopember	22,70	28,21	32,40	65	81,69	100
Desember	22,70	28,33	34,20	60	80,58	100

Sumber:Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026

Suhu udara rata-rata adalah 28,84°C, sedang suhu minimum rata – rata 22,67°C; dan maksimum 33,90°C. Kelembapan udara relatif rata - rata 80,52%. Kelembapan udara terendah terjadi pada bulan Mei (77,90%), sedangkan kelembapan udara tertinggi dijumpai pada bulan September (82,49%). Berdasarkan Klasifikasi Agroklimat Oldeman (1975) dalam Handoko (1995), tipe iklim di Kabupaten Bengkulu Tengah tergolong tipe iklim A1, yakni daerah dengan bulan basah >11 bulan dan bulan kering <1 bulan.

Dengan melihat pola hujan demikian dan sesuai dengan pola iklim global, maka wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah tergolong kepada wilayah dengan Iklim Tropis Basah yang relatif tanpa musim kering. Dengan tipe iklim tropis basah ini, maka potensial bagi pengembangan pertanian. Namun di lain pihak dengan karakter topografi/morfologi wilayah di atas, sangat diperlukan upaya pelestarian kawasan lindung dalam rangka konservasi sumber daya air dan memberikan perlindungan kawasan bawahannya, khususnya kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air.

g. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Bengkulu Tengah terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya umumnya difungsikan oleh penduduk untuk permukiman, perkebunan dan pertanian. Kawasan budidaya di Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan rencana pola ruang adalah 90.597 ha. (63,4%), yang terdiri dari kawasan hutan produksi tetap (HPT), kawasan hutan produksi (HP), kawasan pertanian, kawasan budidaya perikanan, kawasan pertambangan,kawasan pemukiman, kawasan agropolitan, kawasan peruntukan perkantoran, pendidikan, kesehatan, kebudayaan perdagangan dan jasa.

Kawasan budidaya perkebunan terdiri dari perkebunan yang dikelola perusahaan dan perkebunan yang dikelola masyarakat. Perkebunan yang dikelola oleh perusahaan merupakan perkebunan besar dengan komoditi sawit dan karet. Sedangkan perkebunan yang dikelola masyarakat merupakan perkebunan kecil dengan jenis tanaman campuran. Biasanya komoditi yang terdapat di kebun campuran yang dikelola masyarakat ini antara lain: kelapa

sawit, karet, pisang, rambutan, durian, dan berbagai jenis tanaman hortikultur buah-buahan lainnya. Selain budidaya perkebunan, penggunaan lahan yang besar di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu untuk aktifitas pertambangan.

Kawasan Hutan lindung di Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari kawasan hutan lindung dan kawasan suaka alam. Kawasan hutan lindung terletak memanjang dari utara ke selatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan kawasan suaka alam yaitu kawasan Tahura (Taman Hutan Raya) dan kawasan sekitar Danau Dendam Tak Sudah.

Tabel 2.5
Rencana Pola Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No.	Rencana Pola Ruang	Luas	
		(hektar)	(%)
A.	Kawasan Lindung	31.797	22,2
1.	Perlindungan bagi Kawasan Bawahannya	18.579	-
	a. Hutan Lindung	18.428	15,1
	b. Resapan Air	151	0,1
2.	Perlindungan Setempat	7.599	-
	a. Sempadan Sungai	1.819	1,5
	b. Sempadan Pantai	419	0,3
	c. Ruang Terbuka Hijau	5.361	-
3.	Hutan Suaka Alam	5.619	-
	a. Cagar Alam (CA)	4	0,003
	b. Taman Hutan Raya (Tahura)	1.162	0,9
	c. Taman Buru (TB)	4.453	3,6
B.	Kawasan Budidaya	90.597	63,4
1.	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	2.927	2,4
2.	Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)	357	0,3
3.	Kawasan Peruntukan Pertanian	33.773	-
	a. Peruntukan Tanaman Pangan;	4.097	3,3
	b. Peruntukan Hortikultura	5.663	4,6
	c. Peruntukan Perkebunan	23.013	18,8
	d. Peruntukan Peternakan	1.000	0,8
4.	Kawasan Peruntukan Budidaya Perikanan	409	0,3
5.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	20.930	-
	Pertambangan Batubara	20.930	17,1
6.	Kawasan Peruntukan Permukiman	15.405	-
	a. Permukiman Perdesaan	2.467	2,0
	b. Permukiman Perkotaan	2.938	2,4
	c. Relokasi Lahan Permukiman Penduduk	10.000	8,2
7.	Kawasan Agropolitan	3.965	-
8.	Kawasan Peruntukan Perkantoran, Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Perdagangan dan Jasa	12.831	10,5
Luas Darat		1.223.94	85,64
Luas Laut		2.052.0	14,36
Luas Total Darat + Laut		1.429.14	100

Sumber: RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 – 2032

h. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki modal dasar yang sangat potensial untuk pengembangan wilayah guna mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lainnya. Ditinjau dari segi lokasi Kabupaten Bengkulu Tengah

yang berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu memiliki posisi yang strategis karena merupakan jalur perlintasan utama menuju Provinsi Sumatera Selatan (Lubuk Linggau – Palembang) serta jalur perlintasan utama menuju Provinsi Sumatera Barat (Muko-Muko – Padang). Selain itu, posisi yang berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu membuat Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki potensi besar sebagai kawasan penunjang aktifitas perkotaan. Apalagi didukung dengan ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budidaya.

Selain dari segi lokasi, Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang cukup memadai untuk dikembangkan. Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian, Kabupaten Bengkulu Tengah masih sangat baik sehingga tidaklah mengherankan kalau Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Bengkulu. Di samping potensi di bidang pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta memiliki potensi pertambangan yang sangat baik di Kabupaten Bengkulu Tengah. Selain itu dengan bentangan pantai yang dimiliki sangat memungkinkan untuk pengembangan sumberdaya kelautan yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut.

i. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu daerah yang rawan bencana. Dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat beberapa daerah rawan bencana tanah longsor. Daerah rawan longsor ini sebagian besar berada pada kemiringan lahan lebih besar dari 60 persen, yang umumnya berada di kawasan hutan lindung. Sedangkan daerah yang menempati kelerengan kurang dari 40 persen diperkirakan hanya sebagian kecil yang rawan bencana tanah longsor. Beberapa kecamatan yang memiliki kerawanan tanah longsor adalah Kecamatan Pematang Tiga, Pondok Kelapa, Bang Haji, Merigi Sakti, Merigi Kelindang, Taba Penanjung, dan Karang Tinggi.

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Secara alamiah, pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Pola aliran sungai yang umumnya semi paralel menyebabkan datangnya air dari daerah hulu relatif

bersamaan. Pada titik-titik pertemuan anak-anak sungai itulah terjadi akumulasi debit aliran sehingga melebihi kapasitas tampung sungai. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, kawasan rawan bencana banjir berada di Kecamatan Pondok Kelapa, Talang Empat dan sebagian kecil Pondok Kubang, yang merupakan daerah hilir Air Lemau dan Air Bengkulu. Kawasan ini umumnya telah dimanfaatkan untuk areal persawahan dan permukiman.

Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan bagian dari Pulau Sumatera dan memiliki garis pantai yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Secara keseluruhan, Pulau Sumatera memiliki kerawanan terhadap gempa yang disertai potensi tsunami di sepanjang pantai barat. Oleh sebab itu, Kabupaten Bengkulu Tengah juga rawan terhadap bencana gempa dan tsunami.

j. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2025 menurut data dari Bengkulu Tengah Dalam Angka 2026 adalah 127.669 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan. Berikut tabel 2.6 jumlah penduduk berdasarkan kecamatan.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah, 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024-2025 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Talang Empat	13.630	2,6	10,68	123	102
2	Semidang Lagan	13.516	3,4	10,59	251	105
3	Karang Tinggi	33.126	2,2	25,95	201	104
4	Taba Penanjung	8.203	2,1	6,43	63	105
5	Merigi Kelindang	7.519	1,8	5,89	40	103
6	Pagar Jati	12.544	1	9,83	93	106
7	Merigi Sakti	7.760	1,4	6,08	79	106
8	Pondok Kelapa	6.830	-0,3	5,35	68	103
9	Pondok Kubang	11.270	2,9	8,83	123	105
10	Pematang Tiga	7.240	1,1	5,67	102	108
11	Bang Haji	6.031	0,1	4,72	75	108
Bengkulu Tengah		127.669	1,9	100	1.218	105

Sumber:Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026

Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Karang Tinggi sebesar 33.126 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Bang Haji sebesar 6.031 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang lebih tinggi umumnya memiliki

kelengkapan fasilitas sosial-ekonomi yang lebih lengkap dan tingkat perkembangan lebih baik dibandingkan kecamatan lainnya, seperti pada Kecamatan Karang Tinggi. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, kecamatan-kecamatan yang kepadatan penduduknya >100 jiwa/km² adalah di kecamatan Semidang Lagan, Karang Tinggi, Talang Empat, Pondok Kubang, Karang Tinggi, dan Pematang Tiga sementara 5 kecamatan lainnya kepadatan penduduknya <100 jiwa/km². Secara umum kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu 110 jiwa/km².

Penduduk di Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri-dari penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk asli terdiri dari Suku Rejang dan Suku Lembak. Sedangkan penduduk pendatang terdiri-dari berbagai suku yang datang dari luar Kabupaten Bengkulu Tengah, seperti Suku Jawa, Sunda, Batak, dan suku lainnya. Suku Rejang umumnya tinggal di Kecamatan Taba Penanjung, Kec. Karang Tinggi, Pagar Jati, dan Kecamatan Pematang Tiga sedangkan Suku Lembak umumnya tinggal di Kecamatan Talang Empat, Karang Tinggi dan Kec. Pondok Kelapa.

Bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari untuk antar suku umumnya menggunakan bahasa Melayu Bengkulu sebagai bahasa komunikasi selain bahasa Indonesia. Untuk komunikasi sesama suku menggunakan bahasa daerah masing-masing suku. Namun, untuk agama, penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah sebagian besar penganut Agama Islam.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu perkembangan dan pemerataan sektor-sektor pembangun ekonomi daerah, perkembangan kesejahteraan sosial masyarakat, serta perhatian terhadap kondisi seni budaya dan olahraga. Analisis terhadap ketiga faktor diatas mampu menjelaskan mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari gambaran hasil pelaksanaan pembangunan yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi dan distribusi beberapa lapangan usaha di Kabupaten Bengkulu Tengah.

LPE merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan ekonomi di suatu wilayah. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun **2020-2024** dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020-2025

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai PDRB (Miliar Rupiah)						
- ADHB (Miliar Rupiah)	4.672,10	5.466,56	6.544,56	6.665,19	6.781,90	7.175,14
- ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	2.885,34	2.951,44	3.041,02	3.157,25	3.282,44	3.414,18
Jumlah Penduduk (Ribu Orang)	116,70	118,10	119,57	121,14	122,67	124,191
PDRB Perkapita ADHB (Ribu Rupiah)	40.127	46,28	54,73	55,02	55,28	57,78
Inflasi	-	-	5,92	3,09	1,17	0,44
Pertumbuhan Ekonomi (%)	(0,06)	2,29	3,03	3,82	3,97	4,01

Sumber :Bengkulu Tengah Dalam Angka 2026

PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk di daerah ini rata-rata mampu menciptakan nilai tambah sebesar nilai per kapita pada masing-masing tahun tersebut.

b. Laju Inflasi

Berdasarkan tabel 2.7 menunjukkan bahwa laju Inflasi dari tahun ke tahun semakin menurun, laju inflasi Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 0,44 persen. Hal tersebut berdampak positif bagi perekonomian. Daya beli masyarakat meningkat, pertumbuhan ekonomi bisa lebih stabil, dan biaya produksi untuk usaha berkurang.

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Kegunaan IPM adalah untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

IPM Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2025 yaitu 72,48 dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas hidup manusia di kabupaten Bengkulu Tengah.

Tabel. 2.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021-2025

KOMPONEN IPM	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya				
	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Harapan Hidup Saat Lahir(Tahun)	68.19	68,37	72,46	72,56	72,48
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.28	13.45	13,46	13,47	14
Rata-rata lama sekolah	7,48	7,49	7,51	7,71	8
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000 rupiah)	1.031.987	1.062.002	1.195.221	1.247.486	1.232.156
Indeks Pembangunan Manusia	67,96	68,47	70,81	71,67	72,48
Tingkat Pertumbuhan IPM	-	0,51	2,34	0,86	0,81

Sumber : Bappeda, Data Diolah 2026

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat berkaitan dengan akses penduduk dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDI (Human Development Index) adalah salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah yang dikeluarkan oleh UNDP (United Nation Development Programe) dengan menghitung indeks komposit dari tiga indikator utama, yakni kesehatan yang menggunakan variabel Usia Harapan Hidup, pendidikan dengan menggunakan variabel Rata-Rata Lama Sekolah dan lama menempuh jenjang pendidikan formal, serta indikator ekonomi dengan menghitung Tingkat Daya Beli (purchasing power parity/PPP).

Tabel 2.9
Perkembangan IPM Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 – 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Bengkulu Tengah	67,96	70,29	70,81	71,67	72,48
Provinsi Bengkulu	71,64	73,68	74,30	74,91	75,68
Nasional	73,2	73,8	74,4	75,0	75,9

Sumber : Statistik Indonesia 2026; Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2026; dan Bengkulu Tengah Dalam Angka 2026.

Aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat berdasarkan perkembangan IPM. IPM Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami peningkatan setiap tahun, yakni dari tahun 2021 hingga 2025. Pada

tahun 2021 IPM Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 67,96 dan pada tahun 2025 naik menjadi 72,48. Pencapaian IPM Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan pencapaian yang lebih rendah dari Provinsi Bengkulu dan Nasional dalam kurun 5 tahun terakhir seperti yang disajikan dalam Tabel 2.9. Sedangkan, bila diukur berdasarkan rata-rata pertumbuhan, IPM Kabupaten Bengkulu Tengah selama periode 2021-2025 lebih rendah dari capaian IPM Provinsi Bengkulu dan Nasional, dengan rataaan pertumbuhan IPM Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 71,67 - 72,48 di tahun 2025, sementara IPM provinsi Bengkulu tumbuh sebesar 74,91 – 75,68 dan IPM Nasional sebesar 75,0 – 75,9.

1) Angka Harapan Hidup (AHH)

Usia Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk dan derajat kesehatan pada khususnya. Perkembangan Usia Harapan Hidup Tahun 2020-2025 di Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dilihat pada tabel 2.10. Selama periode ini, Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah terus meningkat dari Tahun 2020 sebesar 68,19 hingga tahun 2025 menjadi 72,56, Namun apada Tahun 2025 Angka Harapan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami penurunan menjadi 72,48. Target angka harapan hidup Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2025 adalah sebesar 68,99.

Tabel 2.10
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020-2025

Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Bengkulu Tengah	68,19	72,17	72,33	72,46	72,56	72,48

Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka-2026

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang beragam yang diwarnai oleh berbagai suku yang sudah lama menetap di Kabupaten Bengkulu Tengah. Berbagai suku yang datang dari luar Kabupaten Bengkulu Tengah, misalnya Suku Jawa, Suku Sunda, Batak dan lain-lain. Penduduk asli penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Suku Rejang dan Suku Lembak. Tiga rumpun suku besar yang ada Kabupaten Bengkulu Tengah adalah: Suku Rejang umumnya tinggal di Kecamatan Taba Penanjung, Kecamatan Karang Tinggi, Pagar Jati, dan Kecamatan Pematang Tiga sedangkan Suku Lembak umunya tinggal di Kecamatan Talang Empat, Karang Tinggi dan Kecamatan Pondok Kelapa dan Suku Jawa umumnya tinggal di

Kecamatan Pondok Kelapa, Pagar Jati dan Kecamatan Talang Empat. Bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari untuk antar suku umumnya menggunakan bahasa Melayu Bengkulu sebagai bahasa komunikasi selain bahasa Indonesia. Untuk komunikasi sesama suku menggunakan bahasa daerah masing-masing suku. Seperti Bahasa Rejang, Bahasa Lembak, Bahasa Serawai, Bahasa Jawa, Bahasa Sunda dan lain-lain. Pengaruh Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bengkulu Tengah masih sangat kental, hal ini terlihat seperti dalam upacara perkawinan, Kesenian Syarafal Annam dan Kesenian Rebana dan nyanyian-nyanyian berirama padang pasir.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun gambaran mengenai aspek pelayanan umum di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Bidang Urusan Pendidikan

Di era otonomi daerah urusan pendidikan dari taman kanak-kanak hingga Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) menjadi tanggung jawab daerah, sehingga masa depan pendidikan sangat bergantung kepada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sektor pendidikan. Program pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah adalah meningkatkan kualitas, pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan termasuk bagi anak-anak yang kurang mampu, anak-anak di daerah terisolir dan terpencil, relevansi antara bidang pendidikan yang diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja serta sumber daya alam yang ada. Fasilitas pendidikan merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan program pendidikan. Dengan tenaga pengajar yang berkualitas dan fasilitas yang memadai akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

1. Angka partisipasi sekolah

Di Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat sarana pendidikan mulai dari SD hingga SMA dengan persebaran yang cukup merata di setiap wilayah desa dan kecamatan. Namun, beberapa kendala yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu persebaran tenaga pengajar yang belum merata. Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat

dari tahun 2023 ke 2024 mengalami kenaikan, yakni naik dari 109,15 pada tahun 2023 menjadi 109,53 pada tahun 2024 sedangkan APK jenjang pendidikan SMP/ MTs/Sederajat yang juga menunjukkan adanya kenaikan pada tahun 2023 dan 2024, yakni pada tahun 2023 sebesar 95,02 dan menjadi 95,34 pada tahun 2024, APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat menunjukkan adanya penurunan, yakni pada tahun 2023 sebesar 93,58 menjadi 89,70 pada tahun 2024. Semakin tinggi nilai APK menunjukkan semakin tinggi pula partisipasi penduduk dalam menempuh pendidikan.

Tabel 2.11
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah, 2022 – 2025

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)				Angka Partisipasi Kasar (APK)			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
SD/MI	99,83	99,18	97,75	95,82	113,90	109,15	109,53	103,73
SMP/MTs	80,07	81,34	81,72	82,44	94,27	95,02	95,34	103,76
SMA/SMK/MA	75,72	63,27	63,53	55,01	93,87	93,58	89,70	74,29

Sumber : Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026

2. Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, pada tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki gedung sekolah negeri sebanyak 163 yang terdiri dari 99 gedung Sekolah Dasar (SD), 41 gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP), 17 Gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 6 Gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Tabel 2.12
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah 2025

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	Talang Empat	6	4	4	-
2	Semidang Lagan	6	3	-	-
3	Karang Tinggi	10	5	2	1
4	Taba Penanjung	11	4	2	-
5	Merigi Kelindang	10	3	1	1
6	Pagar Jati	8	4	3	-
7	Merigi Sakti	8	1	-	-
8	Pondok Kelapa	16	7	3	1
9	Pondok Kubang	10	5	2	2
10	Pematang Tiga	8	2	1	-
11	Bang Haji	6	4	-	1

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah			
		SD	SMP	SMA	SMK
Jumlah		99	42	18	6

Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026

3. Rasio guru/murid

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-kabupaten Bengkulu Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut. Jumlah guru di Kabupaten Bengkulu Tengah telah mencukupi dimana setiap 12 siswa sekolah dasar dibimbing oleh 1 (satu) guru dan jumlah guru sekolah menengah pertama 13 siswa sekolah menengah pertama dibimbing oleh 1 (satu) guru.

Tabel 2.13
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2021 s/d 2025 Kabupaten Bengkulu Tengah

No.	Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
1	SD	93	93	93	94	93
1.1.	Jumlah Guru	987	896	904	1.060	969
1.2.	Jumlah Murid	11.577	10.895	10.863	10.724	10.523
1.3.	Rasio					
2	SMP	33	34	34	34	34
2.1.	Jumlah Guru	613	593	603	624	563
2.2.	Jumlah Murid	5.438	5.569	5.350	5.221	5.073
2.3.	Rasio					

Sumber: Bengkulu Tengah Dalam Angka 2026

Tabel 2.14
Jumlah Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD)
di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2025/2026

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan*)	SD			SMP		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Talang Empat	118	1.497	13	97	992	0,10
2	Semidang Lagan	-	-	-	-	-	-
3	Karang Tinggi	122	1.230	10	70	590	0,12
4	Taba Penanjung	115	1.318	11	63	439	0,14
5	Merigi Kelindang	67	650	10	46	345	0,13
6	Pagar Jati	52	435	8	21	82	0,26
7	Merigi Sakti	79	834	11	37	332	0,11
8	Pondok Kelapa	223	2.731	12	131	1.357	0,10
9	Pondok Kubang	81	553	7	42	356	0,12
10	Pematang Tiga	67	796	12	30	334	0,09
11	Bang Haji	45	479	11	26	246	0,11

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan*)	SD			SMP		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=6/7)
Jumlah		969	10.523	104	563	5.073	1,27

Sumber: Bengkulu Tengah Dalam Angka 2026

b. Bidang Urusan Kesehatan

Angka usia harapan hidup di Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2024 yaitu 72,56, meningkat dibandingkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 72,46. Untuk lebih meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah melakukan berbagai program seperti imunisasi, pelayanan kesehatan masyarakat, jemput sehat, menambah fasilitas kesehatan yang mudah terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan program kesehatan masyarakat lainnya. Salah satu indikator kesehatan adalah ketersediaan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan terdepan. Salah satu upaya peningkatan RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah ke tipe C Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan peletakan batu pertama ground breaking PHTC (Peningkatan Tingkat Kesehatan) sebagai salah satu program serratus hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. Pada tahun 2024 fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2019-2025

No	Fasilitas Kesehatan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rumah Sakit	Unit	1	1	1	1	1	1	1
2	Puskesmas	Unit	20	20	20	20	20	20	20
3	Puskesmas Pembantu	Unit	32	32	28	28	28	32	29
4	Poliklinik	Unit	3	3	3	3	3	3	4
5	Apotik	Unit	7	9	10	-	-	14	15

Sumber : Kabupaten BengkuluTengah Dalam Angka, 2026

Tabel 2.16
Jumlah Tenaga Kesehatan di
Kabupaten Bengkulu Tengah, 2019-2025

No	Tenaga Medis	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dokter	Orang	48	75	70	27	48	-	26
2	Perawat	Orang	148	224	224	184	164	158	143
3	Bidan	Orang	294	339	339	328	322	319	246
4	Farmasi	Orang	21	36	36	38	39	37	32
5	Ahli Gizi	Orang	-	19	30	30	34	35	33

Sumber : Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026

c. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

1. Infrastruktur Jalan

Transportasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Terdapat hubungan erat antara transportasi dengan jangkauan dan lokasi kegiatan manusia, barang-barang dan jasa. Dalam kaitan dengan kehidupan manusia, transportasi memiliki peranan penting dalam aspek-aspek sosial, ekonomi, lingkungan, politik dan pertahanan keamanan. Dalam aspek perekonomian, transportasi mempunyai pengaruh yang besar.

Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan dan jembatan penting demi memudahkan hubungan komunikasi dan proses mobilisasi penduduk antar daerah dalam menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, utamanya untuk daerah-daerah sulit terjangkau dan terisolir.

Pada tahun 2026, panjang jalan dengan tingkat kewenangan kabupaten di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah 420,91 km. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Survey Kondisi Jalan Dan Jembatan Tahun 2026 kondisi jalan baik sebesar 48,88%, kondisi sedang sebesar 55,77%, kondisi rusak ringan sebesar 9,03%, Kondisi rusak berat sebesar 36,32%.

Tabel 2.17
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkulu Tengah, 2025

Kecamatan <i>District</i>	Kondisi Jalan (km) <i>Road Condition (km)</i>				
	Baik <i>Good</i>	Sedang <i>Moderat</i>	Rusak <i>Damaged</i>	Rusak Berat <i>Severaly Damaged</i>	Jumlah <i>Total</i>
Talang Empat	13,01	0,10	1,60	4,29	19,00
Semidang Lagan	13,58	1,28	1,78	17,32	33,96
Karang Tinggi	27,74	2,24	2,43	27,30	59,70
Taba Penanjung	8,61	0,30	0,54	9,06	18,51
Merigi Kelindang	10,48	0,92	6,00	7,47	24,88
Pagar Jati	21,69	7,08	0,80	11,91	41,49
Merigi Sakti	6,92	4,60	7,98	16,02	35,52
Pondok Kelapa	50,27	4,06	1,90	15,88	72,11
Pondok Kubang	24,79	0,89	6,08	25,42	57,18
Pematang Tiga	14,15	1,65	3,30	11,74	30,84
Bang Haji	12,34	2,40	3,55	9,43	27,72
Bengkulu Tengah	203,58	25,52	35,96	155,84	420,91

Sumber: Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026

2. Irigasi

Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah sebagian besar adalah petani. Dari areal sawah yang ada di Kabupaten Bengkulu

Tengah, memiliki jaringan irigasi sepanjang 107.145 meter. Berikut Tabel drainase/irigasi di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut.

Tabel 2.18
Dimensi Jaringan Irigasi
Kabupaten Bengkulu Tengah

<i>Panjang Saluran (m)</i>	<i>Panjang Saluran</i>		<i>Luas Cakupan</i>	
	Primer (m)	Sekunder (m)	Potensial (Ha)	Fungsional (Ha)
107.145	7.698	99.447	6.501,5	3.387

Sumber: RTRW kabupaten Bengkulu Tengah, 2012-2032

3. Sistem Jaringan Air Bersih

Masyarakat Bengkulu Tengah umumnya masih menggunakan sumur sebagai sumber air bersih, baik untuk dikonsumsi maupun untuk mencuci dan mandi dan kurang dari 10 persen masyarakat yang dapat menikmati jaringan air bersih dari PDAM. Masyarakat yang menggunakan PDAM sebagai sumber air bersih terdapat pada Kecamatan Talang Empat, Karang Tinggi, Pondok Kelapa Dan Taba Penanjung. Masyarakat yang tinggal dekat dengan aliran sungai, umumnya menggunakan air sungai untuk keperluan mandi dan cuci

4. Sistem Jaringan Listrik

Pembangunan di sektor listrik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di desa maupun di kota. Dengan adanya jaringan listrik maka sektor-sektor lainnya seperti industri kecil dan rumah tangga, pertanian, dan jasa dapat berkembang sehingga meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah tersebut. Sejak tahun 2014 hingga saat ini Kabupaten Bengkulu Tengah tercatat sudah tidak ada desa yang belum dialiri arus listrik dan semua desa telah dialiri oleh jaringan listrik.

d. Bidang Urusan Trantibum

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) di Kabupaten Bengkulu Tengah pada Tahun 2025 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Urusan ini merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah.

Pelaksanaan pelayanan Trantibumlinmas Tahun 2025 diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), penegakan peraturan daerah, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, peningkatan kesiapsiagaan bencana, serta peningkatan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Dalam angka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terus meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya:

1. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara persuasif dan humanis;
2. Pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Penguatan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan anggota Satlinmas di tingkat desa dan kelurahan;
4. Peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan petugas pemadam kebakaran;
5. Penguatan sistem perlindungan masyarakat dan mitigasi risiko bencana;
6. Peningkatan koordinasi lintas sektor dengan TNI, POLRI, BPBD, pemerintah desa, serta elemen masyarakat lainnya.

Sepanjang Tahun 2025, penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan kondisi yang relatif kondusif. Penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan gangguan ketertiban umum dapat dilaksanakan melalui kegiatan patroli rutin, operasi penertiban, pembinaan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas anggota Satlinmas dan aparatur Satpol PP terus dilakukan guna mendukung profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah personel Satpol PP dan anggota Satlinmas dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana operasional, termasuk kendaraan patroli, peralatan komunikasi, dan peralatan pemadam kebakaran;
3. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan terhadap Peraturan Daerah;
4. Masih perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur Trantibumlinmas;
5. Tingginya potensi bencana alam yang memerlukan peningkatan kesiapsiagaan dan respons cepat.

Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas ke depan difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal, penguatan sistem perlindungan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib, tenteram, dan tangguh terhadap bencana.

Penyelenggaraan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang optimal diharapkan dapat menciptakan stabilitas daerah, meningkatkan rasa aman masyarakat, serta mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dari para investor sangat dibutuhkan dan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah serta perekrutan tenaga kerja. Hal ini juga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Tengah. Investor yang masuk ke Kabupaten Bengkulu Tengah dari Tahun 2009-2011 tidak mengalami penambahan secara signifikan. Hal ini menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menarik minat para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Rendahnya daya serap bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah karena struktur perekonomian masyarakat bertumpu pada sektor pertanian. Lebih dari 70 % masyarakat pada umumnya adalah petani

yang masih menggunakan sistem tradisional dan sektor lain yang belum berkembang sehingga belum mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pelayanan umum merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara nasional, pemerintah terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dengan diterapkannya sistem Standar Pelayanan Minimum (SPM), maka setiap aparatur pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Akan tetapi, kewajiban tersebut dapat dipenuhi jika sumber daya manusia yang memiliki tugas memberikan pelayanan telah paham serta didukung oleh peralatan sesuai standar. Kondisi yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini, kurangnya tenaga yang profesional dan berkualitas dalam melayani masyarakat dan kurangnya dukungan peralatan yang memadai, sehingga pelayanan yang sesuai standar belum dapat diwujudkan.

2.1.4.Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. PDRB

Perbandingan antar kabupaten ini, menyajikan gambaran informasi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Bengkulu Tengah pada tahun 2025 mengalami peningkatan. Sampai pada tahun 2025, peranan sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah masih sangat dominan. Fenomena ini tampak dari peranan sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah atas dasar harga berlaku yang relatif sangat besar dibandingkan sektor-sektor lain. Nilai nominal PDRB sektor pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 mencapai 2.323,09 miliar rupiah, dengan besar sumbangan terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 32,38 persen.

Dibandingkan tahun 2024 besar sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB total Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami peningkatan dan kedudukannya sebagai leading sector dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah masih sulit untuk digeser oleh sektor-sektor lain. Sektor lain dengan sumbangan besar adalah pertambangan dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 sebesar 1.156,09 miliar rupiah.

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2011 Mneurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel 2.19 berikut:

Tabel 2.19
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Konstan 2011 Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Bengkulu (persen), 2022–2024

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	3,45	3,18	4,37
Rejang Lebong	4,30	4,05	4,29
Bengkulu Utara	3,14	4,18	4,43
Kaur	3,78	3,40	4,15
Seluma	2,92	2,61	4,06
Mukomuko	4,33	3,69	4,05
Lebong	2,98	2,84	4,30
Kepahiang	4,19	4,01	4,28
Bengkulu Tengah	3,03	3,82	3,97
Kota Bengkulu	5,60	5,53	5,39
Bengkulu	4,31	4,26	4,62

Sumber :Bengkulu Dalam Angka, 2026

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1.1 Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Besarnya pendapatan penduduk yang diterima rumah tangga merupakan gambaran kesejahteraan suatu masyarakat. Tetapi banyak faktor yang menjadi penghalang dalam mengumpulkan data pendapatan rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, BPS menggunakan pendekatan pengeluaran untuk mendapatkan perkiraan pendapatan. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan setiap tahun.

Pengeluaran rumah tangga yang terdiri atas pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan, menggambarkan pengalokasian pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun harga komoditas antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar wilayah khususnya dari sisi ekonomi sehingga angka pengeluaran juga dapat dipakai untuk pembandingan antar wilayah.

Pada tahun 2024, rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya sebesar Rp. 1.247.486 per kapita per bulan yang terbagi atas konsumsi makanan sebesar Rp. 716.161 per kapita per bulan dan konsumsi bukan makanan sebesar Rp. 531.325 per kapita per bulan. Pengeluaran rumah tangga untuk makanan sebagian besar digunakan untuk konsumsi makanan dan minuman jadi sebesar Rp. 164.775 per bulan, diikuti konsumsi padi-padian sebesar Rp. 116.370 per bulan, dan konsumsi rokok sebesar Rp. 103.971 per bulan. Sedangkan pengeluaran rumah tangga bukan makanan sebagian besar digunakan untuk konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar Rp. 273.694 per bulan, diikuti konsumsi aneka komoditas dan jasa Rp. 122.888 per bulan, dan pajak pungutan dan asuransi sebesar Rp. 48.657 per bulan.

Tabel 2.20
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut
Kelompok Komoditas di Kabupaten Bengkulu Tengah
(rupiah), 2024 dan 2025

Kelompok Komoditas/ <i>Commodity Group</i>	2024	2025
Makanan/ <i>Food</i>		
Padi-padian/ <i>Cereals</i>	116.370	101.497
Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	6.927	6.834
Ikan/udang/cumi/kerang/ <i>Fish/ shrimp/ common squid/ shells</i>	59,870	54.557
Daging/ <i>Meat</i>	30.161	27.935
Telur dan susu/ <i>Eggs and milk</i>	30.156	27.841
Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	92.430	79.394
Kacang-kacangan/ <i>Legumes</i>	10.468	10.375
Buah-buahan/ <i>Fruits</i>	36.537	41.875
Minyak dan kelapa/ <i>Oil and coconut</i>	21.948	24.570
Bahan minuman/ <i>Beverage stuffs</i>	20.784	20.670
Bumbu-bumbuan/ <i>Spices</i>	10.398	10.800
Konsumsi lainnya/ <i>Miscellaneous food items</i>	11.366	9.731
Makanan dan minuman jadi/ <i>Prepared food and beverages</i>	164.775	143.400
Rokok/ <i>Cigarettes</i>	103.971	125.835
Jumlah makanan/ <i>Total food</i>	716.161	685.314
Bukan makanan/ <i>Non-food</i>		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/ <i>Housing and household facilities</i>	273.694	271.583
Aneka barang dan jasa/ <i>Goods and services</i>	122.888	114.922
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/ <i>Clothing, footwear, and headgear</i>	30.995	27.135
Barang tahan lama/ <i>Durable goods</i>	30.540	72.851
Pajak, pungutan, dan asuransi/ <i>Taxes and insurance</i>	48.657	45.205
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/ <i>Parties and ceremonies</i>	24.551	15.145
Jumlah bukan makanan/ <i>Total non-food</i>	531.325	546.842
Jumlah/ <i>Total</i>	1.247.486	1.232.156

Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026

2.1.4.2 Sektor Pertanian

Karakteristik geografis Kabupaten Bengkulu Tengah beragam, terdiri dari kawasan pesisir, kawasan perbukitan, dan kawasan pegunungan.

Kawasan pesisir terletak pada Kecamatan Pondok Kelapa yang merupakan satuan dataran rendah alluvial dengan potensi sumber daya laut dan pesisir, pertanian dan pertambangan pasir besi. Kawasan pegunungan tersebar di Kecamatan Talang Empat, Kecamatan Pondok Kubang, Kecamatan Karang Tinggi, Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Bang Haji, dan Kecamatan Pematang Tiga, sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, tegalan dan ladang serta kegiatan pertambangan batubara. Sedangkan kawasan pegunungan yang sebagian besar adalah kawasan hutan lindung terletak di Kecamatan Karang Tinggi, Kecamatan Pematang Tiga, Kecamatan Merigi Sakti, Kecamatan Merigi Kelindang, dan Kecamatan Taba Penanjung.

Dengan kondisi wilayah tersebut potensi Kabupaten Bengkulu Tengah tersebar, mulai dari pesisir hingga ke pegunungan. Akan tetapi, sejauh ini sektor pertanian merupakan sektor yang lebih dominan berkembang. Sektor pertanian yang memberikan kontribusi yang besar dalam PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah relatif sama dengan Kabupaten Bengkulu Utara yaitu pertanian tanaman pangan dan palawija. Hal ini didukung oleh lapisan tanah, topografi, dan iklim sangat cocok untuk bercocok tanam palawija dan tanaman pangan. Sebagai bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara, dahulunya wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah juga merupakan salah satu sentra produksi padi di Provinsi Bengkulu.

Saat ini potensi pengembangan produksi padi di Kabupaten Bengkulu Tengah masih dapat ditingkatkan melalui program perluasan areal tanaman pangan dan intensifikasi pertanian. Akan tetapi belakangan ini terjadi kecenderungan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan, terutama perkebunan sawit dan karet, yang menyebabkan semakin menurunnya luas areal pertanian. Hal ini merupakan permasalahan sekaligus potensi yang harus disikapi secara bijak oleh pemerintah dan masyarakat, mengingat bahwa sektor perkebunan merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat menunjang perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah terutama dalam penunjang pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kondisi lahan di Kabupaten Bengkulu Tengah yang masih luas dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan perkebunan sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi yang akan menambah penghasilan bagi masyarakat. Dengan berkembangnya sektor perkebunan, diharapkan Kabupaten Bengkulu Tengah akan mampu menjadi sentra perkebunan seperti karet, kelapa sawit, kopi dan kakao yang kemudian akan mendorong

perkembangan sektor industri yang saat ini telah mulai berkembang di Kabupaten Bengkulu Tengah. Selain perkebunan rakyat, saat ini terdapat beberapa perkebunan besaryang dikelola oleh perusahaan seperti PT. Agri Andalas, PT. Bio Nusantara, dan PT. Bengkulu Sawit Jaya. Adapun data mengenai produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.21
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan
Jenis Tanaman di Kabupaten Bengkulu Tengah (ton), 2024 dan 2025

Kecamatan/ District	Kelapa Sawit/ Oil Palm		Kelapa/ Coconut	
	2024	2025	2024	2025
Talang Empat	56.127	57.811	53	54
Semidang Lagan	59.177	60.952	56	57
Karang Tinggi	54.863	56.509	57	58
Taba Penanjung	45.536	46.902	133	135
Merigi Kelindang	46.889	48.296	64	65
Pagar Jati	55.562	57.229	116	118
Merigi Sakti	50.221	51.728	95	96
Pondok Kelapa	91.532	94.278	189	192
Pondok Kubang	62.732	64.614	46	47
Pematang Tiga	60.932	62.760	82	83
Bang Haji	49.760	51.253	150	152
Bengkulu Tengah	633.331	652.331	1.042	1.057

Lanjutan Tabel/ Continued Tabel 2.21

Kecamatan/ District	Karet/ Rubber		Kopi/ Coffee	
	2024	2025	2024	2025
Talang Empat	969	957	91	91
Semidang Lagan	1.190	1.175	205	206
Karang Tinggi	1.438	1.420	130	131
Taba Penanjung	1.431	1.413	655	658
Merigi Kelindang	2.075	2.049	259	260
Pagar Jati	1.400	1.383	146	147
Merigi Sakti	2.404	2.374	301	303
Pondok Kelapa	1.216	1.201	150	151
Pondok Kubang	1.797	1.775	146	147
Pematang Tiga	1.305	1.289	408	410
Bang Haji	1.201	1.186	971	976
Bengkulu Tengah	16.462	16.221	3.462	3.479

Lanjutan Tabel/ Continued Tabel 2.21

Kecamatan/ District	Karet/ Rubber		Kopi/ Coffee	
	2024	2025	2024	2025
Talang Empat	1	-	-	-
Semidang Lagan	1	-	-	-
Karang Tinggi	1	-	-	-
Taba Penanjung	5	3	-	-
Merigi Kelindang	2	1	-	-
Pagar Jati	-	-	-	-
Merigi Sakti	-	-	-	-
Pondok Kelapa	2	1	-	-
Pondok Kubang	-	-	-	-
Pematang Tiga	6	5	-	-
Bang Haji	3	2	-	-
Bengkulu Tengah	21	12	-	-

Lanjutan Tabel/ Continued Tabel 2.21

Kecamatan/ District	Teh		Tembakau	
	2024	2025	2024	2025
Talang Empat	-	-	-	-
Semidang Lagan	-	-	-	-
Karang Tinggi	-	-	-	-
Taba Penanjung	-	-	-	-
Merigi Kelindang	-	-	-	-
Pagar Jati	-	-	-	-
Merigi Sakti	-	-	-	-
Pondok Kelapa	-	-	-	-
Pondok Kubang	-	-	-	-
Pematang Tiga	-	-	-	-
Bang Haji	-	-	-	-
Bengkulu Tengah	-	-	-	-

Sumber: Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026

Produksi tanaman perkebunan terbesar di Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2025 adalah kelapa sawit sebesar 652.331 ton dan diikuti karet sebesar 16.221 ton kemudian kopi robusta sebesar 3.479 ton. Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bengkulu Tengah (ha), pada tahun 2025 seperti karet, kelapa, kelapa sawit dan lain-lain adalah 64.988 hektar.

Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu sentra penghasil beras dan hortikultura khususnya durian dan rambutan. Produksi di Kabupaten Bengkulu Tengah masih dapat ditingkatkan melalui program perluasan areal tanaman pangan dan intensifikasi pertanian. Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.22 di bawah ini:

Tabel 2.22
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Bengkulu Tengah (Kwintal) Tahun 2024 dan 2025

Kecamatan/ District	Bawang Merah/ Shallot		Cabai Besar/TW/ Teropong Chili/Big Chili	
	2024	2025	2024	2025
Talang Empat	-	-	-	-
Semidang Lagan	-	-	-	-
Karang Tinggi	-	-	-	-
Taba Penanjung	-	-	2	-
Merigi Kelindang	-	-	-	-
Pagar Jati	-	-	3	-
Merigi Sakti	-	-	-	-
Pondok Kelapa	-	-	76	144,00
Pondok Kubang	-	-	-	-
Pematang Tiga	-	-	135	-
Bang Haji	-	-	3	3,75
Bengkulu Tengah	-	-	219	147,75

Lanjutan Tabel/ Continued Tabel 2.22

Kecamatan/ District	Cabai Keriting/ Curly Chili		Cabai Rawit Chili/Cayenne Pepper	
	2024	2025	2024	2025
Talang Empat	17	124,00	19,5	0,50
Semidang Lagan	11	-	-	-
Karang Tinggi	13,3	18,00	2	-
Taba Penanjung	29	116,50	24	32,50
Merigi Kelindang	53	398,00	4,8	337,00
Pagar Jati	23	32,00	4	10,00
Merigi Sakti	-	-	46	1.241,00
Pondok Kelapa	-	-	41,5	240,00
Pondok Kubang	19,8	23,20	28,8	21,00
Pematang Tiga	2	1,00	119	23,25
Bang Haji	-	-	-	2,50
Bengkulu Tengah	168,1	712,70	289,6	1.907,75

Lanjutan Tabel/ Continued Tabel 2.22

Kecamatan/ District	Kentang/ Potato		Kubis/ Cabbage		Tomat/ Tomato	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Talang Empat	-	-	-	-	6	-
Semidang Lagan	-	-	-	-	-	-
Karang Tinggi	-	-	-	-	-	-
Taba Penanjung	-	-	-	-	1	-
Merigi Kelindang	-	-	-	-	1	-
Pagar Jati	-	-	-	-	3	-
Merigi Sakti	-	-	-	-	-	-
Pondok Kelapa	-	-	-	-	-	-
Pondok Kubang	-	-	-	-	-	3,00
Pematang Tiga	-	-	-	-	-	-
Bang Haji	-	-	-	-	-	4,00
Bengkulu Tengah	-	-	-	-	11	7,00

Lanjutan Tabel/ Continued Tabel 2.22

Kecamatan/ District	Bawang Putih/ Garlic		Bawang Daun/ Scallon		Bayam/ Spinach	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Talang Empat	-	-	-	-	537	-
Semidang Lagan	-	-	-	-	-	43,50
Karang Tinggi	-	-	-	-	-	-
Taba Penanjung	-	-	-	-	-	-
Merigi Kelindang	-	-	-	-	-	-
Pagar Jati	-	-	-	-	-	-
Merigi Sakti	-	-	-	-	-	-
Pondok Kelapa	-	-	-	-	51,5	132,00
Pondok Kubang	-	-	-	-	-	-
Pematang Tiga	-	-	-	20,00	-	-
Bang Haji	-	-	-	2,25	-	-
Bengkulu Tengah	-	-	-	22,25	588,5	175,50

Lanjutan Tabel/ Continued Tabel 2.22

Kecamatan/ District	Jamur Merang Straw Mushrooms		Kacang Panjang Long Beans		Kangkung Water Spinach	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Talang Empat	-	-	17	-	199	7,00
Semidang Lagan	-	-	-	-	-	48,50
Karang Tinggi	-	-	-	-	-	-
Taba Penanjung	-	-	-	-	-	-
Merigi Kelindang	-	-	-	-	-	-
Pagar Jati	-	-	-	-	-	-
Merigi Sakti	-	-	6	352,00	-	-
Pondok Kelapa	-	-	46	259,00	22,5	-

Kecamatan/ District	Jamur Merang Straw Mushrooms		Kacang Panjang Long Beans		Kangkung Water Spinach	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Pondok Kubang	-	-	13,8	22,60	1,1	-
Pematang Tiga	-	-	1	-	-	-
Bang Haji	-	-	-	5,00	-	6,00
Bengkulu Tengah	-	-	83,8	638,60	222,6	61,50

Lanjutan Tabel/ Continued Tabel 2.22

Kecamatan/ District	Ketimun/ Cucumber		Lobak/ Radish		Melon/ Melon	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Talang Empat	3	287,00	-	-	2	-
Semidang Lagan	-	-	-	-	-	-
Karang Tinggi	-	-	-	-	-	-
Taba Penanjung	-	-	-	-	-	-
Merigi Kelindang	-	41,00	-	-	-	-
Pagar Jati	-	1,00	-	-	-	-
Merigi Sakti	-	-	-	-	-	-
Pondok Kelapa	80	-	-	-	-	-
Pondok Kubang	3	-	-	-	-	-
Pematang Tiga	2	-	-	-	-	-
Bang Haji	-	-	-	-	-	-
Bengkulu Tengah	88	329,00	-	-	2	-

Lanjutan Tabel/ Continued Tabel 2.22

Kecamatan/ District	Sawi/ Cabbage		Semangka/ Water Melon		Terung/Eggplant	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Talang Empat	-	-	125	7,00	114	1,00
Semidang Lagan	-	-	-	-	-	-
Karang Tinggi	-	-	-	-	2	-
Taba Penanjung	-	-	-	-	2	-
Merigi Kelindang	-	-	-	-	-	-
Pagar Jati	-	-	-	-	5	10,00
Merigi Sakti	-	-	-	-	6	483,00
Pondok Kelapa	0,9	-	-	-	43	248,00
Pondok Kubang	-	-	-	-	6,5	31,90
Pematang Tiga	-	-	-	-	-	77,75
Bang Haji	-	-	-	-	-	6,00
Bengkulu Tengah	0,9	-	125	7,00	178,5	857,65

Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026

Selain padi sawah, produksi padi ladang juga menambah produksi padi di Bengkulu Tengah. Kabupaten Bengkulu Tengah juga merupakan sentra penghasil buah-buahan durian dan rambutan. Sementara tanaman lain masih sangat terbuka untuk dikembangkan, seperti salak pondoh dan manggis.

Sektor pertanian yang memberikan kontribusi yang besar dalam PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah utamanya pada pertanian tanaman pangan dan palawija. Hal ini didukung oleh lapisan tanah, topografi, dan iklim sangat cocok untuk bercocok tanam palawija dan tanaman pangan. Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu sentra produksi padi di Provinsi Bengkulu. Pemasaran hasil produksi masih dilakukan secara konvensional. Petani menjual gabah kering kepada para pedagang atau tengkulak dan

selanjutnya dijual kembali kepada para pedagang-pedagang besar di Kota Bengkulu dan kota-kota lainnya.

Jagung merupakan komoditas unggulan yang dapat dikembangkan. Permintaan jagung di pasar internasional terus meningkat seiring dengan trend meningkatnya produksi bahan bakar nabati, seperti bioetanol, dan naiknya konsumsi pakan ternak berbasis jagung. Indonesia sebagai negara agraris belum dapat mencukupi permintaan jagung di pasar domestik. Tahun 2006 diperkirakan Indonesia mengimpor jagung sebesar 1,4 juta ton dari total kebutuhan nasional sebesar 12,4 juta ton. Peluang ekspor jagung Indonesia terutama ke negara tetangga seperti Malaysia sebesar 2,5 juta ton, Taiwan 4,6 juta ton, Jepang 16 juta ton, Korea 8,5 juta ton, China sebanyak satu juta ton, Mesir 5,3 juta ton, Iran 2,3 juta ton, dan Arab Saudi 1,4 juta ton per tahun. Potensi pengembangan komoditas jagung di Kabupaten Bengkulu Tengah masih terbuka sangat lebar.

Salah satu komoditas unggulan tahun lainnya adalah singkong. Harga singkong kian meninggi setelah harga minyak dunia melonjak menyentuh angka USD 100 per barel. Komoditas itu terutama diekspor ke Eropa, Korea, China dan Malaysia sebagai bahan pembuat biofuel. Budidaya singkong di Kabupaten Bengkulu Tengah masih berpotensi karena karakteristik tanah dan iklim yang mendukung.

Dalam perkembangan industri pangan nasional, cabe merupakan salah satu bahan baku yang dibutuhkan secara berkesinambungan. Karena merupakan bahan pangan yang dikonsumsi setiap saat, maka cabe akan terus dibutuhkan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Dana yang dibutuhkan untuk menanam cabe pada areal lahan satu hektar pada umumnya yaitu sebesar Rp 34.000.000 lebih. Secara teoritis keuntungan yang diharapkanpun cukup proporsional, yaitu sekitar Rp 25.000.000 dalam tempo delapan bulan. *Benefit cost ratio* sebesar 175, yang berarti Rp 100 biaya yang diinvestasikan dalam budidaya cabe akan mendatangkan penerimaan sebesar Rp 175.

Komoditas lainnya seperti jahe tak hanya sekedar dikenal sebagai bumbu masakan. Lebih dari itu, jahe bisa diolah menjadi pemberi aroma pada berbagai makanan, bahan baku dalam industri minuman, industri obat tradisional, minyak wangi, diolah menjadi asinan. Beberapa negara yang menampung hasil ekspor komoditas jahe dalam bentuk jahe segar adalah Malaysia, Hongkong, Jepang, Uni Emirat Arab, Singapura dan Saudi Arabia.

2.1.4.3 Sektor Kehutanan

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki kawasan hutan yang cukup luas, baik hutan produksi, hutan lindung, dan kawasan hutan cagar alam. Sebaran hutan di Kabupaten Bengkulu Tengah khususnya kawasan hutan lindung dan kawasan hutan cagar alam berada di kawasan bukit barisan yaitu Bukit Rindu Hati, kawasan Danau Dendam Tak Sudah yang berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu, dan Taman Hutan Raya yang terletak di Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang. Keberadaan kawasan hutan lindung dan kawasan hutan cagar alam ini dapat dimanfaatkan dan dikelola menjadi objek wisata alam dan penelitian. Akan tetapi, potensi besar ini harus mendapat dukungan oleh pemerintah dan masyarakat.

Selain hutan lindung dan hutan cagar alam, Kabupaten Bengkulu Tengah juga memiliki areal yang cukup luas untuk dimanfaatkan menjadi hutan produksi. Pengelolaan hutan produksi yang tepat dan terarah dalam jangka waktu panjang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengingat bahwa harga komoditas hutan terutama kayu akan semakin meningkat. Adapun data terakhir luas kawasan hutan di Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.23
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Kabupaten Bengkulu Tengah (ha), 2025

Fungsi	Luas Kawasan
A. Kawasan Suaka Alam/ <i>Sanctuary Reserve Area</i>	-
1. Taman Nasional/ <i>National Parks</i>	-
2. Cagar Alam/ <i>Nature Preserve</i>	-
3. Taman Wisata Alam/ <i>Nature Parks</i>	-
4. Taman Buru/ <i>Game Hunting Parks</i>	-
5. Taman Hutan Raya/ <i>Forest Parks</i>	-
B. Hutan Produksi/ <i>Production Forest</i>	-
1. Hutan Produksi Terbatas (HPT) <i>Limited Production Forest</i>	-
2. Hutan Produksi Tetap (HP) <i>Permanent Production Forest</i>	-
C. Hutan Lindung/ <i>Protection Forest</i>	-
D. Konservasi/ <i>Conservation</i>	-
Jumlah/ <i>Total</i>	-

Sumber: Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026

Pada tahun 2022 total luas kawasan hutan di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 27.330,83 hektar, yang terdiri atas: kawasan suaka alam 4.957,87 hektar, hutan lindung 18.428,00 hektar, hutan produksi terbatas 2.927,23 hektar, dan hutan produksi tetap 1.017,73 hektar (*Sumber: Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026*).

2.1.4.4 Sektor Peternakan

Hewan ternak dibagi dalam dua kelompok yaitu ternak besar dan ternak kecil serta unggas. Hewan yang masuk kategori ternak besar adalah sapi potong dan kerbau. Sedangkan hewan yang masuk kategori ternak kecil dan unggas adalah kambing, domba, babi, kelinci, ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, itik, entok, angsa, dan puyuh. Secara umum, populasi ternak besar mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2025 populasi sapi potong sebanyak 11.254 ekor dan kerbau sebanyak 4.847. Sedangkan populasi ternak kecil dan unggas masing-masing adalah 9.076 ekor dan 345.522 ekor (*Sumber: Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026*).

Sektor perternakan berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Bengkulu tengah terutama ternak sapi dan kambing. Selain sumber pakan yang banyak, ternak ini sangat cocok ditumpang sarikan dengan kebun sawit dan karet. Saat ini pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui dinas terkait tengah berupaya memberi pengarahan pada masyarakat untuk mengintegrasikan perkebunan dan peternakan, terutama sawit dan sapi. Selain itu, peternakan unggas khususnya ternak ayam ras beberapa tahun terakhir ini berkembang pesat. Usaha peternakan ayam ini banyak didapat di Kecamatan Pondok Kelapa dan Karang Tinggi. Berikut data populasi ternak per kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah :

Tabel 2.24
Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah (ekor), 2025

Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
Talang Empat	881	751	636	211	-
Semidang Lagan	940	400	1.200	360	-
Karang Tinggi	450	600	525	-	-
Taba Penanjung	44	343	443	-	-
Merigi Kelindang	650	411	890	-	-
Pagar Jati	476	142	372	-	-
Merigi Sakti	3.540	170	811	113	85
Pondok Kelapa	2.200	985	1.483	-	-
Pondok Kubang	765	521	497	-	-
Pematang Tiga	597	102	532	-	-
Bang Haji	711	422	889	-	-
Bengkulu Tengah	11.254	4.847	8.278	684	85

Sumber: Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026

Lanjutan Tabel/ Continued Tabel 2.24

Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik	Entok
Talang Empat	2.121	44.700	15.000	239	127
Semidang Lagan	8.055	31.214	5.000	546	295
Karang Tinggi	7.429	-	10.000	336	323
Taba Penanjung	3.912	-	-	465	278
Merigi Kelindang	2.109	-	-	361	352
Pagar Jati	1.129	5.000	-	584	131
Merigi Sakti	9.100	-	10.000	766	136

Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik	Entok
Pondok Kelapa	2.009	20.200	69.000	932	215
Pondok Kubang	2.698	-	-	477	50
Pematang Tiga	2.821	-	-	-	169
Bang Haji	17.212	66.500	-	277	200
Bengkulu Tengah	59.595	167.614	109.000	4.983	2.276

Sumber: Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026

2.1.4.5 Sektor Perikanan

Sektor perikanan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri-dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap selama ini dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan potensi laut yang terdapat di Kecamatan Pondok Kelapa dengan garis pantai sepanjang 28,5 km. Hasil penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini masih kurang optimal karena keterbatasan alat penangkapan dengan teknologi yang memadai. Oleh sebab itu, kedepannya pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah akan memberikan dukungan pada masyarakat untuk dpat meningkatkan hasil tangkapan ikan.

Selain perikanan tangkap, perikanan budidaya memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan. Mengingat karekteristik wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah yang beragam dan memiliki banyak aliran sungai, budidaya perikanan dapat dilakukan dengan membuat kolam, tebat teknis, perikanan sawah, dan tambak. Pada tahun 2025, produksi perikanan budidaya sebesar 665,54 ton dengan nilai 36.407,19 juta rupiah. Luas area produksi perikanan budidaya sebesar 808,6 hektar.

Selain itu, pembibitan ikan juga mutlak dilakukan agar pasokan bibit ikan terus terjaga dan Kabupaten Bengkulu Tengah tidak harus bergantung dengan kabupaten lain. Pada tahun 2010 telah dibangun balai benih untuk mengembangkan potensi perikanan budidaya di Kecamatan Pagar Jati dan pada tahun 2013 telah terbangun TPI di kecamatan pondok kelapa. Berikut di bawah ini menjelaskan luas areal produksi perikanan tangkap :

Tabel 2.25
Luas Area Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Bengkulu Tengah (ha), 2025

Kecamatan	Kolam	Tebat Teknis	Perikanan Sawah	Tambak	Jumlah
Talang Empat	60	8	5	-	73
Semidang Lagan	30,5	8	5	-	30,5
Karang Tinggi	69,15	7	6	-	83,15
Taba Penanjung	105,5	15	10	-	130,5
Merigi Kelindang	47,1	6	7	-	60,1
Pagar Jati	50,8	5	8	-	63,8
Merigi Sakti	60,75	7	9	-	76,75
Pondok Kelapa	101,5	15	13	-	150,5
Pondok Kubang	40,8	8	8	-	56,8

Kecamatan	Kolam	Tebat Teknis	Perikanan Sawah	Tambak	Jumlah
Pematang Tiga	40,5	6	4	-	50,5
Bang Haji	25	5	4	-	34
Bengkulu Tengah	631,6	82	74	21	808,6

Sumber: Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki posisi yang sangat strategis, karena selain berada pada jalur perlintasan antara Kota Bengkulu dengan Kota Lubuk Linggau, juga merupakan Kabupaten terdekat dan berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu.

Secara geografis Kabupaten Bengkulu Tengah terletak diantara koordinat 102° 11'24"-102°37'12" Bujur Timur dan 3°28'48"-3°51'36" Lintang Selatan, sedangkan secara Administratif, Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan bagian dari Wilayah Provinsi Bengkulu.

Kabupaten Bengkulu Tengah adalah wilayah agraris dengan Luas wilayah 1.223,94 Ha.

Saat ini Bengkulu Tengah memiliki luas potensi area Budidaya 808,6Ha dan potensi ini terus mengalami peningkatan karena wilayah kabupaten Bengkulu tengah hampir setiap kecamatan memiliki sumber air, baik itu sungai, bendungan atau rawa. Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Bengkulu Tengah belum termanfaatkan secara optimal karena terbatasnya sarana prasarana budidaya yang ada, SDM, dan kemampuan modal usaha.

Pemanfaatan sumberdaya perikanan secara optimal di Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan bagian dari pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah dan penanggulangan kemiskinan (*pro poor*), memperluas kesempatan kerja (*pro job*) serta pertumbuhan dan distribusi kesejahteraan (*pro growth*) maka perlu dikelola dan dikembangkan sebagai sumberdaya pertumbuhan daerah. Pemanfaatan potensi pengembangan budidaya perikanan dapat dilakukan melalui kegiatan pembenihan dan pembesaran, penyediaan sarana prasarana serta pengelolaan lingkungan dengan konsekuensi penggunaan sistem teknologi tertentu untuk dapat memproduksi secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah, maka perlu dukungan fasilitas Sarana dan Prasarana yang memadai. Mengingat Kabupaten Bengkulu Tengah baru terbentuk, sehingga dana belum tersedia. Oleh karena itu bantuan pendanaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sangat diperlukan.

Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu faktor yang strategis dalam peningkatan perekonomian di Kabupaten

Bengkulu Tengah. Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah 1.223,94 km² dengan 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pondok Kelapa, Kecamatan Talang Empat, Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Taba Penanjung, Kecamatan Karang Tinggi, Kecamatan Bang Haji, Kecamatan Pondok Kubang, Kecamatan Merigi Kelindang, Kecamatan Merigi Sakti, Kecamatan Pematang Tiga dan Kecamatan Semidang Lagan.

Dengan Jumlah 11 Kecamatan dan luas area wilayah seperti di atas sampai dengan Tahun 2026 Bengkulu Tengah memiliki 85 POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan) yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan walau dalam jumlah yang tidak signifikan. Dari 85 POKDAKAN yang tercatat telah memiliki badan hukum adalah 30 POKDAKAN, pengembangan atau peningkatan jumlah POKDAKAN tidak menjadi fokus utama lagi saat ini POKDAKAN berbadan hukum menjadi fokus utama, karena hanya pokdakan berbadan hukum yang bisa mendapat bantuan/program Kementerian kelautan dan perikanan (*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2026*).

2.1.4.6 Sektor Pertambangan

Sementara itu subsektor pertambangan dan penggalan juga merupakan subsektor yang cukup besar peranannya dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah seperti terlihat dari cukup tingginya peranan subsektor pertambangan dan penggalan dalam PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah. Selama waktu 2010-2017 peranan subsektor pertambangan dan penggalan dalam PDRB rata-rata berkisar antara 16 sampai 19 persen per tahun. Cukup besarnya peranan subsektor pertambangan dan penggalan dalam perekonomian disebabkan cukup optimalnya eksploitasi bahan-bahan tambang yang terkandung di bumi Kabupaten Bengkulu Tengah. Sektor lain dengan sumbangan besar adalah pertambangan dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 sebesar 1.156,09 miliar rupiah (*Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026*).

2.1.4.7 Industri Pengolahan

Klasifikasi industri pengolahan dibagi kedalam 4 (empat) kategori berdasarkan jumlah tenaga kerja, yaitu industri besar, jika jumlah pekerjanya lebih dari 100 orang, industri sedang jika jumlah pekerjanya antara 20 hingga 99 orang. Sementara jika suatu industri mempekerjakan antara 5-19 orang maka diklasifikasikan sebagai industri kecil. Sedangkan jika jumlah pekerjanya 1 hingga 4 orang, diklasifikasikan sebagai industri kerajinan rumah tangga. Pada tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat 325

industri besar/sedang/kecil/kerajinan rumah tangga (*Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026*).

Pengembangan sektor industri pengolahan di Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki potensi yang besar di bidang agribisnis dan perikanan. Beberapa jenis industri yang dapat dikembangkan yaitu:

1. Industri Pengolahan Kelapa Sawit

Pengolahan kelapa sawit menjadi Crude Palm Oil (CPO) memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini didasari pada kapasitas produksi pabrik CPO tidak mampu menampung pasokan Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan oleh perkebunan rakyat. Dalam dua tahun ke depan, pasokan TBS dari perkebunan rakyat akan meningkat. Saat ini terdapat perkebunan sawit rakyat merupakan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM). Potensi yang baru dikembangkan saat ini merupakan industri hulu, yakni pengolahan TBS menjadi CPO. Potensi lain yang dapat dikembangkan adalah industri hilir, yakni pengolahan CPO menjadi produk turunannya seperti minyak goreng, margarin, sabun, minyak salad, minyak padat, dan sterin yang dapat diolah menjadi biodiesel sebagai pengganti BBM.

2. Industri Pengolahan Karet

Satu-satunya pabrik pengolahan karet yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah PT. Bukit Angkasa Makmur sedangkan PT. Batang Hari sudah tidak beroperasi lagi. Investasi di dalam pengolahan karet di Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki prospek yang baik karena luasnya perkebunan karet rakyat. Pasokan bahan baku karet mentah juga dapat dipasok dari Kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu.

3. Industri Hasil Perikanan

Kelompok kegiatan industri, yaitu :

- a. Industri penangkapan ikan (*fishing industry*) yakni seluruh mata rantai kegiatan dalam usaha penangkapan ikan di laut. Jenis industri ini disebut juga sebagai industri primer.
- b. Industri hasil perikanan (*fish processing industry*), yakni seluruh mata rantai kegiatan dalam usaha pengolahan hasil laut, seperti pengalengan, pengeringan, pembekuan dan sebagainya. Jenis industri ini disebut sebagai industri sekunder.
- c. Industri pemasaran produk laut, yakni seluruh mata rantai kegiatan dalam usaha pemasaran hasil laut. Jenis industri ini disebut sebagai industri tersier dalam perikanan.

d. Industri budidaya perairan, yakni seluruh mata rantai kegiatan dalam usaha budidaya perairan, termasuk industri primer dalam perikanan.

Dengan garis pantai yang cukup panjang, Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki prospek yang sangat baik dalam *fishing industry* (industri penangkapan ikan) yang merupakan industri primer. Dari industri primer dapat dikembangkan dalam fish processing industry, seperti (1) industri penanganan ikan hidup; (2) industri penanganan ikan segar, (3) industri pembekuan ikan; (4) industri pengalengan ikan; dan (5) industri tepung ikan dan pakan ternak. Dalam pengembangan *fish processing industry*, pengendalian kualitas produk merupakan hal yang penting untuk dilakukan dengan peningkatan pelaksanaan pengendalian proses, sanitasi dan tahap operasionalisasi yang lain seperti pemilihan bahan baku ikan dan bahan pembantu, metode processing yang dipilih, dan tingkat teknologi yang digunakan.

Peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah juga cukup tinggi. Hal itu terungkap dari cukup besarnya peranan sektor industri pengol dalam PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah. Selama kurun waktu 2020-2024 peranan sektor industri pengolahan dalam PDRB lebih dari 14 persen per tahun (*Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026*).

2.1.4.8 Sektor Pariwisata

Kabupaten Bengkulu tengah memiliki beberapa obyek wisata yang potensial untuk dikembangkan dalam mendukung perkembangan kabupaten secara keseluruhan. Selain itu, berbagai atraksi wisata juga dapat diciptakan dengan memanfaatkan karakteristik Kabupaten Bengkulu Tengah yang potensial untuk dikembangkan wisata alam. Kondisi alam Kabupaten Bengkulu Tengah yang berbukit dan memiliki banyak aliran sungai serta didukung oleh kondisi alam yang masih asri sangat mendukung untuk dikembangkan beberapa sektor wisata alam, religi, seperti arung jeram, jelajah alam bebas, berkemah, dan olahraga lintas alam lainnya. Berikut merupakan data lengkap mengenai potensi objek wisata di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Tabel 2.26
Potensi Cagar Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Tengah

Kecamatan	Cagar Budaya dan Pariwisata	Desa
Pondok Kelapa	Cagar Budaya	
	Makam Putri Gading Cempaka	Pondok Kelapa
	Wisata Religi Bali/Pure Bali	Sunda Kelapa
	Pariwisata	
	Pantai Sungai Suci	Pasar Pedati
	Wahana Surya	Pasar Pedati
	Buana Alif Waterpark	Abu Sakim

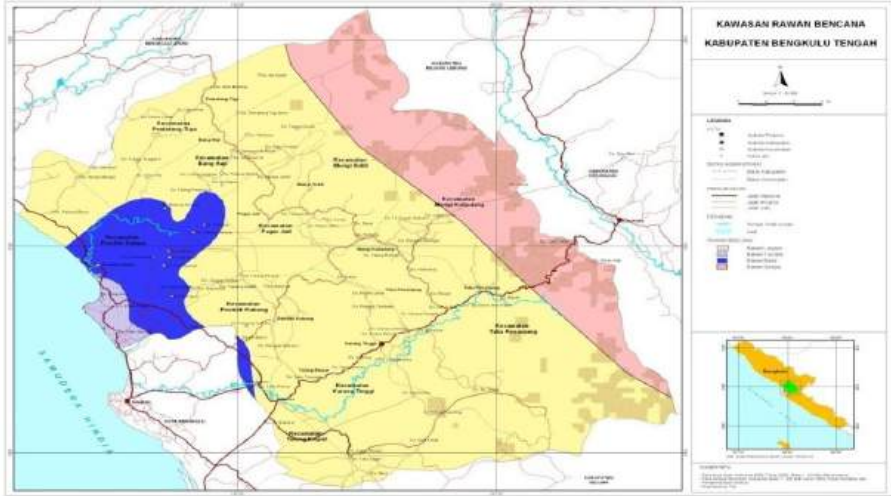
Kecamatan	Cagar Budaya dan Pariwisata	Desa
	Pantai Danau Gedang	Padang Betuah
	Kampung Batik	Panca Mukti
	Cugug Buluah Agrowisata	Srikuncoro
	Pelestarian Penyu Alun Utara	Pekik Nyaring
	Pantai Desa Harapan	Harapan
	Pariwisata	
Pagar Jati	Gunung Bungkuk, Air Terjun Ngik	Karang Are
	Air Terjun Tik Telutung	Renah Kandis
	Lubuk Butar, Curug Mutung	Pagar Jati
Pondok Kubang	Cagar Budaya	
	Wisata Religi Makam keramat	Paku Haji
Merigi Sakti	Pariwisata	
	Gunung Bungkuk	Rajak Besi
Karang Tinggi	Pariwisata	
	Bukit Kandis	Durian Demang
	Curug Tinggi	Renah Lebar
Taba Penanjung	Pariwisata	
	Air Terjun Sengak	Tanjung Heran
	Kampung Durian	Datar Lebar
	Glamping Rindu Hati	Rindu Hati
Merigi Kelindang	Pariwisata	
	Lubuk Batu Kambing	Padang Kedeper
	Air Terjun Cuup Pesuk	Penembang
Talang Empat	Pariwisata	
	Cekdam	Jaya Karta
	Cekdam	Air Sebakul
Semidang Lagan	Pariwisata	
	Curug Cay,Air Terjun Pengantin	Desa Bukit
	Curug Embun	Lagan Bungin

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Tengah, 2026

2.1.5 Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Bengkulu Tengah termasuk dalam wilayah Provinsi Bengkulu yang memiliki pontensi dilanda gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi memiliki jangkauan dampak yang luas, oleh sebab itu secara keseluruhan wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dikategorikan termasuk daerah rawan gempa. Sedangkan daerah rawan tsunami terdapat disekitar pesisir pantai, terutama wilayah Kecamatan Pondok Kelapa. Selain gempa bumi dan tsunami, Kabupaten Bengkulu Tengah yang memiliki karakteristik topografi beragam juga memungkinkan terjadinya longsor dan banjir. Daerah rawan longsor terdapat pada titik – titik tertentu, terutama di daerah dengan kelerengan >8%. Sedangkan daerah berpotensi banjir terdapat di daerah yang landai. Adapun gambaran mengenai lokasi – lokasi rawan bencana terdapat pada gambar 2.8 (peta rawan bencana).

Gambar 2.2
Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bengkulu Tengah



Sumber : Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, 2011

2.1.6 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Kondisi Jalan

Pada tahun 2025, panjang jalan dengan tingkat kewenangan kabupaten di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah 420,91 km. Sekitar 48,36 persen dari panjang tersebut dalam kondisi baik, 6,06 persennya dalam kondisi sedang dan kondisi rusak sebanyak 8,54 persen. Sementara itu, jalan dalam kondisi rusak berat sebanyak 37,02 persen.

Tabel 2.27
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Bengkulu Tengah (km), 2023–2025

Jenis Permukaan Jalan	2023	2024	2025
Aspal	179,10	287,35	298,11
Kerikil	71,80	62,09	59,37
Tanah	40,55	67,57	59,33
Lainnya	122,20	3,90	4,10
Jumlah	413,65	420,91	420,91

Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026

Tabel 2.28
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkulu Tengah (km), 2023–2025

Kondisi Jalan	2023	2024	2025
Baik	169,65	185,82	203,59
Sedang	123,28	31,14	25,52
Rusak	33,35	17,10	35,96
Rusak Berat	87,37	186,86	155,85
Jumlah	413,65	420,91	420,91

Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026

Tabel 2.29
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah, 2025

Kecamatan	Jalan Kabupaten (km)
Talang Empat	19,00
Semidang Lagan	33,96
Karang Tinggi	59,70
Taba Penanjung	18,51

Kecamatan	Jalan Kabupaten (km)
Merigi Kelindang	24,88
Pagar Jati	41,49
Merigi Sakti	35,52
Pondok Kelapa	72,11
Pondok Kubang	57,18
Pematang Tiga	30,84
Bang Haji	27,72
Bengkulu Tengah	420,91

Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026

Tabel 2.30
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Bengkulu Tengah, 2025

Kecamatan	Aspal	Lapisan Penetrasi	Perkerasan	Koral	Tanah	Jumlah
Talang Empat	10,68	4,70	0,00	2,73	0,89	19,00
Semidang Lagan	19,25	0,00	0,00	9,33	5,38	33,96
Karang Tinggi	33,47	2,60	0,47	11,92	11,24	59,70
Taba Penanjung	7,78	4,00	0,00	0,00	6,73	18,51
Merigi Kelindang	8,15	11,40	1,12	2,75	1,46	24,88
Pagar Jati	11,83	21,00	0,00	5,20	3,45	41,49
Merigi Sakti	3,79	19,20	2,51	1,37	8,65	35,52
Pondok Kelapa	39,91	24,70	0,00	4,78	2,72	72,11
Pondok Kubang	22,28	10,30	0,00	12,50	12,10	57,19
Pematang Tiga	12,65	9,50	0,00	2,49	2,49	30,84
Bang Haji	13,92	7,00	0,00	6,30	6,30	27,72
Bengkulu Tengah	183,71	114,4	4,1	59,37	59,32	420,92

Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026

Tabel 2.31
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkulu Tengah, 2025

Kecamatan	Kondisi Jalan (km)				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
Talang Empat	13,01	0,10	1,60	4,29	19,00
Semidang Lagan	13,58	1,28	1,78	17,32	33,96
Karang Tinggi	27,74	2,24	2,43	27,30	59,70
Taba Penanjung	8,61	0,30	0,54	9,06	18,51
Merigi Kelindang	10,48	0,92	6,00	7,47	24,88
Pagar Jati	21,69	7,08	0,80	11,91	41,49
Merigi Sakti	6,92	4,60	7,98	16,02	35,52
Pondok Kelapa	50,27	4,06	1,90	15,88	72,11
Pondok Kubang	24,79	0,89	6,08	25,42	57,18
Pematang Tiga	14,15	1,65	3,30	11,74	30,84
Bang Haji	12,34	2,40	3,55	9,43	27,72
Bengkulu Tengah	203,58	25,52	35,96	155,84	420,91

Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026

2.1.7 Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak pidana menggambarkan jumlah kasus tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Di

bidang keamanan, jumlah tindak pidana disajikan menurut bulan. Secara umum jumlah tindak kejahatan pada tahun 2025 sebanyak 119 kasus.

Tabel 2.32
Jumlah Tindak Pidana Menurut Bulan Di Kabupaten Bengkulu Tengah 2025

Bulan	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Laka Lantas	Jumlah Kasus Narkotika
Januari	8	7	1
Februari	6	10	1
Maret	8	5	2
April	8	7	-
Mei	8	3	-
Juni	12	5	4
Juli	14	4	-
Agustus	13	5	3
September	7	6	-
Oktober	9	8	-
Nopember	9	4	-
Desember	6	8	-
Bengkulu Tengah	100	91	11

Sumber: Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2026

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/urusan pilihan pemerintahan daerah. Ini menyangkut realisasi capaian target kinerja tahun lalu terhadap RPJMD. Hasil evaluasi, dalam perumusannya masih mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029. Hasil evaluasi mengarah pada upaya pemecahan masalah-masalah yang komprehensif, dalam menjawab persoalan isu-isu strategis yang dirumuskan dan dikembangkan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD merupakan bagian penting dari siklus perencanaan yang berfungsi untuk memberikan masukan balik (feedback) terhadap perencanaan program dan kegiatan pada tahun rencana dan sebagai kontrol terhadap pencapaian target RPJMD. Secara detil dapat dilihat pada tabel berikut :

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1.	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			201.145.094.644		200.040.394.644	83,77	99,45		
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			152.451.848.343		151.976.498.343	63,56	99,69	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	Persentase terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (Dikbud) (persen)	100			0	0			
			Persentase Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (Persen)	100		100	0				
	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			0		0					
2.	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			52.409.800		52.409.800	66,67	100		
		Terciptanya Tata kelola pemerintahan yang baik dengan ASN profesional	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		4		0	0		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1	1		0		0			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		1	1		0		0			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		2	2		0		0			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		2	2		0		0			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		1	0		0		0			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		1	0		0		0			
3.	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			14.829.800		14.829.800	66,67	100		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		4		66,67	0		

4.	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			25.580.000		25.580.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
5.	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.000.000		1.000.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
6.	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			10.000.000		10.000.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		2		100	0		
7.	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			1.000.000		1.000.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2		2		100	0		
8.	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
9.	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0	0		
10.	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			151.225.855.393		151.225.855.393	57,14	100		
		Terciptanya Tata kelola pemerintahan yang baik dengan ASN profesional	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1257		1.257		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		4		0	0		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2		0		0	0		
11.	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			151.205.255.393		151.205.255.393	100	100		

		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1257		1.257		100	0		
12.	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-		-	0	0		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		0		0	0		
13.	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			10.200.000		10.200.000	100	100		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2		2		100	0		
14.	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			4.200.000		4.200.000	100	100		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2		2		100	0		
15.	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
16.	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			6.200.000		6.200.000	100	100		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		4		100	0		
17.	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			-		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2		0		0	0		
18.	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Terciptanya Tata kelola pemerintahan yang baik dengan ASN profesional	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
19.	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			-		-	0	0		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
20.	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			475.350.000			0	0		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0	0		
21.	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			472.350.000		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100		0		0	0		
22.	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			3.000.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0	0		

23.	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			302.943.150		302.943.150	82,5	100		
		Jumlah Paket Pelayanan administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		3		0	0		
24.	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			70.481.500		70.481.500	100	100		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
25.	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.000.000		35.000.000	100	100		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		100	0		
26.	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			27.115.000		27.115.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
27.	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			10.961.250		10.961.250	100	100		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
28.	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			63.600.000		63.600.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100	0		
29.	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			-		-	0	0		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
30.	1.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu			4.000.000		4.000.000	100	100		
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100	0		
31.	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			91.785.400		91.785.400	60	100		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		3		60	0		
32.	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	0	0		

		Jumla Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
33.	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
34.	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			313.790.000		313.790.000	93,33	100		
		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaporkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		4		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
35.	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000		1.000.000	80	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		4		80	0		
36.	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			51.600.000		51.600.000	100	100		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
37.	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			261.190.000		261.190.000	100	100		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
38.	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			81.500.000		81.500.000	100	100		
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11		11		0	0		
39.	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			81.500.000		81.500.000	100	100		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11		11		100	0		
40.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			32.909.846.301		32.909.846.301	72,62	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)			20		0	0		
41.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			16.400.493.801		16.400.493.801	80	100		
		Rasio Ketersediaan Ruangan terhadap Siswa Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		0	0		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2		2		0	0		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		0	0		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		0	0		

		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1		1		0	0		
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		2		0	0		
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0	0		
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		2		0	0		
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2		2		0	0		
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	1		1		0	0		
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1		0		0	0		
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100		100		0	0		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	123		123		0	0		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	100		100		0	0		
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	94		94		0	0		
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	2		2		0	0		
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	94		94		0	0		
		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	2		2		0	0		
		Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0	0		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	100		100		0	0		
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	20		20		0	0		
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	20		20		0	0		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	2		2		0	0		
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		1		0	0		
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	5		5		0	0		

		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		1		0	0		
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	100		100		0	0		
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1		1		0	0		
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	3		3		0	0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1		0		0	0		
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	90		90		0	0		
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	94		94		0	0		
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		1		0	0		
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	123		123		0	0		
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1		1		0	0		
42.	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		-		-	0	0		
43.		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	2		0	0	0		
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		511.850.000		511.850.000	100	100		
44.		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2		2	100	0		
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		-		-	0	0		
45.		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0	0	0		
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		-		-	0	0		
46.		Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0	0	0		
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		2.694.113.062		2.694.113.062	100	100		
47.		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1		1	100	0		
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		275.647.613		275.647.613	100	100		
48.		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		2	100	0		
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		-		-	0	0		
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0	0	0		

49.	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			482.300.000		482.300.000	100	100		
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		2		100	0		
50.	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			53.802.118		53.802.118	100	100		
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2		2		100	0		
51.	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah			1.190.000.000		1.190.000.000	100	100		
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	1		1		100	0		
52.	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			-		-	0	0		
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1		0		0	0		
53.	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			224.359.500		224.359.500	100	100		
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100		100		100	0		
54.	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			1.617.200.000		1.617.200.000	100	100		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	123		123		100	0		
55.	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			108.626.660		108.626.660	100	100		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	100		100		100	0		
56.	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			16.130.000		16.130.000	100	100		
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	94		94		100	0		
57.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			247.220.000		247.220.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	2		2		100	0		
58.	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			94.067.000		94.067.000	100	100		
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	94		94		100	0		
59.	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			987.968.970		987.968.970	100	100		
		Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	2		2		100	0		
60.	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar			-		-	0	0		
		Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0	0		
61.	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			145.330.000		145.330.000	100	100		

		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	100		100		100	0		
62.	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			16.380.000		16.380.000	100	100		
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	20		20		100	0		
63.	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			52.754.000		52.754.000	100	100		
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	20		20		100	0		
64.	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			482.120.000		482.120.000	100	100		
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	2		2		100	0		
65.	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			34.200.000		34.200.000	100	100		
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		1		100	0		
66.	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			9.980.000		9.980.000	100	100		
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	5		5		100	0		
67.	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			10.330.000		10.330.000	100	100		
		Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		1		100	0		
68.	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			1.237.800.000		1.237.800.000	100	100		
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	100		100		100	0		
69.	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			1.992.100.000		1.992.100.000	100	100		
		Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1		1		100	0		
70.	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru			892.400.000		892.400.000	100	100		
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	3		3		100	0		
71.	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			-		-	0	0		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1		0		0	0		
72.	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			97.056.820		97.056.820	100	100		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	90		90		100	0		
73.	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			40.572.000		40.572.000	100	100		

		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	94		94		100	0		
74.	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			2.293.991.058		2.293.991.058	100	100		
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		1		100	0		
75.	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			88.195.000		88.195.000	100	100		
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	123		123		100	0		
76.	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			504.000.000		504.000.000	100	100		
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1		1		100	0		
77.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			10.580.192.888		10.580.192.888	78,18	100		
		Rasio Kesediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2		2		0	0		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1		1		0	0		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0	0		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0	0		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	3		3		0	0		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		3		0	0		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0	0		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		2		0	0		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0	0		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2		2		0	0		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	2		0		0	0		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100		100		0	0		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100		100		0	0		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	80		80		0	0		

		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	10		10		0	0		
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	5		5		0	0		
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	2		2		0	0		
		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	34		34		0	0		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	10		10		0	0		
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	3		3		0	0		
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	5		4		0	0		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	2		2		0	0		
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		1		0	0		
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	3		3		0	0		
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	2		2		0	0		
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	34		34		0	0		
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	3		0		0	0		
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	50		0		0	0		
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	100		100		0	0		
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	2		2		0	0		
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		1		0	0		
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	2		2		0	0		
78.	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		443.650.296		443.650.296	100	100		
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2	2		100	0		
79.	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		275.850.000		275.850.000	100	100		

		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1		1		100	0		
80.	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			-		-	0	0		
		Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0	0		
81.	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium			-		-	0	0		
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0	0		
82.	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			2.965.758.414		2.965.758.414	100	100		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	3		3		100	0		
83.	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			1.498.860.353		1.498.860.353	100	100		
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		3		100	0		
84.	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			-		-	0	0		
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0	0		
85.	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			193.165.013		193.165.013	100	100		
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		2		100	0		
86.	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			-		-	0	0		
		Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0	0		
87.	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			343.300.000		343.300.000	100	100		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2		2		100	0		
88.	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah			149.800.000		149.800.000	100	100		
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	2		2		100	0		
89.	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			-		-	0	0		
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	2		0		0	0		
90.	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			2.000.000		2.000.000	100	100		
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100		100		100	0		
91.	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			58.070.000		58.070.000	100	100		
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100		100		100	0		
92.	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.033.850.000		1.033.850.000	100	100		

		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	80		80		100	0		
93.	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			136.400.000		136.400.000	100	100		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	10		10		100	0		
94.	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			9.695.000		9.695.000	100	100		
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	5		5		100	0		
95.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			513.010.000		513.010.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	2		2		100	0		
96.	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			24.500.000		24.500.000	100	100		
		Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	34		34		100	0		
97.	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			243.368.000		243.368.000	100	100		
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	10		10		100	0		
98.	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			52.128.000		52.128.000	100	100		
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	3		3		100	0		
99.	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			20.128.000		20.128.000	80	100		
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	5		4		80	0		
100.	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			31.958.000		31.958.000	100	100		
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	2		2		100	0		
101.	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			4.000.000		4.000.000	100	100		
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		1		100	0		
102.	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			1.500.000		1.500.000	100	100		
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	3		3		100	0		
103.	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			29.456.000		29.456.000	100	100		
		Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2		2		100	0		

		(Kegiatan)								
104.	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		51.936.000		51.936.000	100	100		
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	34		34	100	0		
105.	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru		-		-	0	0		
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	3		0	0	0		
106.	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	50		0	0	0		
107.	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		662.930.000		662.930.000	100	100		
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	100		100	100	0		
108.	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		1.198.731.350		1.198.731.350	100	100		
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	2		2	100	0		
109.	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		479.148.462		479.148.462	100	100		
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		1	100	0		
110.	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		157.000.000		157.000.000	100	100		
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	2		2	100	0		
111.	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		5.083.626.612		5.083.626.612	68,18	100		
		Jumlah Siswa Usia Dini yang mengikuti Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	1		1	0	0		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1		0	0	0		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	1		0	0	0		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1		1	0	0		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1		1	0	0		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1		1	0	0		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1		0	0	0		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0		

			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	1		1		0	0		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara (Unit)	1		0		0	0		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		1		0	0		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1		1		0	0		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0	0		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		1		0	0		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1		1		0	0		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1		1		0	0		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1		0		0	0		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0		0	0		
112.	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			335.936.612		335.936.612	100	100		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	1		1		100	0		
113.	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD			-		-	0	0		
		Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1		0		0	0		
114.	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD			-		-	0	0		
		Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	1		0		0	0		
115.	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			94.000.000		94.000.000	100	100		
		Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1		1		100	0		
116.	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			1.440.000.000		1.440.000.000	100	100		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1		1		100	0		
117.	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			17.150.000		17.150.000	100	100		

		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1		1		100	0		
118.	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1		0		0	0		
119.	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			1.771.234.000		1.771.234.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
120.	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			36.994.000		36.994.000	100	100		
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	1		1		100	0		
121.	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah			-		-	0	0		
		Terpeliharanya Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara (Unit)	1		0		0	0		
122.	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			30.198.000		30.198.000	100	100		
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		1		100	0		
123.	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			69.646.000		69.646.000	100	100		
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1		1		100	0		
124.	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			15.850.000		15.850.000	100	100		
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		1		100	0		
125.	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			-		-	0	0		
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0	0		
126.	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			26.650.000		26.650.000	100	100		
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		1		100	0		
127.	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru			606.000.000		606.000.000	100	100		
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1		1		100	0		
128.	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			20.250.000		20.250.000	100	100		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1		1		100	0		
129.	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			328.700.000		328.700.000	100	100		
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1		1		100	0		

130.	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			-	-	0	0		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1		0	0	0		
131.	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			279.018.000	279.018.000	100	100		
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1		1	100	0		
132.	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			12.000.000	12.000.000	100	100		
		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0		
133.	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			-	-	0	0		
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0	0	0		
134.	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan			845.533.000	845.533.000	46,15	100		
		Jumlah Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1		0	0	0		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (Orang)	1		0	0	0		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1		1	0	0		
			Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0		
			Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan (Orang)	1		1	0	0		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat (Unit)	1		0	0	0		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1		1	0	0		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1		1	0	0		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1		0	0	0		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	1		0	0	0		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1		0	0	0		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat (Ruang)	1		0	0	0		

135.	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			-	-	0	0		
		Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1	0	0	0	0		
136.	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			-	-	0	0		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	1	0	0	0	0		
137.	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			8.750.000	8.750.000	100	100		
		Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1	1	100	0			
138.	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			11.650.000	11.650.000	100	100		
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1	1	100	0			
139.	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			744.400.000	744.400.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1	1	100	0			
140.	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			18.083.000	18.083.000	100	100		
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	1	1	100	0			
141.	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			-	-	0	0		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1	0	0	0	0		
142.	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			12.650.000	12.650.000	100	100		
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1	1	100	0			
143.	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah			50.000.000	50.000.000	100	100		
		Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	1	100	0			
144.	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			-	-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1	0	0	0	0		
145.	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal			-	-	0	0		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	1	0	0	0	0		
146.	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan			-	-	0	0		

		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1		0		0	0		
147.	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			-		-	0	0		
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0		0	0		
148.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			7.500.000		7.500.000	85,71	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)		0		0	0			
			Persentase Sekolah Yang Melaksanakan Kurikulum sesuai ketentuan (persen)	100	100		100	0			
149.	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			4.500.000		4.500.000	75	100		
		Pessentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1	0		0	0			
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	1	1		0	0			
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	1	1		0	0			
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1	1		0	0			
150.	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar			-		-	0	0		
		Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1	0		0	0			
151.	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			2.500.000		2.500.000	100	100		
		Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	1	1		100	0			
152.	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			1.000.000		1.000.000	100	100		
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkatkan Kompetensi	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	1	1		100	0			
153.	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			1.000.000		1.000.000	100	100		
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1	1		100	0			
154.	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			3.000.000		3.000.000	100	100		
		Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	1		0	0			
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	1	1		0	0			
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	1		0	0			
155.	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			1.000.000		1.000.000	100	100		

		Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1		1		100	0		
156.	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	1	1.000.000		1.000.000	100	100		
157.	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	1.000.000		1.000.000	100	100		
158.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			2.000.000		2.000.000	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)			0		0	0		
			Persentase Guru yang ditingkatkan kompetensinya (persen)	28		20		71,43	0		
			Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)			20		0	0		
159.	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			2.000.000		2.000.000	100	100		
		Persentase Sekolah Yang Melaksanakan Kurikulum	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1		1		0	0		
160.	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.000.000		1.000.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1		1		100	0		
161.	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.000.000		1.000.000	100	100		
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1		1		100	0		
162.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			16.990.000		16.990.000	66,67	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase izin yang diterbitkan (persen)	100		90		90	0		
			Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)			0		0	0		
163.	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			16.990.000		16.990.000	66,67	100		

		Jumlah Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Yang Diselenggarakan Masyarakat yang Terbit	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1		1		0	0		
164.	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			14.490.000		14.490.000	100	100		
		Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
165.	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1		0		0	0		
166.	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			2.500.000		2.500.000	100	100		
		Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
167.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			996.730.000		-	0	0	SMPN 1 BENGKULU TENGAH	
		Persentase TK/PAUD Terakreditasi (Persentase)		79,90		70		87,61	0		
168.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			996.730.000		-	0	0		
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		1		0		0	0		
169.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			996.730.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		0		0	0		
170.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			375.840.000		375.840.000	100	100	SMPN 2 BENGKULU TENGAH	
		meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						100	0		
171.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			375.840.000		375.840.000	100	100		
		Rasio Kesediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
172.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			375.840.000		375.840.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		

173.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			604.560.000		604.560.000	100	100	SMPN 3 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						100	0		
174.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			604.560.000		604.560.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
175.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			604.560.000		604.560.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
176.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			327.120.000		327.120.000	100	100	SMPN 4 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
177.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			327.120.000		327.120.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
178.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			327.120.000		327.120.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
179.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			522.000.000		522.000.000	100	100	SMPN 5 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
180.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			522.000.000		522.000.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
181.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			522.000.000		522.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
182.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			192.560.000		192.560.000	100	100	SMPN 6 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
183.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			192.560.000		192.560.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
184.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			192.560.000		192.560.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
185.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			138.040.000		138.040.000	100	100	SMPN 7 BENGKULU TENGAH	
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts						100	0		

186.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			138.040.000		138.040.000	100	100		
		Rasio Kesediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
187.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			138.040.000		138.040.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
188.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			222.720.000		222.720.000	100	100	SMPN 8 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
189.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			222.720.000		222.720.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
190.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			222.720.000		222.720.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
191.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			245.920.000		245.920.000	100	100	SMPN 09 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
192.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			245.920.000		245.920.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
193.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			245.920.000		245.920.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
194.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			194.880.000		194.880.000	100	100	SMPN 10 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
195.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			194.880.000		194.880.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
196.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			194.880.000		194.880.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
197.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			214.800.000		214.800.000	100	100	SMPN 11 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
198.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			214.800.000		214.800.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		

		PAUD,SD/MI dan SMP/Mts									
199.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		214.800.000		214.800.000	100	100			
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0			
200.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			97.440.000		97.440.000	100	100	SMPN 12 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0			
201.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		97.440.000		97.440.000	100	100			
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0			
202.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		97.440.000		97.440.000	100	100			
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0			
203.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			276.280.000		276.280.000	100	100	SMPN 13 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0			
204.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		276.280.000		276.280.000	100	100			
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0			
205.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		276.280.000		276.280.000	100	100			
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0			
206.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			128.960.000		128.960.000	100	100	SMPN 14 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah					100	0			
207.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		128.960.000		128.960.000	100	100			
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0			
208.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		128.960.000		128.960.000	100	100			
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0			
209.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			132.440.000		132.440.000	100	100	SMPN 15 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah					100	0			
210.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		132.440.000		132.440.000	100	100			
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0			

211.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			132.440.000		132.440.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
212.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			27.840.000		27.840.000	100	100	SMPN 16 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						100	0		
213.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			27.840.000		27.840.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
214.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			27.840.000		27.840.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
215.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			12.760.000		12.760.000	100	100	SMPN 17 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
216.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			12.760.000		12.760.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
217.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			12.760.000		12.760.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
218.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			135.920.000		135.920.000	100	100	SMPN 18 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
219.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			135.920.000		135.920.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
220.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			135.920.000		135.920.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
221.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			84.680.000		452.060.000	100	533,85	SMPN 19 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
222.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			84.680.000		452.060.000	100	533,85		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
223.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			84.680.000		452.060.000	100	533,85		

		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
224.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			49.880.000		49.880.000	100	100	SMPN 20 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
225.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			49.880.000		49.880.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
226.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			49.880.000		49.880.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
227.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			96.280.000		96.280.000	100	100	SMPN 21 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
228.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			96.280.000		96.280.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
229.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			96.280.000		96.280.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
230.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			29.000.000		29.000.000	100	100	SMPN 22 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
231.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			29.000.000		29.000.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
232.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			29.000.000		29.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
233.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			70.960.000		70.960.000	100	100	SMPN 23 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
234.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			70.960.000		70.960.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
235.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			70.960.000		70.960.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		

236.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			59.160.000		59.160.000	100	100	SMPN 24 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
237.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			59.160.000		59.160.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
238.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			59.160.000		59.160.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
239.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			93.000.000		93.000.000	100	100	SMPN 25 BENGKULU TENGAH	
		meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						100	0		
240.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			93.000.000		93.000.000	100	100		
		Rasio Kesiapan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
241.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			93.000.000		93.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
242.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			22.040.000		22.040.000	100	100	SMPN 26 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
243.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			22.040.000		22.040.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
244.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			22.040.000		22.040.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
245.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			45.240.000		45.240.000	100	100	SMPN 27 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
246.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			45.240.000		45.240.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
247.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			45.240.000		45.240.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
248.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			34.800.000		34.800.000	100	100	SMPN 28 BENGKULU TENGAH	

249.		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		34.800.000		34.800.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0		
250.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		34.800.000		34.800.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0		
	251. 1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			52.200.000		52.200.000	100	100	SMPN 29 BENGKULU TENGAH
252.		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		52.200.000		52.200.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0		
253.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		52.200.000		52.200.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0		
	254. 1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			165.880.000		165.880.000	100	100	SMPN 30 BENGKULU TENGAH
255.		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		165.880.000		165.880.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0		
256.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		165.880.000		165.880.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0		
	257. 1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			30.160.000		30.160.000	100	100	SMPN 31 BENGKULU TENGAH
258.		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		30.160.000		30.160.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0		
259.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		30.160.000		30.160.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0		
	260. 1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			53.360.000		53.360.000	100	100	SMPN 32 BENGKULU TENGAH
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		

261.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		53.360.000		53.360.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	1		0	0		
262.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		53.360.000		53.360.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	1		100	0		
263.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			-	-	0	0	SMP IT MAHAD RABBANI	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					0	0		
264.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		-		-	0	0		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	0		0	0		
265.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		-		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	0		0	0		
266.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			-	-	0	0	SMP IT IHYAUL QURAN	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					0	0		
267.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		-		-	0	0		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	0		0	0		
268.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		-		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	0		0	0		
269.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			489.740.000	489.740.000	100	100	SD NEGERI 01 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
270.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		489.740.000		489.740.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	1		0	0		
271.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		489.740.000		489.740.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	1		100	0		
272.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			394.800.000	394.800.000	100	100	SD NEGERI 02 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
273.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		394.800.000		394.800.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	1		0	0		

274.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			394.800.000		394.800.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
275.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			180.420.000		180.420.000	100	100	SD NEGERI 03 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
276.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			180.420.000		180.420.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
277.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			180.420.000		180.420.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
278.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			202.100.000		202.100.000	100	100	SD NEGERI 04 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
279.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			202.100.000		202.100.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
280.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			202.100.000		202.100.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
281.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			105.280.000		105.280.000	100	100	SD NEGERI 05 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
282.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			105.280.000		105.280.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
283.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			105.280.000		105.280.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
284.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			60.160.000		60.160.000	100	100	SD NEGERI 06 BENGKULU TENGAH	
		meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						100	0		
285.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			60.160.000		60.160.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
286.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			60.160.000		60.160.000	100	100		

		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
287.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			220.840.000		220.840.000	100	100	SD NEGERI 07 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
288.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			220.840.000		220.840.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
289.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			220.840.000		220.840.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
290.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			118.440.000		118.440.000	100	100	SD NEGERI 08 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
291.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			118.440.000		118.440.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
292.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			118.440.000		118.440.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
293.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			187.060.000		187.060.000	100	100	SD NEGERI 09 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
294.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			187.060.000		187.060.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
295.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			187.060.000		187.060.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
296.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			140.000.000		140.000.000	100	100	SD NEGERI 10 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
297.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			140.000.000		140.000.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
298.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			140.000.000		140.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		

299.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			120.320.000		120.320.000	100	100	SD NEGERI 11 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
300.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			120.320.000		120.320.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
301.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			120.320.000		120.320.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
302.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			110.860.000		110.860.000	100	100	SD NEGERI 12 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
303.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			110.860.000		110.860.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
304.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			110.860.000		110.860.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
305.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			84.540.000		84.540.000	100	100	SD NEGERI 13 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
306.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			84.540.000		84.540.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
307.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			84.540.000		84.540.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
308.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			70.500.000		70.500.000	100	100	SD NEGERI 14 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
309.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			70.500.000		70.500.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
310.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			70.500.000		70.500.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
311.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			207.680.000		207.680.000	100	100	SD NEGERI 15 BENGKULU TENGAH	

		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
312.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		207.680.000		207.680.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0		
313.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		207.680.000		207.680.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0		
314.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			89.300.000		89.300.000	100	100	SD NEGERI 16 BENGKULU TENGAH
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
315.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		89.300.000		89.300.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0		
316.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		89.300.000		89.300.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0		
317.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			234.000.000		234.000.000	100	100	SD NEGERI 17 BENGKULU TENGAH
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
318.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		234.000.000		234.000.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0		
319.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		234.000.000		234.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0		
320.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			264.140.000		264.140.000	100	100	SD NEGERI 18 BENGKULU TENGAH
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
321.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		264.140.000		264.140.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0		
322.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		264.140.000		264.140.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0		
323.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			78.960.000		78.960.000	100	100	SD NEGERI 19 BENGKULU TENGAH
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		

324.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			78.960.000		78.960.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
325.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			78.960.000		78.960.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
326.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			164.500.000		164.500.000	100	100	SD NEGERI 20 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
327.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			164.500.000		164.500.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
328.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			164.500.000		164.500.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
329.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			203.920.000		203.920.000	100	100	SD NEGERI 21 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
330.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			203.920.000		203.920.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
331.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			203.920.000		203.920.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
332.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			73.320.000		73.320.000	100	100	SD NEGERI 22 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
333.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			73.320.000		73.320.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
334.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			73.320.000		73.320.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
335.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			140.000.000		140.000.000	100	100	SD NEGERI 23 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
336.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			140.000.000		140.000.000	100	100		

		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
337.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			140.000.000		140.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
338.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			48.880.000		48.880.000	100	100	SD NEGERI 24 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
339.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			48.880.000		48.880.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
340.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			48.880.000		48.880.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
341.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			211.500.000		211.500.000	100	100	SD NEGERI 25 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
342.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			211.500.000		211.500.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
343.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			211.500.000		211.500.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
344.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			143.820.000		143.820.000	100	100	SD NEGERI 26 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
345.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			143.820.000		143.820.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
346.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			143.820.000		143.820.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
347.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			195.460.000		195.460.000	100	100	SD NEGERI 27 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
348.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			195.460.000		195.460.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		

349.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			195.460.000		195.460.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
350.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			20.680.000		20.680.000	100	100	SD NEGERI 28 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
351.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			20.680.000		20.680.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
352.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			20.680.000		20.680.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
353.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			155.980.000		155.980.000	100	100	SD NEGERI 29 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
354.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			155.980.000		155.980.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
355.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			155.980.000		155.980.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
356.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			46.060.000		46.060.000	100	100	SD NEGERI 30 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
357.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			46.060.000		46.060.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
358.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			46.060.000		46.060.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
359.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			134.420.000		134.420.000	100	100	SD NEGERI 31 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
360.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			134.420.000		134.420.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
361.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			134.420.000		134.420.000	100	100		

		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
362.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			164.500.000		164.500.000	100	100	SD NEGERI 32 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
363.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			164.500.000		164.500.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
364.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			164.500.000		164.500.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
365.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			84.600.000		84.600.000	100	100	SD NEGERI 33 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
366.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			84.600.000		84.600.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
367.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			84.600.000		84.600.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
368.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			81.780.000		81.780.000	100	100	SD NEGERI 34 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
369.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			81.780.000		81.780.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
370.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			81.780.000		81.780.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
371.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			51.700.000		51.700.000	100	100	SD NEGERI 35 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
372.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			51.700.000		51.700.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
373.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			51.700.000		51.700.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		

374.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			85.540.000		85.540.000	100	100	SD NEGERI 36 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
375.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			85.540.000		85.540.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
376.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			85.540.000		85.540.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
377.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			142.880.000		142.880.000	100	100	SD NEGERI 37 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
378.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			142.880.000		142.880.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
379.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			142.880.000		142.880.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
380.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			68.620.000		68.620.000	100	100	SD NEGERI 38 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
381.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			68.620.000		68.620.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
382.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			68.620.000		68.620.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
383.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			47.000.000		47.000.000	100	100	SD NEGERI 39 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
384.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			47.000.000		47.000.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
385.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			47.000.000		47.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
386.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			172.900.000		172.900.000	100	100	SD NEGERI 40 BENGKULU TENGAH	

		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
387.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		172.900.000		172.900.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0		
388.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		172.900.000		172.900.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0		
389.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			16.920.000		16.920.000	100	100	SD NEGERI 41 BENGKULU TENGAH
		meningkatnya partisipasi anak usia sekolah					100	0		
390.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		16.920.000		16.920.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0		
391.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		16.920.000		16.920.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0		
392.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			69.560.000		69.560.000	100	100	SD NEGERI 42 BENGKULU TENGAH
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
393.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		69.560.000		69.560.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0		
394.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		69.560.000		69.560.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0		
395.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			123.140.000		123.140.000	100	100	SD NEGERI 43 BENGKULU TENGAH
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
396.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		123.140.000		123.140.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0		
397.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		123.140.000		123.140.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0		
398.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			11.280.000		11.280.000	100	100	SD NEGERI 44 BENGKULU TENGAH
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		

399.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		11.280.000		11.280.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	1		0	0		
400.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		11.280.000		11.280.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	1		100	0		
401.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		54.460.000		54.460.000	100	100	SD NEGERI 45 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
402.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		54.460.000		54.460.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	1		0	0		
403.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		54.460.000		54.460.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	1		100	0		
404.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		104.340.000		104.340.000	100	100	SD NEGERI 46 BENGKULU TENGAH	
		meningkatnya partisipasi anak usia sekolah					100	0		
405.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		104.340.000		104.340.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	1		0	0		
406.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		104.340.000		104.340.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	1		100	0		
407.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		141.000.000		141.000.000	100	100	SD NEGERI 47 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
408.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		141.000.000		141.000.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	1		0	0		
409.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		141.000.000		141.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	1		100	0		
410.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		61.100.000		61.100.000	100	100	SD NEGERI 48 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
411.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		61.100.000		61.100.000	100	100		

		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
412.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			61.100.000		61.100.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
413.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			81.780.000		81.780.000	100	100	SD NEGERI 49 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
414.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			81.780.000		81.780.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
415.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			81.780.000		81.780.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
416.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			72.380.000		72.380.000	100	100	SD NEGERI 50 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
417.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			72.380.000		72.380.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
418.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			72.380.000		72.380.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
419.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			42.300.000		42.300.000	100	100	SD NEGERI 51 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
420.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			42.300.000		42.300.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
421.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			42.300.000		42.300.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
422.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			30.080.000		30.080.000	100	100	SD NEGERI 52 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
423.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			30.080.000		30.080.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		

424.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			30.080.000		30.080.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
425.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			52.640.000		52.640.000	100	100	SD NEGERI 53 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
426.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			52.640.000		52.640.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
427.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			52.640.000		52.640.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
428.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			111.860.000		111.860.000	100	100	SD NEGERI 54 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
429.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			111.860.000		111.860.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
430.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			111.860.000		111.860.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
431.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			50.760.000		50.760.000	100	100	SD NEGERI 55 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
432.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			50.760.000		50.760.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
433.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			50.760.000		50.760.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
434.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			104.340.000		104.340.000	100	100	SD NEGERI 56 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
435.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			104.340.000		104.340.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
436.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			104.340.000		104.340.000	100	100		

		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
437.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			63.920.000		63.920.000	100	100	SD NEGERI 57 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
438.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			63.920.000		63.920.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
439.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			63.920.000		63.920.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
440.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			55.460.000		55.460.000	100	100	SD NEGERI 58 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
441.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			55.460.000		55.460.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
442.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			55.460.000		55.460.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
443.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			100.580.000		100.580.000	100	100	SD NEGERI 59 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
444.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			100.580.000		100.580.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
445.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			100.580.000		100.580.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
446.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			36.660.000		36.660.000	100	100	SD NEGERI 60 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
447.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			36.660.000		36.660.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
448.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			36.660.000		36.660.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		

449.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			90.240.000		90.240.000	100	100	SD NEGERI 61 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
450.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			90.240.000		90.240.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
451.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			90.240.000		90.240.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
452.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			140.000.000		140.000.000	100	100	SD NEGERI 62 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
453.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			140.000.000		140.000.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
454.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			140.000.000		140.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
455.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			72.320.000		72.320.000	100	100	SD NEGERI 63 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
456.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			72.320.000		72.320.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
457.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			72.320.000		72.320.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
458.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			114.680.000		114.680.000	100	100	SD NEGERI 64 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
459.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			114.680.000		114.680.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
460.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			114.680.000		114.680.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
461.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			30.080.000		30.080.000	100	100	SD NEGERI 65 BENGKULU TENGAH	

462.		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		30.080.000		30.080.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0		
463.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		30.080.000		30.080.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0		
	464. 1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			69.560.000		69.560.000	100	100	SD NEGERI 66 BENGKULU TENGAH
465.		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		69.560.000		69.560.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0		
466.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		69.560.000		69.560.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0		
	467. 1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			50.700.000		50.700.000	100	100	SD NEGERI 67 BENGKULU TENGAH
468.		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		50.700.000		50.700.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0		
469.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		50.700.000		50.700.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0		
	470. 1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			259.440.000		259.440.000	100	100	SD NEGERI 68 BENGKULU TENGAH
471.		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		259.440.000		259.440.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0		
472.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		259.440.000		259.440.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0		
	473. 1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			68.620.000		68.620.000	100	100	SD NEGERI 69 BENGKULU TENGAH
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		

474.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			68.620.000		68.620.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
475.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			68.620.000		68.620.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
476.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			80.840.000		80.840.000	100	100	SD NEGERI 70 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
477.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			80.840.000		80.840.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
478.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			80.840.000		80.840.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
479.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			87.360.000		87.360.000	100	100	SD NEGERI 71 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
480.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			87.360.000		87.360.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
481.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			87.360.000		87.360.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
482.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			180.420.000		180.420.000	200	100	SD NEGERI 72 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						200	0		
483.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			180.420.000		180.420.000	200	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		2		0	0		
484.	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			180.420.000		180.420.000	200	100		
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		2		200	0		
485.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			66.740.000		66.740.000	100	100	SD NEGERI 73 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
486.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			66.740.000		66.740.000	100	100		

		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
487.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			66.740.000		66.740.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
488.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			68.620.000		68.620.000	100	100	SD NEGERI 74 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
489.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			68.620.000		68.620.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
490.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			68.620.000		68.620.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
491.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			83.660.000		83.660.000	100	100	SD NEGERI 75 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
492.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			83.660.000		83.660.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
493.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			83.660.000		83.660.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
494.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			121.200.000		121.200.000	100	100	SD NEGERI 76 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
495.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			121.200.000		121.200.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
496.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			121.200.000		121.200.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
497.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			77.960.000		77.960.000	100	100	SD NEGERI 77 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
498.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			77.960.000		77.960.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		

499.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			77.960.000		77.960.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
500.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			115.620.000		115.620.000	100	100	SD NEGERI 78 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
501.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			115.620.000		115.620.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
502.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			115.620.000		115.620.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
503.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			77.080.000		77.080.000	100	100	SD NEGERI 79 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
504.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			77.080.000		77.080.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
505.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			77.080.000		77.080.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
506.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101.520.000		101.520.000	100	100	SD NEGERI 80 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
507.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			101.520.000		101.520.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
508.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			101.520.000		101.520.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
509.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			49.820.000		49.820.000	100	100	SD NEGERI 81 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
510.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			49.820.000		49.820.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
511.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			49.820.000		49.820.000	100	100		

		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
512.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			66.740.000		66.740.000	100	100	SD NEGERI 82 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
513.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			66.740.000		66.740.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
514.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			66.740.000		66.740.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
515.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			86.480.000		86.480.000	100	100	SD NEGERI 83 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
516.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			86.480.000		86.480.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
517.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			86.480.000		86.480.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
518.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			44.180.000		44.180.000	100	100	SD NEGERI 84 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
519.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			44.180.000		44.180.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
520.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			44.180.000		44.180.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
521.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			38.540.000		38.540.000	100	100	SD NEGERI 85 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
522.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			38.540.000		38.540.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
523.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			38.540.000		38.540.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		

524.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			36.660.000		36.660.000	100	100	SD NEGERI 86 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
525.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			36.660.000		36.660.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
526.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			36.660.000		36.660.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
527.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			47.160.000		47.160.000	100	100	SD NEGERI 87 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
528.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			47.160.000		47.160.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
529.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			47.160.000		47.160.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
530.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			215.200.000		215.200.000	100	100	SD NEGERI 88 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
531.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			215.200.000		215.200.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
532.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			215.200.000		215.200.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
533.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			70.500.000		70.500.000	100	100	SD NEGERI 89 BENGKULU TENGAH	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						100	0		
534.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			70.500.000		70.500.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		0	0		
535.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			70.500.000		70.500.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1		100	0		
536.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			106.220.000		106.220.000	100	100	SD NEGERI 90 BENGKULU TENGAH	

		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
537.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		106.220.000		106.220.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0		
538.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		106.220.000		106.220.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0		
539.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			64.320.000		64.320.000	100	100	SD NEGERI 91 BENGKULU TENGAH
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
540.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		64.320.000		64.320.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0		
541.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		64.320.000		64.320.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0		
542.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			59.220.000		59.220.000	100	100	SD NEGERI 92 BENGKULU TENGAH
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100	0		
543.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		59.220.000		59.220.000	100	100		
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	0	0		
544.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		59.220.000		59.220.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		1	100	0		
545.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			-		-	0	0	SD IT AL-IHSAN
		Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts					0	0		
546.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		-		-	0	0		
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		0	0	0		
547.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		-		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1		0	0	0		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			150.756.236.067		127.752.773.751	84,05	84,74	
548.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			61.211.412.240		50.877.094.751	81,32	83,12	DINAS KESEHATAN
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Persen)	100		83,14	83,14	0		

			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			100		0	0		
			PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Persen)			83,14		83,14	0		
549.	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80.147.597		61.747.597	100	77,04		
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
550.	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			22.900.000		19.900.000	100	86,9		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
551.	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			4.900.000		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
552.	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			11.448.802		11.448.802	100	100		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
553.	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			2.500.000		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
554.	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			19.515.500		17.015.500	100	87,19		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
555.	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.883.295		13.383.295	100	70,87		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		100	0		

556.	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		56.068.323.517		45.837.524.590	100	81,75		
		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		0	0		
557.	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		56.029.618.047		45.800.879.120	100	81,74		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12		100	0		
558.	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		22.550.470		22.550.470	100	100		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		100	0		
559.	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		9.000.000		6.940.000	100	77,11		
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		100	0		
560.	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		7.155.000		7.155.000	100	100		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		100	0		
561.	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		6.850.000		3.300.000	100	48,18		
		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		0	0		
562.	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		6.850.000		3.300.000	100	48,18		
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		100	0		
563.	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		140.887.446		126.584.446	55,42	89,85		
		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15	1		0	0		

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15		1		0	0		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		1		0	0		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		0	0		
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
564.	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7.740.000		7.737.000	100	99,96		
565.		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		100	0		
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		60.000.000		54.800.000	20	91,33		
566.		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1		20	0		
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1.100.000		-	6,67	0		
567.		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15	1		6,67	0		
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		30.265.905		30.265.905	6,67	100		
568.		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15	1		6,67	0		
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		3.984.640		3.984.640	10	100		
569.		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	1		10	0		
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		13.200.000		13.200.000	100	100		
570.		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		100	0		
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu		9.120.000		1.120.000	100	12,28		
571.		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		100	0		
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		15.476.901		15.476.901	100	100		
572.		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		100	0		
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4.159.944.000		4.141.900.000	100	99,57		
573.		Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	9		0	0		
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		4.159.944.000		4.141.900.000	100	99,57		
574.		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	9		100	0		
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		638.634.680		620.235.918	100	97,12		

		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
575.	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000.000		-	100	0		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
576.	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			348.000.000		344.401.238	100	98,97		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
577.	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			288.634.680		275.834.680	100	95,57		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
578.	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			116.625.000		85.802.200	8,33	73,57		
		Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	60		5		0	0		
579.	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			116.625.000		85.802.200	8,33	73,57		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	60		5		8,33	0		
580.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			42.502.453.310		40.197.645.573	66,67	94,58	DINAS KESEHATAN	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Cakupan kepesertaan JKN (%)					0	0		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)					0	0		
			PERSENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Persen)	100		94,6		94,6	0		
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)					0	0		
			Angka Penemuan TBC (Angka)					0	0		
			Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)					0	0		
			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))					0	0		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)					0	0		
			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))					0	0		
			Cakupan Penemuan kasus TB (%)					0	0		

			Angka keberhasilan pengobatan TB (Angka)					0	0			
			Persentase RS terakreditasi paripurna (%)					0	0			
			Total Fertility Rate (Angka kelahiran total) (%)					0	0			
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))					0	0			
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)					0	0			
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)					0	0			
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)					0	0			
			PERSENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Persen)	100				94,64	94,64			0
			Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)						0			0
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)						0			0
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)						0			0
			Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) (%)						0			0
			Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)						0			0
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)						0			0
			Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar (%)						0			0
581.	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		29.939.456.310		29.160.295.972	80	97,4				
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	2		0	0	0	0				
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1		1	0	0					
		Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	2		2	0	0					
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	2		2	0	0					
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1		1	0	0					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	2		2	0	0					
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	20		0	0	0					

			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	20		20		0	0		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	120		120		0	0		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	3		3		0	0		
582.	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas			-		-	0	0		
		Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	2		0		0	0		
583.	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			16.240.395.122		15.849.143.000	100	97,59		
		Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1		1		100	0		
584.	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			1.050.000.000		1.026.366.001	100	97,75		
		Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	2		2		100	0		
585.	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			7.732.151.238		7.512.405.000	100	97,16		
		Tersedianya Puskesmas yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	2		2		100	0		
586.	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			311.204.746		230.550.000	100	74,08		
		Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1		1		100	0		
587.	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			108.990.000		93.507.000	100	85,79		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	2		2		100	0		
588.	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			-		-	0	0		
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	20		0		0	0		
589.	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			190.655.000		188.639.525	100	98,94		
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	20		20		100	0		
590.	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			4.182.952.204		4.138.112.308	100	98,93		
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	120		120		100	0		
591.	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			123.108.000		121.573.138	100	98,75		

		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	3		3		100	0		
592.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			12.529.297.000		11.026.969.601	65,63	88,01		
		Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	65		65		0	0		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	50		50		0	0		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	69		69		0	0		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	60		60		0	0		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0		0		0	0		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	30		30		0	0		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	25		25		0	0		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	55		0		0	0		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	35		0		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	10		0		0	0		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	25		25		0	0		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	20		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0	0		

		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	25		25		0	0		
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	30		0		0	0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1		0		0	0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0	0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		0	0		
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1		1		0	0		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1		1		0	0		
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1		0		0	0		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0	0		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1		1		0	0		
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	6		6		0	0		
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	20		0		0	0		
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	42		0		0	0		
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	25		0		0	0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0	0		
593.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		95.500.000		92.814.000	100	97,19		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	65	65		100	0		
594.	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		114.500.000		104.450.000	100	91,22		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	50	50		100	0		
595.	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		14.000.000		13.234.569	100	94,53		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	69	69		100	0		

596.	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		19.500.000		3.800.000	100	19,49		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	60	60		100	0		
597.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		14.000.000		7.000.000	0	50		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	0		0	0		
598.	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		16.772.000		10.410.000	100	62,07		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	30	30		100	0		
599.	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		93.000.000		18.000.000	100	19,35		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	25	25		100	0		
600.	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		15.980.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	55	0		0	0		
601.	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		95.980.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	35	0		0	0		
602.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		15.510.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	10	0		0	0		
603.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		12.070.000		6.000.000	100	49,71		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	25	25		100	0		
604.	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		-		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	20	0		0	0		
605.	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		3.000.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1	0		0	0		
606.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		66.000.000		63.626.500	100	96,4		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1		100	0		
607.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		170.427.000		41.586.150	100	24,4		

		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		100	0		
608.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			37.320.000		29.446.000	100	78,9		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		100	0		
609.	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			298.270.000		175.357.000	100	58,79		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		1		100	0		
610.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			92.378.000		15.623.000	100	16,91		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		100	0		
611.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			12.650.000		6.800.000	100	53,75		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	25		25		100	0		
612.	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			11.350.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	30		0		0	0		
613.	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			11.000.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1		0		0	0		
614.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			334.805.000		114.559.500	100	34,22		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		100	0		
615.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			10.199.292.000		10.021.584.630	100	98,26		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
616.	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			4.000.000		14.060.000	100	351,5		
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1		1		100	0		
617.	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			26.730.000		14.060.000	100	52,6		
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1		1		100	0		
618.	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			17.000.000		-	0	0		
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1		0		0	0		

619.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			181.505.000		162.204.252	100	89,37		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		100	0		
620.	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			107.233.000		35.700.000	100	33,29		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1		1		100	0		
621.	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			119.320.000		48.030.000	100	40,25		
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	6		6		100	0		
622.	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			5.745.000		-	0	0		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	20		0		0	0		
623.	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			11.460.000		-	0	0		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	42		0		0	0		
624.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			12.070.000		-	0	0		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	25		0		0	0		
625.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			300.930.000		28.624.000	100	9,51		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		100	0		
626.	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			27.500.000		10.380.000	100	37,75		
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1		1		0	0		
627.	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			27.500.000		10.380.000	100	37,75		
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1		1		100	0		
628.	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.200.000		-	0	0		
		Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1		0		0	0		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1		0		0	0		
629.	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			-		-	0	0		
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1		0		0	0		
630.	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			6.200.000		-	0	0		

		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1		0		0	0		
631.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			4.114.818.656		3.341.362.155	100	81,2	DINAS KESEHATAN	
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)					0	0		
			Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)					0	0		
			PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (Persen)	100	81,15			81,15	0		
			Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)					0	0		
632.	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			3.579.666.656		2.933.537.980	100	81,95		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1	1			0	0		
633.	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			3.579.666.656		2.933.537.980	100	81,95		
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1	1			100	0		
634.	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			535.152.000		407.824.175	100	76,21		
		Jumlah Dokumen Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	12	12			0	0		
635.	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			535.152.000		407.824.175	100	76,21		
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	12	12			100	0		
636.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			489.284.000		428.187.262	100	87,51	DINAS KESEHATAN	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)					0	0		
			Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)					0	0		
			PERSENTASE PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN (Persen)	100	87,51			87,51	0		
637.	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			476.784.000		423.187.262	100	88,76		

		Jumlah Dokumen Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1		1		0	0		
638.	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			476.784.000		423.187.262	100	88,76		
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1		1		100	0		
639.	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			12.500.000		5.000.000	100	40		
		Jumlah Dokumen Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1		1		0	0		
640.	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			12.500.000		5.000.000	100	40		
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1		1		100	0		
641.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			73.730.000		-	0	0	DINAS KESEHATAN	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)					0	0		
642.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			73.730.000		-	0	0		
		Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		0		0	0		
643.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			73.730.000		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		0		0	0		
644.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKULU TENGAH	

							0	0		
645.	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-		0	0		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	78	0		0	0		
646.	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			-		0	0		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	78	0		0	0		
647.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			21.117.471.059		15.504.639.400	66,67	73,42	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKULU TENGAH
		Masyarakat Memperoleh Layanan Kesehatan Yang Mudah Diakses, Terjangkau dan Bermutu	Persentase pemenuhan upaya kesehatan (RSUD) (persen)	100			0	0		
			Terlaksananya Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Persen)	100	80		80	0		
			Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. (%)		0		0	0		
648.	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			-		0	0		
		Tersedianya Penyediaan Alat Kesehatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	4	0		0	0		
649.	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			-		0	0		
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	4	0		0	0		
650.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			11.717.471.059		6.980.780.446	100	59,58	
		Terlaksananya Operasional Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	1		0	0		
651.	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			11.717.471.059		6.980.780.446	100	59,58	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	1		100	0		
652.	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			9.400.000.000		8.523.858.954	100	90,68	
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat di Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1	1		0	0		
653.	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			9.400.000.000		8.523.858.954	100	90,68	
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1	1		100	0		

654.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.500.000		4.963.000	100	90,24	PUSKESMAS BENTIRING	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			90,2		0	0		
655.	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			5.500.000		4.963.000	100	90,24		
		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
656.	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			5.500.000		4.963.000	100	90,24		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
657.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.161.227.725		878.287.703	83,26	75,63	PUSKESMAS BENTIRING	
		Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)					0	0		
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))					0	0		
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)					0	0		
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)					0	0		
			Jumlah kematian balita (Angka)					0	0		
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))			80		0	0		
			Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)					0	0		
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)					0	0		
			Angka keberhasilan pengobatan TB (Angka)					0	0		
			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))					0	0		
658.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.161.227.725		878.287.703	83,26	75,63		
		Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	672		117		0	0		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	571		751		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	12		12		0	0		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	12		12		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0	0		

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	12		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0	0		
659.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			59.917.600		56.872.000	17,41	94,92		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	672		117		17,41	0		
660.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			90.600.000		51.000.000	131,52	56,29		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	571		751		131,52	0		
661.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			12.000.000		9.600.000	100	80		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	12		12		100	0		
662.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			16.400.000		12.200.000	100	74,39		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	12		12		100	0		
663.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			190.000.000		66.409.000	100	34,95		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
664.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			9.400.000		5.700.000	100	60,64		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		100	0		
665.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			19.200.000		15.800.000	100	82,29		

		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		100	0		
666.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			18.600.000		11.600.000	100	62,37		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		100	0		
667.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			15.000.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	12		0		0	0		
668.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			92.518.000		78.758.000	100	85,13		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		100	0		
669.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			418.232.125		406.570.584	100	97,21		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
670.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			182.160.000		127.678.119	100	70,09		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		100	0		
671.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			10.000.000		10.000.000	100	100		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		100	0		
672.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			800.000		-	0	0		
		Terlaksananya pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0	0		
673.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan			26.400.000		26.100.000	100	98,86		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan (Dokumen)	1		1		100	0		
674.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			8.698.800		6.940.000	100	79,78	PUSKESMAS BENTIRING	
		Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)					0	0		
675.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			8.698.800		6.940.000	100	79,78		
		Jumlah dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0	0		
676.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			8.698.800		6.940.000	100	79,78		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		100	0		
677.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.500.000		3.344.000	0	95,54	PUSKESMAS UJUNG KARANG	

		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpehuni	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)		95,56		0	0		
678.	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		3.500.000		3.344.000	0	95,54		
		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1		0	0		
679.	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		3.500.000		3.344.000	0	95,54		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1		0	0		
680.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		837.897.270		573.186.117	97,72	68,41	PUSKESMAS UJUNG KARANG	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)				0	0		
			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))				0	0		
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)				0	0		
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)				0	0		
			Angka keberhasilan pengobatan TB (Angka)				0	0		
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))				0	0		
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)				0	0		
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)				0	0		
			Jumlah kematian balita (Angka)				0	0		
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)				0	0		
			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))				0	0		
681.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		837.897.270		573.186.117	97,72	68,41		
		Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	30	30		0	0		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	500	417		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	8	8		0	0		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	13	11		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1		0	0		

			(Dokumen)								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1		0	0			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		0	0			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	8	8		0	0			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1		0	0			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0	1		0	0			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1		0	0			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1		0	0			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1		0	0			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1	1		0	0			
682.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			38.400.000		25.600.000	100	66,67		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	30	30			100	0		
683.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			26.800.000		14.300.000	83,4	53,36		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	500	417			83,4	0		
684.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			36.000.000		25.800.000	100	71,67		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	8	8			100	0		
685.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			25.200.000		11.900.000	84,62	47,22		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	13	11			84,62	0		
686.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			279.172.000		167.779.651	100	60,1		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1			100	0		
687.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			2.980.000		1.400.000	100	46,98		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1			100	0		
688.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15.600.000		10.100.000	100	64,74		

		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		100	0		
689.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			17.300.000		1.100.000	100	6,36		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		100	0		
690.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			28.800.000		9.800.000	100	34,03		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	8		8		100	0		
691.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			71.290.000		54.100.000	100	75,89		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		100	0		
692.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			120.059.270		110.779.506	0	92,27		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0		1		0	0		
693.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			148.896.000		117.626.960	100	79		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		100	0		
694.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			4.800.000		2.700.000	100	56,25		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		100	0		
695.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			200.000		-	100	0		
		Terlaksananya pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		100	0		
696.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan			22.400.000		20.200.000	100	90,18		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan (Dokumen)	1		1		100	0		
697.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			16.398.000		13.300.000	100	81,11	PUSKESMAS UJUNG KARANG	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)					0	0		
698.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			16.398.000		13.300.000	100	81,11		
		Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0	0		
699.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			16.398.000		13.300.000	100	81,11		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		100	0		
700.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.500.000		1.189.000	100	47,56	PUSKESMAS RENAH KANDIS	

		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)				0	0		
701.	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		2.500.000		1.189.000	100	47,56		
		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1		0	0		
702.	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		2.500.000		1.189.000	100	47,56		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1		100	0		
703.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		736.619.742		616.655.757	95,17	83,71	PUSKESMAS RENAH KANDIS	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))				0	0		
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)				0	0		
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))				0	0		
			Jumlah kematian balita (Angka)				0	0		
			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))				0	0		
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)				0	0		
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)				0	0		
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))				0	0		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)				0	0		
			Angka keberhasilan pengobatan TB (Angka)				0	0		
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)				0	0		
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)				0	0		
704.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		736.619.742		616.655.757	95,17	83,71		
		Presentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	60	58		0	0		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	365	356		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	8	8		0	0		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	9	3		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1		0	0		

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	8		8		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0	0		
705.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			60.316.000		60.304.000	96,67	99,98		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	60		58		96,67	0		
706.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			29.000.000		29.000.000	97,53	100		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	365		356		97,53	0		
707.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			19.200.000		19.200.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	8		8		100	0		
708.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			9.200.000		9.200.000	33,33	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	9		3		33,33	0		
709.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			139.248.000		63.153.350	100	45,35		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
710.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			2.800.000		2.800.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		100	0		
711.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			14.800.000		14.800.000	100	100		

		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		100	0		
712.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.320.000		4.800.000	100	75,95		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		100	0		
713.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			5.600.000		5.600.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	8		8		100	0		
714.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			89.858.800		89.240.000	100	99,31		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		100	0		
715.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			180.767.342		153.341.167	100	84,83		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
716.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			149.709.600		136.217.240	100	90,99		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		100	0		
717.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			6.800.000		6.600.000	100	97,06		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		100	0		
718.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			600.000		-	100	0		
		Terlaksananya pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		100	0		
719.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan			22.400.000		22.400.000	100	100		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan (Dokumen)	1		1		100	0		
720.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			6.980.000		6.980.000	100	100	PUSKESMAS RENAH KANDIS	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)					0	0		
721.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.980.000		6.980.000	100	100		
		Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0	0		
722.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			6.980.000		6.980.000	100	100		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		100	0		
723.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.850.000		5.466.500	0	93,44	PUSKESMAS TABA LAGAN	

		Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Terpenuhi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)		93,44		0	0		
724.	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		5.850.000		5.466.500	0	93,44		
		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1		0	0		
725.	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		5.850.000		5.466.500	0	93,44		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1		0	0		
726.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		1.008.041.946		840.635.526	66,24	83,39	PUSKESMAS TABA LAGAN	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)				0	0		
			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))				0	0		
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)				0	0		
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)				0	0		
			Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)				0	0		
			Angka keberhasilan pengobatan TB (Angka)				0	0		
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))				0	0		
			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))				0	0		
			Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)				0	0		
			Jumlah kematian balita (Angka)				0	0		
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))				0	0		
727.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		1.008.041.946		840.635.526	66,24	83,39		
		Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	360	136		0	0		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5796	725		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	13	13		0	0		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	102	11		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1		0	0		

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	13		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	0		1		0	0		
728.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			84.000.000		74.600.000	37,78	88,81		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	360		136		37,78	0		
729.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			57.600.000		56.600.000	12,51	98,26		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5796		725		12,51	0		
730.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			31.200.000		31.200.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	13		13		100	0		
731.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			6.600.000		6.600.000	10,78	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	102		11		10,78	0		
732.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			168.840.000		81.828.000	100	48,46		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
733.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			6.000.000		6.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		100	0		
734.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15.000.000		15.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		100	0		

735.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			4.800.000		2.000.000	100	41,67		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		100	0		
736.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			1.200.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	13		0		0	0		
737.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			125.106.000		100.010.000	100	79,94		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		100	0		
738.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			266.879.546		252.746.579	0	94,7		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0		1		0	0		
739.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			174.056.400		159.595.947	100	91,69		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		100	0		
740.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			19.200.000		10.400.000	100	54,17		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		100	0		
741.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.960.000		-	0	0		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0	0		
742.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan			45.600.000		44.055.000	0	96,61		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan (Dokumen)	0		1		0	0		
743.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			7.180.000		2.511.000	100	34,97	PUSKESMAS TABA LAGAN	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)					0	0		
744.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.180.000		2.511.000	100	34,97		
		Jumlah Dukomen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0	0		
745.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			7.180.000		2.511.000	100	34,97		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		100	0		
746.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.200.000		4.032.000	100	65,03	PUSKESMAS TABA TERET	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)					0	0		

747.	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		6.200.000		4.032.000	100	65,03		
		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1		0	0		
748.	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		6.200.000		4.032.000	100	65,03		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1		100	0		
749.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		874.837.217		660.058.506	85,31	75,45	PUSKESMAS TABA TERET	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)				0	0		
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)				0	0		
			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))				0	0		
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)				0	0		
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))				0	0		
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))				0	0		
			Jumlah kematian balita (Angka)				0	0		
			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))				0	0		
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)				0	0		
			Angka keberhasilan pengobatan TB (Angka)				0	0		
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)				0	0		
750.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		874.837.217		660.058.506	85,31	75,45		
		Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	171	123		0	0		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	580	996		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	10	13		0	0		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	12	5		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	130	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	9	8		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60	1		0	0		

			(Dokumen)								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	19	1		0	0			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	5	13		0	0			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	600	1		0	0			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	4		0	0			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	280	1		0	0			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	96	1		0	0			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	16	1		0	0			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	8	8		0	0			
751.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			38.800.000		38.800.000	71,93	100		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	171	123		71,93	0			
752.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			49.400.000		33.100.000	171,72	67		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	580	996		171,72	0			
753.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			12.000.000		7.800.000	130	65		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	10	13		130	0			
754.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			11.200.000		6.600.000	41,67	58,93		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	12	5		41,67	0			
755.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			174.200.000		59.753.600	0,77	34,3		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	130	1		0,77	0			
756.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			3.400.000		1.600.000	88,89	47,06		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	9	8		88,89	0			
757.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			18.000.000		18.000.000	1,67	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	60	1		1,67	0			

758.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			3.740.000		1.800.000	5,26	48,13		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	19		1		5,26	0		
759.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			2.000.000		1.800.000	260	90		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	5		13		260	0		
760.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			105.000.000		92.510.000	0,17	88,1		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	600		1		0,17	0		
761.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			263.713.217		250.967.979	400	95,17		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		4		400	0		
762.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			161.584.000		118.626.927	0,36	73,42		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	280		1		0,36	0		
763.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			9.600.000		8.700.000	1,04	90,63		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	96		1		1,04	0		
764.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			3.000.000		900.000	6,25	30		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	16		1		6,25	0		
765.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan			19.200.000		19.100.000	100	99,48		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan (Dokumen)	8		8		100	0		
766.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			3.600.000		2.740.000	12,5	76,11	PUSKESMAS TABA TERET	
		Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)					0	0		
767.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.600.000		2.740.000	12,5	76,11		
		Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	8		1		0	0		
768.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			3.600.000		2.740.000	12,5	76,11		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	8		1		12,5	0		
769.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.000.000		3.880.000	100	97	PUSKESMAS ARGA INDAH II	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)					0	0		

770.	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			4.000.000		3.880.000	100	97		
		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
771.	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			4.000.000		3.880.000	100	97		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
772.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.054.352.421		932.401.782	94,67	88,43	PUSKESMAS ARGA INDAH II	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)					0	0		
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)					0	0		
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))					0	0		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)					0	0		
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)					0	0		
			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))					0	0		
			Angka keberhasilan pengobatan TB (Angka)					0	0		
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)					0	0		
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))					0	0		
			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))					0	0		
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)					0	0		
			Jumlah kematian balita (Angka)					0	0		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			1.054.352.421		932.401.782	94,67	88,43		
		Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	80		80		0	0		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	100		100		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	15		12		0	0		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	20		8		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0	0		

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	15		15		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0	0		
774.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			78.688.000		78.400.000	100	99,63		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	80		80		100	0		
775.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			61.200.000		61.200.000	100	100		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	100		100		100	0		
776.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			18.000.000		18.000.000	80	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	15		12		80	0		
777.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			13.600.000		13.600.000	40	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	20		8		40	0		
778.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			186.760.000		102.197.000	100	54,72		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
779.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1.400.000		1.400.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		100	0		
780.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			18.000.000		18.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		100	0		

781.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			3.000.000		3.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		100	0		
782.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			1.200.000		600.000	100	50		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	15		15		100	0		
783.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			119.699.000		119.484.000	100	99,82		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		100	0		
784.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			337.085.421		310.978.486	100	92,26		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
785.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			179.200.000		169.942.296	100	94,83		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		100	0		
786.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			5.120.000		4.800.000	100	93,75		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		100	0		
787.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.400.000		800.000	100	57,14		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		100	0		
788.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan			30.000.000		30.000.000	100	100		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan (Dokumen)	1		1		100	0		
789.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			5.217.200		4.800.000	100	92	PUSKESMAS ARGA INDAH II	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)					0	0		
790.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.217.200		4.800.000	100	92		
		Jumlah dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0	0		
791.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			5.217.200		4.800.000	100	92		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		100	0		
792.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.800.000		4.609.000	100	96,02	PUSKESMAS SIDODADI	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)					0	0		

793.	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		4.800.000		4.609.000	100	96,02		
		jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1		0	0		
794.	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		4.800.000		4.609.000	100	96,02		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1		100	0		
795.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		1.111.449.372		912.584.925	91,48	82,11	PUSKESMAS SIDODADI	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)				0	0		
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)				0	0		
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))				0	0		
			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))				0	0		
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)				0	0		
			Angka keberhasilan pengobatan TB (Angka)				0	0		
			Jumlah kematian balita (Angka)				0	0		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)				0	0		
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))				0	0		
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)				0	0		
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)				0	0		
			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))				0	0		
796.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		1.111.449.372		912.584.925	91,48	82,11		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	115	115		0	0		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	72	72		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	36	13		0	0		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	6	6		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1		0	0		

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	36		13		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0	0		
797.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			22.000.000		22.000.000	100	100		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	115		115		100	0		
798.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			92.500.000		74.300.000	100	80,32		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	72		72		100	0		
799.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			7.200.000		7.200.000	36,11	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	36		13		36,11	0		
800.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			7.200.000		6.600.000	100	91,67		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	6		6		100	0		
801.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			193.681.000		94.656.000	100	48,87		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
802.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			8.400.000		6.000.000	100	71,43		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		100	0		
803.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			13.400.000		13.400.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		100	0		

804.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			9.200.000		6.000.000	100	65,22		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		100	0		
805.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			6.000.000		6.000.000	36,11	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	36		13		36,11	0		
806.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			108.778.400		99.800.000	100	91,75		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		100	0		
807.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			432.087.172		399.130.127	100	92,37		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
808.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			178.192.800		146.298.798	100	82,1		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		100	0		
809.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			12.000.000		12.000.000	100	100		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		100	0		
810.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.610.000		-	100	0		
		Terlaksananya pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		100	0		
811.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan			19.200.000		19.200.000	100	100		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan (Dokumen)	1		1		100	0		
812.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			8.400.000		8.160.000	100	97,14	PUSKESMAS SIDODADI	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)					0	0		
813.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			8.400.000		8.160.000	100	97,14		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0	0		
814.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			8.400.000		8.160.000	100	97,14		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		100	0		
815.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.100.000		6.576.000	100	92,62	PUSKESMAS KEMBANG SERI	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)					0	0		

816.	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		7.100.000		6.576.000	100	92,62		
		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1		0	0		
817.	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		7.100.000		6.576.000	100	92,62		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1		100	0		
818.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		1.266.348.040		1.095.811.704	73,71	86,53	PUSKESMAS KEMBANG SERI	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka keberhasilan pengobatan TB (Angka)				0	0		
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)				0	0		
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))				0	0		
			Jumlah kematian balita (Angka)				0	0		
			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))				0	0		
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)				0	0		
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)				0	0		
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)				0	0		
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)				0	0		
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)				0	0		
			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))				0	0		
819.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		1.266.348.040		1.095.811.704	73,71	86,53		
		Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	159		0	0		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	129	4		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	14	15		0	0		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	26	22		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	0		0	0		

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0		4		0	0		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0		22		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0		1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0		0		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	0		0		0	0		
820.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			76.800.000		76.800.000	0	100		
821.		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0		159		0	0		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			53.800.000		53.800.000	3,1	100		
822.		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	129		4		3,1	0		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			30.000.000		30.000.000	107,14	100		
823.		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	14		15		107,14	0		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			12.000.000		12.000.000	84,62	100		
824.		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	26		22		84,62	0		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			223.600.000		111.592.000	0	49,91		
825.		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0		1		0	0		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			29.400.000		33.400.000	0	113,61		
826.		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0		0		0	0		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			11.000.000		11.000.000	0	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0		1		0	0		

827.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			26.200.000		22.700.000	0	86,64		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0		4		0	0		
828.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			8.000.000		8.000.000	0	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0		22		0	0		
829.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			171.463.000		167.877.000	0	97,91		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0		1		0	0		
830.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			348.555.040		340.354.249	100	97,65		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
831.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			210.000.000		164.920.455	0	78,53		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0		1		0	0		
832.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			20.530.000		19.868.000	0	96,78		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0		0		0	0		
833.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.800.000		300.000	0	16,67		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		1		0	0		
834.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan			43.200.000		43.200.000	0	100		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan (Dokumen)	0		0		0	0		
835.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			12.043.200		3.872.000	0	32,15	PUSKESMAS KEMBANG SERI	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)					0	0		
836.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			12.043.200		3.872.000	0	32,15		
		Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0		0		0	0		
837.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			12.043.200		3.872.000	0	32,15		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0		0		0	0		
838.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.300.000		3.011.000	100	91,24	PUSKESMAS TANJUNG DALAM	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100	0		

839.	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		3.300.000		3.011.000	100	91,24		
		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1	0	0		
840.	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		3.300.000		3.011.000	100	91,24		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1	100	0		
841.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		722.012.665		591.516.075	88,2	81,93	PUSKESMAS TANJUNG DALAM	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					88,2	0		
842.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		722.012.665		591.516.075	88,2	81,93		
		Jumlah Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	76		70	0	0		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	332		36	0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	9		9	0	0		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	15		3	0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1	0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1	0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1	0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1	0	0		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	9		9	0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1	0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1	0	0		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1	0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1	0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1	0	0		

			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0	0		
843.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			34.000.000		33.300.000	92,11	97,94		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	76		70		92,11	0		
844.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			36.456.600		33.700.000	10,84	92,44		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	332		36		10,84	0		
845.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			22.500.000		22.500.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	9		9		100	0		
846.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			11.200.000		8.000.000	20	71,43		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	15		3		20	0		
847.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			142.260.000		58.464.000	100	41,1		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
848.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			8.400.000		8.400.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		100	0		
849.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			13.400.000		13.400.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		100	0		
850.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			5.600.000		4.200.000	100	75		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		100	0		
851.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			8.400.000		8.400.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	9		9		100	0		
852.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			87.220.000		83.992.000	100	96,3		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		100	0		
853.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			178.918.065		173.775.374	100	97,13		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
854.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			150.058.000		120.584.701	100	80,36		

		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		100	0		
855.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			6.000.000		5.700.000	100	95		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		100	0		
856.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			800.000		300.000	100	37,5		
		Terlaksananya pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		100	0		
857.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			16.800.000		16.800.000	100	100		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		100	0		
858.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			8.300.000		2.740.000	100	33,01	PUSKESMAS TANJUNG DALAM	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						100	0		
859.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			8.300.000		2.740.000	100	33,01		
		Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0	0		
860.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			8.300.000		2.740.000	100	33,01		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		100	0		
861.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.250.000		2.260.000	100	69,54	PUSKESMAS PEMATANG TIGA	
		terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			70		0	0		
862.	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			3.250.000		2.260.000	100	69,54		
		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
863.	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			3.250.000		2.260.000	100	69,54		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
864.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			946.603.833		732.302.951	87,29	77,36	PUSKESMAS PEMATANG TIGA	
		meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah kematian balita (Angka)			0		0	0		
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)			70		0	0		
			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0	0		
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)			30		0	0		

		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))		83,96		0	0		
		Angka keberhasilan pengobatan TB (Angka)		5		0	0		
		Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)		0		0	0		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)		90		0	0		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))		2,86		0	0		
		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		60		0	0		
		Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)		44,4		0	0		
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)		90		0	0		
865.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		946.603.833		732.302.951	87,29	77,36	
		Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	74	74		0	0		
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	794	356		0	0		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	10	11		0	0		
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	10	5		0	0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1		0	0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1		0	0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1		0	0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		0	0		
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	240	11		0	0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1		0	0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1		0	0		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1		0	0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1		0	0		

		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0	0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0	0		
866.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		49.000.000		31.360.000	100	64		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	74	74		100	0		
867.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		60.600.000		43.400.000	44,84	71,62		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	794	356		44,84	0		
868.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		6.000.000		4.000.000	110	66,67		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	10	11		110	0		
869.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		11.600.000		9.200.000	50	79,31		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	10	5		50	0		
870.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		165.584.000		112.834.500	100	68,14		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1		100	0		
871.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		4.200.000		2.800.000	100	66,67		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1		100	0		
872.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		8.800.000		6.200.000	100	70,45		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1		100	0		
873.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		2.800.000		600.000	100	21,43		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		100	0		
874.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		2.400.000		1.200.000	4,58	50		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	240	11		4,58	0		
875.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		104.632.475		89.320.000	100	85,37		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1		100	0		
876.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		347.575.358		291.855.416	100	83,97		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1		100	0		

877.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			150.274.000		117.053.035	100	77,89		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		100	0		
878.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			15.138.000		5.680.000	100	37,52		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		100	0		
879.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.200.000		-	100	0		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		100	0		
880.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			16.800.000		16.800.000	100	100		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		100	0		
881.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			7.100.000		3.760.000	100	52,96	PUSKESMAS PEMATANG TIGA	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)			95		0	0		
882.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.100.000		3.760.000	100	52,96		
		Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0	0		
883.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			7.100.000		3.760.000	100	52,96		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		100	0		
884.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.400.000		2.400.000	100	100	PUSKESMAS DESA JAMBU	
		Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Terpenuhi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)					0	0		
885.	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			2.400.000		2.400.000	100	100		
		Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
886.	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			2.400.000		2.400.000	100	100		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
887.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			625.588.484		553.297.080	80	88,44	PUSKESMAS DESA JAMBU	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan Dan Masyarakat	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)					0	0		
			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))					0	0		
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)					0	0		

			Angka keberhasilan pengobatan TB (Angka)				0	0		
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))				0	0		
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))				0	0		
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)				0	0		
			Jumlah kematian balita (Angka)				0	0		
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)				0	0		
			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))				0	0		
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)				0	0		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)				0	0		
888.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		625.588.484		553.297.080	80	88,44		
		persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	53		0	0	0		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	288		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	12		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	12		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		4		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		4		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		0		0	0	
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	12		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		4		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		0		0	0	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		0		0	0	

		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0	0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		0		0	0		
889.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		38.512.400		38.153.466	0	99,07		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	53		0	0	0		
890.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		29.000.000		27.200.000	0	93,79		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	288		0	0	0		
891.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		15.600.000		9.600.000	0	61,54		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	12		0	0	0		
892.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		10.000.000		8.000.000	0	80		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	12		0	0	0		
893.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		85.276.000		63.400.000	0	74,35		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		0	0	0		
894.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		9.800.000		9.800.000	400	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		4	400	0		
895.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		13.400.000		13.400.000	400	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		4	400	0		
896.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		14.500.000		13.700.000	0	94,48		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		0	0	0		
897.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		-		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	12		0	0	0		
898.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		63.700.000		57.900.000	400	90,89		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		4	400	0		
899.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		161.000.084		157.858.690	0	98,05		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		0	0	0		

900.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			110.300.000		102.084.924	0	92,55		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		0		0	0		
901.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			10.000.000		9.000.000	0	90		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		0		0	0		
902.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			54.100.000		35.000.000	0	64,7		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0	0		
903.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			10.400.000		8.200.000	0	78,85		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		0		0	0		
904.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			6.280.000		6.280.000	0	100	PUSKESMAS DESA JAMBU	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)					0	0		
905.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			6.280.000		6.280.000	0	100		
		Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		0		0	0		
906.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			6.280.000		6.280.000	0	100		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		0		0	0		
907.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.050.000		1.384.000	100	67,51	PUSKESMAS KARANG NANDING	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)					0	0		
908.	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			2.050.000		1.384.000	100	67,51		
		Jumlah dokumen administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
909.	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			2.050.000		1.384.000	100	67,51		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
910.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			685.083.189		618.333.173	94,63	90,26	PUSKESMAS KARANG NANDING	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)					0	0		
			Angka keberhasilan pengobatan TB (Angka)					0	0		
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))					0	0		

			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)				0	0		
			Jumlah kematian balita (Angka)				0	0		
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)				0	0		
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)				0	0		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)				0	0		
			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))				0	0		
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)				0	0		
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (%)				0	0		
			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))				0	0		
911.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		685.083.189		618.333.173	94,63	90,26		
		Persentase penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	52	48		0	0		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	250	245		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	8	6		0	0		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	10	3		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	15	12		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	3	3		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12	12		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	15	12		0	0		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	85	80		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	100	95		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	40	30		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	15	40		0	0		

			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	3		1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		12		0	0		
912.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			13.600.000		13.600.000	92,31	100		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	52		48		92,31	0		
913.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			39.330.000		38.700.000	98	98,4		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	250		245		98	0		
914.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			21.600.000		16.000.000	75	74,07		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	8		6		75	0		
915.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			7.800.000		5.800.000	30	74,36		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	10		3		30	0		
916.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			126.976.000		96.184.475	80	75,75		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	15		12		80	0		
917.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			16.500.000		16.500.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	3		3		100	0		
918.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			16.000.000		16.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		100	0		
919.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			5.200.000		5.200.000	80	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	15		12		80	0		
920.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			8.800.000		8.800.000	94,12	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	85		80		94,12	0		
921.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			72.916.000		70.610.000	95	96,84		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	100		95		95	0		
922.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			160.713.189		147.583.266	100	91,83		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		

923.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			139.448.000		127.955.432	75	91,76		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	40		30		75	0		
924.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			12.400.000		12.200.000	266,67	98,39		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	15		40		266,67	0		
925.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			600.000		-	33,33	0		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	3		1		33,33	0		
926.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			43.200.000		43.200.000	100	100		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		12		100	0		
927.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			4.432.000		4.250.000	20	95,89	PUSKESMAS KARANG NANDING	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)					0	0		
928.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.432.000		4.250.000	20	95,89		
		Jumlah dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	10		2		0	0		
929.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4.432.000		4.250.000	20	95,89		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	10		2		20	0		
930.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.000.000		4.531.000	0	90,62	PUSKESMAS SRIKUNCORO	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)					0	0		
931.	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			5.000.000		4.531.000	0	90,62		
		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0		1		0	0		
932.	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			5.000.000		4.531.000	0	90,62		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0		1		0	0		
933.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.257.654.411		1.112.805.558	91,11	88,48	PUSKESMAS SRIKUNCORO	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))					0	0		
			Angka keberhasilan pengobatan TB (Angka)					0	0		
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)					0	0		

934.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))		1.257.654.411	100	1.112.805.558	0	0	91,11	88,48		
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)					0	0				
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)					0	0				
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))					0	0				
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)					0	0				
			Jumlah kematian balita (Angka)					0	0				
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))					0	0				
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)					0	0				
934.	1.02.02.2.02	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	100	1.257.654.411	100	1.112.805.558	0	0	91,11	88,48		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	300		300		0	0				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	13		13		0	0				
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	15		10		0	0				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0	0				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0	0				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0	0				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0	0				
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	13		13		0	0				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0	0				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		0	0				
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0	0				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0	0				

		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0	0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0	0		
935.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		69.804.000		69.140.000	100	99,05		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	100		100		100	0		
936.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		69.200.000		69.200.000	100	100		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	300		300		100	0		
937.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		3.200.000		3.200.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	13		13		100	0		
938.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		9.200.000		7.200.000	66,67	78,26		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	15		10		66,67	0		
939.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		386.880.000		268.988.000	100	69,53		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		1		100	0		
940.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		2.600.000		2.000.000	100	76,92		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		1		100	0		
941.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		14.100.000		14.100.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		1		100	0		
942.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		6.474.400		2.000.000	100	30,89		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1		1		100	0		
943.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		15.000.000		15.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	13		13		100	0		
944.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		110.400.000		110.209.999	100	99,83		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		1		100	0		
945.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		346.152.211		341.673.329	100	98,71		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1		1		100	0		

946.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			177.843.800		163.694.230	100	92,04		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		100	0		
947.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			8.000.000		8.000.000	100	100		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		100	0		
948.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			400.000		-	0	0		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0	0		
949.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			38.400.000		38.400.000	100	100		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		100	0		
950.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			4.520.000		4.520.000	100	100	PUSKESMAS SRIKUNCORO	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)					0	0		
951.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.520.000		4.520.000	100	100		
		Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0	0		
952.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4.520.000		4.520.000	100	100		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		100	0		
953.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.500.000		4.002.000	100	88,93	PUSKESMAS PAGAR JATI	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			0		0	0		
954.	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			4.500.000		4.002.000	100	88,93		
		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
955.	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			4.500.000		4.002.000	100	88,93		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
956.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.351.843.289		1.196.588.918	89,87	88,52	PUSKESMAS PAGAR JATI	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))			0		0	0		
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)			0		0	0		
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)					0	0		

			Jumlah kematian balita (Angka)					0	0		
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)					0	0		
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (%)					0	0		
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))					0	0		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)					0	0		
			Angka keberhasilan pengobatan TB (Angka)					0	0		
			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))					0	0		
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)					0	0		
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))					0	0		
			957.	1.02.02.2.02				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	100		88		0	0			
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	480		480		0	0			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	10		8		0	0			
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	11		11		0	0			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0	0			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		0		0	0			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0	0			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0	0			
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	10		8		0	0			
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0	0			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		0	0			
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0	0			
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0	0			

		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0	0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0	0		
958.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		108.680.000		108.000.000	88	99,37		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	100		88		88	0		
959.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		127.000.000		117.000.000	100	92,13		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	480		480		100	0		
960.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		24.000.000		21.600.000	80	90		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10		8		80	0		
961.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		16.800.000		15.800.000	100	94,05		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	11		11		100	0		
962.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		294.472.000		207.858.000	100	70,59		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		1		100	0		
963.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		4.000.000		4.000.000	0	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0	0		
964.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		13.200.000		13.200.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		1		100	0		
965.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		8.200.000		600.000	100	7,32		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1		1		100	0		
966.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		8.000.000		8.000.000	80	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	10		8		80	0		
967.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		116.156.000		106.860.000	100	92		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		1		100	0		
968.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		388.676.569		366.289.770	100	94,24		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1		1		100	0		

969.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			187.758.720		173.381.148	100	92,34		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		100	0		
970.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			29.700.000		29.200.000	100	98,32		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		100	0		
971.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.200.000		800.000	100	66,67		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		100	0		
972.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			24.000.000		24.000.000	100	100		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		100	0		
973.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			8.800.000		6.600.000	100	75	PUSKESMAS PAGAR JATI	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)			0		0	0		
974.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			8.800.000		6.600.000	100	75		
		Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0	0		
975.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			8.800.000		6.600.000	100	75		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		100	0		
976.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.100.000		2.260.000	100	72,9	PUSKESMAS ATURAN MUMPO	
		Persentase Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi						100	0		
977.	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			3.100.000		2.260.000	100	72,9		
		Jumlah Dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
978.	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			3.100.000		2.260.000	100	72,9		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
979.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			964.517.287		879.363.908	99,76	91,17	PUSKESMAS ATURAN MUMPO	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Jumlah kematian balita (Angka)					0	0		
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)					0	0		

980.	1.02.02.2.02		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))				0	0		
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)				0	0		
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)				0	0		
			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))				0	0		
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)				0	0		
			Angka keberhasilan pengobatan TB (Angka)				0	0		
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))				0	0		
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)				0	0		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		964.517.287		879.363.908	99,76	91,17		
		Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	83	80		0	0		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	475	475		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	13	13		0	0		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	8	8		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	13	13		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1		0	0		

			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0	0		
981.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			92.336.000		92.336.000	96,39	100		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	83		80		96,39	0		
982.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			57.600.000		51.600.000	100	89,58		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	475		475		100	0		
983.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			16.000.000		15.600.000	100	97,5		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	13		13		100	0		
984.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			17.200.000		17.200.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	8		8		100	0		
985.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			175.924.000		130.220.000	100	74,02		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
986.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			8.000.000		8.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		100	0		
987.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			21.000.000		21.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		100	0		
988.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			4.915.000		1.200.000	100	24,42		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		100	0		
989.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			10.400.000		10.400.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	13		13		100	0		
990.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			95.870.950		93.056.000	100	97,06		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		100	0		
991.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			235.607.337		231.685.482	100	98,34		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
992.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			166.864.000		148.266.426	100	88,85		

		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		100	0		
993.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			27.600.000		25.200.000	100	91,3		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		100	0		
994.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.600.000		-	100	0		
		Terlaksananya pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		100	0		
995.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			33.600.000		33.600.000	100	100		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		100	0		
996.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			3.490.600		-	0	0	PUSKESMAS ATURAN MUMPO	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Mayarakat Bidang Kesehatan						0	0		
997.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.490.600		-	0	0		
		Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		0		0	0		
998.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			3.490.600		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		0		0	0		
999.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.250.000		2.250.000	100	52,94	PUSKESMAS LUBUK UNEN	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi						100	0		
1000.	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			4.250.000		2.250.000	100	52,94		
		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
1001.	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			4.250.000		2.250.000	100	52,94		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
1002.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			875.954.380		717.160.932	99,45	81,87	PUSKESMAS LUBUK UNEN	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat						99,45	0		
1003.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			875.954.380		717.160.932	99,45	81,87		
		Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	101		101		0	0		

		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1039		1.039		0	0		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	16		14		0	0		
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	90		7		0	0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0	0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0		1		0	0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0		1		0	0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0		1		0	0		
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0		1		0	0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0		1		0	0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		4		0	0		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0		1		0	0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1305		1		0	0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		0		0	0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	405		1		0	0		
1004.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		38.660.000		38.000.000	100	98,29		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	101	101		100	0		
1005.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		47.200.000		36.600.000	100	77,54		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1039	1.039		100	0		
1006.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		10.000.000		7.000.000	87,5	70		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	16	14		87,5	0		
1007.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		5.600.000		4.400.000	7,78	78,57		

		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	90		7		7,78	0		
1008.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			163.440.000		93.531.000	100	57,23		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
1009.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			2.800.000		2.800.000	0	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0		1		0	0		
1010.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			21.000.000		15.800.000	0	75,24		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0		1		0	0		
1011.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			8.975.000		5.000.000	0	55,71		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0		1		0	0		
1012.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			8.800.000		8.600.000	0	97,73		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0		1		0	0		
1013.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			81.275.000		66.500.000	0	81,82		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0		1		0	0		
1014.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			314.732.380		308.517.956	400	98,03		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		4		400	0		
1015.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			128.472.000		88.211.976	0	68,66		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0		1		0	0		
1016.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			11.000.000		10.000.000	0,08	90,91		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1305		1		0,08	0		
1017.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.600.000		-	0	0		
		Terlaksananya pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		0		0	0		
1018.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan			32.400.000		32.200.000	0,25	99,38		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan (Dokumen)	405		1		0,25	0		
1019.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			11.649.200		2.760.000	7,14	23,69	PUSKESMAS LUBUK UNEN	

		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					7,14	0		
1020.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		11.649.200		2.760.000	7,14	23,69		
		Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14		1		0	0		
1021.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		11.649.200		2.760.000	7,14	23,69		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14		1		7,14	0		
1022.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.600.000		2.372.500	100	35,95	PUSKESMAS KARANG TINGGI	
		Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah yang Terprnuhi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)				0	0		
1023.	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		6.600.000		2.372.500	100	35,95		
		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1			0	0		
1024.	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		6.600.000		2.372.500	100	35,95		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1			100	0		
1025.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		1.015.360.642		747.066.138	70,17	73,58	PUSKESMAS KARANG TINGGI	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))				0	0		
			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))				0	0		
			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))				0	0		
			Jumlah kematian balita (Angka)				0	0		
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)				0	0		
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)				0	0		
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)				0	0		
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)				0	0		
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))				0	0		
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)				0	0		
			Angka keberhasilan pengobatan TB (Angka)				0	0		
1026.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.015.360.642		747.066.138	70,17	73,58		

		Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk ukmdan ukp rujukan tingkat daerah kkabupaten /kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	123		122		0	0		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	848		848		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	12		12		0	0		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	8		8		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	6		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	2		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	2		1		0	0		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	300		300		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	5		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	6		1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0	0		
1027.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			57.600.000		57.600.000	99,19	100		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	123		122		99,19	0		
1028.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			63.000.000		24.300.000	100	38,57		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	848		848		100	0		
1029.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			16.800.000		16.800.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	12		12		100	0		

1030.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			6.800.000		6.800.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	8		8		100	0		
1031.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			188.990.000		70.090.000	16,67	37,09		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	6		1		16,67	0		
1032.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			4.000.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		0		0	0		
1033.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			8.000.000		6.000.000	50	75		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	2		1		50	0		
1034.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.564.500		-	50	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	2		1		50	0		
1035.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			3.200.000		3.200.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	300		300		100	0		
1036.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			79.440.000		77.440.000	20	97,48		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	5		1		20	0		
1037.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			391.406.142		372.630.677	100	95,2		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
1038.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			158.360.000		83.005.461	16,67	52,42		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	6		1		16,67	0		
1039.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			10.000.000		9.600.000	100	96		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		100	0		
1040.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			2.000.000		400.000	100	20		
		Terlaksananya pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		100	0		
1041.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan			19.200.000		19.200.000	100	100		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan (Dokumen)	1		1		100	0		
1042.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			4.506.400		-	0	0	PUSKESMAS KARANG TINGGI	

		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)				0	0		
1043.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4.506.400		-	0	0		
		Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	2		0	0	0		
1044.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		4.506.400		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	2		0	0	0		
1045.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.400.000		1.676.000	0	31,04	PUSKESMAS SEKAYUN
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)				0	0		
1046.	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		5.400.000		1.676.000	0	31,04		
		jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	7500000		1	0	0		
1047.	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		5.400.000		1.676.000	0	31,04		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	7500000		1	0	0		
1048.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.186.539.123		966.467.115	100	81,45	PUSKESMAS SEKAYUN
		Meningkatnya Kualitas kesehatan perorang dan masyarakat	Angka keberhasilan pengobatan TB (Angka)				0	0		
			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))				0	0		
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)				0	0		
			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))				0	0		
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))				0	0		
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)				0	0		
			Jumlah Kematian Ibu (Angka)				0	0		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)				0	0		
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)				0	0		
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)				0	0		
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))				0	0		
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)				0	0		

1049.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.186.539.123		966.467.115	100	81,45		
		persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	110	110		0	0		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	532	532		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	8	8		0	0		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	16	16		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	8	8		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1	1		0	0		
1050.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		105.564.000		105.552.000	100	99,99		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	110	110		100	0		
1051.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		36.000.000		30.400.000	100	84,44		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	532	532		100	0		
1052.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		17.600.000		17.600.000	100	100		

		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	8		8		100	0		
1053.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			4.800.000		4.800.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	16		16		100	0		
1054.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			218.980.000		117.226.100	100	53,53		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
1055.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			4.200.000		4.000.000	100	95,24		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		100	0		
1056.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			19.600.000		19.600.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		100	0		
1057.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			5.800.000		3.000.000	100	51,72		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		100	0		
1058.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			8.800.000		4.000.000	100	45,45		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	8		8		100	0		
1059.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			132.854.200		116.500.000	100	87,69		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		100	0		
1060.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			435.160.923		354.275.287	0	81,41		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0		1		0	0		
1061.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			154.360.000		147.593.728	100	95,62		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		100	0		
1062.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			10.920.000		10.720.000	100	98,17		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		100	0		
1063.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.100.000		400.000	100	36,36		
		Terlaksananya pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		100	0		
1064.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			30.800.000		30.800.000	100	100		

		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		100	0		
1065.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			6.612.800		6.244.500	100	94,43	PUSKESMAS SEKAYUN	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)					0	0		
1066.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			6.612.800		6.244.500	100	94,43		
		jumlah dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0	0		
1067.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			6.612.800		6.244.500	100	94,43		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		100	0		
1068.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.900.000		3.000.000	100	76,92	PUSKESMAS SUKARAMI	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			400		0	0		
1069.	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			3.900.000		3.000.000	100	76,92		
		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
1070.	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			3.900.000		3.000.000	100	76,92		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
1071.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			828.743.295		568.767.840	77,58	68,63	PUSKESMAS SUKARAMI	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))			4,43		0	0		
			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))					0	0		
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)			50		0	0		
			Jumlah kematian balita (Angka)			0		0	0		
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)			0		0	0		
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)			36		0	0		
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))			80		0	0		
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)			60		0	0		
			Angka keberhasilan pengobatan TB (Angka)			66		0	0		
			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0	0		

			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)		85		0	0		
1072.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		828.743.295		568.767.840	77,58	68,63		
		Jumlah dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	180	121		0	0		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	528	405		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	312	12		0	0		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	50	4		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	63	5		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1	1		0	0		
1073.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		58.292.800		46.344.000	67,22	79,5		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	180	121		67,22	0		
1074.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		52.800.000		43.700.000	76,7	82,77		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	528	405		76,7	0		
1075.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		31.200.000		29.500.000	3,85	94,55		

		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	312		12		3,85	0		
1076.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			5.000.000		1.200.000	8	24		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	50		4		8	0		
1077.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			147.068.000		33.369.550	100	22,69		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
1078.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			3.500.000		3.100.000	100	88,57		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		100	0		
1079.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			19.800.000		19.400.000	100	97,98		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		100	0		
1080.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			5.301.000		2.000.000	100	37,73		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		100	0		
1081.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			6.300.000		6.300.000	7,94	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	63		5		7,94	0		
1082.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			83.500.000		70.470.000	100	84,4		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		100	0		
1083.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			243.582.215		192.588.355	100	79,07		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
1084.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			130.999.280		91.595.935	100	69,92		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		100	0		
1085.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			3.600.000		1.700.000	100	47,22		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		100	0		
1086.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.800.000		-	100	0		
		Terlaksananya pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		100	0		
1087.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			36.000.000		27.500.000	100	76,39		

		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		100	0		
1088.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			5.731.600		2.800.000	100	48,85	PUSKESMAS SUKARAMI	
		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)					0	0		
1089.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			5.731.600		2.800.000	100	48,85		
		Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0	0		
1090.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			5.731.600		2.800.000	100	48,85		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		100	0		
1091.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			16.800.000		7.420.000	100	44,17	PUSKESMAS PEKIK NYARING	
		presentasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, keuangan, barang milik daerah, dan tata kelola pemerintahan OPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)					0	0		
1092.	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			16.800.000		7.420.000	100	44,17		
		Perencanaan pengolahan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
1093.	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			16.800.000		7.420.000	100	44,17		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
1094.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.489.972.671		2.044.525.402	100	82,11	PUSKESMAS PEKIK NYARING	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))					0	0		
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))					0	0		
			Angka keberhasilan pengobatan TB (Angka)					0	0		
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)					0	0		
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))					0	0		
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)					0	0		
			Jumlah kematian balita (Angka)					0	0		
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)					0	0		
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)					0	0		
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)					0	0		

			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))				0	0		
1095.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.489.972.671		2.044.525.402	100	82,11		
		Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	96		0	0		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	36		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0	7		0	0		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0	90		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0	1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	0	1		0	0		
1096.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		68.400.000		61.500.000	0	89,91		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	96		0	0		
1097.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		80.360.000		52.600.000	0	65,46		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	36		0	0		
1098.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		36.000.000		32.600.000	0	90,56		

		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0		7		0	0		
1099.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			25.000.000		24.000.000	0	96		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0		90		0	0		
1100.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			343.250.000		237.989.500	100	69,33		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
1101.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			6.200.000		1.400.000	0	22,58		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0		1		0	0		
1102.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			37.900.000		36.900.000	100	97,36		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		100	0		
1103.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			39.359.275		28.700.000	100	72,92		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		100	0		
1104.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			4.200.000		4.200.000	0	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0		1		0	0		
1105.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			197.884.000		164.500.000	0	83,13		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0		1		0	0		
1106.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1.289.284.196		1.165.340.717	100	90,39		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
1107.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			303.535.200		182.195.185	0	60,02		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0		1		0	0		
1108.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			12.400.000		10.900.000	0	87,9		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0		1		0	0		
1109.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			3.000.000		2.100.000	0	70		
		Terlaksananya pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		1		0	0		
1110.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			43.200.000		39.600.000	0	91,67		

		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	0	1		0	0		
1111.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			6.480.000		6.144.000	0	94,81	PUSKESMAS PEKIK NYARING
		Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)					0	0	
1112.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.480.000		6.144.000	0	94,81	
		Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0	1			0	0	
1113.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			6.480.000		6.144.000	0	94,81	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0	1			0	0	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			110.032.816.914		70.727.346.748	66,94	64,28	
1114.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.344.089.575		6.817.850.842	70	72,96	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Persentase terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (%)	100	100			100	0	
			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)		0			0	0	
1115.	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			122.025.000		122.025.000	100	100	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2			0	0	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1			0	0	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1			0	0	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1			0	0	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1			0	0	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1			0	0	
1116.	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			50.719.000		50.719.000	100	100	

		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		100	0		
1117.	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			11.106.000		11.106.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1118.	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			45.500.000		45.500.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1119.	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1120.	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			8.000.000		8.000.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1121.	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.700.000		6.700.000	100	100		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1122.	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.514.320.575		5.111.159.866	108,18	78,46		
		Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	53		66		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		1		0	0		
1123.	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.514.320.575		5.111.159.866	124,53	78,46		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	53		66		124,53	0		
1124.	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1125.	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			-		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		1		100	0		
1126.	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-		-	100	0		

		Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		4		0	0		
1127.	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-	100	0		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		4		100	0		
1128.	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			65.000.000		-	0	0		
		Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		0		0	0		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8		0		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	320		0		0	0		
1129.	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			65.000.000		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		0		0	0		
1130.	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8		0		0	0		
1131.	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	320		0		0	0		
1132.	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			841.618.220		516.546.791	71,48	61,38		
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		12		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12		10		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		11		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		18		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	50		1		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		3		0	0		
1133.	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			17.000.000		12.000.000	200	70,59		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		12		200	0		
1134.	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.000.000		5.000.000	83,33	100		

		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12		10		83,33	0		
1135.	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100.000.000		99.506.000	91,67	99,51		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		11		91,67	0		
1136.	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			100.000.000		99.800.150	90	99,8		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		18		90	0		
1137.	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			110.000.000		10.000.000	2	9,09		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	50		1		2	0		
1138.	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			114.995.000		10.000.000	8,33	8,7		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		1		8,33	0		
1139.	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			394.623.220		280.240.641	25	71,01		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		3		25	0		
1140.	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			214.875.780		212.356.200	75	98,83		
		Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		1		0	0		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		6		0	0		
1141.	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			177.360.000		177.258.000	50	99,94		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		1		50	0		
1142.	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			37.515.780		35.098.200	100	93,56		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		6		100	0		
1143.	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			992.030.000		513.081.485	56,25	51,72		
		Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		0		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		0	0		
1144.	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000.000		4.000.000	100	80		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		

1145.	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			126.800.000		66.795.969	100	52,68		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
1146.	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.000.000		-	0	0		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		0		0	0		
1147.	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			855.230.000		442.285.516	25	51,72		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		25	0		
1148.	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			594.220.000		342.681.500	50	57,67		
		Terseleenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	35		35		0	0		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	4		4		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		0		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
1149.	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			353.020.000		101.481.500	100	28,75		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	35		35		100	0		
1150.	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			241.200.000		241.200.000	100	100		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	4		4		100	0		
1151.	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		0		0	0		
1152.	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
1153.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			4.503.617.395		3.768.058.000	99,69	83,67	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten yang mendapat penanganan (%)			0		0	0		
			Persentase desa yg mendapat penanganan infrastruktur pengendali banjir (%)			0		0	0		
			Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi/ditingkatkan (Ha)	286,61		217,84		76,01	0		

1154.	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		270.866.000		116.026.000	100	42,84		
		Terselenggaranya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2		2	0	0		
1155.	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota		270.866.000		116.026.000	100	42,84		
		Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2		2	100	0		
1156.	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		4.232.751.395		3.652.032.000	99,62	86,28		
		Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	0,273		0,27	0	0		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0,272		0,27	0	0		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1		1	0	0		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0,648		0,65	0	0		
1157.	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		773.598.045		646.662.000	98,9	83,59		
		Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	0,273		0,27	98,9	0		
1158.	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		731.530.250		581.069.000	99,26	79,43		
		Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0,272		0,27	99,26	0		
1159.	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		2.633.123.100		2.333.501.000	100	88,62		
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1		1	100	0		
1160.	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		94.500.000		90.800.000	100,31	96,08		
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0,648		0,65	100,31	0		
1161.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			21.562.200.138		19.472.628.600	75	90,31	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki sambungan rumah (SR) air minum layak (%)	15,44		25,67	166,26	0		
			Jumlah Sumber Air Baku yang dibangun (Unit)	1		0	0	0		
			Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan (%)			0	0	0		
1162.	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		21.562.200.138		19.472.628.600	75	90,31		
		Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	2		0	0	0		

			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1		1		0	0		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	10		10		0	0		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	3000		3.000		0	0		
1163.	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan			-		-	0	0		
1164.		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	2		0		0	0		
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			624.827.788		49.000.000	100	7,84		
1165.		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1		1		100	0		
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			5.299.159.850		4.681.938.600	100	88,35		
1166.		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	10		10		100	0		
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			15.638.212.500		14.741.690.000	100	94,27		
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	3000		3.000		100	0		
1167.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			4.473.100.000		4.068.600.000	110	90,96	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang dibangun MCK (%)	4.82		0,24		4,98	0		
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak (%)			0		0	0		
			Persentase desa yang dibangun sanitasi (%)	23.61		19,51		82,63	0		
1168.	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota			4.473.100.000		4.068.600.000	110	90,96		
		Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan (MÂ³/ Hari)	1		1		0	0		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)	5		6		0	0		
1169.	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat			775.000.000		770.500.000	100	99,42		
1170.		Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan (MÂ³/ Hari)	1		1		100	0		
	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			3.698.100.000		3.298.100.000	120	89,18		

		Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)	5		6	120	0		
1171.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			10.362.550.000		5.964.363.500	100	57,56	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)			0	0	0		
			Persentase Gedung daerah yang dibangun/ditingkatkan (persen)	100		77,02	77,02	0		
1172.	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			10.362.550.000		5.964.363.500	100	57,56	
		Terselenggaranya penataan bangunan gedung	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	7		7	0	0		
1173.	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			10.362.550.000		5.964.363.500	100	57,56	
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	7		7	100	0		
1174.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			58.406.106.406		29.419.308.406	100	50,37	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)			54,43	0	0		
			Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Persen)	76,11		54,43	71,51	0		
			Persentase Panjang Jalan kabupaten dalam Kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat (Persen)	23,89		45,57	9,25	0		
1175.	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			58.406.106.406		29.419.308.406	100	50,37	
		Terselenggaranya penanganan jalan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	6		6	0	0		
			Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	0,6		0,6	0	0		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	18,28		18,28	0	0		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	4		4	0	0		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	1		1	0	0		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	50		50	0	0		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1,5		1,5	0	0		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1,5		1,5	0	0		

1176.	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			3.637.657.200		1.900.702.200	100	52,25		
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	6		6		100	0		
1177.	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan			1.499.605.000		1.481.440.000	100	98,79		
		Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	0.6		0,6		100	0		
1178.	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan			42.978.815.276		17.596.927.276	100	40,94		
		Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	18.28		18,28		100	0		
1179.	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan			1.173.665.000		1.090.100.000	100	92,88		
		Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	4		4		100	0		
1180.	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan			5.196.306.000		4.926.241.000	100	94,8		
		Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	1		1		100	0		
1181.	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			629.347.930		206.497.930	100	32,81		
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	50		50		100	0		
1182.	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan			1.905.335.000		1.761.870.000	100	92,47		
		Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.5		1,5		100	0		
1183.	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan			1.385.375.000		455.530.000	100	32,88		
		Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.5		1,5		100	0		
1184.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			449.649.000		291.527.000	25	64,83	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi (Orang)			0		0	0		
			Persentase pemberdayaan jasa konstruksi (Instansi Pemerintah, Perseorangan dan Badan Usaha) (%)	100		65,85		65,85	0		
1185.	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			-		-	0	0		
		Terselenggaranya pengembangan jasa konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	60		0		0	0		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	10		0		0	0		
1186.	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis			-		-	0	0		
		Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	60		0		0	0		
1187.	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi			-		-	0	0		

		Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	10		0		0	0		
1188.	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			382.422.000		224.400.000	100	58,68		
		Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1		1		0	0		
1189.	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota			382.422.000		224.400.000	100	58,68		
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100	0		
1190.	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			67.227.000		67.127.000	20	99,85		
		Terselenggaranya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	35		35		0	0		
			Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	30		0		0	0		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	50		0		0	0		
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	10		0		0	0		
			Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun (Dokumen)	1		0		0	0		
1191.	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			32.227.000		32.227.000	100	100		
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	35		35		100	0		
1192.	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	30		0		0	0		
1193.	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi			35.000.000		34.900.000	0	99,71		
		Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	50		0		0	0		
1194.	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	10		0		0	0		
1195.	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi			-		-	0	0		

		Tersusunnya SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun (Dokumen)	1		0		0	0		
1196.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			931.504.400		925.010.400	25	99,3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)			0		0	0		
			Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan penataan ruang (%)	8,7		8,7		100	0		
1197.	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			50.604.000		50.604.000	0	100		
		Terselenggaranya penyusunan dokumen rencana tata ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0		
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	1		0		0	0		
1198.	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang			-		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0		
1199.	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0		
1200.	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota			50.604.000		50.604.000	0	100		
		Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	1		0		0	0		
1201.	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			845.717.400		839.223.400	100	99,23		
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	1		1		0	0		
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	2		2		0	0		
1202.	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar			830.717.400		824.223.400	100	99,22		
		Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	1		1		100	0		
1203.	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang			15.000.000		15.000.000	100	100		
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	2		2		100	0		
1204.	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			20.365.000		20.365.000	0	100		

		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	20		0		0	0		
1205.	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang			20.365.000		20.365.000	0	100		
		Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	1		0		0	0		
1206.	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			-		-	0	0		
		Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	20		0		0	0		
1207.	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota			14.818.000		14.818.000	0	100		
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	4		0		0	0		
1208.	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang			14.818.000		14.818.000	0	100		
		Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	4		0		0	0		
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			3.328.356.383		2.859.125.536	95,94	85,9		
1209.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.960.484.383		2.525.529.586	99,57	85,31	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Optimalnya Tata Kelola pemerintahan yang berkualitas	Persentase terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (Perkim) (persen)	100				0	0		
			Persentase terwujudnya program penunjang urusan pemerintah daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (%)	100		100		100	0		
			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			25		0	0		
1210.	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.890.000		6.888.850	90,7	99,98		
		Adanya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	43		43		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	43		23		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
1211.	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			500.000		499.770	100	99,95		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1212.	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			3.080.000		3.079.770	100	99,99		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	43		43		100	0		
1213.	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.550.000		1.549.770	53,49	99,99		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	43		23		53,49	0		
1214.	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			500.000		499.770	100	99,95		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1215.	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.260.000		1.259.770	100	99,98		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1216.	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.551.580.564		2.188.505.747	104	85,77		
		Adanya Laporan Keuangan yang Berkualitas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		28		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12		0		0	0		
1217.	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.550.090.564		2.187.015.747	112	85,76		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		28		112	0		
1218.	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.490.000		1.490.000	200	100		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		2		200	0		
1219.	1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			-		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12		0		0	0		

1220.	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			32.000.000		32.000.000	100	100		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang berkualitas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		0	0		
1221.	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			32.000.000		32.000.000	100	100		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		100	0		
1222.	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			138.783.819		118.083.459	116,67	85,08		
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		2		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		2		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	730		730		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		2		0	0		
1223.	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.389.548		6.389.548	200	86,47		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		2		200	0		
1224.	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
1225.	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			28.862.021		28.295.300	200	98,04		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		2		200	0		
1226.	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			8.532.250		8.500.000	0	99,62		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0		2		0	0		
1227.	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			19.000.000		19.000.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	730		730		100	0		
1228.	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			-		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0	0		
1229.	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			75.000.000		55.898.611	200	74,53		

		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		2		200	0		
1230.	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			24.200.000		24.200.000	0	100		
		Terlaksana Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50		0		0	0		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		0		0	0		
1231.	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-	0	0		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50		0		0	0		
1232.	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			24.200.000		24.200.000	0	100		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		0		0	0		
1233.	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			142.540.000		91.861.530	75	64,45		
		Terlaksana Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36		9		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
1234.	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			500.000		500.000	100	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
1235.	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			31.200.000		18.601.530	25	59,62		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36		9		25	0		
1236.	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			110.840.000		72.760.000	100	65,64		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
1237.	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64.490.000		63.990.000	200	99,22		
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		20		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15		30		0	0		
1238.	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			55.750.000		55.750.000	200	100		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		20		200	0		
1239.	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			8.740.000		8.240.000	200	94,28		

		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15		30		200	0		
1240.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			365.122.000		330.845.950	100	90,61	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	persentase penanganan rumah tidak layak huni (persen)	9		9		100	0		
			Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)			345		0	0		
1241.	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			1.140.000		1.140.000	100	100		
		Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1		2		0	0		
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat)	10		0		0	0		
1242.	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			1.140.000		1.140.000	200	100		
		Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1		2		200	0		
1243.	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh			-		-	0	0		
		Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat)	10		0		0	0		
1244.	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			363.982.000		329.705.950	100	90,58		
		Tersedianya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	15		15		0	0		
1245.	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			363.982.000		329.705.950	100	90,58		
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	15		15		100	0		
1246.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			-		-	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
								0	0		
1247.	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	15		0		0	0		
1248.	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			-		-	0	0		

		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	15		0		0	0		
1249.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			2.750.000		2.750.000	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)			50		0	0		
1250.	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			2.750.000		2.750.000	100	100		
		Terbangunnya PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen)	5		5		0	0		
1251.	1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan			2.750.000		2.750.000	100	100		
		Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen)	5		5		100	0		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			18.379.495.896		13.758.685.895	80,31	74,86		
1252.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.061.942.948		5.115.915.795	90,91	72,44	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		Terlaksana Pelayanan Penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi	Persentase terlaksananya penunjang urusan daerah kab/kota (Satpol pp) (%)	100		100		100	0		
			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			100		0	0		
1253.	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.100.000		2.100.000	100	100		
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		2		0	0		
1254.	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			700.000		700.000	100	100		

		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
1255.	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			300.000		300.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1256.	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			300.000		300.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1257.	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			300.000		300.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1258.	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			300.000		300.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1259.	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			200.000		200.000	100	100		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		2		100	0		
1260.	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.232.637.448		4.230.884.255	100	80,86		
		Terlaksana Pelayanan Penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38		38		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		4		0	0		
1261.	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.224.653.948		4.226.176.255	100	80,89		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38		38		100	0		
1262.	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			4.903.000		1.627.500	100	33,19		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1263.	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			3.080.500		3.080.500	100	100		

		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		4		100	0		
1264.	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			17.000.000		-	0	0		
		Persentase Terlaksananya Administrasi umum Perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0	0		
1265.	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			17.000.000		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0	0		
1266.	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			36.596.000		26.596.000	85,71	72,67		
		Persentase Terlaksananya Administrasi umum Perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
1267.	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.000.000		1.000.000	100	100		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
1268.	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
1269.	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.000.000		5.000.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
1270.	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000		1.000.000	100	100		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
1271.	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.000.000		4.000.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100	0		
1272.	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			13.000.000		3.000.000	100	23,08		

1273.		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100	0		
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12.596.000		12.596.000	100	100		
1274.		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.485.869.500		569.260.800	100	38,31		
		persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
1275.	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			200.000		200.000	100	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
1276.	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			14.400.000		6.171.000	100	42,85		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
1277.	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.471.269.500		562.889.800	100	38,26		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
1278.	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			287.740.000		287.074.740	100	99,77		
		persentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12		12		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0	0		
1279.	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			87.740.000		87.740.000	100	100		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12		12		100	0		
1280.	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			200.000.000		199.334.740	100	99,67		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100	0		
1281.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			411.410.500		364.665.000	76,92	88,64	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		Meningkatnya penanganan gangguan ketertaman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)			100		0	0		
			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)			100		0	0		

1282.	1.05.02.2.01		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)		100		0	0		
			Cakupan Pelanggaran Gangguan Trantibum yang terselesaikan (%)	100	100		100	0		
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)		100		0	0		
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		373.328.500		328.155.000	66,67	87,9		
		Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	157	0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	6	6		0	0		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	16	16		0	0		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	4	0		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	1		0	0		
			Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1	0		0	0		
1283.	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota		14.500.000		14.500.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota (Dokumen)	1	1		100	0		
1284.	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		4.550.000		4.550.000	100	100		

		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1		1		100	0		
1285.	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			-		-	0	0		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	157		0		0	0		
1286.	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			10.000.000		10.000.000	100	100		
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1		1		100	0		
1287.	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			4.500.000		4.500.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	6		6		100	0		
1288.	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			277.000.000		277.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	16		16		100	0		
1289.	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			24.528.500		-	0	0		
		Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	4		0		0	0		
1290.	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah			38.250.000		17.605.000	100	46,03		
		Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1		1		100	0		
1291.	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			-		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1		0		0	0		

1292.	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			19.590.000		19.590.000	100	100		
		persentase perda dan perkara yang ditegakkan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
1293.	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			-		-	100	0		
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
1294.	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			9.750.000		9.750.000	100	100		
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1		1		100	0		
1295.	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			9.840.000		9.840.000	100	100		
		Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
1296.	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			18.492.000		16.920.000	100	91,5		
		persentase pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1		1		0	0		
1297.	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			18.492.000		16.920.000	100	91,5		
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1		1		100	0		
1298.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.866.081.501		3.187.893.987	119,64	82,46	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			100		0	0		
			Persentase Terwujudnya Pogram Penunjang Urusan Daerahkab/Kota Yag Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD (Persen)	92		92		100	0		
			Persentase terwujudnya program penunjang urusan daerah kab/kota yang mendukung kelancaran tugas dan fungsni OPD (Bpbd) (persen)	92				0	0		
1299.	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.500.000		-	0	0		
		Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		0		0	0		
1300.	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-		-	0	0		
1301.		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		-	0	0		
1302.		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			9.500.000		-	0	0		
1303.		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			-		-	0	0		
1304.		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-	0	0		
1305.		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		0		0	0		
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.124.458.501		2.488.283.945	433,33	79,64		
		Jumlah Laporan Keuangan yang terlaksana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	23		276		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	4		0		0	0		

1306.	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.113.435.501		2.477.399.545	1200	79,57		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23		276		1200	0		
1307.	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			11.023.000		10.884.400	100	98,74		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1308.	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			-		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		0		0	0		
1309.	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25.000.000		24.999.975	50	100		
		Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	23		23		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		0	0		
1310.	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			25.000.000		24.999.975	100	100		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	23		23		100	0		
1311.	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		0	0		
1312.	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			107.610.300		95.499.180	85,71	88,75		
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
1313.	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			25.000.000		25.000.000	100	100		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		

1314.	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
1315.	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			21.000.000		20.948.790	100	99,76		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
1316.	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			3.621.000		2.983.510	100	82,39		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
1317.	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.517.500		4.500.000	100	99,61		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100	0		
1318.	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			7.500.000		6.095.080	100	81,27		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100	0		
1319.	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			45.971.800		35.971.800	100	78,25		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1320.	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	0	0		
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
1321.	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
1322.	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			264.425.500		259.368.097	100	98,09		
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
1323.	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000		1.000.000	100	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
1324.	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			44.045.500		42.388.097	100	96,24		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
1325.	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			219.380.000		215.980.000	100	98,45		

		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
1326.	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			335.087.200		319.742.790	190,48	95,42		
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14		52		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7		7		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0	0		
1327.	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			181.354.200		172.380.590	371,43	95,05		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14		52		371,43	0		
1328.	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			16.150.000		16.150.000	100	100		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7		7		100	0		
1329.	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			137.583.000		131.212.200	100	95,37		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100	0		
1330.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			155.873.000		100.169.150	14,48	64,26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat serta meningkatkan penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)			0		0	0		
			Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)			0		0	0		
			Persentase sarana dan prasarana yang direhabilitasi (persen)	33		33		100	0		
			Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)			0		0	0		
			Persentase Dokumen Rencana Panangulangan bencana (persen)	0		0		0	0		
			Indek Resiko Bencana (Indek)	173,15		173,15		100	0		
			Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (persen)	100		100		100	0		
			Persentase masyarakat yang diberi pemahaman pengurangan resiko bencana (persen)	0.16		0,16		100	0		
			Persentase desa tangguh bencana (persen)	7.58		0		0	0		
			Persentase sekolah aman bencana (persen)	83.33		0		0	0		

1331.	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			-		-	0	0		
		Persentase Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/ Kota (Orang)	150		0		0	0		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	150		0		0	0		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/ Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	35		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	11		0		0	0		
1332.	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			-		-	0	0		
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/ Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/ Kota (Orang)	150		0		0	0		
1333.	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	150		0		0	0		
1334.	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota			-		-	0	0		
		Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/ Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/ Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	35		0		0	0		
1335.	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota			-		-	0	0		
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0	0		
1336.	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota			-		-	0	0		

		Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0	0		
1337.	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	11		0		0	0		
1338.	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			137.373.000		81.823.900	29,67	59,56		
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1500		670		0	0		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	300		44		0	0		
1339.	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			92.373.000		61.823.900	44,67	66,93		
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1500		670		44,67	0		
1340.	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			45.000.000		20.000.000	14,67	44,44		
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	300		44		14,67	0		
1341.	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			18.500.000		18.345.250	33,33	99,16		
		Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	75		0		0	0		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1		1		0	0		
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0	0		
1342.	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	75		0		0	0		
1343.	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			18.500.000		18.345.250	100	99,16		

		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1		1		100	0		
1344.	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota			-		-	0	0		
		Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0	0		
1345.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.884.737.947		3.958.509.463	79,32	81,04	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
		Meningkatnya kualitas kinerja bidang Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum OPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan daerah kab/kota (Damkar) (persen)	100		100		100	0		
			Nilai Evaluasi SAKIP (Predikat)					0	0		
1346.	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.102.000		2.497.000	100	80,5		
		Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
1347.	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.700.000		2.497.000	100	92,48		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		100	0		
1348.	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			200.000		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1349.	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		-	100	0		

		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1350.	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1351.	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			202.000		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1352.	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1353.	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.535.134.747		3.711.305.888	216,67	81,83		
		Persentase terlaksananya Administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		90		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2		2		0	0		
1354.	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.535.134.747		3.711.305.888	450	81,83		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		90		450	0		
1355.	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1356.	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2		2		100	0		
1357.	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-		-	100	0		
		Persentase terlaksananya Administrasi BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		0	0		

1358.	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-	-	100	0		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1	100	0		
1359.	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	0	0		
		persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		0	0	0		
1360.	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-	-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		0	0	0		
1361.	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			38.260.000	25.532.000	33,33	66,73		
		persentase terlaksananya administrasi umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1	0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0	0	0		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		0	0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2	0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0	0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0	0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12		2	0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		6	0	0		
1362.	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.000.000	-	100	0		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1	100	0		
1363.	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-	-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0	0	0		
1364.	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			-	-	0	0		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		0	0	0		
1365.	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.000.000	6.017.000	100	66,86		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2	100	0		
1366.	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000	-	0	0		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0	0	0		

1367.	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.000.000		-	0	0		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0	0		
1368.	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.760.000		1.635.000	16,67	92,9		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		2		16,67	0		
1369.	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			18.000.000		17.880.000	50	99,33		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		6		50	0		
1370.	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	0	0		
		jumlah pengadaan barang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
1371.	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
1372.	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			91.710.000		69.686.583	69,44	75,99		
		persentase terlaksananya jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		1		0	0		
1373.	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			270.000		270.000	100	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
1374.	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			18.200.000		9.776.583	100	53,72		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
1375.	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			73.240.000		59.640.000	8,33	81,43		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		1		8,33	0		
1376.	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			216.531.200		149.487.992	79,17	69,04		
		jumlah barang yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9		7		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		8		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		1		0	0		

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0	0		
1377.	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			53.674.000		67.990.292	77,78	126,67		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9		7		77,78	0		
1378.	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			125.707.200		45.275.990	88,89	36,02		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		8		88,89	0		
1379.	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.860.000		2.996.000	50	77,62		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		1		50	0		
1380.	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			33.290.000		33.225.710	100	99,81		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100	0		
1381.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			1.999.450.000		1.031.532.500	25,71	51,59	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
		Meningkatnya Layanan Pencegahan kebakaran, Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (persen)	100				0	0		
			Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)					0	0		
			Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)					0	0		
1382.	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			23.000.000		17.870.000	25	77,7		
		Persentase Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran dalam waktu respon time	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	10		0		0	0		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1		0		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	37		0		0	0		

			Terkait (Unit)								
1383.	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			13.000.000		7.870.000	100	60,54		
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1		1		100	0		
1384.	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			10.000.000		10.000.000	0	100		
		Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	10		0		0	0		
1385.	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)			-		-	0	0		
		Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1		0		0	0		
1386.	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			-		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	37		0		0	0		
1387.	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			-		-	0	0		
		Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1		0		0	0		
1388.	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			-		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1		0		0	0		
1389.	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			1.976.450.000		1.013.662.500	40	51,29		
		Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi dan edukasi kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	50		40		0	0		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	143		0		0	0		
1390.	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			1.447.650.000		559.302.500	80	38,64		

		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	50		40		80	0		
1391.	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran			528.800.000		454.360.000	0	85,92		
		Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	143		0		0	0		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			4.996.578.350		3.668.466.288	78,56	73,42		
1392.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.142.793.350		3.061.696.288	115,24	73,9	DINAS SOSIAL	
		Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpenuhi	Persentase Perencanaan ()			74,98		0	0		
			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			74,98		0	0		
			Persentase terwujudnya program penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100		74,98		74,98	0		
			Persentase terwujudnya program penunjang urusan pemerintah daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (DINAS SOSIAL) (persen)	100		74,98		74,98	0		
			Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)			74,98		0	0		
1393.	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			48.150.000		36.887.418	100	76,61		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
1394.	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8.800.000		7.678.000	100	87,25		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
1395.	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			20.600.000		19.209.418	100	93,25		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1396.	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			8.750.000		-	100	0		

		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1397.	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			10.000.000		10.000.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1398.	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1399.	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.617.198.350		2.884.438.920	100	79,74		
		Tersedianya dokumen laporan Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	4		4		0	0		
1400.	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.602.948.350		2.877.478.920	100	79,86		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		12		100	0		
1401.	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			14.250.000		6.960.000	100	48,84		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	4		4		100	0		
1402.	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0	0		
1403.	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0	0		
1404.	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			149.845.000		79.352.592	200	52,96		
		Terpenuhinya dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		2		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		2		0	0		

1405.	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	3.000.000	3	2.918.000	0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		5		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
1405.	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.000.000		2.918.000	100	97,27		
1406.	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		100	0		
					-	-	-	0	0		
1407.	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0		0	0		
					48.000.000		19.247.695	200	40,1		
1408.	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		200	0		
					13.845.000		3.713.000	200	26,82		
1409.	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2		200	0		
					12.000.000		10.500.000	300	87,5		
1410.	1.06.01.2.06.0008	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	3		300	0		
					13.000.000		974.030	500	7,49		
1411.	1.06.01.2.06.0009	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	5		500	0		
					60.000.000		41.999.867	100	70		
1412.	1.06.01.2.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		100	0		
					50.000.000		-	0	0		
1413.	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	50.000.000	0	-	0	0		
1414.	1.06.01.2.08	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0		0	0		
					193.600.000		18.807.758	66,67	9,71		
1414.	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		0	0		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		0	0		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	0		0	0		

1415.	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.000.000		1.500.000	100	50		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1	100	0		
1416.	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		26.400.000		12.085.758	100	45,78		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1	100	0		
1417.	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		164.200.000		5.222.000	0	3,18		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0	0	0		
1418.	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		84.000.000		42.209.600	60	50,25		
		Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8		8	0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15		3	0	0		
1419.	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		80.000.000		41.822.000	100	52,28		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8		8	100	0		
1420.	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4.000.000		387.600	20	9,69		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15		3	20	0		
1421.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		9.150.000		8.714.000	25	95,23	DINAS SOSIAL	
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)		4,3		0	0		
			Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase)		4,3		0	0		
			Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)		4,3		0	0		
1422.	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		9.150.000		8.714.000	25	95,23		
		jumlah pendamping dan mitra kerja	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	32		0	0	0		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	32		0	0	0		

			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	32		32		0	0		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	11		0		0	0		
1423.	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
1424.	1.06.02.2.03.0002	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	32		0		0	0		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
1425.	1.06.02.2.03.0003	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	32		0		0	0		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			9.150.000		8.714.000	100	95,23		
1426.	1.06.02.2.03.0004	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	32		32		100	0		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
1427.	1.06.04	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	11		0		0	0		
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			3.195.000		8.590.000	37,5	268,86	DINAS SOSIAL	
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase kelompok rentan yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi Sosial di luar panti (persen)	50		3,3		6,6	0		
			Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)			3,3		0	0		
			Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)			3,3		0	0		
			Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)			3,3		0	0		
			Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)			3,3		0	0		
1428.	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			3.195.000		8.590.000	50	268,86		
		Jumlah Peserta bimbingan Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Kabuoaten Bengkulu Tengah	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		50		0	0		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		50		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		0		0	0		

			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		100		0	0		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		0		0	0		
1429.	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan			-		400.000	100	0		
1430.	1.06.04.2.01.0002	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		50		100	0		
		Penyediaan Sandang			-		5.000.000	100	0		
1431.	1.06.04.2.01.0003	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		50		100	0		
		Penyediaan Alat Bantu			-		-	0	0		
1432.	1.06.04.2.01.0006	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		0		0	0		
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
1433.	1.06.04.2.01.0009	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0	0		
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			3.195.000		3.190.000	100	99,84		
1434.	1.06.04.2.01.0012	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		100		100	0		
		Pemberian Layanan Rujukan			-		-	0	0		
1435.	1.06.04.2.02	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		0		0	0		
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			-		-	0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		0		0	0		
1436.	1.06.04.2.02.0003		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		0		0	0		
		Penyediaan Permakanan			-		-	0	0		

		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		0		0	0		
1437.	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang			-		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		0		0	0		
1438.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			96.000.000		26.200.000	56	27,29	DINAS SOSIAL	
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)		5,3		0	0			
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)		5,3		0	0			
1439.	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			96.000.000		26.200.000	56	27,29		
		Jumlah PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)	12000	12.000		0	0			
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	50	6		0	0			
1440.	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			-		16.200.000	100	0		
		Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)	12000	12.000		100	0			
1441.	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			96.000.000		10.000.000	12	10,42		
		Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	50	6		12	0			
1442.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			745.440.000		563.266.000	17,78	75,56	DINAS SOSIAL	
		Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)		5,28		0	0			
1443.	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			745.440.000		563.266.000	53,33	75,56		
		Jumlah masyarakat Terpenuhnya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1500	800		0	0			
1444.	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan			745.440.000		563.266.000	53,33	75,56		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1500	800		53,33	0			
1445.	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Jumlah orang yang Melakukan pemberdayaan Masyarakat kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan	2	0		0	0			

		Kabupaten/Kota (Kampung)								
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20		0		0	0		
1446.	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		-		-	0	0		
		Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2		0		0	0		
1447.	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		-		-	0	0		
		Terpenuhi Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20		0		0	0		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			3.392.697.166		2.587.722.137	70,33	76,27	
1448.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.079.337.166		2.274.588.017	70,27	73,87	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)		74,95		0	0		
1449.	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		34.229.000		13.655.000	100	39,89		
		Dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4			0	0		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1			0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1			0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1			0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1			0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2			0	0		
1450.	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15.000.000		4.000	100	0,03		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4			100	0		
1451.	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.578.000		5.578.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1			100	0		

		Dokumen RKA-SKPD	RKA-SKPD (Dokumen)								
1452.	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		200.000		200.000	100	100			
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		100	0			
1453.	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		5.578.000		-	100	0			
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		100	0			
1454.	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1.721.000		1.721.000	100	100			
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		100	0			
1455.	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6.152.000		6.152.000	100	100			
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		100	0			
1456.	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.770.427.166		2.003.904.017	100	72,33			
		Jumlah Laporan Keuangan yang Terlaksana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	22	22		0	0			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		0	0			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4		0	0			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2		0	0			
1457.	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.762.464.166		1.990.941.017	100	72,07			
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	22	22		100	0			
1458.	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.000.000		5.000.000	100	100			
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		100	0			
1459.	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		-		5.000.000	100	0			
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4		100	0			

		(Laporan)								
1460.	2.07.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2.963.000		2.963.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2		2	100	0		
1461.	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-		-	0	0		
		Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terlaksana	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3		0	0	0		
1462.	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3		0	0	0		
1463.	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		105.883.000		105.883.000	86,88	100		
		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1	0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2	0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		20	0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		3	0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6		6	0	0		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		1	0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1	0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1	0	0		
1464.	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-		-	20	0		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1	20	0		
1465.	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-		-	100	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2	100	0		
1466.	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		50.000.000		50.000.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		20	100	0		
1467.	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		19.063.000		19.063.000	75	100		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		3	75	0		
1468.	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		26.820.000		26.820.000	100	100		

		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6		6		100	0		
1469.	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			-		-	100	0		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
1470.	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			10.000.000		10.000.000	100	100		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100	0		
1471.	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-		-	100	0		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1472.	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4		0		0	0		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		0	0		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
1473.	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4		0		0	0		
1474.	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		0	0		
1475.	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0	0		
1476.	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
1477.	2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
		Persentase Pengadaan Bangunan Gedung Kantor dan Gedung Kantor Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0	0		
1478.	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-	0	0		

		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0	0		
1479.	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			132.568.000		114.916.000	95,83	86,68		
		Jumlah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		10		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
1480.	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-		-	100	0		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
1481.	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			17.652.000		-	83,33	0		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		10		83,33	0		
1482.	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.550.000		20.550.000	100	100		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
1483.	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			94.366.000		94.366.000	100	100		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
1484.	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36.230.000		36.230.000	50	100		
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3		3		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
1485.	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			36.230.000		36.230.000	100	100		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3		3		100	0		
1486.	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
1487.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			-		-	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

								0	0		
1488.	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			-		-	0	0		
		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1			0		0	0		
		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	12			0		0	0		
1489.	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			-		-	0	0		
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1		0		0	0		
1490.	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			-		-	0	0		
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	12		0		0	0		
1491.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			300.000.000		299.964.120	116,67	99,99	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)			99,99		0	0		
1492.	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			300.000.000		299.964.120	116,67	99,99		
		Terselenggaranya pelatihan kerja berbasis unit kompetensi bagi tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	32		80		0	0		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	3		3		0	0		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	12		0		0	0		
1493.	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			300.000.000		299.964.120	250	99,99		
		Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	32		80		250	0		
1494.	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			-		-	100	0		
		Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	3		3		100	0		
1495.	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	12		0		0	0		
1496.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			-		-	90	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		MENINGKATNYA PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)			0		0	0		

1497.	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		-	-	80	0		
		Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	25	20	0	0		
1498.	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja		-	-	80	0		
		Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	25	20	80	0		
1499.	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		-	-	100	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	75	75	0	0		
1500.	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		-	-	100	0		
		Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	75	75	100	0		
1501.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			13.360.000	13.170.000	58,33	98,58	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		MENINGKATNYA PEKERJA INDONESIA YANG TERLINDUNGI	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)		98,58	0	0		
1502.	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		13.360.000	13.170.000	33,33	98,58		
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	3	1	0	0		
1503.	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		13.360.000	13.170.000	33,33	98,58		
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	3	1	33,33	0		
1504.	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		-	-	70,83	0		
		Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	12	5	0	0		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	3	3	0	0		
1505.	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	41,67	0		
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	12	5	41,67	0		

		Kabupaten/Kota									
1506.	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		-		-	100	0			
		Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	3		3	100	0			
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			8.357.542.900		-	0	0		
1507.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.450.039.900		-	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)				0	0			
1508.	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.220.000		-	0	0		
		Persentase Dokumen Perencanaan disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		0	0	0			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		0	0	0			
1509.	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.000.000		-	0	0		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		0	0	0			
1510.	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			220.000		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		0	0	0			
1511.	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.011.739.900		-	0	0		
		Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35		0	0	0			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0	0	0			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		0	0	0			
1512.	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.011.739.900		-	0	0		

		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35		0		0	0		
1513.	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
1514.	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			-		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
1515.	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.000.000		-	0	0		
		Persentase Dokumen Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
1516.	2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			6.000.000		-	0	0		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
1517.	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Persentase Dokumen Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	35		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0	0		
1518.	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	35		0		0	0		
1519.	2.08.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			-		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0	0		
1520.	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			38.000.000		-	0	0		
		Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0	0		

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
1521.	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0	0		
1522.	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			-		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
1523.	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.000.000		-	0	0		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0	0		
1524.	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			-		-	0	0		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
1525.	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.000.000		-	0	0		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0	0		
1526.	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			-		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0	0		
1527.	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25.000.000		-	0	0		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
1528.	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	0	0		
		Persentase Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0	0		
1529.	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-	0	0		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0	0		
1530.	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			331.780.000		-	0	0		
		Persentase Dokumen jasa penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0	0		
1531.	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			500.000		-	0	0		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0	0		
1532.	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			36.000.000		-	0	0		

		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		0	0		
1533.	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			295.280.000		-	0	0		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0	0		
1534.	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			58.300.000		-	0	0		
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20		0		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6		0		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
1535.	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			58.300.000		-	0	0		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20		0		0	0		
1536.	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6		0		0	0		
1537.	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
1538.	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
1539.	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		

1540.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			303.300.000			-	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)					0	0			
			Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)					0	0			
1541.	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			145.400.000			-	0	0		
		Persentase Dokumen Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0			
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Organisasi)	1		0		0	0			
			Jumlah organisasi kemasyarakatan / profesi / dunia usaha / media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	1		0		0	0			
1542.	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			44.200.000			-	0	0		
		Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0			
1543.	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			22.200.000			-	0	0		
		Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Organisasi)	1		0		0	0			
1544.	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			79.000.000			-	0	0		
		Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan / profesi / dunia usaha / media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab / kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan / profesi / dunia usaha / media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	1		0		0	0			
1545.	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			157.900.000			-	0	0		

		&Persentase Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota&	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)	1		0		0	0		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	10		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota (Unit)	1		0		0	0		
1546.	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			73.200.000		-	0	0		
1547.		Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)	1		0		0	0		
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			48.200.000		-	0	0		
1548.		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	10		0		0	0		
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
1549.		Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		0		0	0		
	2.08.02.2.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			36.500.000		-	0	0		
		Terbentuknya Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) pada lembaga pemerintah dan LPLPP kewenangan kab/kota	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota (Unit)	1		0		0	0		
1550.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			199.380.000		-	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)					0	0		
1551.	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			65.000.000		-	0	0		
		Persentase Dokumen Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0		

			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	12		0		0	0		
1552.	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			65.000.000		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0		
1553.	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	12		0		0	0		
1554.	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			134.380.000		-	0	0		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)	1		0		0	0		
1555.	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			134.380.000		-	0	0		
		Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)	1		0		0	0		
1556.	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Persentase Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	5		0		0	0		
1557.	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	5		0		0	0		
1558.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			2.981.433.000		-	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)					0	0		

1559.	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.972.743.000		-	0	0		
		&Persentase Dokumen Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	1	0	0	0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	0	0	0		
1560.	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		94.793.000		-	0	0		
		Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	1	0	0	0	0		
1561.	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		2.877.950.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	0	0	0		
1562.	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		8.690.000		-	0	0		
		Persentase Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35	0	0	0	0		
1563.	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		8.690.000		-	0	0		
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35	0	0	0	0		
1564.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		4.800.000		-	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)			0	0	0		
1565.	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4.800.000		-	0	0		
		&Persentase Dokumen Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	0	0	0	0		

1566.	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			4.800.000		-	0	0		
		Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		0		0	0		
1567.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			17.000.000		-	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)					0	0		
1568.	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		&Persentase Dokumen Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0		
1569.	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0		
1570.	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			17.000.000		-	0	0		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0		
1571.	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0		
1572.	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			17.000.000		-	0	0		
		Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0		

1573.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			401.590.000			-	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Meningkatnya Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)						0	0		
			Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)						0	0		
1574.	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota			224.800.000			-	0	0		
		&Persentase Dokumen Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota&	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu (Kegiatan)	1		0			0	0		
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	1		0			0	0		
1575.	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA			146.400.000			-	0	0		
		Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang terpadu	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu (Kegiatan)	1		0			0	0		
1576.	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota			78.400.000			-	0	0		
		terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	1		0			0	0		
1577.	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			176.790.000			-	0	0		
		&Persentase Dokumen Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota&	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)	10		0			0	0		
1578.	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			176.790.000			-	0	0		
		Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)	10		0			0	0		
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			4.657.449.661		4.131.077.106	90,82	88,7			
1579.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.581.849.661		4.053.906.106	81,69	88,48	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		
		Meningkatkan tata kelola opd	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			100			0	0		

			Persentase Terwujudnya Program penunjang urusan pemerintah daerah Kab yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (Dkpp) (persen)	100		100		100	0		
1580.	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			33.957.000		19.804.760	100	58,32		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	13		0		0	0		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		1		2		0	0		
1581.	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			33.957.000		19.804.760	0	58,32		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	13		0		0	0		
1582.	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-	200	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		2		200	0		
1583.	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.171.117.561		3.527.040.436	9,52	84,56		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	504		48		0	0		
1584.	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.171.117.561		3.527.040.436	9,52	84,56		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	504		48		9,52	0		
1585.	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7		0		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0		0	0		
1586.	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7		0		0	0		
1587.	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0		0	0		
1588.	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			129.850.000		287.903.841	100	221,72		
		Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		0	0		
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
1589.	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		14.000.000		13.986.000	100	99,9		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1	100	0		
1590.	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		48.500.000		48.500.000	100	100		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1	100	0		
1591.	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		17.000.000		6.225.800	100	36,62		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1	100	0		
1592.	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1.561.500		47.500.000	100	3041,95		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1	100	0		
1593.	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		20.788.500		154.749.541	100	744,4		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1	100	0		
1594.	2.09.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu		1.000.000		1.000.000	100	100		
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1	100	0		
1595.	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		27.000.000		15.942.500	100	59,05		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1	100	0		
1596.	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		-	0	0		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0	0	0		
1597.	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0	0	0		
1598.	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		148.896.000		151.757.544	66,67	101,92		
		Penyediaan jasa Penunjang Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0	0	0		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
1599.	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			600.000		600.000	0	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0	0		
1600.	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			43.200.000		61.057.544	100	141,34		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
1601.	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			105.096.000		90.100.000	100	85,73		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
1602.	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			98.029.100		67.399.525	180,43	68,75		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	23		60		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0	0		
1603.	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			86.029.100		55.399.525	260,87	64,4		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	23		60		260,87	0		
1604.	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			12.000.000		12.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100	0		
1605.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			68.000.000		57.171.000	140	84,08	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)			96		0	0		
			Jumlah Peningkatan Penggunaan Lahan Pekarangan (Kelompok)	20		4		20	0		
1606.	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			29.635.000		28.765.000	66,67	97,06		
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	1		1		0	0		

			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		0	0		
1607.	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			-		-	0	0		
		Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	1		0		0	0		
1608.	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Kabupaten/Kota	Tingkat Produsen dan Konsumen di		25.910.000		25.790.000	100	99,54		
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	1		1		100	0		
1609.	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota			3.725.000		2.975.000	100	79,87		
		Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		100	0		
1610.	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			38.365.000		28.406.000	250	74,04		
		Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1		4		0	0		
1611.	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			7.165.000		6.500.000	100	90,72		
		Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1		1		100	0		
1612.	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			31.200.000		21.906.000	400	70,21		
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1		4		400	0		
1613.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			-		-	100	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)			3		0	0		
1614.	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	100	0		
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1		1		0	0		
1615.	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			-		-	100	0		
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1		1		100	0		
1616.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			7.600.000		20.000.000	0	263,16	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)			100		0	0		

1617.	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		7.600.000		20.000.000	0	263,16		
		Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1		0	0	0		
1618.	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		7.600.000		20.000.000	0	263,16		
		Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1		0	0	0		
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			165.370.000		6.960.000	16,67	4,21	
1619.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			3.000.000		3.000.000	0	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah pemerintah (persen)	20		20		100	0	
			Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)			50		0	0	
1620.	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.000.000		3.000.000	0	100	
		Surat Hak Atas Tanah	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	4		0		0	0	
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		0		0	0	
1621.	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.000.000		2.000.000	0	100	
		Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	4		0		0	0	
1622.	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.000.000		1.000.000	0	100	
		Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		0		0	0	
1623.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			108.700.000			0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Persentase pengadaan tanah yang difasilitasi (persen)	100		0		0	0	
1624.	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			108.700.000			0	0	
			Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah (Laporan)	6		0		0	0	
1625.	2.10.05.2.01.0003	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			108.700.000			0	0	

		Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah (Laporan)	6		0		0	0		
1626.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			53.670.000		3.960.000	33,33	7,38	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Meningkatnya Tertib Pertanahan dan Kepastian Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)			10		0	0		
			Persentase peningkatan tanah/aset pemerintah yang bersertifikat (persen)	25		25		100	0		
1627.	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			53.670.000		3.960.000	33,33	7,38		
		Surat Hak Atas Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	30		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	6		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	100		100		0	0		
1628.	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			-		-	0	0		
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	30		0		0	0		
1629.	2.10.10.2.01.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		-		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	6		0		0	0		
1630.	2.10.10.2.01.0004		Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		53.670.000		3.960.000	100	7,38		
		Terlaksananya tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (KT skala kecil)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	100		100		100	0		
	2.11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		6.231.343.036		4.859.712.906	64,91	77,99		
1631.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.892.128.786		4.057.280.864	103,18	82,93	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	1		1		100	0		

			Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		100	0		
			Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			90		0	0		
1632.	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.765.750		2.400.000	133,33	24,58		
		Nilai Evaluasi SAKIP DLH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		4		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		4		0	0		
1633.	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.000.000		1.650.000	133,33	27,5		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		4		133,33	0		
1634.	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3.765.750		750.000	133,33	19,92		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		4		133,33	0		
1635.	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.195.737.036		3.436.385.309	125	81,9		
		Nilai Evaluasi SAKIP DLH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32		48		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
1636.	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.195.737.036		3.436.385.309	150	81,9		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32		48		150	0		
1637.	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1638.	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			-		-	0	0		

		Nilai Evaluasi SAKIP DLH	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1		0		0	0		
1639.	2.11.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1		0		0	0		
1640.	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			77.611.000		77.111.000	38,33	99,36		
		Nilai Evaluasi SAKIP DLH	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4		0		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	60		32		0	0		
1641.	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			39.600.000		39.600.000	100	100		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		100	0		
1642.	2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0	0		
1643.	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4		0		0	0		
1644.	2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			38.011.000		37.511.000	53,33	98,68		
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	60		32		53,33	0		
1645.	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			158.060.400		136.021.400	114,29	86,06		
		Nilai Evaluasi SAKIP DLH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		2		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		2		0	0		

1646.	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.000.000		-	100	0		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
1647.	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			18.000.000		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
1648.	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.000.000		24.981.000	100	99,92		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
1649.	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			3.000.000		-	100	0		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
1650.	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			53.600.000		53.580.000	200	99,96		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		2		200	0		
1651.	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			5.000.000		5.000.000	100	100		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100	0		
1652.	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			52.460.400		52.460.400	200	100		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		2		200	0		
1653.	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			374.440.000		331.172.155	200	88,44		
		Nilai Evaluasi SAKIP DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		2		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		3		0	0		
1654.	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000		700.000	100	70		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
1655.	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			19.150.000		17.782.155	200	92,86		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		2		200	0		
1656.	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			354.290.000		312.690.000	300	88,26		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		3		300	0		
1657.	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			76.514.600		74.191.000	66,67	96,96		

		Nilai Evaluasi SAKIP DLH	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	13		13		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13		13		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0	0		
1658.	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			12.000.000		9.762.000	100	81,35		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	13		13		100	0		
1659.	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			64.514.600		64.429.000	100	99,87		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13		13		100	0		
1660.	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0	0		
1661.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			12.132.000		12.132.000	20	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten (Dokumen)	1		1		100	0		
			Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)			75		0	0		
			Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten (Dokumen)	1		1		100	0		
1662.	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			12.132.000		12.132.000	100	100		
		Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	1		1		0	0		
1663.	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota			12.132.000		12.132.000	100	100		
		RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	1		1		100	0		
1664.	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Dokumen KLHS yang disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	1		0		0	0		

			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	1		0		0	0		
1665.	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				-		-	0	0	
		Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1		0		0	0		
1666.	2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS				-		-	0	0	
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	1		0		0	0		
1667.	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				-		-	0	0	
		Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1		0		0	0		
1668.	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup				-		-	0	0	
		Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	1		0		0	0		
1669.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				166.242.000		151.669.500	40	91,23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten (Laporan)	1		1		100	0		
			Indeks Kualitas Air (Indeks)			62,25		0	0		
			Jumlah Laporan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten (Laporan)	1		1		100	0		
			Indeks Kualitas Udara (Indeks)			79,11		0	0		
			Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications (Dokumen)			1		0	0		
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)			68,32		0	0		
1670.	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				166.242.000		151.669.500	50	91,23	
		Laporan Pencegahan,Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0	0		
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	20		20		0	0		

			Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1		1		0	0		
1671.	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			-		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0	0		
1672.	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			50.934.000		36.464.000	100	71,59		
		Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	20		20		100	0		
1673.	2.11.03.2.01.0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan			-		-	0	0		
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	1		0		0	0		
1674.	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah			115.308.000		115.205.500	100	99,91		
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1		1		100	0		
1675.	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Pencegahan,Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1		0		0	0		
1676.	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi			-		-	0	0		
		kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1		0		0	0		
1677.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			40.084.000		39.284.000	7	98	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)			21		0	0		
			Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (Dokumen)	1		1		100	0		
			Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)			0		0	0		
1678.	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			40.084.000		39.284.000	7	98		

		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	4		0		0	0		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	100		21		0	0		
1679.	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			22.900.000		22.600.000	0	98,69		
1680.	2.11.06.2.01.0007	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	1		0		0	0		
		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup			-		-	0	0		
		Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	4		0		0	0		
1681.	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			17.184.000		16.684.000	21	97,09		
1682.	2.11.07	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	100		21		21	0		
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			-		-	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Laporan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH (Laporan)	1				0	0		
1683.	2.11.07.2.01		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)			0		0	0		
		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			-		-	0	0		
		Laporan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Serta Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	1		0		0	0		
1684.	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH			-		-	0	0		
1685.	2.11.09	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	1		0		0	0		
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			-		-	0	0	DINAS LINGKUNGAN	

									HIDUP	
	Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup (unit)			0		0	0		
		Jumlah Laporan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten (Laporan)	1		0		0	0		
1686.	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-		-	0	0		
	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	1		0		0	0		
1687.	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		-		-	0	0		
	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	1		0		0	0		
1688.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		-		-	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten (Laporan)	1		1		100	0		
		Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)			0		0	0		
1689.	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		-		-	0	0		
	Persentase kasus lingkungan hidup yang ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	5		0		0	0		
1690.	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		-		-	0	0		
	Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	5		0		0	0		
1691.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		1.120.756.250		599.346.542	2,73	53,48	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah/Indeks Kinerja Pengumpulan Data Sampah (Laporan)	1		0		0	0		
		Jumlah Laporan Pengelolaan Sampah (Laporan)	1		1		100	0		
		Terlaksananya Pengolahan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)			0,87		0	0		
1692.	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah		1.120.756.250		599.346.542	5,45	53,48		

		Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	15,96		0,87		0	0		
1693.	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan			1.120.756.250		599.346.542	5,45	53,48		
		Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	15,96		0,87		5,45	0		
1694.	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta			-		-	0	0		
		Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0	0		
1695.	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah			-		-	0	0		
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0	0		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			3.626.222.068		2.939.800.903	67,81	81,07		
1696.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.362.610.268		2.671.869.073	65,2	79,46	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	Persentase Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD (Capil) (Persen)	100		100		100	0		
			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			25		0	0		
1697.	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.215.000		2.150.000	44,44	51,01		
		Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		0		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		1		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
1698.	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.025.000		-	0	0		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		0		0	0		
1699.	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2.650.000		1.610.000	33,33	60,75		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		1		33,33	0		
1700.	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			540.000		540.000	100	100		

		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
1701.	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.018.116.668		2.429.854.537	98	80,51		
		Jumlah Laporan Keuangan yang Terlaksana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		24		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
1702.	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.015.762.668		2.427.480.537	96	80,49		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		24		96	0		
1703.	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.354.000		2.374.000	100	100,85		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1704.	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terlaksana	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	1		0		0	0		
1705.	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0	0		
1706.	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			18.500.000		17.216.000	42,86	93,06		
		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3		3		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
1707.	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-		-	0	0		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0	0		
1708.	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		

1709.	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			-	-	0	0		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0	0	0		
1710.	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			-	-	0	0		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0	0	0		
1711.	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.500.000	8.250.000	100	97,06		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3		3	100	0		
1712.	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.000.000	-	100	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1	100	0		
1713.	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			9.000.000	8.966.000	100	99,62		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1	100	0		
1714.	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			22.000.000	-	1,67	0		
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0	0	0		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20		1	0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0	0	0		
1715.	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-	-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0	0	0		
1716.	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			22.000.000	-	5	0		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20		1	5	0		
1717.	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0	0	0		
1718.	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			211.503.600	168.254.536	100	79,55		
		Jumlah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1	0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1	0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1	0	0		
1719.	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			250.000	-	100	0		

		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
1720.	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			60.000.000		52.474.536	100	87,46		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
1721.	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			151.253.600		115.780.000	100	76,55		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
1722.	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			88.275.000		54.394.000	166,67	61,62		
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13		52		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		5		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
1723.	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			83.830.000		54.394.000	400	64,89		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13		52		400	0		
1724.	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.445.000		-	100	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		5		100	0		
1725.	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
1726.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			2.375.000		-	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Dalam Kepemilikan Sudah Merekam KTP- El (Persen)	100				0	0		
			Persentase Penduduk yang Sudah Merekam KTP-El (Persen)	100				0	0		
			Persentase Dalam Kepemilikan Kartu Indentitas Anak (KIA) (Persen)	74,60				0	0		
			Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)					0	0		
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)					0	0		
1727.	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			-		-	0	0		

		Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	1		0		0	0		
1728.	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	1		0		0	0		
1729.	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			2.375.000		-	0	0		
		Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	1		0		0	0		
1730.	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			2.375.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	1		0		0	0		
1731.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			2.150.000		-	100	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran (Persentase)					0	0		
			Persentase Kepemilikan Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun (Persen)	100				0	0		
			Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		25			0	0		
			Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		25			0	0		
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		25			0	0		
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun (Persen)	100				0	0		
			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		25			0	0		
1732.	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			-		-	100	0		
		Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	1		1		0	0		
1733.	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	1		1		100	0		
1734.	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			2.150.000		-	100	0		

		Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1		1		0	0		
1735.	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil			2.150.000		-	100	0		
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1		1		100	0		
1736.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			257.946.800		266.791.830	100	103,43	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Peningkatan Pelayanan Hak Akses (Persen)	21,96				0	0		
			Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)			25		0	0		
1737.	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			-		-	100	0		
		Persentase Peningkatan Pelayanan Hak Akses	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	1		1		0	0		
1738.	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			-		-	100	0		
		Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	1		1		100	0		
1739.	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			257.946.800		256.584.830	100	99,47		
		persentase pengelolaan Informasi Adminduk	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	1		1		0	0		
1740.	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			257.946.800		256.584.830	100	99,47		
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	1		1		100	0		
1741.	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			-		10.207.000	100	0		
		persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan dan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1		1		0	0		
1742.	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			-		10.207.000	100	0		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1		1		100	0		
1743.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			1.140.000		1.140.000	100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Meningkatnya Kualitas profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)			25		0	0		
			Persentase Pemenuhan Data Dalam Penyusunan Profil dan Agregat Kependudukan (Persen)	100		100		100	0		
1744.	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			1.140.000		1.140.000	100	100		

		Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	3		3		0	0		
1745.	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			1.140.000		1.140.000	100	100		
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	3		3		100	0		
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			20.613.025.786			-	0	0	
1746.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.348.420.254			-	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)					0	0		
			Persentase terlaksananya penunjang urusan daerah kab/kota (Pemdes) (persen)	100				0	0		
1747.	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			49.972.000			-	0	0	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		0	0		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		0		0	0		
1748.	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			15.152.000			-	0	0	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		0	0		
1749.	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			10.200.000			-	0	0	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
1750.	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			4.200.000			-	0	0	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		

1751.	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			4.900.000		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
1752.	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			8.770.000		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
1753.	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.750.000		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		0		0	0		
1754.	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.868.859.154		-	0	0		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		0		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
1755.	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.866.859.154		-	0	0		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		0		0	0		
1756.	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.000.000		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
1757.	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20		0		0	0		
1758.	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0	0		
1759.	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20		0		0	0		
1760.	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			93.132.000		-	0	0		
		Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
1761.	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.000.000		-	0	0		
1762.	2.13.01.2.06.0002	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	0	0		
1763.	2.13.01.2.06.0004	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		0	0		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12.500.000		-	0	0		
1764.	2.13.01.2.06.0005	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0	0		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2.202.000		-	0	0		
1765.	2.13.01.2.06.0006	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			14.000.000		-	0	0		
1766.	2.13.01.2.06.0008	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0	0		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			-		-	0	0		
1767.	2.13.01.2.06.0009	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0	0		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			62.430.000		-	0	0		
1768.	2.13.01.2.08	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			271.600.000		-	0	0		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1		0		0	0		

			(Laporan)								
1769.	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000			-	0	0	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0			0	0	
1770.	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			60.000.000			-	0	0	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0			0	0	
1771.	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-			-	0	0	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0			0	0	
1772.	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			210.600.000			-	0	0	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0			0	0	
1773.	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64.857.100			-	0	0	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8		0			0	0	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0			0	0	
1774.	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			64.857.100			-	0	0	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8		0			0	0	
1775.	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-			-	0	0	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0			0	0	
1776.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA			700.000			-	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)						0	0	
			Persentase Desa yang Memiliki Lembaga Kemasyarakatan Desa (persen)	100					0	0	
			Persentase Desa yang memiliki Lembaga Kemasayarakatan Desa (%)	100					0	0	
1777.	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			700.000			-	0	0	
		penyelenggaraan penataan desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	142		0			0	0	

1778.	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa			700.000		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	142		0		0	0		
1779.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			14.115.900.000		-	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Aparatur Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya (persen)	85				0	0		
			Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)					0	0		
			Persentase Aparatur Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	85				0	0		
1780.	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			14.115.900.000		-	0	0		
		Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	1		0		0	0		
1781.	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0		
1782.	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			14.108.900.000		-	0	0		
		Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0		
1783.	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			7.000.000		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	1		0		0	0		
1784.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			614.377.500		-	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)					0	0		
			Persentase desa tertib administrasi (persen)	90				0	0		
			Persentase Desa Tertib administrasi (%)	100				0	0		
1785.	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			614.377.500		-	0	0		
		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	1		0		0	0		

			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	142		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	710		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1		0		0	0		
1786.	2.13.04.2.01.0001	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			-		-	0	0		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		0		0	0		
1787.	2.13.04.2.01.0004	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			26.213.500		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	1		0		0	0		
1788.	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	142		0		0	0		
1789.	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			550.000.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	1		0		0	0		
1790.	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			-		-	0	0		
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	1		0		0	0		
1791.	2.13.04.2.01.0010	Facilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			4.894.000		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	1		0		0	0		
1792.	2.13.04.2.01.0011	Facilitasi Penyusunan Profil Desa			18.500.000		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	1		0		0	0		
1793.	2.13.04.2.01.0013	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa			10.770.000		-	0	0		

		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1		0		0	0		
1794.	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	710		0		0	0		
1795.	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			4.000.000		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1		0		0	0		
1796.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2.533.628.032		-	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)					0	0		
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang di berdayakan (%)	100				0	0		
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan (persen)	60				0	0		
			Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)					0	0		
1797.	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.533.628.032		-	0	0		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	142		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1		0		0	0		

1798.	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			-	-	0	0		
		Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	0		0	0		
1799.	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			2.506.378.032	-	0	0		
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	142	0		0	0		
1800.	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			-	-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1	0		0	0		
1801.	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			27.000.000	-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	0		0	0		
1802.	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			250.000	-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	0		0	0		
1803.	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			-	-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	0		0	0		
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			901.623.000	-	0	0		
1804.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			229.473.000	-	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)				0	0		
			Total Fertility Rate (TFR). (Orang)				0	0		
1805.	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			206.825.000	-	0	0		

		Persentase pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan (Kegiatan)	1		0		0	0		
1806.	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			195.650.000		-	0	0		
		Terlaksananya Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dokumen)	1		0		0	0		
1807.	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal			11.175.000		-	0	0		
		Terlaksananya Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan (Kegiatan)	1		0		0	0		
1808.	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			22.648.000		-	0	0		
		&Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk &	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1		0		0	0		
1809.	2.14.02.2.02.0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan			1.150.000		-	0	0		
		Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	1		0		0	0		
1810.	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			21.498.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1		0		0	0		
1811.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			672.150.000		-	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)					0	0		
			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)					0	0		
1812.	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			672.150.000		-	0	0		
		Persentase Dokumen Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1		0		0	0		

		(Dokumen)									
		Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0	0			
1813.	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		-		-	0	0			
		Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1		0		0	0			
1814.	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal		672.150.000		-	0	0			
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dokumen)	1		0		0	0			
1815.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		-		-	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera					0	0			
1816.	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		-		-	0	0			
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	1		0		0	0			
1817.	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		-		-	0	0			
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	1		0		0	0			
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		5.165.281.116		3.979.492.864	55,08	77,04			
1818.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.676.962.116		3.683.894.954	59,61	78,77	DINAS PERHUBUNGAN		

		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Tercapainya program penunjang urusan pemerintah daerah (persen)	100		80,5		80,5	0		
			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			20		0	0		
			Persentase terlaksananya penunjang urusan daerah kab/kota (Dishub) (persen)	100		80,5		80,5	0		
			Nilai Evaluasi SAKIP (Predikat)			61		0	0		
1819.	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.041.500		17.579.480	100	70,2		
		Tercapainya Dokumen Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		2		0	0		
1820.	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			16.750.000		13.811.480	100	82,46		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		100	0		
1821.	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8.291.500		3.768.000	100	45,44		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		2		100	0		
1822.	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.190.770.616		3.473.859.296	92,11	82,89		
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38		35		0	0		
1823.	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.190.770.616		3.473.859.296	92,11	82,89		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38		35		92,11	0		
1824.	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4		0		0	0		
1825.	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0	0		
1826.	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4		0		0	0		
1827.	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			35.600.000		20.955.500	69,05	58,86		

		Terlaksananya administrsi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		1		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		1		0	0		
1828.	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.000.000		283.500	100	28,35		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
1829.	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
1830.	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12.500.000		6.649.000	33,33	53,19		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		1		33,33	0		
1831.	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2.500.000		1.850.000	100	74		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
1832.	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.600.000		5.400.000	100	96,43		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100	0		
1833.	2.15.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu			4.000.000		2.000.000	100	50		
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100	0		
1834.	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10.000.000		4.773.000	50	47,73		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		1		50	0		
1835.	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	0	0		
		Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0	0		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
1836.	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-	0	0		

		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0	0		
1837.	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
1838.	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			353.620.000		117.312.178	83,33	33,17		
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
1839.	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			450.000		450.000	100	100		
		Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
1840.	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			22.540.000		14.742.178	50	65,4		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		1		50	0		
1841.	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			330.630.000		102.120.000	100	30,89		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
1842.	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			71.930.000		54.188.500	55,56	75,34		
		Tercapainya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6		6		0	0		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6		4		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
1843.	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			71.930.000		54.188.500	100	75,34		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6		6		100	0		
1844.	2.15.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			-		-	66,67	0		
		Tersedianya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6		4		66,67	0		
1845.	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
1846.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			488.319.000		295.597.910	43,75	60,53	DINAS PERHUBUNGAN	

		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas dan Pelayanan sektor perhubungan Darat (%)	90		67,6		75,11	0		
			Persentase pemenuhan dokumen perhubungan (persen)	90		67,6		75,11	0		
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)			67		0	0		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas dan Pelayanan sektor perhubungan Darat (persen)	85		64		75,29	0		
			Konektivitas Darat (Persentase)			67		0	0		
1847.	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		meningkatnya rencana induk jaringan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0		
1848.	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0		
1849.	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			335.598.000		201.725.850	50	60,11		
		terselenggaranya perlengkapan jalan kabupaten/kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	50		25		0	0		
1850.	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			335.598.000		201.725.850	50	60,11		
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	50		25		50	0		
1851.	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			61.481.000		10.974.560	100	17,85		
		Terselenggaranya pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2		2		0	0		
1852.	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			61.481.000		10.974.560	100	17,85		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2		2		100	0		
1853.	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota			91.240.000		82.897.500	50	90,86		
		Terlaksananya pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	1		0		0	0		

			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	1		1		0	0		
1854.	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	16.000.000		12.897.500	100	80,61		
		Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0	0		
1855.	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	-		-	0	0		
		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1		0		0	0		
1856.	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	1	-		-	0	0		
		Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	75.240.000		70.000.000	100	93,04		
1857.	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	1		1		100	0		
		Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	1	-		-	0	0		
1858.	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen)	1		0		0	0		
		Terlaksananya analisis dampak lalu lintas	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	1	-		-	0	0		
1859.	2.15.02.2.07.0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen)	1		0		0	0		
		Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin									
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			5.683.410.892		4.868.508.550	58,12	85,66		
1860.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.711.807.392		3.062.939.468	62,95	82,52	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dalam Hal Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Administrasi Umum	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (Bahasa)			75		0	0		
			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			400		0	0		
1861.	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	-		-	100	0		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
1862.	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-	100	0		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12		12		100	0		
1863.	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1864.	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1865.	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1866.	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1867.	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1868.	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.128.974.942		2.608.760.744	78,57	83,37		
		Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Secara Tertib dan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27		27		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7		4		0	0		
1869.	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.128.974.942		2.608.760.744	100	83,37		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27		27		100	0		

1870.	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		-		-	57,14	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7		4	57,14	0		
1871.	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-		-	0	0		
		Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0	0	0		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0	0	0		
1872.	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0	0	0		
1873.	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-		-	0	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0	0	0		
1874.	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		192.300.685		179.517.285	40,74	93,35		
		Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		1	0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0	0	0		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		0	0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10	0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		4	0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		2	0	0		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0	0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4		1	0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		8	0	0		
1875.	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.500.000		3.498.000	25	99,94		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		1	25	0		
1876.	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0	0	0		

1877.	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			-	-	0	0		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		0	0	0		
1878.	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			71.826.585	69.427.985	100	96,66		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10	100	0		
1879.	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			52.191.000	51.541.000	100	98,75		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		4	100	0		
1880.	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			15.000.000	11.500.000	50	76,67		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		2	50	0		
1881.	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			-	-	0	0		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0	0	0		
1882.	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			4.000.000	1.864.800	25	46,62		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4		1	25	0		
1883.	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			45.783.100	41.685.500	66,67	91,05		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		8	66,67	0		
1884.	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			285.504.905	208.338.739	87,5	72,97		
		Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		4	0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12	0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		3	0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		9	0	0		
1885.	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.500.000	1.500.000	100	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		4	100	0		
1886.	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			67.920.000	66.384.874	100	97,74		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12	100	0		
1887.	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.584.905	5.584.905	75	73,63		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		3	75	0		

1888.	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			208.500.000		134.868.960	75	64,69		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		9		75	0		
1889.	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			105.026.860		66.322.700	50	63,15		
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang di Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		5		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
1890.	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			105.026.860		66.322.700	100	63,15		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		5		100	0		
1891.	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
1892.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			414.863.400		385.910.792	46,11	93,02	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)			100		0	0		
1893.	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			414.863.400		385.910.792	46,11	93,02		
		Terlaksananya Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	50		30		0	0		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	1		0		0	0		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	6		1		0	0		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	6		6		0	0		
			Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	250		250		0	0		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	5		0		0	0		
1894.	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media			195.500.000		189.989.500	60	97,18		

		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	50		30		60	0		
1895.	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			-		-	0	0		
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	1		0		0	0		
1896.	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik			137.863.400		120.263.400	16,67	87,23		
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	6		1		16,67	0		
1897.	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			81.500.000		75.657.892	100	92,83		
		Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	6		6		100	0		
1898.	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten			-		-	100	0		
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	250		250		100	0		
1899.	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik			-		-	0	0		
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	5		0		0	0		
1900.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			1.556.740.100		1.419.658.290	50	91,19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE (Indeks)			2,84		0	0		
1901.	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.556.740.100		1.419.658.290	50	91,19		
		Terlaksananya Pengelolaan E-Government di Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	2		0		0	0		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah (Aplikasi)	1		0		0	0		
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas (unit)	0		0		0	0		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	6		6		0	0		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	24		24		0	0		

1902.	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional			380.000		380.000	0	100		
		Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	2		0		0	0		
1903.	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			198.195.100		189.678.830	100	95,7		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (Laporan)	1		1		100	0		
1904.	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			-		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1		0		0	0		
1905.	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pembangunan dan/atau Pengembangan aplikasi khusus SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah (Aplikasi)	1		0		0	0		
1906.	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas			1.250.000		1.250.000	0	100		
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas (unit)	0		0		0	0		
1907.	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			198.815.000		82.815.000	100	41,65		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	6		6		100	0		
1908.	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE			1.158.100.000		1.145.534.460	100	98,91		
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	24		24		100	0		
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			13.491.000		13.491.000	75	100		
1909.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-	0	0	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH	
			Persentase terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (DISDAKPERINKOP) (%)	100		100		100	0		
1910.	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-	0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
1911.	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		

1912.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			180.000		180.000	100	100	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH	
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (persen)	82		82		100	0		
1913.	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			180.000		180.000	100	100		
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	50		50		0	0		
1914.	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			180.000		180.000	100	100		
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	50		50		100	0		
1915.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			13.011.000		13.011.000	100	100	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH	
		Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)			0		0	0		
			Persentase Pelatihan SDM Koperasi (Persentase)	100		100		100	0		
1916.	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			13.011.000		13.011.000	100	100		
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	150		150		0	0		
1917.	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			13.011.000		13.011.000	100	100		
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	150		150		100	0		
1918.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			300.000		300.000	100	100	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH	
		Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Persentase)			0		0	0		
			Persentase pertumbuhan UKM (persen)	0,34		0,34		100	0		
1919.	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			300.000		300.000	100	100		
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	50		50		0	0		
1920.	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro			300.000		300.000	100	100		

		Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	50		50		100	0		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			3.307.732.646		2.615.171.335	65,52	79,06		
1921.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.306.322.646		2.613.761.335	75	79,05	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			100		0	0		
			Nilai Evaluasi SAKIP (Predikat)			61		0	0		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	100		100		100	0		
1922.	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.000.000		1.000.000	100	100		
		Jumlah Dokumen Perencanaan yang berkualitas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		2		0	0		
1923.	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			300.000		300.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1924.	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			300.000		300.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1925.	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			200.000		200.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1926.	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			200.000		200.000	100	100		

		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1927.	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		2		100	0		
1928.	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.731.592.646		2.062.868.247	100	75,52		
		Jumlah Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan terlaksana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
1929.	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.731.592.646		2.062.868.247	100	75,52		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		12		100	0		
1930.	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1931.	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			29.000.000		29.000.000	33,33	100		
		Jumlah administrasi pengelolaan Pegawai yang dikelola dengan baik	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	200		0		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0		0	0		
1932.	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			29.000.000		29.000.000	100	100		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		100	0		
1933.	2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	200		0		0	0		
1934.	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0		0	0		
1935.	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			95.000.000		95.000.000	71,43	100		
		Jumlah Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		0	0		

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		4		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		0	0		
1936.	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.000.000		6.000.000	50	100		
1937.		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		50	0		
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	0	0		
1938.		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0	0		
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			43.000.000		43.000.000	50	100		
1939.		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		50	0		
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			6.000.000		6.000.000	100	100		
1940.		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		4		100	0		
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			9.000.000		9.000.000	100	100		
1941.		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		100	0		
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			16.000.000		16.000.000	100	100		
1942.		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2		2		100	0		
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15.000.000		15.000.000	100	100		
1943.		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		100	0		
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	0	0		
1944.		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6		0		0	0		
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-	0	0		
1945.		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6		0		0	0		
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			393.230.000		375.414.088	100	95,47		
		Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		3		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
1946.	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.230.000		1.230.000	100	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
1947.	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			105.200.000		92.584.088	100	88,01		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		100	0		
1948.	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.720.000		6.720.000	100	100		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		3		100	0		
1949.	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			280.080.000		274.880.000	100	98,14		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
1950.	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			56.500.000		50.479.000	50	89,34		
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9		9		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
1951.	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			56.500.000		50.479.000	100	89,34		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9		9		100	0		
1952.	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
1953.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				-		-	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)			100		0	0		
1954.	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0	0		

		Prosentase terpenuhinya pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di Kabupaten Bengkulu Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		0		0	0		
1955.	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		0		0	0		
1956.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			1.410.000		1.410.000	33,33	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)		100			0	0		
			Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti (persen)	100	100			100	0		
1957.	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			1.410.000		1.410.000	33,33	100		
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	100	100			0	0		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	100	0			0	0		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	6	0			0	0		
1958.	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			1.410.000		1.410.000	100	100		
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	100	100			100	0		
1959.	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			-		-	0	0		
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	100	0			0	0		
1960.	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			-		-	0	0		
		Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	6	0			0	0		

1961.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				-			0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)			100			0	0		
			Persentase perusahaan yang dilakukan pengendalian (persen)	100		100			100	0		
1962.	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				-			0	0		
		Persentase Realisasi Investasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	100		0			0	0		
1963.	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				-			0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	100		0			0	0		
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA				7.972.651.998		5.981.128.263	62,6	75,02		
1964.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.322.651.998		3.164.629.452	81,06	73,21	DINAS PEMUDA DAN OLAAH RAGA	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Persentase terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (Dispora) (persen)	100					0	0		
			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			100			0	0		
1965.	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.900.300		5.450.000	100	92,37		
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2			0	0		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1			0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1			0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		2			0	0		
1966.	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.200.000		5.050.000	100	97,12		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2			100	0		
1967.	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				200.000		200.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1			100	0		

1968.	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			200.000		200.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1969.	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			300.300		-	100	0		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		2		100	0		
1970.	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.646.538.498		2.625.045.428	66,86	71,99		
		Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43		36		0	0		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2		1		0	0		
1971.	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.646.338.498		2.625.045.428	83,72	71,99		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43		36		83,72	0		
1972.	2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			200.000		-	50	0		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2		1		50	0		
1973.	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			135.800.000		135.800.000	100	100		
		Persentase Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		2		0	0		
1974.	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			135.800.000		135.800.000	100	100		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		2		100	0		
1975.	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			173.623.500		142.873.438	63,18	82,29		
		Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		4		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	18		4		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	23		3		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	30		1		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		1		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		

			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
1976.	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			11.000.000		10.000.000	80	90,91		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		4		80	0		
1977.	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	22,22	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	18		4		22,22	0		
1978.	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.250.000		-	13,04	0		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	23		3		13,04	0		
1979.	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			17.500.000		-	3,33	0		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	30		1		3,33	0		
1980.	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			-		-	100	0		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
1981.	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100.000.000		99.999.938	50	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		1		50	0		
1982.	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			16.400.000		5.400.000	100	32,93		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100	0		
1983.	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			27.473.500		27.473.500	100	100		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1984.	2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-		-	100	0		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1985.	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	100	0		
		Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		2		0	0		
1986.	2.19.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	100	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		2		100	0		
1987.	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			315.089.700		223.049.586	100	70,79		
		Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
1988.	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			18.000.000		9.610.548	100	53,39		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
1989.	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			297.089.700		213.439.038	100	71,84		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
1990.	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			45.700.000		32.411.000	100	70,92		
		Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		0	0		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		4		0	0		
1991.	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			45.700.000		32.411.000	100	70,92		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		100	0		
1992.	2.19.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		4		100	0		
1993.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			810.930.896		623.740.476	51,67	76,92	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda kader, pelopor dan kreatif yang aktif dalam pembangunan (Orang)	1.570		6,28		0,4	0		
			Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)			2,42		0	0		
1994.	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			810.930.896		623.740.476	66,43	76,92		
		Meningkatnya Keikutsertaan Pemuda Pelopor, Wirausaha muda pemula, dan Pemuda Kader di Bengkulu Tengah Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	30		10		0	0		
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	20		25		0	0		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	1		1		0	0		

			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	20		0		0	0		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	75		80		0	0		
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	1		0		0	0		
1995.	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota			150.000.000		149.250.000	100	99,5		
		Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	1		1		100	0		
1996.	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota			-		-	33,33	0		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	30		10		33,33	0		
1997.	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda			204.692.096		201.445.896	125	98,41		
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	20		25		125	0		
1998.	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota			-		-	100	0		
		Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	1		1		100	0		
1999.	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota			-		-	0	0		
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	20		0		0	0		
2000.	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota			456.238.800		273.044.580	106,67	59,85		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	75		80		106,67	0		
2001.	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota			-		-	0	0		

		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana kepemudaan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	1		0		0	0		
2002.	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	1	-	0	-	0	0		
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	50		0		0	0		
2003.	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota			-		-	0	0		
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	1		0		0	0		
2004.	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/ Kota			-		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	50		0		0	0		
2005.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			2.739.069.104		2.092.758.335	47,06	76,4	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase SDM Olah Ragawan yang dibina (persen)	50		50		100	0		
			Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)			3,6		0	0		
			Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional/wilayah (Orang)	35		35		100	0		
2006.	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			438.000.000		378.936.992	50	86,52		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Tersampainya Alat Olahraga Ke Cabor terpilih	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota (Unit)	5		0		0	0		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen)	1		1		0	0		
2007.	2.19.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota			-		-	0	0		

		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota (Unit)	5		0		0	0		
2008.	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			-		-	50	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2		1		50	0		
2009.	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar			438.000.000		378.936.992	100	86,52		
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen)	1		1		100	0		
2010.	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			151.378.000		143.185.360	33,33	94,59		
		Meningkatnya Jumlah Atlit yang berprestasi dan di bina Terselenggaranya Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	3		3		0	0		
			Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan)	1		0		0	0		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	100		0		0	0		
2011.	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota			151.378.000		143.185.360	100	94,59		
		Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota (Kegiatan)	3		3		100	0		
2012.	2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota			-		-	0	0		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan)	1		0		0	0		
2013.	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			-		-	0	0		
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	100		0		0	0		
2014.	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			-		-	30	0		
		Meningkatnya Jumlah atlit Berprestasi yang dibina Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	100		50		0	0		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	100		0		0	0		

			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	30		0		0	0		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	20		20		0	0		
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	1		0		0	0		
2015.	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah			-		-	50	0		
		Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	100		50		50	0		
2016.	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga			-		-	0	0		
		Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	100		0		0	0		
2017.	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	30		0		0	0		
2018.	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	20		20		100	0		
2019.	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota			-		-	0	0		
		Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	1		0		0	0		
2020.	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			1.111.426.104		604.763.314	50	54,41		
		Jumlah organisasi Keolahragaan yang dibantu Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait (Rakorkab) Meningkatnya Penerima Penghargaan Organisasi Keolahragaan yang Berprestasi	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0	0		
2021.	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota			-		-	0	0		
		Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	1		0		0	0		
2022.	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait			1.111.426.104		604.763.314	100	54,41		
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100	0		
2023.	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			1.038.265.000		965.872.669	75	93,03		

		Terlaksananya Lomba Olahraga Tradisional Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	2		0		0	0		
2024.	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			250.000.000		228.176.684	100	91,27		
2025.		Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	1		1		100	0		
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan			464.100.000		435.954.880	100	93,94		
2026.		Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	1		1		100	0		
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat			324.165.000		301.741.105	100	93,08		
2027.		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional			-		-	0	0		
		Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	2		0		0	0		
2028.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			100.000.000		100.000.000	50	100	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Presentase Organisasi Kepramukaan yang aktif (persen)	100				0	0		
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)			100		0	0		
2029.	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			100.000.000		100.000.000	50	100		
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah (Hibah Peramuka) Terlaksananya Bantuan Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	1		1		0	0		
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	50		0		0	0		
2030.	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			100.000.000		100.000.000	100	100		
2031.		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	1		1		100	0		
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah			-		-	0	0		
		Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	50		0		0	0		

	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			35.940.000		28.940.000	100	80,52		
2032.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			35.940.000		28.940.000	100	80,52	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)			2,76		0	0		
2033.	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			35.940.000		28.940.000	100	80,52		
		Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	33		33		0	0		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu (Persentase)	80		80		0	0		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Dokumen)	10		10		0	0		
2034.	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			20.145.400		20.145.400	100	100		
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	33		33		100	0		
2035.	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral			-		-	100	0		
		Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu (Persentase)	80		80		100	0		
2036.	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia			15.794.600		8.794.600	100	55,68		
		Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Dokumen)	10		10		100	0		
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			450.000		450.000	100	100		
2037.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			450.000		450.000	100	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)			1,36		0	0		
2038.	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			450.000		450.000	100	100		
		Tersedianya Penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	41		41		0	0		
2039.	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			450.000		450.000	100	100		
		Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	41		41		100	0		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			695.574.000		695.574.000	62,5	100		
2040.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			340.954.000		340.954.000	75	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Jumlah wisatawan budaya (persen)	160		80		50	0		
			Jumlah Pengunjung Wisatawan Budaya (Orang)	160		160		100	0		

			Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)			20		0	0		
2041.	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			85.000.000		85.000.000	100	100		
		Jumlah Pengunjung Objek Wisata	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	10		10		0	0		
2042.	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			85.000.000		85.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	10		10		100	0		
2043.	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			249.884.000		249.884.000	50	100		
		Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	1		0		0	0		
2044.	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			249.884.000		249.884.000	100	100		
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	1		1		100	0		
2045.	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	1		0		0	0		
2046.	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			6.070.000		6.070.000	100	100		
		Jumlah Lembaga Adat yang diberi pembinaan	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	10		10		0	0		
2047.	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat			6.070.000		6.070.000	100	100		
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	10		10		100	0		
2048.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			-		-	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Festival yang diikuti (persen)	4		0		0	0		
			Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)			0		0	0		
2049.	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Persentase Festival yang diikuti	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1		0		0	0		
2050.	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			-		-	0	0		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1		0		0	0		
2051.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			354.620.000		354.620.000	66,67	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

		Meningkatnya Warisan Budaya Yang Dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)		11		0	0		
2052.	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		4.620.000		4.620.000	50	100		
		Persentase benda ,bangunan,struktur,situs dan kawasan cagar budaya yang telah diregistrasi	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	3	3		0	0		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	1	0		0	0		
2053.	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		4.620.000		4.620.000	100	100		
		Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	3	3		100	0		
2054.	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya		-		-	0	0		
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	1	0		0	0		
2055.	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		350.000.000		350.000.000	100	100		
		Persentase benda ,bangunan,struktur,situs dan kawasan cagar budaya yang telah diregistrasi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2	2		0	0		
2056.	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya		350.000.000		350.000.000	100	100		
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2	2		100	0		
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		7.761.252.331		6.869.836.656	100,55	88,51		
2057.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.067.548.756		4.234.432.316	113,36	83,56	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpenuhi	Persentase terwujudnya program penunjang urusan pemerintah daerah yg mendukung kelancaran tugas dan pungsi OPD (Perpusip) (persen)	100	100		100	0		
			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)		100		0	0		
			Persentase Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas OPD (Persen)	100	100		100	0		
			Nilai Evaluasi SAKIP (Predikat)		71		0	0		
2058.	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.105.000		2.105.000	180	100		
		Tersedianya Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	4		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		0	0		

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
2059.	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.105.000		2.105.000	400	100		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		4		400	0		
2060.	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2061.	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-		-	200	0		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		2		200	0		
2062.	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2063.	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2064.	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.705.950.847		3.929.345.415	98,04	83,5		
		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	51		48		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		4		0	0		
2065.	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.705.950.847		3.929.345.415	94,12	83,5		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	51		48		94,12	0		
2066.	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2067.	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			-		-	100	0		

		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		4		100	0		
2068.	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-			- 200	0		
		Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		4		0	0		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
2069.	2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-			- 400	0		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		4		400	0		
2070.	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-			- 0	0		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
2071.	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-			- 0	0		
		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1		0		0	0		
2072.	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-			- 0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0	0		
2073.	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-			- 0	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1		0		0	0		
2074.	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			28.897.750		28.551.300	125	98,8		
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		4		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		2		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		2		0	0		

			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
2075.	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.620.000		7.620.000	400	100		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		4		400	0		
2076.	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
2077.	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.000.000		4.991.300	100	99,83		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2078.	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			800.000		800.000	100	100		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2079.	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.500.000		7.200.000	200	96		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		2		200	0		
2080.	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			-		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0	0		
2081.	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			7.977.750		7.940.000	200	99,53		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		2		200	0		
2082.	2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-		-	0	0		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
2083.	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	0	0		
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0	0		
2084.	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-	0	0		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
2085.	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0	0		
2086.	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			264.990.559		209.725.301	125	79,14		

		Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		2		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		2		0	0		
2087.	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			300.000		300.000	100	100		
2088.		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			125.000.000		94.585.301	200	75,67		
2089.		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		2		200	0		
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	0	0		
2090.		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0	0		
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			139.690.559		114.840.000	200	82,21		
2091.		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		2		200	0		
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			65.604.600		64.705.300	40	98,63		
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		4		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		0		0	0		
2092.	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			65.604.600		64.705.300	80	98,63		
2093.		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		4		80	0		
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-	0	0		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		0		0	0		
2094.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			2.693.703.575		2.635.404.340	60,7	97,84	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Tenaga Perpustakaan yang Bersertifikasi (persen)	100		100		100	0		
			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (persen)	100		25		25	0		

2095.	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		361.670.000		359.604.715	54,26	99,43		
		Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	3		0		0	0	
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	1		0		0	0	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	1500		1.300		0	0	
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	65		55		0	0	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	1		1		0	0	
2096.	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-		-	0	0		
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	3		0		0	0	
2097.	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		-		-	0	0		
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	1		0		0	0	
2098.	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan		225.000.000		224.805.000	86,67	99,91		
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	1500		1.300		86,67	0	
2099.	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota		116.670.000		114.849.685	84,62	98,44		
		Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	65		55		84,62	0	
2100.	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		20.000.000		19.950.030	100	99,75		
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	1		1		100	0	
2101.	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.332.033.575		2.275.799.625	68,75	97,59		
		Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	1		0		0	0	
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah	1		1		0	0	

			Kabupaten/Kota (Perpustakaan)								
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	50		45		0	0		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	100		85		0	0		
2102.	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	1		0		0	0		
2103.	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.636.203.575		1.598.703.575	100	97,71		
		Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	1		1		100	0		
2104.	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			178.170.000		175.589.000	90	98,55		
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	50		45		90	0		
2105.	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			517.660.000		501.507.050	85	96,88		
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	100		85		85	0		
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			7.800.000		4.800.000	16	61,54		
2106.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			7.800.000		4.800.000	20	61,54	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)					0	0		
			Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Kearsipan Secara Baik (persen)	100		95		95	0		
2107.	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			6.300.000		4.800.000	80	76,19		
		Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	5		4		0	0		
2108.	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			6.300.000		4.800.000	80	76,19		
		Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	5		4		80	0		
2109.	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	25		0		0	0		
2110.	2.24.02.2.02.0004	Akusisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			-		-	0	0		

		Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	25		0		0	0		
2111.	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			1.500.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pegguna)	40		0		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0	0		
2112.	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			-		-	0	0		
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pegguna)	40		0		0	0		
2113.	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			1.500.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0	0		
2114.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				-		-	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)			12		0	0		
			Persentase OPD yang menyerahkan arsip (persen)	100		95		95	0		
2115.	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	20		0		0	0		
2116.	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			-		-	0	0		
		Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	20		0		0	0		
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			1.006.526.900		530.728.230	83,35	52,73		
2117.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			840.000.000		364.984.650	100	43,45	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)			1.474		0	0		
2118.	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			-		-	100	0		
		Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		1		0	0		

2119.	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		-	-	100	0		
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	100	0		
2120.	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		840.000.000	364.984.650	100	43,45		
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	50	50	0	0		
2121.	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		840.000.000	364.984.650	100	43,45		
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	50	50	100	0		
2122.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		157.370.000	156.586.700	100	99,5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		665,54	0	0		
2123.	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		157.370.000	156.586.700	100	99,5		
		Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	0	0		
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	1	1	0	0		
2124.	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		69.720.000	69.400.000	100	99,54		
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	100	0		
2125.	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		87.650.000	87.186.700	100	99,47		
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	1	1	100	0		
2126.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		9.156.900	9.156.880	50,05	100	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)		27,59	0	0		
2127.	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		9.156.900	9.156.880	100	100		
		Ada nya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Keci	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	1	1	0	0		
2128.	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		9.156.900	9.156.880	100	100		
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan	1	1	100	0		

			Risiko (Unit Usaha)								
2129.	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		-		-	0,1	0			
		Persentase jumlah penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	1467.316	1.467		0	0			
2130.	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		-		-	0,1	0			
		Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Ton)	1467.316	1.467		0,1	0			
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		3.968.847.931		2.382.323.605	90,54	60,03			
2131.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.968.847.931		2.382.323.605	88,59	60,03	DINAS PARIWISATA		
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Dalam Hal Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum	Persentase terwujudnya program penunjang urusan daerah kab/kota yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (persen)	100	80		80	0			
			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)		0		0	0			
			Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (Bahasa)		0		0	0			
			Persentase Terwujudnya Program Penunjang Urusan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD (Persen)	100	80		80	0			
2132.	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.100.000		-	89,23	0			
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		0	0			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		0	0			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		0	0			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		0	0			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		0	0			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		0	0			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		0	0			

			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4		4		0	0		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5		4		0	0		
			Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	5		4		0	0		
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	1		1		0	0		
2133.	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			600.000		-	100	0		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
2134.	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			500.000		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2135.	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2136.	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2137.	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2138.	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2139.	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-	100	0		

		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
2140.	3.26.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			-		-	0	0		
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		0	0		
2141.	3.26.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4		4		100	0		
2142.	3.26.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-	100	0		
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1		1		100	0		
2143.	3.26.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			-		-	80	0		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5		4		80	0		
2144.	3.26.01.2.01.0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu			-		-	80	0		
		Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	5		4		80	0		
2145.	3.26.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan			-		-	100	0		
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	1		1		100	0		
2146.	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.499.725.931		2.160.967.985	86,25	61,75		
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30		27		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		1		0	0		

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		1		0	0		
2147.	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.499.725.931		2.160.967.985	90	61,75		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	30		27		90	0		
2148.	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-		-	100	0		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		1		100	0		
2149.	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			-		-	0	0		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
2150.	3.26.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			-		-	100	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2151.	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2152.	3.26.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			-		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		1		100	0		
2153.	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2154.	3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			-		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		1		100	0		
2155.	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-		-	100	0		
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		

			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
2156.	3.26.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2157.	3.26.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2158.	3.26.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2159.	3.26.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2160.	3.26.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-	100	0		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2161.	3.26.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-	100	0		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2162.	3.26.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2163.	3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			-		-	100	0		
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	1		1		0	0		

			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
2164.	3.26.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			-		-	100	0		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
2165.	3.26.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			-		-	100	0		
		Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
2166.	3.26.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah			-		-	100	0		
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
2167.	3.26.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah			-		-	100	0		
		Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
2168.	3.26.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
2169.	3.26.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah			-		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
2170.	3.26.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
2171.	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	89,39	0		
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	10		5		0	0		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	30		10		0	0		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	1		1		0	0		

			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	2		2		0	0		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		10		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		5		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		5		0	0		
2172.	3.26.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			-		-	50	0		
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	10		5		50	0		
2173.	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	33,33	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	30		10		33,33	0		
2174.	3.26.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		1		100	0		
2175.	3.26.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			-		-	100	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		1		100	0		
2176.	3.26.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			-		-	100	0		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		1		100	0		
2177.	3.26.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	1		1		100	0		
2178.	3.26.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	1		1		100	0		
2179.	3.26.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	2		2		100	0		
2180.	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		10		100	0		
2181.	3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	100	0		
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		5		100	0		

2182.	3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	100	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		5		100	0		
2183.	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			173.212.000		86.268.804	81,82	49,81		
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		15		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10		6		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		10		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	50		5		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		4		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
2184.	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-		-	100	0		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		100	0		
2185.	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	100	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		15		100	0		
2186.	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			-		-	60	0		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10		6		60	0		
2187.	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			40.000.000		19.677.500	50	49,19		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		10		50	0		
2188.	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			18.212.000		7.217.000	10	39,63		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	50		5		10	0		
2189.	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			30.000.000		10.000.000	100	33,33		

		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangn yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100	0		
2190.	3.26.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			-		-	80	0		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		4		80	0		
2191.	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			30.000.000		17.500.050	100	58,33		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100	0		
2192.	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			55.000.000		31.874.254	100	57,95		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2193.	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			-		-	100	0		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2194.	3.26.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-		-	100	0		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2195.	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		26.990.000	73,71	0		
		Meningkatkan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		3		0	0		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		3		0	0		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10		4		0	0		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7		2		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0	0		
2196.	3.26.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-	100	0		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		3		100	0		
2197.	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		26.990.000	100	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		3		100	0		
2198.	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-	40	0		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10		4		40	0		
2199.	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-	28,57	0		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7		2		28,57	0		
2200.	3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	100	0		

		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100	0		
2201.	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			136.810.000		108.096.816	85,42	79,01		
		Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		5		0	0		
2202.	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-		-	100	0		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
2203.	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			37.600.000		18.776.816	100	49,94		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2204.	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	100	0		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2205.	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			99.210.000		89.320.000	41,67	90,03		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		5		41,67	0		
2206.	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			158.000.000		-	89,33	0		
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		4		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		3		0	0		
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	4		4		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		4		0	0		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		2		0	0		
2207.	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			158.000.000		-	100	0		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		4		100	0		

2208.	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	-	100	0		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	100	0		
2209.	3.26.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		-	-	100	0		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	4	4	100	0		
2210.	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-	80	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	4	80	0		
2211.	3.26.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		-	-	66,67	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	2	66,67	0		
2212.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		-	-	89,63	0	DINAS PARIWISATA	
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	persentase objek wisata yang ditingkatkan (persen)	65	60	92,31	0		
			Persentase Objek Wisata dan Kunjungan Wisatawan yang Ditingkatkan (Persen)	50	75	150	0		
			persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (persen)	65	60	92,31	0		
			Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)		0	0	0		
2213.	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		-	-	76,67	0		
		Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3	2	0	0		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3	2	0	0		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	0	0		
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	20	10	0	0		
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	0	0		
2214.	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		-	-	66,67	0		
		Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3	2	66,67	0		
2215.	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		-	-	66,67	0		

		Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3		2		66,67	0		
2216.	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			-			100	0		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		100	0		
2217.	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			-			50	0		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	20		10		50	0		
2218.	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			-			100	0		
		Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100	0		
2219.	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			-			93,33	0		
		Meningkatnya Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0	0		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3		3		0	0		
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	20		12		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		0	0		
2220.	3.26.02.2.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			-			100	0		
		Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100	0		
2221.	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			-			100	0		
		Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100	0		
2222.	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			-			100	0		
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	1		1		100	0		
2223.	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			-			100	0		

		Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3		3		100	0		
2224.	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			-		-	60	0		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	20		12		60	0		
2225.	3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			-		-	100	0		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		100	0		
2226.	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			-		-	100	0		
		Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	5		5		0	0		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3		3		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3		3		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3		3		0	0		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/Kota (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya (Dokumen)	1		1		0	0		
2227.	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			-		-	100	0		
		Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	5		5		100	0		
2228.	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			-		-	100	0		
		Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100	0		
2229.	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3		3		100	0		

2230.	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		-	-	100	0		
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3	3	100	0		
2231.	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		-	-	100	0		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	100	0		
2232.	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		-	-	100	0		
		Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3	3	100	0		
2233.	3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	100	0		
		Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen)	1	1	100	0		
2234.	3.26.02.2.03.0009	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya		-	-	100	0		
		Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya (Dokumen)	1	1	100	0		
2235.	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		-	-	84,58	0		
		Meningkatnya Usaha Pariwisata Daerah Yang Memiliki Tanda Daftar	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata)	15	10	0	0		
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi (Usaha)	30	21	0	0		
			Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 (Usaha)	15	12	0	0		
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota (Dokumen)	1	1	0	0		
			Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi (Usaha)	15	9	0	0		
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (Laporan)	1	1	0	0		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan)	1	1	0	0		
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) (Unit Usaha)	5	5	0	0		
2236.	3.26.02.2.04.0006	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota		-	-	66,67	0		

		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021)Terjaganya konsistensi pelaksanaan standar CHSE	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata)	15		10		66,67	0		
2237.	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota			-		-	70	0		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi (Usaha)	30		21		70	0		
2238.	3.26.02.2.04.0008	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota			-		-	80	0		
		Terlaksananya sertifikasi SNI 9042:2021	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 (Usaha)	15		12		80	0		
2239.	3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota			-		-	100	0		
		Tersedianya Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota (Dokumen)	1		1		100	0		
2240.	3.26.02.2.04.0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)			-		-	60	0		
		Meningkatnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikat standar usaha dari lembaga OSS	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi (Usaha)	15		9		60	0		
2241.	3.26.02.2.04.0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota			-		-	100	0		
		Terlaksananya komitmen melaksanakan standar usaha	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (Laporan)	1		1		100	0		
2242.	3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota			-		-	100	0		
		Meningkatnya Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan)	1		1		100	0		
2243.	3.26.02.2.04.0013	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)			-		-	100	0		
		Terfasilitasinya Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menegah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) (Unit Usaha)	5		5		100	0		
2244.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			-		-	100	0	DINAS PARIWISATA	
		Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)			0		0	0		
			Persentase Peningkatan Frekuensi Promosi Pariwisata (Persen)	80		75		93,75	0		
2245.	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			-		-	100	0		
		Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1		1		0	0		

			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3		3		0	0		
2246.	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			-		-	100	0		
		Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1		1		100	0		
2247.	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			-		-	100	0		
		Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1		1		100	0		
2248.	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			-		-	100	0		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	1		1		100	0		
2249.	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Kabupaten/Kota			-		-	100	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	1		1		100	0		
2250.	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			-		-	100	0		
		Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3		3		100	0		
2251.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				-		-	97,22	0	DINAS PARIWISATA
		Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)			0		0	0		
			Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (persen)	70		60		85,71	0		
2252.	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Bereksprei, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota			-		-	100	0		
		Meningkatnya Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Bereksprei, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	3		3		0	0		
2253.	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif			-		-	100	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	3		3		100	0		
2254.	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			-		-	97,06	0		

		Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia (Unit)	5		5		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Insentif yang Diberikan (Pelaku Usaha)	20		15		0	0		
			Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	10		10		0	0		
			Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah (Pelaku Usaha)	10		10		0	0		
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah terlaksanakannya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	1		1		0	0		
			Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah (Kebijakan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	20		15		0	0		
2255.	3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan			-		-	100	0		
		Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen)	1		1		100	0		
2256.	3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan			-		-	100	0		
		Terfasilitasinya Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Laporan)	1		1		100	0		

2257.	3.26.04.2.02.0004	Penyediaan Infrastruktur			-		-	100	0		
		Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia (Unit)	5		5		100	0		
2258.	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran			-		-	100	0		
		Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1		1		100	0		
2259.	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif			-		-	100	0		
		Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1		1		100	0		
2260.	3.26.04.2.02.0011	Fasilitasi pemberian insentif			-		-	75	0		
		Terlaksananya fasilitasi pemberian insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan (Pelaku Usaha)	20		15		75	0		
2261.	3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah			-		-	100	0		
		Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	10		10		100	0		
2262.	3.26.04.2.02.0013	Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)			-		-	100	0		
		Terlaksananya bantuan pelaku usaha ekonomi kreatif (Banper)	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah (Pelaku Usaha)	10		10		100	0		
2263.	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual			-		-	100	0		
		Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	2		2		100	0		
2264.	3.26.04.2.02.0015	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual			-		-	100	0		
		Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual (Dokumen)	1		1		100	0		
2265.	3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah			-		-	100	0		
		Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
2266.	3.26.04.2.02.0017	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif			-		-	100	0		
		Terlaksanakanya pendudukan pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendudukan pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	1		1		100	0		
2267.	3.26.04.2.02.0018	Penyusunan Skema Insentif Daerah			-		-	100	0		
		Terlaksananya skema insentif ekonomi kreatif daerah	Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif (Dokumen)	1		1		100	0		
2268.	3.26.04.2.02.0019	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah			-		-	100	0		
		Terselenggaranya Formulasi kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah (Kebijakan)	1		1		100	0		
2269.	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			-		-	100	0		

		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan)	1		1	100	0		
2270.	3.26.04.2.02.0021	Perlindungan Hasil Kreativitas			-	-	100	0		
		Terlindunginya Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1		1	100	0		
2271.	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual			-	-	75	0		
		Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	20		15	75	0		
2272.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			-	-	90,14	0	DINAS PARIWISATA	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)			0	0	0		
			Persentase pelaku ekraf yang ditingkatkan kompetensinya (persen)	65		60	92,31	0		
			Persentase Pelaku Ekraf yang Ditingkatkan Kompetensinya (persen)	70		65	92,86	0		
2273.	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			-	-	90,28	0		
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	1		1	0	0		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	20		20	0	0		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	20		20	0	0		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	20		15	0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	30		20	0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	1		1	0	0		
2274.	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif			-	-	100	0		
		Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	1		1	100	0		
2275.	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			-	-	100	0		
		Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	20		20	100	0		

2276.	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI		-	-	100	0		
		Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	20	20	100	0		
2277.	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata		-	-	75	0		
		Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	20	15	75	0		
2278.	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		-	-	66,67	0		
		Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	30	20	66,67	0		
2279.	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		-	-	100	0		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	1	1	100	0		
2280.	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		-	-	90	0		
		Meningkatnya Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	20	20	0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha (Laporan)	1	1	0	0		
			Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal (Lembaga)	10	10	0	0		
			Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	20	18	0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/ Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	20	20	0	0		
			Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	20	10	0	0		
2281.	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		-	-	100	0		
		Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	20	20	100	0		
2282.	3.26.05.2.02.0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha		-	-	100	0		
		Terlaksananya Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha (Laporan)	1	1	100	0		
2283.	3.26.05.2.02.0004	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif		-	-	100	0		
		Terfasilitasinya Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal (Lembaga)	10	10	100	0		

2284.	3.26.05.2.02.0005	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Subsektor Ekonomi Kreatif	Recognition Current Competencies (RCC)		-	-	90	0		
		Terlaksanya Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	20	18		90	0		
2285.	3.26.05.2.02.0006	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif			-	-	100	0		
		Meningkatnya Kapasitas Asesor Kompetensi/ Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	20	20		100	0		
2286.	3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif			-	-	50	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Profesi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	20	10		50	0		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			10.633.343.095		8.711.441.343	91,08	81,93	
2287.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.613.489.250		7.976.558.717	61,76	82,97	DINAS PERTANIAN
		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpenuhi	Persentase terlaksananya penunjang urusan daerah kab/kota (Pertanian) (persen)	100	100		100	0		
			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)		100		0	0		
2288.	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.226.900		9.120.000	62,5	20,16	
		Persentase Capaian Urusan Perencanaan , Keuangan Kepegawaian, Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	1		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		0	0		
2289.	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			36.886.900		6.120.000	25	16,59	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	1		25	0		
2290.	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8.340.000		3.000.000	100	35,97	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		100	0		
2291.	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.865.546.595		7.721.045.048	100	87,09	
		Persentase Capaian Urusan Perencanaan , Keuangan Kepegawaian, Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	98	98		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		0	0		
2292.	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.865.546.595		7.721.045.048	100	87,09	

		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	98		98		100	0		
2293.	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2294.	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			28.000.000		28.000.000	100	100		
		Persentase Capaian Urusan Perencanaan , Keuangan Kepegawaian, Administrasi Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		2		0	0		
2295.	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			28.000.000		28.000.000	100	100		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		2		100	0		
2296.	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			161.617.155		130.961.446	66,67	81,03		
		Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
2297.	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			23.500.000		23.500.000	100	100		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2298.	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			93.540.155		93.471.446	0	99,93		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
2299.	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.000.000		-	100	0		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2300.	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.220.000		7.220.000	0	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0	0		
2301.	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			3.000.000		-	100	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100	0		

2302.	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			29.357.000		6.770.000	100	23,06		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2303.	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			429.798.600		40.376.329	33,33	9,39		
		Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0	0		
2304.	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			45.359.000		37.376.329	100	82,4		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2305.	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000		3.000.000	0	100		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0	0		
2306.	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			381.439.600		-	0	0		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0	0		
2307.	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			83.300.000		47.055.894	41,67	56,49		
		Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20		5		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
2308.	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			3.000.000		-	25	0		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20		5		25	0		
2309.	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			55.300.000		47.055.894	100	85,09		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		1		100	0		
2310.	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25.000.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		

		Bangunan Lainnya									
2311.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			318.500.000		306.768.852	100	96,32	DINAS PERTANIAN	
		Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)			2		0	0		
			Total luas Areal rehabilitasi/intensifikasi/ekstensifikasi (Ha)	64,941				0	0		
			Peningkatan produktifitas Kelapa sawit,Karet,Tanaman Kopi,dan Peningkatan Indek Tanaman Padi dan total luas areal rehabilitasi/intensifikasi/ektensifikasi (Ha/IP)	129,882 /2.4		129,882:2,4		100	0		
			Karet (Ha)	13,370		13,36		99,93	0		
			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)			13.799		0	0		
			Kelapa Sawit (Ha)	49,067		49,05		99,97	0		
			Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)			3.826		0	0		
			Tanaman Kopi (Ha)	2,504		2,5		99,84	0		
			Indeks Pertanaman Padi (IP)	2.2		2,2		100	0		
2312.	3.27.02.2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					318.500.000			
		Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1		1		0	0		
2313.	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			300.000.000		288.268.852	100	96,09		
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1		1		100	0		
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1		1		0	0		
2314.	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			18.500.000		18.500.000	100	100		
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1		1		100	0		
2315.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			216.860.845		159.110.845	85,71	73,37	DINAS PERTANIAN	
		Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Produktivitas padi (Ton/Ha)	5.0		5		100	0		
			Meningkatnya Jumlah produksi tanaman pangan jagung (Ton/Ha)	6,5		6,5		100	0		
			Meningkatnya Indeks Penanaman Padi (IP) (IP)	2		2		100	0		
			Persentase kelompok tani tanaman pangan yang memiliki alat mesin pertanian (persen)	65		65		100	0		
			Meningkatnya Jumlah produksi tanaman Holtikultura Cabe (Ton/Ha)	4		4		100	0		

		Persentase luas lahan sawah yang teraliri aliran irigasi (persen)	72		72		100	0		
		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)			2.022		0	0		
2316.	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian		56.500.000		56.500.000	100	100		
		Cakupan Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	1		0	0		
2317.	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		56.500.000		56.500.000	100	100		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	1		100	0		
2318.	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian		160.360.845		102.610.845	83,33	63,99		
		Cakupan Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1		0	0		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1		0	0		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1		0	0		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1		0	0		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	1	0		0	0		
			Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	1	1		0	0		
2319.	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		60.750.000		3.000.000	100	4,94		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1		100	0		
2320.	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit		-		-	100	0		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1		100	0		
2321.	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya		-		-	100	0		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1		100	0		
2322.	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		-		-	100	0		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1		100	0		
2323.	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		99.610.845		99.610.845	0	100		
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	1	0		0	0		
2324.	3.27.03.2.02.0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak		-		-	100	0		

		Terbangunnya dan Terehabitasinya sarana dan prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	1		1		100	0		
2325.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			61.020.000		14.550.017	275	23,84	DINAS PERTANIAN	
		Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Penurunan Angka Kematian hewan (persen)	0.02		0,02		100	0		
			Peningkatan Peyediaan Pangan Asal Hewan yang aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) dan Penurunan Angka Kematian Hewan (Persen)	0.09				0	0		
			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)			320		0	0		
			Peningkatan Penyediaan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (persen)	0.08		0,08		100	0		
			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)			5		0	0		
2326.	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			41.070.000			- 450	0		
		Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Mnular Strategis (PHMS)	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	1		0		0	0		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1		9		0	0		
2327.	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan			-			- 0	0		
		Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	1		0		0	0		
2328.	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			41.070.000			- 900	0		
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1		9		900	0		
2329.	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			19.950.000		14.550.017	100	72,93		
		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Pra NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1		1		0	0		
2330.	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium			-		6.089.512	100	0		
		Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	1		1		100	0		
2331.	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			19.950.000		8.460.505	100	42,41		
		Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1		1		100	0		
2332.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			-			100	0	DINAS PERTANIAN	
		Meningkatnya Pegendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)			50		0	0		

		Persentase luas lahan sawah yang memiliki asuransi (persen)	40		40		100	0		
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)			20		0	0		
		persentase Luas Lahan Sawah yang Memiliki Asuransi (Persen)	30		30		100	0		
2333.	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		-		-	100	0		
		Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	1	1		0	0		
2334.	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		-		-	100	0		
		Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	1	1		100	0		
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis (laporan)	1	1		0	0		
2335.	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis		-		-	100	0		
		Tertanggulangnya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis (laporan)	1	1		100	0		
2336.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			14.315.000		14.815.000	0	103,49	DINAS PERTANIAN
		Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dikeluarkan (Perusahaan)	2	2		100	0		
			Fasilitasi Usaha Perkebunan besar swasta/nasional (persen)	4	4		100	0		
			Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)		100		0	0		
			Fasilitasi Usaha Perkebunan Besar Swasta / Nasional (Persen)	5	5		100	0		
2337.	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		14.315.000		14.815.000	0	103,49		
		Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Ditingkatkan	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	1	0		0	0		
2338.	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian		14.315.000		14.815.000	0	103,49		
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	1	0		0	0		
2339.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			409.158.000		239.637.912	42,99	58,57	DINAS PERTANIAN
		Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)		55		0	0		
			Persentase Penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya (persen)	10	10		100	0		
			Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)		0		0	0		
			Persentase Penilaian kelas kelompok Tani (kelompok)	62			0	0		
			Jumlah tenaga penyuluhan (Orang)	51	51		100	0		

2340.	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			409.158.000		239.637.912	42,99	58,57		
		Persenyase SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	59		1		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	11		11		0	0		
2341.	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			388.608.000		229.959.999	1,69	59,18		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	59		1		1,69	0		
2342.	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			-		-	100	0		
		Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	11		11		100	0		
		Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	11		3		0	0		
2343.	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			20.550.000		9.677.913	27,27	47,09		
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	11		3		27,27	0		
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			220.500.000		159.450.187	33,33	72,31		
2344.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			220.500.000		159.450.187	33,33	72,31	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Luas akses kelola hutan oleh masyarakat (Ha)			0		0	0		
			Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari (unit)			0		0	0		
			Luas Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) (Kawasan)	1		0		0	0		
2345.	3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota			220.500.000		159.450.187	33,33	72,31		
		Dokumen Pengembangan Kawasan Konservasi (Tahura)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan (Ha)	1		0		0	0		
			Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0		
2346.	3.28.04.2.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA			220.500.000		159.450.187	100	72,31		
		Tersusun dan Ditetapkannya Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan (Dokumen)	1		1		100	0		
2347.	3.28.04.2.01.0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan (Ha)	1		0		0	0		

2348.	3.28.04.2.01.0016	Penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Tersedianya peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			3.498.279.030		3.498.279.030	94,52	100		
2349.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.473.279.030		3.473.279.030	96,97	100	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH	
		Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpenuhi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			0		0	0		
2350.	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			240.000		240.000	70	100		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		2		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
2351.	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-	40	0		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		2		40	0		
2352.	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			240.000		240.000	100	100		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2353.	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.158.521.896		3.158.521.896	105,77	100		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26		29		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
2354.	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.158.521.896		3.158.521.896	111,54	100		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26		29		111,54	0		
2355.	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2356.	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			133.123.198		133.123.198	100	100		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		1		0	0		

			Disediakan (Paket)								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
2357.	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-		-	100	0		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2358.	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			102.600.000		102.600.000	100	100		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
2359.	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			-		-	100	0		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
2360.	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			-		-	100	0		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
2361.	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			14.000.000		14.000.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100	0		
2362.	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			-		-	100	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100	0		
2363.	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			16.523.198		16.523.198	100	100		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2364.	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			152.793.936		152.793.936	100	100		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		

2365.	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			500.000		500.000	100	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
2366.	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			24.000.000		24.000.000	100	100		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2367.	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			128.293.936		128.293.936	100	100		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2368.	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28.600.000		28.600.000	100	100		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		9		0	0		
2369.	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			5.500.000		5.500.000	100	100		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		100	0		
2370.	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			23.100.000		23.100.000	100	100		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		9		100	0		
2371.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			-		-	33,33	0	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH	
		Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)			0		0	0		
			Jumlah Pasar Kecamatan yang Ditingkatkan (persen)	2		1		50	0		
2372.	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			-		-	33,33	0		
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3		1		0	0		
2373.	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			-		-	33,33	0		
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3		1		33,33	0		
2374.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			-		-	100	0	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI USAHA KECIL	

										MENENGAH	
		Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)		0		0	0			
			Cakupan Barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau Stabilitas Harganya (Persentase)	100	100		100	0			
2375.	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			-		-	100	0		
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	1	1		0	0			
2376.	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	1	1		100	0			
2377.	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota			-		-	100	0		
		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		0	0			
2378.	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		100	0			
2379.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			25.000.000		25.000.000	100	100	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH	
		Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)		0		0	0			
			Persentasi Alat UTTP yang distandardisasi Harganya (persen)	25	25		100	0			
2380.	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			25.000.000		25.000.000	100	100		
		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	35	35		0	0			
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	50	50		0	0			
2381.	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			25.000.000		25.000.000	100	100		
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	35	35		100	0			
2382.	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			-		-	100	0		

		Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	50		50		100	0		
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			252.200.000		252.200.000	66,67	100		
2383.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			252.200.000		252.200.000	100	100	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH	
		Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Jumlah Kawasan Sentra Industri yang Dibangun/Ditingkatkan (Kawasan)	1		1		100	0		
			Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)			0		0	0		
2384.	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			252.200.000		252.200.000	100	100		
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1		1		0	0		
2385.	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			-		-	100	0		
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1		1		100	0		
2386.	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			252.200.000		252.200.000	100	100		
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1		1		100	0		
2387.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			-		-	0	0	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH	
		Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)			0		0	0		
			Persentase Industri yang Masuk Kedalam Aplikasi SINas (persen)	3		0		0	0		
2388.	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1		0		0	0		
2389.	3.31.04.2.01.0001		Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		-		-	0	0		

		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1		0		0	0		
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			-		-	62,5	0		
2390.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			-		-	62,5	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)			0		0	0		
2391.	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-		-	62,5	0		
		Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	4		1		0	0		
2392.	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-		-	100	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		100	0		
2393.	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi			-		-	25	0		
		Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	4		1		25	0		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH			34.103.805.612		29.036.764.917	96,88	85,14		
2394.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			31.808.193.212		27.100.549.961	97,84	85,2	SEKRETARIAT DAERAH	
		Terlaksananya Urusan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			50		0	0		
			Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)			65		0	0		
			Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran (SETDA) (persen)	100		95		95	0		
2395.	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.814.000		25.260.000	100	81,98		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
2396.	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			17.535.500		16.365.000	100	93,32		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		100	0		
2397.	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			6.851.000		5.975.000	100	87,21		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2398.	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.927.500		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2399.	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.000.000		2.470.000	100	82,33		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2400.	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			1.500.000		450.000	100	30		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2401.	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.912.696.178		10.941.197.145	100	78,64		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	99		99		0	0		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	400		400		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	4		4		0	0		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2		2		0	0		
2402.	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.886.813.178		10.916.724.245	100	78,61		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	99		99		100	0		
2403.	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			700.500		700.200	100	99,96		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400		400		100	0		

		(Dokumen)								
2404.	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.682.500		2.682.500	100	100		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1		1		100	0		
2405.	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		22.500.000		21.090.200	100	93,73		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4		4		100	0		
2406.	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		-		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2		2		100	0		
2407.	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		330.905.000		302.308.800	100	91,36		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2		2		0	0		
2408.	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		330.905.000		302.308.800	100	91,36		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2		2		100	0		
2409.	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		136.522.250		135.955.250	100	99,58		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2		2		0	0		
2410.	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		136.522.250		135.955.250	100	99,58		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2		2		100	0		
2411.	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.358.411.600		2.258.742.568	100	95,77		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1		1		0	0		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	380		380		0	0		
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		2		0	0		

2412.	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			66.000.000		60.831.900	100	92,17		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2413.	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			805.350.000		746.463.878	100	92,69		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2414.	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			332.961.600		325.879.050	100	97,87		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2415.	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			86.050.000		82.450.000	100	95,82		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2416.	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			203.750.000		189.189.956	100	92,85		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	380		380		100	0		
2417.	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			539.300.000		529.498.254	100	98,18		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100	0		
2418.	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			325.000.000		324.429.530	100	99,82		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		2		100	0		
2419.	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.142.700.000		2.985.675.000	100	95		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4		4		0	0		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		2		0	0		
2420.	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			3.040.000.000		2.892.100.000	100	95,13		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4		4		100	0		
2421.	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			102.700.000		93.575.000	100	91,11		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		2		100	0		
2422.	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.393.822.100		3.121.822.269	94,44	91,99		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	9		7		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
2423.	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.600.500		9.600.500	77,78	90,57		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	9		7		77,78	0		
2424.	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			452.676.600		429.333.259	100	94,84		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2425.	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			786.385.000		772.772.554	100	98,27		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2426.	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.144.160.000		1.910.115.956	100	89,08		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2427.	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.180.703.500		1.121.806.285	83,4	95,01		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	80		77		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	110		96		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		2		0	0		
2428.	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			797.932.500		750.497.020	96,25	94,06		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	80		77		96,25	0		
2429.	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			90.271.000		78.933.000	87,27	87,44		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	110		96		87,27	0		
2430.	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			292.500.000		292.376.265	66,67	99,96		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		2		66,67	0		
2431.	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			4.568.086.584		3.709.396.509	100	81,2		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		

			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		0	0		
2432.	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.328.444.084		750.804.671	100	56,52		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		100	0		
2433.	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			311.500.000		310.832.960	100	99,79		
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2434.	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2.928.142.500		2.647.758.878	100	90,42		
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		100	0		
2435.	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			2.344.310.000		2.091.008.631	100	89,2		
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
2436.	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			1.141.520.000		1.020.580.130	100	89,41		
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2437.	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			693.190.000		580.997.758	100	83,82		
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2438.	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			509.600.000		489.430.743	100	96,04		
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2439.	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			163.352.000		161.737.000	95,83	99,01		
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	6		5		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
2440.	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			59.688.000		59.585.000	83,33	99,83		

		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	6		5		83,33	0		
2441.	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			46.683.000		45.401.000	100	97,25		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2		2		100	0		
2442.	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			25.545.000		25.317.000	100	99,11		
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1		1		100	0		
2443.	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			31.436.000		31.434.000	100	99,99		
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
2444.	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			245.870.000		245.640.504	100	99,91		
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	1		1		0	0		
2445.	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan			49.137.000		48.689.845	100	99,09		
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	1		1		100	0		
2446.	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			49.839.000		48.698.999	100	97,71		
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1		1		100	0		
2447.	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			146.894.000		148.251.660	100	100,92		
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	1		1		100	0		
2448.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			1.576.144.700		1.229.220.362	90,81	77,99	SEKRETARIAT DAERAH	
		Meningkatnya kualitas kebijakana pemerintahan dan otonomi daerah, Menigkatnya kualitas kesejahteraan rakyat, meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)			70		0	0		
			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)			75		0	0		
			Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)			85		0	0		
			Persentase kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti (Persen)	100				0	0		
			Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)			70		0	0		
2449.	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			509.769.000		452.072.300	85,71	88,68		
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	1		1		0	0		

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	7		4		0	0		
2450.	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan			110.507.000		50.649.000	100	45,83		
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	1		1		100	0		
2451.	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			18.585.200		21.630.300	100	116,38		
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1		1		100	0		
2452.	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			380.676.800		379.793.000	57,14	99,77		
		Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	7		4		57,14	0		
2453.	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			781.748.000		513.760.362	100	65,72		
		Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4		4		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	1		1		0	0		
2454.	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			186.200.000		195.379.912	100	104,93		
		Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4		4		100	0		
2455.	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			564.148.000		288.025.450	100	51,05		
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	1		1		100	0		
2456.	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			31.400.000		30.355.000	100	96,67		

		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	1		1		100	0		
2457.	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			179.050.000		159.510.000	83,67	89,09		
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	500		455		0	0		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	5		3		0	0		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	3		3		0	0		
2458.	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			68.355.000		68.165.000	91	99,72		
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	500		455		91	0		
2459.	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum			81.405.000		62.055.000	60	76,23		
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	5		3		60	0		
2460.	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			29.290.000		29.290.000	100	100		
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	3		3		100	0		
2461.	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			105.577.700		103.877.700	100	98,39		
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	1		1		0	0		
2462.	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			105.577.700		103.877.700	100	98,39		
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	1		1		100	0		
2463.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			719.467.700		706.994.594	99	98,27	SEKRETARIAT DAERAH	
		Menigkatnya kualitas kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)			90		0	0		
			Persentase jumlah paket tender yang berhasil dilaksanakan (Persen)	100		95		95	0		
			Persentase kajian Kebijakan perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti (Persen)	90		90		100	0		
2464.	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			164.704.000		162.086.500	100	98,41		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1		1		0	0		

			(Dokumen)									
2465.	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			33.850.000		31.850.000	100	94,09			
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	1		1		100	0			
2466.	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			115.416.000		115.398.500	100	99,98			
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	2		2		100	0			
2467.	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			15.438.000		14.838.000	100	96,11			
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1		1		100	0			
2468.	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			350.740.700		344.434.300	100	98,2			
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	3		3		0	0			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	2			2		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4			4		0	0		
2469.	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			64.838.700		63.096.700	100	97,31			
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	3		3		100	0			
2470.	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			67.927.000		65.416.000	100	96,3			
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	2		2		100	0			
2471.	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			217.975.000		215.921.600	100	99,06			
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4		4		100	0			
2472.	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			169.480.000		168.023.794	96,67	99,14			
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1		1		0	0			
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	1			1		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	40			36		0	0		
2473.	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			67.500.000		67.132.000	100	99,45			
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1		1		100	0			
2474.	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			57.280.000		57.191.794	100	99,85			

		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	1		1		100	0		
2475.	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			44.700.000		43.700.000	90	97,76		
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	40		36		90	0		
2476.	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			34.543.000		32.450.000	100	93,94		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	1		1		0	0		
2477.	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			34.543.000		32.450.000	100	93,94		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	1		1		100	0		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD			31.979.533.782		33.464.349.629	68,7	104,64		
2478.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			23.640.309.727		25.450.499.899	80,51	107,66	SEKRETARIAT DPRD	
		Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Hal Perencanaan dan administrasi Umum	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			14,15		0	0		
2479.	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.500.000		-	68,57	0		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		4		0	0		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		3		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
2480.	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			500.000		-	80	0		

		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		4		80	0		
2481.	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			500.000		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
2482.	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			500.000		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2483.	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			500.000		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
2484.	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			500.000		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2485.	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		3		100	0		
2486.	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-	100	0		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
2487.	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.638.560.296		7.645.432.229	90,63	164,82		
		Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	30		30		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	30		30		0	0		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2		2		0	0		

			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)								
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)								
2488.	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.638.560.296		3.427.437.637	100	73,89		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30		30		100	0		
2489.	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-		4.217.994.592	100	0		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	30		30		100	0		
2490.	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-		-	100	0		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2491.	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			-		-	100	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2492.	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2493.	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			-		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		1		100	0		
2494.	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2		2		100	0		
2495.	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			-		-	25	0		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4		1		25	0		
2496.	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-		-	81,25	0		
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		1		0	0		

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
2497.	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2498.	4.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2499.	4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-	25	0		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		1		25	0		
2500.	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-	100	0		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2501.	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			144.900.000		974.388.750	31	672,46		
		Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	40		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	40		10		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50		34		0	0		
2502.	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		829.488.750	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	40		0		0	0		
2503.	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			-		-	25	0		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	40		10		25	0		
2504.	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			144.900.000		144.900.000	68	100		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50		34		68	0		
2505.	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.589.730.759		1.584.647.776	100	99,68		
		Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		

			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		5		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36		36		0	0		
2506.	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			27.500.000		27.500.000	100	100		
2507.		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			144.800.000		139.739.999	100	96,51		
2508.		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			-		-	100	0		
2509.		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			120.350.000		120.345.000	100	100		
2510.		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			222.660.000		222.657.500	100	100		
2511.		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			129.000.000		129.000.000	100	100		
2512.		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		5		100	0		
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			440.000.000		439.985.223	100	100		
2513.		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100	0		
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			505.420.759		505.420.054	100	100		
2514.		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36		36		100	0		
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			40.000.000		-	50	0		
		Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
2515.	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-	100	0		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		1		100	0		
2516.	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			40.000.000		-	0	0		

		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
2517.	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.988.726.335		1.814.699.694	100	91,25		
		Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24		24		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
2518.	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.500.000		1.500.000	100	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
2519.	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			291.000.000		278.872.329	100	95,83		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24		24		100	0		
2520.	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			393.304.680		383.804.680	100	97,58		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
2521.	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.302.921.655		1.150.522.685	100	88,3		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2522.	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.358.207.900		2.340.094.213	66,67	99,23		
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	30		30		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		30		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
2523.	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2.291.697.900		2.274.384.213	100	99,24		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	30		30		100	0		
2524.	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			66.510.000		65.710.000	100	98,8		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		30		100	0		
2525.	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	0	0		

		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
2526.	4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			-		-	100	0		
		Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	1		1		0	0		
2527.	4.02.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan			-		-	100	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	1		1		100	0		
2528.	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			12.877.684.437		11.091.237.237	66,67	86,13		
		Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	25		25		0	0		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	25		0		0	0		
2529.	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			12.046.434.437		11.091.237.237	100	92,07		
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	25		25		100	0		
2530.	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			831.250.000		-	100	0		
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2531.	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			-		-	0	0		
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	25		0		0	0		
2532.	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			-		-	100	0		
		Terlaksannya Layanan Adminstrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	7		7		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	100		100		0	0		
2533.	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD			-		-	100	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	7		7		100	0		
2534.	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			-		-	100	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	100		100		100	0		
2535.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			8.339.224.055		8.013.849.730	54,32	96,1	SEKRETARIAT DPRD	
		Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase penetapan ranperda Tahun N (%)			8.100		0	0		
2536.	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			-		-	50	0		
		Terbahasnya Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1		1		0	0		

			(Dokumen)								
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	2		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1		0		0	0		
2537.	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1		1		100	0		
2538.	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1		1		100	0		
2539.	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1		1		100	0		
2540.	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1		0		0	0		
2541.	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	2		0		0	0		
2542.	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1		0		0	0		
2543.	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			-		-	100	0		
		Tersusunnya Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1		1		0	0		

			(Dokumen)								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
2544.	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	2		2		100	0		
2545.	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	2		2		100	0		
2546.	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	2		2		100	0		
2547.	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	2		2		100	0		
2548.	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	2		2		100	0		
2549.	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1		1		100	0		
2550.	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	1		1		100	0		
2551.	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
2552.	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			245.000.000		-	33,33	0		
		Tersusunnya Laporan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	50		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	4		4		0	0		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	50		0		0	0		

2553.	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah			-	-	0	0		
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	50		0	0	0		
2554.	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			-	-	100	0		
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	4		4	100	0		
2555.	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses			245.000.000	-	0	0		
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	50		0	0	0		
2556.	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			-	-	50	0		
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1		1	0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	5		0	0	0		
2557.	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD			-	-	100	0		
		Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1		1	100	0		
2558.	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD			-	-	0	0		
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	5		0	0	0		
2559.	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah			-	-	50	0		
		Tersusunnya Laporan Pembahasan Kerja sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	1		0	0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	1		1	0	0		
2560.	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah			-	-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	1		0	0	0		
2561.	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi			-	-	100	0		
		Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	1		1	100	0		
2562.	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			5.465.296.605	5.460.965.289	66,67	99,92		
		Tersusunnya Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	24		24	0	0		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	1		1	0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	1		1	0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	3		1	0	0		

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	3		0		0	0		
2563.	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			4.218.670.000		4.217.994.592	100	99,98		
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	24		24		100	0		
2564.	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			-		-	100	0		
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	1		1		100	0		
2565.	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			-		-	100	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	1		1		100	0		
2566.	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			1.246.626.605		1.242.970.697	33,33	99,71		
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	3		1		33,33	0		
2567.	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus			-		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	3		0		0	0		
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (%)			2.025		0	0		
2568.	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			1.418.882.300		1.368.855.291	7,5	96,47		
		Tersusunnya Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	5		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	10		3		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	10		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1		0		0	0		
2569.	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			-		-	0	0		
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	5		0		0	0		
2570.	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			1.368.882.300		1.368.855.291	30	100		
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	10		3		30	0		
2571.	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			50.000.000		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	10		0		0	0		

2572.	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD			-		-	0	0		
		Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1		0		0	0		
2573.	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			1.210.045.150		1.184.029.150	35,24	97,85		
		Tersusunnya Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	3		2		0	0		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	5		4		0	0		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	7		7		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	20		0		0	0		
2574.	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD			127.440.000		127.440.000	0	100		
		Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	1		0		0	0		
2575.	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			423.605.150		423.589.150	66,67	100		
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	3		2		66,67	0		
2576.	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			268.000.000		245.000.000	80	91,42		
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	5		4		80	0		
2577.	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			280.000.000		280.000.000	100	100		
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	7		7		100	0		
2578.	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			-		-	0	0		
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	1		0		0	0		
2579.	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD			-		-	0	0		
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1		0		0	0		
2580.	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			111.000.000		108.000.000	0	97,3		
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	20		0		0	0		
	5.01	PERENCANAAN			7.463.402.680		6.164.955.225	64,42	82,6		
2581.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.339.908.795		5.137.209.685	89,29	81,03	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Jumlah Jenis Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (Jenis)	8		8		100	0		
			Persentase jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan (Persen)	100		100		100	0		
			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			100		0	0		
			Nilai Evaluasi SAKIP (Predikat)			81		0	0		
2582.	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.382.798		11.382.798	100	100		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
2583.	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.500.000		1.500.000	100	100		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		100	0		
2584.	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.500.000		1.500.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		2		100	0		
2585.	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.000.000		1.000.000	100	100		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2586.	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.382.798		7.382.798	100	100		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
2587.	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.932.201.497		3.815.318.109	100	77,36		
		Tersedianya laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35		35		0	0		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0	0		

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		1		0	0		
2588.	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.932.201.497		3.815.318.109	100	77,36		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35		35		100	0		
2589.	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-		-	100	0		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2590.	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			-		-	100	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2591.	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2592.	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			-		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		1		100	0		
2593.	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15		0		0	0		
2594.	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0	0		
2595.	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15		0		0	0		
2596.	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			169.766.500		147.647.540	100	86,97		
		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		4		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		0	0		

			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
2597.	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.000.000		950.000	100	95		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
2598.	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.000.000		34.942.000	100	99,83		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		100	0		
2599.	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			850.000		779.000	100	91,65		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
2600.	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			27.572.000		11.000.000	100	39,9		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		4		100	0		
2601.	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			16.200.000		15.600.000	100	96,3		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100	0		
2602.	5.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu			9.164.000		9.160.000	100	99,96		
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100	0		
2603.	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			79.980.500		75.216.540	100	94,04		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2604.	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			494.930.000		492.378.675	75	99,48		
		Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		4		0	0		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0	0		
2605.	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
2606.	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			254.430.000		254.430.000	100	100		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		4		100	0		
2607.	5.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			142.000.000		139.648.675	100	98,34		

		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100	0		
2608.	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			98.500.000		98.300.000	100	99,8		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100	0		
2609.	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			317.128.000		266.369.758	100	83,99		
		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
2610.	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.500.000		1.500.000	100	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
2611.	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100.800.000		95.289.758	100	94,53		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		2		100	0		
2612.	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			214.828.000		169.580.000	100	78,94		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2613.	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			414.500.000		404.112.805	100	97,49		
		Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30		30		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15		15		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0	0		
2614.	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			262.100.000		252.312.100	100	96,27		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30		30		100	0		
2615.	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.400.000		2.400.000	100	100		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15		15		100	0		
2616.	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			150.000.000		149.400.705	100	99,6		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100	0		

2617.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			605.330.000		556.097.552	53,26	91,87	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Usulan prioritas kecamatan yang terakomodir dalam RKPD (persen)	87		87		100	0		
			Persentase Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (persen)	92		92		100	0		
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)			100		0	0		
			Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPD (persen)	100		100		100	0		
			Tingkat konsistensi program RKPD terhadap RPD (persen)	97		97		100	0		
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)			100		0	0		
2618.	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			519.657.500		487.328.425	62,43	93,78		
		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang di tetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	2		0		0	0		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1		1		0	0		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1		1		0	0		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1		0		0	0		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	500		373		0	0		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	2		2		0	0		
2619.	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			-		-	0	0		
		Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	2		0		0	0		
2620.	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik			40.822.250		39.572.250	100	96,94		
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1		1		100	0		
2621.	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			16.323.000		16.123.000	100	98,77		
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1		1		100	0		
2622.	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			152.745.750		145.345.135	0	95,15		
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1		0		0	0		

2623.	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		14.925.000		13.950.000	74,6	93,47		
		Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	500		373	74,6	0		
2624.	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		294.841.500		272.338.040	100	92,37		
		Ditetapkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2		2	100	0		
		(RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)								
2625.	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		20.330.000		20.251.500	3,74	99,61		
		Tersusunnya dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang di tetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1		0	0	0		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	365		41	0	0		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1		0	0	0		
2626.	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		-		-	0	0		
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1		0	0	0		
2627.	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		20.330.000		20.251.500	11,23	99,61		
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	365		41	11,23	0		
2628.	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		-		-	0	0		
		Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1		0	0	0		
2629.	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		65.342.500		48.517.627	100	74,25		
		Tersusunnya laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	2		2	0	0		
2630.	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		65.342.500		48.517.627	100	74,25		
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	2		2	100	0		
2631.	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		-		-	100	0		
		Terkelolanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang berkualitas	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1		1	0	0		
2632.	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		-		-	100	0		

		Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1		1		100	0		
2633.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			518.163.885		471.647.988	23,46	91,02	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Wilayah (Persentase)			100		0	0		
			Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, bidang ekonomi dan SDA, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang tercapai (persen)	95		95		100	0		
2634.	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah			118.302.400		93.819.865	17,27	79,31		
		Tersusunya Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Bidang Bidang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah (Laporan)	11		1		0	0		
2635.	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			22.345.200		20.783.200	20	93,01		
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5		1		20	0		
2636.	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			41.920.000		33.061.900	20	78,87		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5		1		20	0		
2637.	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			26.037.200		26.037.200	20	100		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5		1		20	0		
2638.	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah			28.000.000		13.937.565	9,09	49,78		
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah (Laporan)	11		1		9,09	0		

		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)		100		0	0		
2639.	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		242.835.985		242.115.897	7,5	99,7		
		Tersusunnya Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	8	1		0	0		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	8	0		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	8	1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	10	1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	10	1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	10	0		0	0		
2640.	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		50.000.000		49.807.300	12,5	99,61		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	8	1		12,5	0		
2641.	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		-		-	0	0		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	8	0		0	0		
2642.	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		87.555.985		87.477.267	12,5	99,91		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	8	1		12,5	0		
2643.	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		70.000.000		69.582.560	10	99,4		
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	10	1		10	0		
2644.	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		35.280.000		35.248.770	10	99,91		

		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	10		1		10	0		
2645.	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			-		-	0	0		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	10		0		0	0		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)			100		0	0		
2646.	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			157.025.500		135.712.226	53,57	86,43		
		Tersusunya Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	7		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5		0		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		1		0	0		
2647.	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			13.153.000		13.153.000	14,29	100		
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	7		1		14,29	0		
2648.	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			1.622.500		-	0	0		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5		0		0	0		
2649.	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			109.250.000		104.795.646	100	95,92		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1		1		100	0		
2650.	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			33.000.000		17.763.580	100	53,83		
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		1		100	0		
	5.02	KEUANGAN			181.596.362.951		111.500.864.365	111,04	61,4		
2651.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.143.618.932		9.468.360.395	121,03	77,97	BADAN KEUANGAN DAERAH	

		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	100		100		100	0		
			Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Daerah Kab/Kota (Persen)	100		100		100	0		
			Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)			0		0	0		
			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			0		0	0		
2652.	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.124.000		4.386.000	100	43,32		
		Persentase terlaksananya penunjang urusan daerah kab/kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
2653.	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.750.000		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2654.	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			4.386.000		4.386.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2655.	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.000.000		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2656.	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			1.988.000		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2657.	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.507.262.657		6.029.936.856	100	70,88		
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		12		0	0		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0	0		

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
2658.	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.504.634.657		6.027.308.856	100	70,87		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		12		100	0		
2659.	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-		-	100	0		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2660.	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.988.000		1.988.000	100	100		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2661.	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			640.000		640.000	100	100		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2662.	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			316.440.000		314.581.000	75,21	99,41		
		Tersedianya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	39		10		0	0		
2663.	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			139.500.000		138.441.000	100	99,24		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		100	0		
2664.	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1.440.000		640.000	100	44,44		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		1		100	0		
2665.	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			175.500.000		175.500.000	25,64	100		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	39		10		25,64	0		
2666.	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.210.541.435		2.178.486.164	100	98,55		
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
2667.	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.750.000		4.750.000	100	70,37		
2668.	5.02.01.2.06.0002	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			830.009.800		813.051.300	100	97,96		
2669.	5.02.01.2.06.0004	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			334.515.000		324.118.229	100	96,89		
2670.	5.02.01.2.06.0005	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			103.750.000		102.550.000	100	98,84		
2671.	5.02.01.2.06.0006	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			481.561.147		481.061.147	100	99,9		
2672.	5.02.01.2.06.0009	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100	0		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			183.955.488		182.955.488	100	99,46		
2673.	5.02.01.2.06.0011	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			270.000.000		270.000.000	100	100		
2674.	5.02.01.2.07	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50.000.000		50.000.000	400	100		
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		4		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	20		80		0	0		
2675.	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50.000.000		50.000.000	400	100		

		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		4		400	0		
2676.	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	400	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	20		80		400	0		
2677.	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			816.460.740		756.057.076	100	92,6		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
2678.	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.700.000		4.700.000	100	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
2679.	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			122.775.740		118.587.926	100	96,59		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2680.	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			55.025.000		54.259.150	100	98,61		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2681.	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			633.960.000		578.510.000	100	91,25		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2682.	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			232.790.100		134.913.299	100	57,95		
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	50		50		0	0		
2683.	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			232.790.100		134.913.299	100	57,95		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	50		50		100	0		
2684.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			167.064.107.513		99.961.161.718	108,65	59,83	BADAN KEUANGAN DAERAH	

		Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Dokumen Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun, Persentase Dokumen Laporan Keuangan Daerah yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan disampaikan Tepat Waktu, Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda/Raperbup APBD/APBD-P dan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD yang disusun, Persentase Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Darurat dan Mendesak, Analisis Perencanaan, Penyaluran Bantuan Keuangan dan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Persen)	100		100		100	0		
			Persentase Dokumen Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun, Persentase Dokumen Laporan Keuangan Daerah yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan disampaikan Tepat Waktu, Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda/Raperbup APBD/APBD-P dan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD yang disusun, Persentase Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Darurat dan Mendesak, Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daer (Persen)	100		100		100	0		
			Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital (Desa)			0		0	0		
			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)			30		0	0		
			Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)			0		0	0		
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)			380		0	0		
2685.	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.619.849.306		1.246.024.285	100	76,92		
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40		40		0	0		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40		40		0	0		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2		2		0	0		

			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	6		6		0	0		
2686.	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			32.160.000		22.145.870	100	68,86		
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		2		100	0		
2687.	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			87.107.800		85.106.920	100	97,7		
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		2		100	0		
2688.	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			20.580.000		-	100	0		
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40		40		100	0		
2689.	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			77.500.000		77.275.000	100	99,71		
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40		40		100	0		
2690.	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			-		-	100	0		
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1		1		100	0		
2691.	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			-		-	100	0		
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1		1		100	0		
2692.	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			397.341.000		360.463.900	100	90,72		
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2		2		100	0		
2693.	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			428.298.006		424.335.246	100	99,07		
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2		2		100	0		
2694.	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			576.862.500		276.697.349	100	47,97		
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	6		6		100	0		
2695.	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			164.475.636.024		97.790.911.064	100	59,46		
		Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	142		142		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	142		142		0	0		
2696.	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah			14.075.000		14.075.000	100	100		

		Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
2697.	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			160.043.824.600		97.776.836.064	100	61,09		
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	142		142		100	0		
2698.	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			900.000.000		-	100	0		
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1		1		100	0		
2699.	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			3.517.736.424		-	100	0		
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	142		142		100	0		
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)			0		0	0		
			Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)			0		0	0		
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)			100		0	0		
2700.	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			632.187.607		588.330.033	142,86	93,06		
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5		5		0	0		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	2		8		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	41		41		0	0		
2701.	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			72.441.602		72.415.602	100	99,96		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5		5		100	0		

2702.	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		64.531.500		64.531.500	100	100		
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	12		12	100	0		
2703.	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		261.446.255		252.446.255	100	96,56		
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1		1	100	0		
2704.	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		105.505.430		99.500.430	100	94,31		
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1	100	0		
2705.	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		-		-	100	0		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	1		1	100	0		
2706.	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		-		-	400	0		
		Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	2		8	400	0		
2707.	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		128.262.820		99.436.246	100	77,53		
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	41		41	100	0		
		Meningkatnya tata keloia perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)			0	0	0		
			Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) (%)			0	0	0		
2708.	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		336.434.576		335.896.336	87,5	99,84		
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	1		1	0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	4		4	0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	4		1	0	0		

			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	4		4		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	40		40		0	0		
2709.	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			79.587.300		79.062.080	100	99,34		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
2710.	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			68.903.330		68.890.310	100	99,98		
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	4		4		100	0		
2711.	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			31.970.583		31.970.583	25	100		
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	4		1		25	0		
2712.	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			13.749.800		13.749.800	100	100		
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	4		4		100	0		
2713.	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			56.645.203		56.645.203	100	100		
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	1		1		100	0		
2714.	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			85.578.360		85.578.360	100	100		

		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	40		40		100	0		
2715.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			926.626.131		843.325.414	100	91,01	BADAN KEUANGAN DAERAH	
		Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Ketaatan Rekonsiliasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah (Persen)	90		90		100	0		
			Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)			0		0	0		
			Manajemen Aset (Kategori)			0		0	0		
2716.	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			926.626.131		843.325.414	100	91,01		
		Terlaksananya Persentase perangkat daerah yang mengelola barang milik daerah dengan akuntabel Persentase ketaatan rekonsiliasi dan inventarisasi barang milik daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
2717.	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga			90.940.250		90.922.780	100	99,98		
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2		2		100	0		
2718.	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			40.401.150		40.401.150	100	100		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
2719.	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah			300.318.040		299.012.257	100	99,57		
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
2720.	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			182.380.250		176.255.525	100	96,64		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
2721.	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah			112.740.280		107.279.960	100	95,16		
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		100	0		

2722.	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			70.812.980		70.812.980	100	100		
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
2723.	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			129.033.181		58.640.762	100	45,45		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
2724.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			1.462.010.375		1.228.016.838	100	84	BADAN KEUANGAN DAERAH	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Persen)	97		97		100	0		
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)			0		0	0		
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))			0		0	0		
2725.	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			1.462.010.375		1.228.016.838	100	84		
		Tersedianya Persentase Peningkatan Nilai Pendapatan Asli Daerah Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
2726.	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			144.012.275		143.722.049	100	99,8		
		Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		

2727.	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			398.739.500		323.099.578	100	81,03		
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
2728.	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			75.000.000		74.999.981	100	100		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1		1		100	0		
2729.	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			22.497.500		22.042.000	100	97,98		
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
2730.	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			151.028.850		121.240.400	100	80,28		
		Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	1		1		100	0		
2731.	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah			66.118.000		65.924.700	100	99,71		
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
2732.	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah			168.000.000		108.800.000	100	64,76		
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
2733.	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			280.375.000		239.699.630	100	85,49		
		Terlaksannnya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
2734.	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			36.431.750		24.313.500	100	66,74		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
2735.	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			119.807.500		104.175.000	100	86,95		
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
	5.03	KEPEGAWAIAN			5.953.305.421		4.762.537.292	63,36	80		
2736.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.561.778.974		4.430.125.845	61,12	79,65	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			80,86		0	0		
			Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Persen)	100		80,86		80,86	0		
2737.	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-	42,86	0		

		Persentase Jumlah Jenis Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
2738.	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-	100	0		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
2739.	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
2740.	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
2741.	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
2742.	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			-		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
2743.	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2744.	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-	100	0		

		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
2745.	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.889.662.834		3.848.145.714	100	78,7		
		Persentase Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65		65		0	0		
2746.	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.889.662.834		3.848.145.714	100	78,7		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65		65		100	0		
2747.	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Persentase Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0	0		
2748.	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0	0		
2749.	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			254.536.512		242.252.958	93,33	95,17		
		Persentase Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		4		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25		25		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		3		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		4		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15		15		0	0		
2750.	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			22.500.000		20.445.000	80	90,87		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		4		80	0		
2751.	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.960.140		25.939.000	100	99,92		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25		25		100	0		
2752.	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			30.700.000		27.725.900	100	90,31		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		3		100	0		
2753.	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			99.500.000		94.340.000	80	94,81		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		4		80	0		
2754.	5.03.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu			6.000.000		5.800.000	100	96,67		

		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100	0		
2755.	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			69.876.372		68.003.058	100	97,32		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15		15		100	0		
2756.	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	0	0		
		Persentase Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12		0		0	0		
2757.	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12		0		0	0		
2758.	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			271.910.000		210.912.057	77,78	77,57		
		Persentase Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		1		0	0		
2759.	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000.000		2.000.000	100	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
2760.	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			99.600.000		81.242.057	100	81,57		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		100	0		
2761.	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			170.310.000		127.670.000	33,33	74,96		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		1		33,33	0		
2762.	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			145.669.628		128.815.116	53,13	88,43		
		Persentase Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	16		15		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16		13		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16		6		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0	0		
2763.	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			122.623.628		114.223.116	93,75	93,15		

		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	16		15		93,75	0		
2764.	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			14.000.000		11.319.000	81,25	80,85		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16		13		81,25	0		
2765.	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.046.000		3.273.000	37,5	36,18		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16		6		37,5	0		
2766.	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0	0		
2767.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			391.526.447		332.411.447	69,08	84,9	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti DIKLAT Teknis Fungsional (Persen)	90		0		0	0		
			Persentase Pejabat yang di tempatkan sesuai dengan pangkat dan golongan (Persen)	100		90		90	0		
			Persentase Pejabat yang ditempatkan sesuai dengan Pngkat dan Golongan (Persen)	52,30		90		172,08	0		
			Persentase Pejabat yang ditempatkan sesuai dengan Pangkat dan Golongan (Persen)	100		90		90	0		
			Persentase Kebutuhan Pegawai yang dipenuhi (Persen)	52,30		63		120,46	0		
			Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)			91,3		0	0		
2768.	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			251.996.622		203.136.622	83,33	80,61		
		Persentase Jumlah Jenis Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	3		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	3		3		0	0		
2769.	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN			203.196.622		158.336.622	66,67	77,92		
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	3		2		66,67	0		
2770.	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN			48.800.000		44.800.000	100	91,8		

		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	3		3		100	0		
		Meningkatnya Kualitas Penilaian Kriteria ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)			90,84		0	0		
2771.	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			44.681.970		34.479.970	77,53	77,17		
		Persentase Jumlah Jenis Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	3		2		0	0		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	500		442		0	0		
2772.	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			11.894.800		5.692.800	66,67	47,86		
		Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	3		2		66,67	0		
2773.	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN			32.787.170		28.787.170	88,4	87,8		
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	500		442		88,4	0		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)			84		0	0		
2774.	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			89.820.455		89.767.455	66,67	99,94		
		Jumlah Jenis Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		1		0	0		
2775.	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			7.253.000		7.200.000	100	99,27		
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	2		2		100	0		
2776.	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			-		-	0	0		
		Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1		0		0	0		
2777.	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			82.567.455		82.567.455	100	100		
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		1		100	0		
		Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)			0,04		0	0		
2778.	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			5.027.400		5.027.400	50	100		
		Persentase Jumlah Jenis Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	100		0		0	0		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	30		30		0	0		
2779.	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			-		-	0	0		

		Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	100		0		0	0		
2780.	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			5.027.400		5.027.400	100	100		
		Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	30		30		100	0		
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			400.202.832		137.070.288	50	34,25		
2781.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			400.202.832		137.070.288	50	34,25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		1) Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial, dan 2) Meningkatnya Kualitas Analisis Kebutuhan,Perancangan Pengembangan dan 3) Meningkatnya Layanan Penjamin Mutu,Pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi 4) Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)			0		0	0		
			Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)			0		0	0		
			Persentase Pejabat Eselon III yng Mengikuti PIM (Persen)	32,41		0		0	0		
			Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)			0,04		0	0		
			Persentase Pejabat Eselon II yng Mengikuti PIM (Persen)	45,31		0		0	0		
			Persentase Pejabat Eselon IV yng Mengikuti PIM (Persen)	12,27		0		0	0		
			Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)			0		0	0		
2782.	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			400.202.832		137.070.288	50	34,25		
		Persentase Jumlah Jenis Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun (Dokumen)	2		1		0	0		
2783.	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional			400.202.832		137.070.288	50	34,25		
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2		1		50	0		

		(Dokumen)								
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			547.516.000		546.403.823	14,29	99,8	
2784.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			547.516.000		546.403.823	14,29	99,8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase capaian Rencana Induk Kelitbangan (RIK) (persen)	25		25		100	0	
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)			100		0	0	
			Persentase Capaian Rencana Induk Kelitbangan (RIK) (Persen)	25		25		100	0	
2785.	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			547.516.000		546.403.823	50	99,8	
		Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	3		0		0	0	
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1		1		0	0	
2786.	5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			-		-	0	0	
		Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	3		0		0	0	
2787.	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			547.516.000		546.403.823	100	99,8	
		Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1		1		100	0	
2788.	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			-		-	0	0	
		Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	1		0		0	0	
2789.	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat			-		-	0	0	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	1		0		0	0	
2790.	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			-		-	0	0	
		Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1		0		0	0	
2791.	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			-		-	0	0	

		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1		0		0	0		
2792.	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			-		-	0	0		
		Meningkatnya pemanfaatan hasil inovasi dan teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1		0		0	0		
2793.	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			-		-	0	0		
		Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1		0		0	0		
2794.	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			-		-	0	0		
		Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1		0		0	0		
2795.	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			-		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1		0		0	0		
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH			6.951.490.659		5.817.862.487	83,44	83,69		
2796.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.417.780.223		5.284.489.411	83,05	82,34	INSPEKTORAT DAERAH	
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Hal Perencanaan dan Administrasi Umum	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			82,34		0	0		
2797.	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.940.500		11.880.500	33,33	99,5		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		6		0	0		
2798.	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.940.500		11.880.500	100	99,5		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		6		100	0		
		Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
2799.	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0	0		

2800.	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	0	0		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0	0	0		
2801.	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.371.759.996	4.363.882.554	129,17	81,24		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	62		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	0		0	0		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	0		0	0		
2802.	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.371.759.996	4.363.882.554	516,67	81,24		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	62		516,67	0		
2803.	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-	-	0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	0		0	0		
2804.	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			-	-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	0		0	0		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeseteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	0		0	0		
2805.	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD			-	-	0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	0		0	0		
2806.	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			153.202.207	153.158.457	92,14	99,97		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		0	0		
2807.	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			53.650.000	53.606.250	100	99,92		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		100	0		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	1		0	0		
2808.	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			21.053.297	21.053.297	5	100		

		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20		1		5	0		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7		12		0	0		
2809.	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			78.498.910		78.498.910	171,43	100		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7		12		171,43	0		
2810.	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			350.807.520		309.393.912	100	88,19		
		Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
2811.	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			22.500.000		14.493.000	100	64,41		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2812.	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			29.990.000		29.990.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
2813.	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			19.994.000		19.993.983	100	100		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3		3		0	0		
2814.	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			81.200.000		81.200.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3		3		100	0		
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2		2		0	0		
2815.	6.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu			61.998.000		61.998.000	100	100		
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2		2		100	0		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		10		0	0		
2816.	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			135.125.520		101.718.929	100	75,28		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		10		100	0		
2817.	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	0	0		
		Pengadaan Mauble	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7		0		0	0		

2818.	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-	0	0		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7		0		0	0		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	13		0		0	0		
2819.	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	13		0		0	0		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0	0		
2820.	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0	0		
2821.	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			329.820.000		250.486.988	100	75,95		
		Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
2822.	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.500.000		1.500.000	100	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
		Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
2823.	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			102.000.000		50.666.988	100	49,67		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
		Penyedia Jasa Layanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
2824.	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			226.320.000		198.320.000	100	87,63		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2825.	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			200.250.000		195.687.000	100	97,72		
		Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11		11		0	0		
2826.	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			185.000.000		180.467.000	100	97,55		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11		11		100	0		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18		18		0	0		

2827.	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.250.000		15.220.000	100	99,8		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18		18		100	0		
2828.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			230.135.830		229.798.830	73,45	99,85	INSPEKTORAT DAERAH	
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase temuan audit yang bersifat material nihil (persen)	98		93,67		95,58	0		
			Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)			81,36		0	0		
2829.	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			150.168.450		149.831.450	84,23	99,78		
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	8		9		0	0		
2830.	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			23.209.700		23.209.700	112,5	100		
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	8		9		112,5	0		
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	30		46		0	0		
2831.	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja			57.425.000		57.425.000	153,33	100		
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	30		46		153,33	0		
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	3		2		0	0		
2832.	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			24.259.000		24.152.000	66,67	99,56		
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	3		2		66,67	0		
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	7		4		0	0		
2833.	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa			1.660.750		1.660.750	57,14	100		
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	7		4		57,14	0		
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1		0		0	0		
2834.	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal			-		-	0	0		
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1		0		0	0		
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	4		4		0	0		
2835.	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			27.084.000		27.084.000	100	100		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	4		4		100	0		
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	5		5		0	0		

2836.	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			16.530.000		16.300.000	100	98,61		
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	5		5		100	0		
2837.	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			79.967.380		79.967.380	35,71	100		
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	7		5		0	0		
2838.	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			79.967.380		79.967.380	71,43	100		
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	7		5		71,43	0		
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	2		0		0	0		
2839.	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			-		-	0	0		
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	2		0		0	0		
2840.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			303.574.606		303.574.246	100	100	INSPEKTORAT DAERAH	
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)			2		0	0		
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)			3		0	0		
2841.	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			7.792.000		7.792.000	100	100		
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2		2		0	0		
2842.	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			7.042.000		7.042.000	100	100		
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2		2		100	0		
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2		2		0	0		
2843.	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			750.000		750.000	100	100		
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2		2		100	0		
2844.	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			295.782.606		295.782.246	100	100		
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	4		4		0	0		
2845.	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			101.845.000		101.844.640	100	100		
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	4		4		100	0		

		Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	4		4		0	0		
2846.	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			3.600.000		3.600.000	100	100		
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	4		4		100	0		
		Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	12		12		0	0		
2847.	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			105.000.000		105.000.000	100	100		
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	12		12		100	0		
		Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6		6		0	0		
2848.	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			85.337.606		85.337.606	100	100		
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6		6		100	0		
	7.01	KECAMATAN			20.656.645.884		15.136.297.867	75,13	73,28		
2849.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.557.788.696		1.965.024.012	93,75	76,83	KECAMATAN PONDOK KELAPA	
		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			100		0	0		
			Persentase terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (Pondok Kelapa) (persen)	100		100		100	0		
			Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Daerah Kab/ Kota (Angka)	100		100		100	0		
2850.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			700.000		700.000	100	100		
		Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		6		0	0		
2851.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			700.000		700.000	100	100		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		6		100	0		
2852.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.418.058.696		1.880.068.946	100	77,75		
		Persentase Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23		23		0	0		
2853.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.418.058.696		1.880.068.946	100	77,75		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23		23		100	0		

2854.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlaksana	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4		0		0	0		
2855.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0	0		
2856.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4		0		0	0		
2857.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			20.440.000		19.845.000	85,71	97,09		
		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		15		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		5		0	0		
2858.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			500.000		-	100	0		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		15		100	0		
2859.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
2860.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			4.500.000		4.500.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
2861.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2.500.000		2.500.000	100	100		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
2862.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.500.000		1.500.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1		1		100	0		

			Disediakan (Dokumen)								
2863.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			10.000.000		10.000.000	100	100		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2		2		100	0		
2864.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.440.000		1.345.000	100	93,4		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		5		100	0		
2865.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	100	0		
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0	0		
2866.	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	100	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100	0		
2867.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			99.740.000		53.465.066	200	53,6		
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0		2		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		4		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		2		0	0		
2868.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			500.000		500.000	0	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0		2		0	0		
2869.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			15.000.000		12.025.066	200	80,17		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		4		200	0		
2870.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			84.240.000		40.940.000	200	48,6		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		2		200	0		
2871.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18.850.000		10.945.000	100	58,06		
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0	0		
2872.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			18.850.000		10.945.000	100	58,06		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		100	0		

		Dinas Jabatan										
2873.	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-		-	100	0				
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1	100	0				
2874.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-		-	100	0	KECAMATAN PONDOK KELAPA		
		Meningkatnya Partisipasi Lembaga pada Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Pondok Kelapa) (persen)	90		90	100	0				
			Persentase Partisipasi lembaga pada pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan desa (%)			90	0	0				
			Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Angka)	90		90	100	0				
2875.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			-		-	100	0			
		Persentase Partisipasi Lembaga pada pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1	0	0				
2876.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			-		-	100	0			
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1	100	0				
2877.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-		-	1	0	KECAMATAN PONDOK KELAPA		
							1	0				
2878.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			-		-	1	0			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	100		1	0	0				
2879.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			-		-	1	0			
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	100		1	1	0				
2880.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.725.869.889		1.441.267.137	78,95	83,51	KECAMATAN PAGAR JATI		
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Dalam Hal perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan Kepegawaian Kecamatan ()				0	0				
			Persentase Administrasi Umum ()				0	0				
			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			0	0	0				
			Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas ()				0	0				
			Nilai Hasil Evaluasi Sakip (Angka)			75	0	0				

			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (PERSENTASE)	100		100		100	0		
2881.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.670.000		26.700.000	100	1000		
		Jumlah Dokumen DAN LAPORAN Perencanaan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		0	0		
2882.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.670.000		26.700.000	100	1000		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		100	0		
2883.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.584.209.889		1.344.033.637	100	84,84		
		Jumlah Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan terlaksana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16		16		0	0		
2884.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.584.209.889		1.344.033.637	100	84,84		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16		16		100	0		
2885.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9.000.000		9.000.000	50	100		
		Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlaksana	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4		0		0	0		
2886.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			9.000.000		9.000.000	100	100		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		100	0		
2887.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4		0		0	0		
2888.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.000.000		-	71,43	0		
		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
2889.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-		-	100	0		

		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2890.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
2891.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.000.000		-	100	0		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
2892.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			-		-	100	0		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
2893.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			-		-	0	0		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0	0		
2894.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.000.000		-	100	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100	0		
2895.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.000.000		-	100	0		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2896.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	100	0		
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia DAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR LAINNYA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0	0		
2897.	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-	100	0		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100	0		
2898.	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	100	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100	0		
2899.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			103.050.000		45.250.000	100	43,91		
		Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		

2900.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			9.600.000		9.600.000	100	100		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2901.	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	100	0		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2902.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			93.450.000		35.650.000	100	38,15		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2903.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			22.940.000		16.283.500	66,67	70,98		
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		0	0		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
2904.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			22.940.000		16.283.500	100	70,98		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		100	0		
2905.	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		1		100	0		
2906.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
2907.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			8.500.000		8.500.000	0	100	KECAMATAN PAGAR JATI	
		Meningkatnya Partisipasi Lembaga pada Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Pagar Jati) (persen)	90		90		100	0		
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Persen)	89		89		100	0		
			Persentase Partisipasi lembaga pada pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan desa (%)			90		0	0		
2908.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			8.500.000		8.500.000	0	100		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	14		0		0	0		
2909.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			8.500.000		8.500.000	0	100		

		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	14		0		0	0		
2910.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-		-	100	0	KECAMATAN PAGAR JATI	
		Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PERSENTASE PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM (PERSENTASE)	80		80		100	0		
			Persentase Partisipasi Pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)			90		0	0		
			Persentase Kelompok Masyarakat (kades/kaur/perangkat ,karang taruna,LPM,BPD,ORMAS) YANG MENDAPATKAN PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN DI TINGKAT KECAMATAN (Persen)	80		80		100	0		
2911.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			-		-	100	0		
		Persentase Partisipasi Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebagai Penugasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	50		50		0	0		
2912.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	50		50		100	0		
2913.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			-		-	100	0	KECAMATAN PAGAR JATI	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)			100		0	0		
			PERSENTASE DESA YANG TELAH MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN ,PENGANGGARAN,DAN PELAPORAN DENGAN BENAR DAN TEPAT WAKTU (Persen)	90		90		100	0		
			Persentase desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu (Pagar Jati) (persen)	90		90		100	0		
2914.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			-		-	100	0		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	14		14		0	0		
2915.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			-		-	100	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	14		14		100	0		
2916.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.583.825.016		1.259.948.999	69,44	79,55	KECAMATAN PONDOK KUBANG	
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Dalam Hal perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA (Persen)	100		100		100	0		

			Persentase terlaksananya penunjang urusan daerah kab/kota (Pondok Kubang) (persen)	100		100		100	0		
			Nilai Hasil Evaluasi Sakip (Angka)			0		0	0		
			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			0		0	0		
2917.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.300.000		1.300.000	100	100		
		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		6		0	0		
2918.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.300.000		1.300.000	100	100		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		6		100	0		
2919.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.451.932.516		1.195.609.165	106,67	82,35		
		Jumlah Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan terlaksana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15		16		0	0		
2920.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.451.932.516		1.195.609.165	106,67	82,35		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15		16		106,67	0		
2921.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			14.000.000		14.000.000	46,67	100		
		Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlaksana	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	15		14		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4		0		0	0		
2922.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			14.000.000		14.000.000	93,33	100		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	15		14		93,33	0		
2923.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4		0		0	0		
2924.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			14.545.000		14.495.000	78,57	99,66		
		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		1		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
2925.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			500.000		500.000	100	100		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2926.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
2927.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			4.850.000		4.850.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
2928.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			300.000		300.000	100	100		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2929.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			735.000		735.000	50	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		1		50	0		
2930.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			3.760.000		3.710.000	100	98,67		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100	0		
2931.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4.400.000		4.400.000	100	100		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2932.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	0	0		
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0	0		
2933.	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0	0		
2934.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			76.950.000		26.725.834	100	34,73		
		Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
2935.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			350.000		300.000	100	85,71		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		

2936.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4.000.000		1.825.834	100	45,65		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2937.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			72.600.000		24.600.000	100	33,88		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2938.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25.097.500		7.819.000	33,33	31,15		
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		0		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
2939.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			25.097.500		7.819.000	100	31,15		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		100	0		
2940.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		0		0	0		
2941.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
2942.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			8.500.000		8.500.000	0	100	KECAMATAN PONDOK KUBANG	
		Meningkatnya Partisipasi Lembaga pada Pemberdayaan Desa	Persentase Partisipasi lembaga pada pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan desa (%)			0		0	0		
			Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Pondok Kubang) (persen)	89		89		100	0		
			Persentase program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (persentase)	89		89		100	0		
2943.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			8.500.000		8.500.000	0	100		
		Persentase Partisipasi lembaga pada pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	12		0		0	0		
2944.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			8.500.000		8.500.000	0	100		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	12		0		0	0		

2945.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-		-	0	0	KECAMATAN PONDOK KUBANG	
		Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kelompok Masyarakat (Kades/ Kaur/ Perangkat, Karang Taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat Kecamatan (Pondok Kubang) (persen)	80		80		100	0		
			persentase program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (persentase)	80		80		100	0		
			Persentase Partisipasi Pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)			0		0	0		
2946.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			-		-	0	0		
		Persentase Partisipasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebagai Penugasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	150		0		0	0		
2947.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	150		0		0	0		
2948.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			620.000		526.000	100	84,84	KECAMATAN PONDOK KUBANG	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)			0		0	0		
			Persentase desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu (Pondok Kubang) (persen)	90		90		100	0		
			persentase program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (persentase)	90		90		100	0		
2949.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			620.000		526.000	100	84,84		
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1		1		0	0		
2950.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			620.000		526.000	100	84,84		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1		1		100	0		
2951.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.417.376.563		1.104.065.668	69,58	77,9	KECAMATAN MERIGI SAKTI	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			100		0	0		
			Persentase terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (Merigi Sakti) (persen)	100		100		100	0		
			Nilai Hasil Evaluasi Sakip (Angka)			75		0	0		
2952.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.245.000		1.800.000	80	55,47		

		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan yang berkualitas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
2953.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.310.000		700.000	100	53,44		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2954.	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			200.000		200.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2955.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.535.000		700.000	100	45,6		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2956.	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			200.000		200.000	0	100		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
2957.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2958.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.247.194.563		980.563.592	8,33	78,62		
		Jumlah Laporan keuangan dan penyusunan Laporan Pengelola Keuangan yang terlaksana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		1		0	0		
2959.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.247.194.563		980.563.592	8,33	78,62		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		1		8,33	0		
2960.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			19.200.000		19.200.000	50	100		

		Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlaksana	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4		0		0	0		
2961.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			19.200.000		19.200.000	100	100		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		100	0		
2962.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4		0		0	0		
2963.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			44.711.500		29.397.200	91,67	65,75		
		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
2964.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	50	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		50	0		
2965.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.000.000		7.237.200	100	90,47		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
2966.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			-		-	100	0		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2967.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.200.000		-	100	0		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100	0		
2968.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			34.251.500		20.900.000	100	61,02		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100	0		
2969.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.260.000		1.260.000	100	100		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		100	0		

2970.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			79.120.000		60.085.876	44,44	75,94		
		Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		0	0		
2971.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			500.000		-	100	0		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
2972.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			20.400.000		8.565.876	8,33	41,99		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		1		8,33	0		
2973.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			58.220.000		51.520.000	25	88,49		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		25	0		
2974.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			23.905.500		13.019.000	66,67	54,46		
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		3		0	0		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
2975.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			23.905.500		13.019.000	100	54,46		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		3		100	0		
2976.	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		1		100	0		
2977.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
2978.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-		-	25	0	KECAMATAN MERIGI SAKTI	
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Partisipasi Pada Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)			0		0	0		
2979.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			-		-	25	0		
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	4		1		0	0		

2980.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			-		-	25	0		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	4		1		25	0		
2981.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			-		-	6,67	0	KECAMATAN MERIGI SAKTI	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu (Persen)	100		100		100	0		
			Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)			0		0	0		
2982.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			-		-	6,67	0		
		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	15		1		0	0		
2983.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			-		-	6,67	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	15		1		6,67	0		
2984.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.599.022.285		1.289.863.108	85,71	80,67	KECAMATAN BANG HAJI	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Persentase terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (Bang Haji) (persen)	100		100		100	0		
			Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Daerah Kab/Kota (tahun)	1		1		100	0		
			Nilai Hasil Evaluasi Sakip (Angka)			75		0	0		
			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			100		0	0		
2985.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.542.500		1.542.500	100	100		
		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		0	0		
2986.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.542.500		1.542.500	100	100		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		100	0		
2987.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.494.721.285		1.228.591.608	100	82,2		
		Jumlah Laporan Keuangan yang terlaksana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15		15		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	4		4		0	0		
2988.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.494.721.285		1.228.591.608	100	82,2		

		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15		15		100	0		
2989.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		4		100	0		
2990.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlaksana	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		0		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8		0		0	0		
2991.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		0		0	0		
2992.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8		0		0	0		
2993.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			8.848.500		5.448.500	128,57	61,58		
		&Persentase Pengelolaan Administrasi Umum&	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		4		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		2		0	0		
2994.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			500.000		500.000	100	100		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2995.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
2996.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.250.000		750.000	100	33,33		

		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
2997.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			898.500		898.500	100	100		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2998.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.200.000		1.200.000	400	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		4		400	0		
2999.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.500.000		2.100.000	100	84		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100	0		
3000.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.500.000		-	100	0		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		2		100	0		
3001.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	50	0		
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0	0		
3002.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-	0	0		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
3003.	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	100	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100	0		
3004.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			76.610.000		40.731.000	100	53,17		
		Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
3005.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			250.000		250.000	100	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
3006.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.000.000		1.221.000	100	40,7		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
3007.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			73.360.000		39.260.000	100	53,52		

		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
3008.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17.300.000		13.549.500	50	78,32		
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		0	0		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5		0		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	16		16		0	0		
3009.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			17.300.000		13.549.500	100	78,32		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		100	0		
3010.	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5		0		0	0		
3011.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		0	0		
3012.	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	16		16		100	0		
3013.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			8.500.000		8.500.000	100	100	KECAMATAN BANG HAJI	
		Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (Persentase)	89		89		100	0		
			Persentase Partisipasi lembaga pada pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan desa (%)			90		0	0		
			Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Bang Haji) (persen)	90		90		100	0		
3014.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			8.500.000		8.500.000	100	100		
		Persentase Partisipasi lembaga pada pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	12		12		0	0		
3015.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			8.500.000		8.500.000	100	100		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	12		12		100	0		

3016.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-		-	100	0	KECAMATAN BANG HAJI	
			Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (Bang Haji) (persen)	85		85		100	0		
3017.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-		-	100	0		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		1		0	0		
3018.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			-		-	100	0		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		1		100	0		
3019.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-		-	100	0	KECAMATAN BANG HAJI	
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Persentase)	85		85		100	0		
3020.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			-		-	100	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	25		25		0	0		
3021.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	25		25		100	0		
3022.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			500.000		500.000	100	100	KECAMATAN BANG HAJI	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa terlaksana	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)			100		0	0		
			Persentase desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu (Bang Haji) (persen)	90		90		100	0		
			Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase)	85		85		100	0		
3023.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			500.000		500.000	100	100		
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2		2		0	0		
3024.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			500.000		500.000	100	100		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2		2		100	0		
3025.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.813.489.622		1.483.594.079	95,54	81,81	KECAMATAN KARANG TINGGI	
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Dalam Hal perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum	Persentase terlaksana penunjang urusan daerah kab/Kota (Persen)	100		100		100	0		
			Nilai Hasil Evaluasi Sakip (Angka)			75		0	0		

			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			100		0	0		
			Persentase terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (Karang Tinggi) (persen)	100		100		100	0		
			Persentase terlaksananya urusan pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	90		90		100	0		
3026.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.300.000		700.000	90	53,85		
		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan yang berkualitas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		1		0	0		
3027.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			100.000		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
3028.	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			100.000		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
3029.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			200.000		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
3030.	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			200.000		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
3031.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			700.000		700.000	50	100		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		1		50	0		
3032.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.513.698.822		1.255.549.279	125	82,95		

		Adanya Laporan Keuangan yang berkualitas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		18		0	0		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		1		1		0	0		
3033.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.513.000.822		1.254.851.279	150	82,94		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		18		150	0		
3034.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			698.000		698.000	100	100		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
3035.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			34.000.000		34.000.000	15,13	100		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	19		1		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4		1		0	0		
3036.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			34.000.000		34.000.000	5,26	100		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	19		1		5,26	0		
3037.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	25	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4		1		25	0		
3038.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			37.214.000		33.214.000	76,19	89,25		
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		4		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		1		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		0		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
3039.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			11.000.000		11.000.000	400	100		

		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		4		400	0		
3040.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0	0		
3041.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.000.000		4.000.000	33,33	80		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		1		33,33	0		
3042.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			19.214.000		18.214.000	100	94,8		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
3043.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			-		-	0	0		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		0		0	0		
3044.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.000.000		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0	0		
3045.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.000.000		-	0	0		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
3046.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			142.135.000		82.772.800	201,67	58,24		
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		3		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		3		0	0		
3047.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			500.000		330.000	5	66		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		1		5	0		
3048.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			62.005.000		30.007.800	300	48,4		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		3		300	0		
3049.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			79.630.000		52.435.000	300	65,85		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		3		300	0		
3050.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.141.800		77.358.000	77,78	90,86		
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		1		0	0		

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		2		0	0		
3051.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			35.141.800		27.361.000	33,33	77,86		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		1		33,33	0		
3052.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		0	0		
3053.	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50.000.000		49.997.000	200	99,99		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		2		200	0		
3054.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20.300.000		20.300.000	0	100	KECAMATAN KARANG TINGGI	
		Meningkatnya Partisipasi Lembaga pada Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan (Persen)	85		85		100	0		
			Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Karang Tinggi) (persen)	89				0	0		
			Persentase Partisipasi lembaga pada pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan desa (%)			90		0	0		
3055.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			20.300.000		20.300.000	0	100		
		Partisipasi lembaga pada pelaksanaan pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	13		0		0	0		
3056.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			20.300.000		20.300.000	0	100		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	13		0		0	0		
3057.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-		-	0	0	KECAMATAN KARANG TINGGI	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Persentase Partisipasi Pada Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)			90		0	0		
			Persentase Kelompok masyarakat (Kades/kaur/perangkat,karang taruna,LPM,BPD,Ormas) yang mendapatkan peningkatan Wawasan kebangsaan ditingkat Kecamatan (Persen)	90		90		100	0		
3058.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			-		-	0	0		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan penugasan kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	2		0		0	0		

3059.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			-	-	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	2		0	0	0		
3060.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			-	-	0	0	KECAMATAN KARANG TINGGI	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)		0	0	0	0		
			Persentase desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu (Karang Tinggi) (persen)	90	90	100	0	0		
3061.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			-	-	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa terlaksana	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	13	0	0	0	0		
3062.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			-	-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	13	0	0	0	0		
3063.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.232.393.988	1.888.559.810	86,43	84,6	KECAMATAN TALANG EMPAT	
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Dalam Hal perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum	Terlaksannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di kantor Camat Talang Empat (Dokumen)	5	5	100	0	0		
			Nilai Hasil Evaluasi Sakip (Angka)		75	0	0	0		
			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)		0	0	0	0		
		Terlaksananya Kegiatan Rutin Kantor Camat Talang Empat (Bulan)		12	12	100	0	0		
		Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Kecamatan Talang Empat (Bulan)		12	12	100	0	0		
		Terlaksannaya Penyediaan Jasa Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)		12	12	100	0	0		
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)		3	3	100	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)		2	2	100	0	0		
3064.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.390.500	2.390.500	100	100		
		Jumlah Dokumen Perencanaan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	0	0	0		
3065.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.390.500	2.390.500	100	100		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	100	0	0		

3066.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.069.468.488		1.783.220.990	114,29	86,17		
		Jumlah Penyusunan Laporan Pengelola Keuangan Terlaksana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21		27		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	4		4		0	0		
3067.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.069.468.488		1.783.220.990	128,57	86,17		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	21		27		128,57	0		
3068.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	4		4		100	0		
3069.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			17.500.000		17.500.000	50	100		
		Jumlah administrasi pengelolaan Pegawai yang dikelola dengan baik	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	27		27		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6		0		0	0		
3070.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			17.500.000		17.500.000	100	100		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	27		27		100	0		
3071.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6		0		0	0		
3072.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			9.011.000		5.026.000	85,71	55,78		
		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dengan baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		

3073.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			500.000		-	100	0		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
3074.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
3075.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.500.000		2.635.000	100	75,29		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
3076.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1.111.000		1.111.000	100	100		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
3077.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			900.000		900.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100	0		
3078.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.000.000		-	100	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100	0		
3079.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.000.000		380.000	100	19		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
3080.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	100	0		
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0	0		
3081.	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	100	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100	0		
3082.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			107.440.000		60.267.320	100	56,09		
		Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
3083.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			500.000		250.000	100	50		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		

3084.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			22.340.000		11.417.320	100	51,11		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
3085.	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	100	0		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
3086.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			84.600.000		48.600.000	100	57,45		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
3087.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26.584.000		20.155.000	66,67	75,82		
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		0	0		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		0		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0	0		
3088.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			26.584.000		20.155.000	100	75,82		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		100	0		
3089.	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		0		0	0		
3090.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100	0		
3091.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-		-	100	0	KECAMATAN TALANG EMPAT	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. (%)			90		0	0		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat diwilayah kecamatan (Kegiatan)	1		1		100	0		
3092.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			-		-	100	0		
		Persentase & Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		0	0		
3093.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			-		-	100	0		

		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		100	0		
3094.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			8.500.000		8.500.000	100	100	KECAMATAN TALANG EMPAT	
		Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (talang empat) (persen)	89		89		100	0		
			Persentase Partisipasi lembaga pada pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan desa (%)			90		0	0		
			Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (persentase)	89		89		100	0		
3095.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			8.500.000		8.500.000	100	100		
		Persentase Partisipasi lembaga pada pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10		10		0	0		
3096.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			8.500.000		8.500.000	100	100		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10		10		100	0		
3097.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-		-	100	0	KECAMATAN TALANG EMPAT	
		Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kelompok Masyarakat (Kades/ Kaur/ Perangkat, Karang Taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat Kecamatan (Talang Empat) (persen)	80		80		100	0		
			Persentase kelompok masyarakat (kades/ kaur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan (persentase)	80		0		0	0		
			Persentase Partisipasi Pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)			0		0	0		
3098.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			-		-	100	0		
		Persentase Partisipasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebagai Penugasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	21		21		0	0		
3099.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	21		21		100	0		
3100.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			-		-	100	0	KECAMATAN TALANG EMPAT	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)			100		0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penggolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Lembaga)	10		10		100	0		

3101.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	-	100	0		
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	10	10	0	0		
3102.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		-	-	100	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	10	10	100	0		
3103.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.659.713.323	1.280.213.545	62,78	77,13	KECAMATAN MERIGI KELINDANG
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Dalam Hal perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum	Persentase Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (persentase)	100	100	100	0		
			Persentase terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (Merigi Kelindang) (persen)	100	100	100	0		
			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)		25	0	0		
			Nilai Hasil Evaluasi Sakip (Angka)		30	0	0		
3104.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		700.000	700.000	33,33	100		
		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	0	0		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	0	0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	0	0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	0	0		
3105.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		300.000	300.000	100	100		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	100	0		
3106.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		200.000	200.000	0	100		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	0	0		
3107.	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-	-	0	0		

		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
3108.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			200.000		200.000	0	100		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
3109.	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			-		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
3110.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
3111.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.520.218.323		1.181.052.237	200	77,69		
		Jumlah Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan terlaksana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	13		52		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
3112.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.520.218.323		1.181.052.237	400	77,69		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	13		52		400	0		
3113.	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
3114.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
3115.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlaksana	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	21		0		0	0		

			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4		0		0	0		
3116.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	21		0		0	0		
3117.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4		0		0	0		
3118.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			22.480.000		19.716.000	80	87,7		
		Persentasi Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
3119.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.600.000		2.263.000	100	62,86		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
3120.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			-		-	0	0		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
3121.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.200.000		1.200.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100	0		
3122.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			14.680.000		14.693.000	100	100,09		
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100	0		
3123.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3.000.000		1.560.000	100	52		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
3124.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	0	0		
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
3125.	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-	0	0		

		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
3126.	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
3127.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84.190.000		56.145.308	51,67	66,69		
		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		0		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	15		1		0	0		
3128.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			850.000		850.000	100	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
3129.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			10.500.000		7.435.308	100	70,81		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
3130.	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	0	0		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		0		0	0		
3131.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			72.840.000		47.860.000	6,67	65,71		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	15		1		6,67	0		
3132.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			32.125.000		22.600.000	50	70,35		
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
3133.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			32.125.000		22.600.000	100	70,35		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		100	0		
3134.	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0		

		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
3135.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-		-	20	0	KECAMATAN MERIGI KELINDANG	
		Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat (kades/ kaur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan (Persen)	80		80		100	0		
			Persentase Kelompok Masyarakat (Kades/Kaur/Perangkat, Karang Taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat Kecamatan (Merigi Kelindang) (persen)	90		90		100	0		
			Persentase Partisipasi Pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)			20		0	0		
			persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (persentase)	80		80		100	0		
3136.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			-		-	20	0		
		Persentase Partisipasi Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebagai Penugasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	25		5		0	0		
3137.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			-		-	20	0		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	25		5		20	0		
3138.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.358.409.585		1.080.680.916	106,67	79,55	KECAMATAN SEMIDANG LAGAN	
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Dalam Hal perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Sakip (Angka)			0		0	0		
			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			0		0	0		
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan (Semidang Lagan) (persen)	100				0	0		
			Persentase terlaksananya penunjang urusan daerah kab/kota (dokumen)	1		1		100	0		
3139.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		0		0	0		
3140.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		0		0	0		
3141.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.238.736.335		1.011.867.281	1000	81,69		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	10		100		0	0		

3142.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.238.736.335		1.011.867.281	1000	81,69		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	10		100		1000	0		
3143.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	50	0		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapann	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0	0		
3144.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0	0		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4		4		0	0		
3145.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	100	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4		4		100	0		
3146.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			14.253.250		3.346.000	50	23,48		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		12		0	0		
3147.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.200.000		900.000	100	75		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		12		100	0		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2		0		0	0		
3148.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.500.000		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2		0		0	0		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3		3		0	0		
3149.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			5.000.000		2.006.000	100	40,12		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3		3		100	0		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
3150.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.000.000		-	0	0		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0	0		
3151.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.500.000		-	0	0		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0	0		

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
3152.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1.053.250		440.000	100	41,78		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
3153.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
3154.	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
3155.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84.120.000		48.181.635	66,67	57,28		
		Penyediaan Jasa Surat MenyuraT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0	0		
3156.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			500.000		-	0	0		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0	0		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
3157.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			8.000.000		6.301.635	100	78,77		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
3158.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			75.620.000		41.880.000	100	55,38		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
3159.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			21.300.000		17.286.000	0	81,15		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	2		0		0	0		
3160.	7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			21.300.000		17.286.000	0	81,15		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	2		0		0	0		
3161.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			8.500.000		8.500.000	100	100	KECAMATAN SEMIDANG LAGAN	
		Meningkatnya Partisipasi Lembaga pada Pemberdayaan Desa	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)			100		0	0		
			Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Semidang Lagan) (persen)	89		89		100	0		

			Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Persen)	89		89		100	0		
3162.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			8.500.000		8.500.000	100	100		
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	13		13		0	0		
3163.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			8.500.000		8.500.000	100	100		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	13		13		100	0		
3164.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-		-	0	0	KECAMATAN SEMIDANG LAGAN	
								0	0		
3165.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			-		-	0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	17		0		0	0		
3166.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	17		0		0	0		
3167.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.771.175.700		-	0	0	KECAMATAN PEMATANG TIGA	
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Dalam Hal perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya penunjang urusan daerah kab/kota (Pematang Tiga) (persen)	100				0	0		
			Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)					0	0		
			Nilai Evaluasi SAKIP (Predikat)					0	0		
			Persentase terlaksananya penunjang urusan daerah kab/kota (Persentase)	100				0	0		
3168.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan yang berkualitas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
3169.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
3170.	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
3171.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
3172.	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			-		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
3173.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
3174.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.663.409.700		-	0	0		
		Jumlah Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan terlaksana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16		0		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
3175.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.663.409.700		-	0	0		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16		0		0	0		
3176.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			-		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
3177.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		

		Jumlah administrasi pengelolaan Pegawai yang dikelola dengan baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4		0		0	0		
3178.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4		0		0	0		
3179.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.886.000		-	0	0		
		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2		0		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		0		0	0		
3180.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.250.000		-	0	0		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0	0		
3181.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			636.000		-	0	0		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		0	0		
3182.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.500.000		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2		0		0	0		
3183.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.500.000		-	0	0		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		0		0	0		
3184.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84.320.000		-	0	0		
		Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0	0		
3185.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.000.000		-	0	0		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		0	0		
3186.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			82.320.000		-	0	0		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0	0		
3187.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16.560.000		-	0	0		
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0	0		

3188.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		16.560.000		-	0	0		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0	0	0		
3189.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-		-	0	0	KECAMATAN PEMATANG TIGA
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. (%)				0	0		
			Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Persentase)	90			0	0		
3190.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			-		-	0	0	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah kecamatan yang terlaksana	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0	0	0		
3191.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			-		-	0	0	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0	0	0		
3192.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			10.000.000		-	0	0	KECAMATAN PEMATANG TIGA
		Meningkatnya Partisipasi Lembaga pada Pemberdayaan Desa	Persentase Partisipasi lembaga pada pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan desa (%)				0	0		
			Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Persentase)	89			0	0		
3193.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			10.000.000		-	0	0	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	13		0	0	0		
3194.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			10.000.000		-	0	0	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	13		0	0	0		
3195.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			-		-	0	0	KECAMATAN PEMATANG TIGA
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa terlaksana	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)				0	0		
			Persentase desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu (Persentase)	90			0	0		
3196.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			-		-	0	0	

		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1		0		0	0		
3197.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			-		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1		0		0	0		
3198.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.583.261.217		1.999.984.149	100	77,42	KECAMATAN TABA PENANJUNG	
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Dalam Hal perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			100		0	0		
			Persentase PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Tahun)	1		1		100	0		
			PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Tahun)	1		1		100	0		
			Nilai Hasil Evaluasi Sakip (Angka)			75		0	0		
			PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Tahun)	1				0	0		
			PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Tahun)	1		1		100	0		
3199.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.900.000		1.900.000	100	100		
		Jumlah Dokumen Peracanaan yang berkualitas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
3200.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
3201.	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		

3202.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.900.000		1.900.000	100	100		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
3203.	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
3204.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
3205.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.398.261.217		1.874.221.618	100	78,15		
		Jumlah Laporan Keuangan yang terlaksana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1		1		0	0		
3206.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.398.261.217		1.874.221.618	100	78,15		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1		1		100	0		
3207.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	100	0		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang berkualitas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1		1		0	0		
3208.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	100	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		100	0		
3209.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	100	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1		1		100	0		
3210.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			43.600.000		36.020.000	100	82,61		
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		0	0		

			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
3211.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.000.000		-	100	0		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
3212.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	100	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
3213.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.000.000		10.000.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
3214.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4.000.000		4.000.000	100	100		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
3215.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2.400.000		2.400.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100	0		
3216.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu			13.200.000		13.200.000	100	100		
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100	0		
3217.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			8.000.000		6.420.000	100	80,25		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
3218.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			113.850.000		67.492.531	100	59,28		
		Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
3219.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			250.000		-	100	0		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
3220.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			16.400.000		10.972.531	100	66,91		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
3221.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			97.200.000		56.520.000	100	58,15		

		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
3222.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25.650.000		20.350.000	100	79,34		
		Terlaksana Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		1		0	0		
3223.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			25.650.000		20.350.000	100	79,34		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		100	0		
3224.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		1		100	0		
3225.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			200.000.000		199.470.444	100	99,74	KECAMATAN TABA PENANJUNG	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi lembaga pada pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan desa (%)			100		0	0		
3226.	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			200.000.000		199.470.444	100	99,74		
		Meningkatnya kegiatan Pelayanan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		0	0		
3227.	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			200.000.000		199.470.444	100	99,74		
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		100	0		
3228.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			80.400.000		79.800.000	100	99,25	KECAMATAN TABA PENANJUNG	
		Meningkatnya Penanganan Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)			100		0	0		
			Persentase PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Tahun)	1		1		100	0		
3229.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			80.400.000		79.800.000	100	99,25		
		Jumlah Tokoh Agama dan Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		1		0	0		
3230.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			80.400.000		79.800.000	100	99,25		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		1		100	0		
3231.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-		-	100	0	KECAMATAN TABA PENANJUNG	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Persentase Partisipasi Pada Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)			90		0	0		

3232.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			-	-	100	0		
		Terlaksanannya Program Penyelenggaraan Urusan Pemeritahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	1	1		0	0		
3233.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			-	-	100	0		
		Terlaksanannya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	1	1		100	0		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			20.021.295.476	31.882.558.533	69,13	159,24		
3234.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.199.236.777	2.620.217.169	67,85	81,9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah dalam hal Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya penunjang urusan daerah kab/kota (Kesbangpol) (persen)	100	245		245	0		
			Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (Bahasa)				0	0		
3235.	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.753.800	590.000	75	7,61		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	0		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		0	0		
3236.	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.890.000	590.000	100	10,02		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		100	0		
3237.	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			520.000	-	0	0		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	0		0	0		
3238.	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			593.800	-	100	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		100	0		
3239.	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			750.000	-	100	0		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		100	0		
3240.	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.626.580.487	2.295.473.141	311,11	87,39		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	56		0	0		

3241.	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.626.580.487		2.295.473.141	311,11	87,39		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18		56		311,11	0		
3242.	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	50		0		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		0	0		
3243.	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	50		0		0	0		
3244.	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		0	0		
3245.	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			110.106.803		95.084.458	3,57	86,36		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		1		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	10		0		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		0		0	0		
3246.	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-		10.000.000	0	0		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
3247.	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.000.000		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0	0		
3248.	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			41.372.000		41.372.000	0	100		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		0	0		
3249.	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			750.000		750.000	0	100		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		

3250.	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		8.000.000		7.550.000	25	94,38		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		1	25	0		
3251.	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		23.076.000		8.503.655	0	36,85		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10		0	0	0		
3252.	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		26.908.803		26.908.803	0	100		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		0	0	0		
3253.	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		-	0	0		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0	0	0		
3254.	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0	0	0		
3255.	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		209.039.030		188.389.570	204,17	90,12		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0	0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		2	0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0	0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		8	0	0		
3256.	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		300.000		300.000	0	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0	0	0		
3257.	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		33.200.000		23.946.540	16,67	72,13		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		2	16,67	0		
3258.	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-		-	0	0		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0	0	0		
3259.	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		175.539.030		164.143.030	800	93,51		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		8	800	0		
3260.	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		245.756.657		40.680.000	13,33	16,55		

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		2		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		0		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
3261.	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			40.750.000		40.680.000	40	99,83		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		2		40	0		
3262.	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			6.000.000		-	0	0		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		0		0	0		
3263.	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			199.006.657		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
3264.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			1.326.566.699		2.740.963.142	100	206,62	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)			97		0	0		
3265.	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			1.326.566.699		2.740.963.142	100	206,62		
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	300		0		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	40		80		0	0		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	25		50		0	0		
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	1		0		0	0		

3266.	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			-	1.284.980.871	100	0		
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1	1		100	0		
3267.	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			-	-	0	0		
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	300	0		0	0		
3268.	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			437.125.099	412.930.553	200	94,47		
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	40	80		200	0		
3269.	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			889.441.600	1.043.051.718	200	117,27		
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	25	50		200	0		
3270.	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka			-	-	0	0		
		Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	1	0		0	0		
3271.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			1.299.842.000	2.592.540.000	62,5	199,45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)		100		0	0		
3272.	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			1.299.842.000	2.592.540.000	62,5	199,45		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	0		0	0		

		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	50		0		0	0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8		15		0	0		
3273.	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		-		1.296.270.000	0	0		
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1		0		0	0		
3274.	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		-		-	0	0		
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50		0		0	0		
3275.	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1.299.842.000		1.296.270.000	187,5	99,73		
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8		15		187,5	0		
3276.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		-		2.000.000	100	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Meningkatkan Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan			80		0	0		
3277.	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		-		2.000.000	100	0		

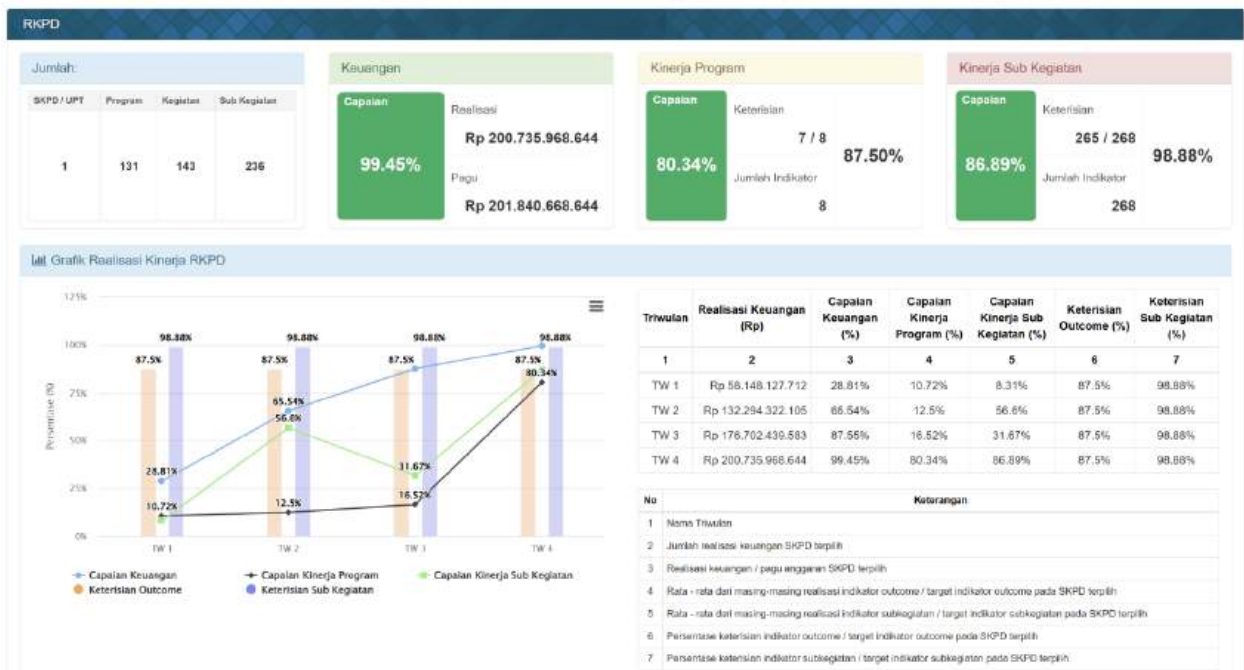
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1		1		0	0		
3278.	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			-		2.000.000	100	0		
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1		1		100	0		
3279.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				2.500.000	4.000.000	33,33	160	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Kebudayaan Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)			22		0	0		
3280.	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			2.500.000		4.000.000	33,33	160		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	100		0		0	0		
3281.	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			2.500.000		2.000.000	0	80		
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1		0		0	0		
3282.	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			-		2.000.000	100	0		
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1		1		100	0		

3283.	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		-	-	0	0		
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	100	0	0	0		
3284.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			14.193.150.000	23.922.838.222	61,67	168,55	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)		59	0	0		
3285.	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			14.193.150.000	23.922.838.222	61,67	168,55	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2	2	0	0		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	100	30	0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	12	2	0	0		
3286.	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			-	11.963.892.671	100	0	
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2	2	100	0		
3287.	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			13.953.350.000	11.764.875.551	100	84,32	

		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1		1		100	0		
3288.	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			89.800.000		89.320.000	30	99,47		
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	100		30		30	0		
3289.	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000		104.750.000	16,67	69,83		
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12		2		16,67	0		
								0	0		
			JUMLAH		896.480.694.107		712.373.545.403				
			Rata-rata capaian kinerja (%)					76,02	79,46		
			Predikat kinerja					Tinggi	Tinggi		

2.2 Analisis Capaian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, Pelaksanaan Program menunjukkan kinerja dengan capaian 80,34%, sementara realisasi anggaran mencapai 99,45%.

I. Realisasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran (< 70%)

Berikut adalah rincian program, kegiatan, dan subkegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang capaian kinerjanya berada di bawah ambang batas minimal yang ditetapkan (70%):

Program yang tidak memenuhi target kinerja (< 70%):

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 63,56 %
- Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, dengan capaian 66,67%
- Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dengan capaian 0%
- Orogram Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan capaian 66,67%

Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja (< 70%):

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian 66,67%

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian 57,14%
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan capaian 0%
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan capaian 0%
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian 0%
- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan capaian 68,18%
- Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan capaian 46,15%
- Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, dengan capaian 66,67%
- Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 50%
- Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
- Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, dengan capaian 50%

Subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja (< 70%):

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan capaian 66,67%
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan capaian 0%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan capaian 0%
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan capaian 0%
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan capaian 0%
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan capaian 0%
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan capaian 0%
- Penyediaan Bahan/Material, dengan capaian 0%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan capaian 60%
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan capaian 0%
- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), dengan capaian 0%
- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, dengan capaian 0%
- Pembangunan Perpustakaan Sekolah, dengan capaian 0%

- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah, dengan capaian 0%
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah, dengan capaian 0%
- Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar, dengan capaian 0%
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan capaian 0%
- Pembangunan Perpustakaan Sekolah, dengan capaian 0%
- Pembangunan Laboratorium, dengan capaian 0%
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah, dengan capaian 0%
- Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium, dengan capaian 0%
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah, dengan capaian 0%
- Pembangunan Ruang Kelas Baru, dengan capaian 0%
- Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, dengan capaian 0%
- Pengadaan Mebel PAUD, dengan capaian 0%
- Pengadaan Perlengkapan PAUD, dengan capaian 0%
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD, dengan capaian 0%
- Pemeliharaan Mebel Sekolah, dengan capaian 0%
- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, dengan capaian 0%
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, dengan capaian 0%
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, dengan capaian 0%
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan, dengan capaian 0%
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan capaian 0%
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan capaian 0%
- Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan capaian 0%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal, dengan capaian 0%
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan, dengan capaian 0%

- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, dengan capaian 0%
- Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar, dengan capaian 0%
- Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, dengan capaian 0%
- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional, dengan capaian 0%
- Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional, dengan capaian 0%
- Penetapan Cagar Budaya, dengan capaian 0%

Realisasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran (70% - 100%)

Berikut adalah rincian program, kegiatan, dan subkegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah berhasil mencapai target kinerja sesuai batas standar yang diwajibkan ($\geq 70\%$):

Program yang memenuhi target kinerja (70% - 100%):

- Program Pengelolaan Pendidikan, dengan capaian 72,62%
- Program Pengembangan Kurikulum, dengan capaian 85,71 %
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan capaian 100%
- Program Pengembangan kebudayaan, dengan capaian 75%

Kegiatan yang memenuhi target kinerja (70% - 100%):

- Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian 82,5%
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 93,33%
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 100%
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan capaian 80%
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan capaian 78,18%
- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, dengan capaian 75%
- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 100%
- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan capaian 100%

- Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%

Subkegiatan yang memenuhi target kinerja (70% - 100%):

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan capaian 100%
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan capaian 100.00%
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan capaian 100%
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan capaian 100%
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian 100.00%
- , Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan capaian 100.00%
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan capaian 100%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan capaian 100%
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian 100%
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian 100%
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan capaian 100%
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian 100%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian 100%
- Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan capaian 100%
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan capaian 100%
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan capaian 100%
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian 100%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan capaian 100%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan capaian 100%
- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, dengan capaian 100%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan capaian 100%

- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, dengan capaian 100%
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, dengan capaian 100%
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, dengan capaian 100%
- Pengadaan Mebel Sekolah, dengan capaian 100%
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, dengan capaian 100%
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan capaian 100%
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan capaian 100%
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, dengan capaian 100%
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, dengan capaian 100%
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, dengan capaian 100%
- Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar, dengan capaian 100%
- Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan, dengan capaian 100%
- Pengembangan konten digital untuk Pendidikan, dengan capaian 100%
- Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan, dengan capaian 100%
- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dengan capaian 100%
- Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan, dengan capaian 100%
- Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan capaian 100%
- Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi dengan capaian 100%
- Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik, dengan capaian 100%
- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik, dengan capaian 100%
- Pembangunan Ruang Kelas Baru, dengan capaian 100%
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan capaian 100%
- Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, dengan capaian 100%

- Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik, dengan capaian 100%
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, dengan capaian 100%
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar, dengan capaian 100%
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik, dengan capaian 100%
- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, dengan capaian 100%
- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, dengan capaian 100%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan capaian 100%
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, dengan capaian 100%
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, dengan capaian 100%
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan capaian 100%
- Pengadaan Mebel Sekolah, dengan capaian 100%
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, dengan capaian 100%
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, dengan capaian 100%
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan capaian 100%
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan capaian 100%
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, dengan capaian 100%
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, dengan capaian 100%
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, dengan capaian 100%
- Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan, dengan capaian 100%
- Pengembangan konten digital untuk Pendidikan, dengan capaian 100%
- Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan, dengan capaian 80%
- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, dengan capaian 100%
- Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan, dengan capaian 100%
- Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan capaian 100%

- Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intolerans, dengan capaian 100%
- Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik, dengan capaian 100%
- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik, dengan capaian 100%
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, dengan capaian 100%
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik, dengan capaian 100%
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, dengan capaian 100%
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD, dengan capaian 100%
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD, dengan capaian 100%
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, dengan capaian 100%
- Pengelolaan Dana BOP PAUD, dengan capaian 100%
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD, dengan capaian 100%
- Pengembangan konten digital untuk Pendidikan, dengan capaian 100%
- Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan, dengan capaian 100%
- Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan, dengan capaian 100%
- Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan capaian 100%
- Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, dengan capaian 100%
- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik, dengan capaian 100%
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD, dengan capaian 100%
- Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD, dengan capaian 100%
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan capaian 100%
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan, dengan capaian 100%
- Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan, dengan capaian 100%
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan, dengan capaian 100%

- Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik, dengan capaian 100%
- Pengadaan Mebel Sekolah, dengan capaian 100%
- Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar, dengan capaian 100%
- Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, dengan capaian 100%
- Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar, dengan capaian 100%
- Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, dengan capaian 100%
- Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, dengan capaian 100%
- Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, dengan capaian 100%
- Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan capaian 100%
- Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan capaian 100%
- Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, dengan capaian 100%
- Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, dengan capaian 100%
- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan, dengan capaian 100%
- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, dengan capaian 100%
- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat, dengan capaian 100%
- Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, dengan capaian 100%
- Pelindungan Cagar Budaya, dengan capaian 100%

Realisasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil / Keluaran (> 100%)

Tidak Terdapat Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang melebihi target kinerja

II. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

Faktor Pendorong: Keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan IV didorong oleh optimalisasi penyelesaian seluruh program dan kegiatan, tingginya realisasi anggaran, serta komitmen seluruh unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara intensif, pemanfaatan teknologi informasi, serta dukungan dari pemangku kepentingan dan pemerintah daerah turut berkontribusi terhadap tercapainya target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada akhir tahun.

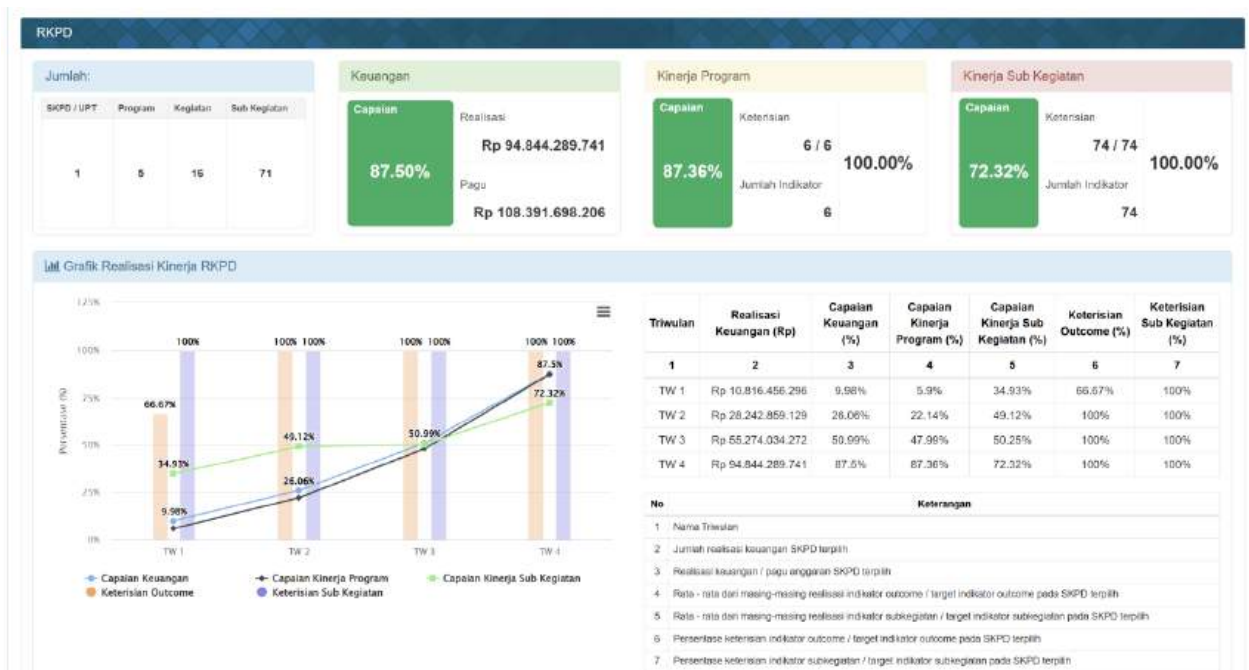
Faktor Penghambat: Pada Triwulan IV, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pencapaian kinerja, antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan menjelang akhir tahun anggaran, kendala administrasi dan pelaporan, serta tingginya beban kerja dalam penyelesaian program dan penyusunan laporan kinerja. Selain itu, keterlambatan penyampaian data dari unit pelaksana dan beberapa faktor eksternal turut memengaruhi optimalisasi pencapaian target kinerja tahunan

III. Rekomendasi Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja tahun berjalan sebagai dasar penyusunan perencanaan tahun berikutnya. Selain itu, penyempurnaan perencanaan program, percepatan persiapan kegiatan awal tahun, optimalisasi penyerapan anggaran sejak awal tahun, serta penguatan koordinasi dan sistem pelaporan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, diperlukan tindak lanjut dalam penyempurnaan Renja SKPD berikutnya melalui evaluasi menyeluruh capaian kinerja tahunan, penajaman prioritas program, serta penyusunan perencanaan yang lebih realistis dan berbasis hasil. Selain itu, optimalisasi perencanaan dan penganggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas data, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas Renja pada tahun berikutnya.

2. DINAS KESEHATAN



Berdasarkan hasil rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) terhadap hasil Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, pelaksanaan program menunjukkan kinerja dengan capaian 87,36%. Sementara realisasi anggaran mencapai 87,50%.

I. Analisis Realisasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Realisasi yang TIDAK MEMENUHI Target Kinerja Minimal (< 70%)

Berikut adalah daftar program, kegiatan, dan subkegiatan pada Renja RSUD Tahun 2025 yang realisasi capaian kinerjanya berada di bawah batas minimal 70%:

Program yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil:

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Capaian Kinerja: 66,67 %
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 0 %

Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil:

- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Capaian kinerja dengan Capaian 55,42 %
- Pemeliharaan Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Capaian 8,33%
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah kabupaten/Kota dengan Capaian 65,63 %

- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dengan Capaian 0 %
- Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dengan Capaian 0%

Sub-Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Keluaran:

- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan — Capaian Kinerja: 0%
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Capaian Kinerja 20%
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Capaian Kinerja 6,67 %
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor Capaian Kinerja 6,67 %
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Capaian Kinerja 10%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Capaian Kinerja 8,33 %
- Pembangunan Puskesmas Capaian Kinerja 0%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Capaian Kinerja 0%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Capaian Kinerja: 0%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Capaian Kinerja 0%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Capaian Kinerja: 0%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV — Capaian Kinerja: 0%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Capaian Kinerja 0%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Capaian Kinerja 0%
- Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Capaian Kinerja 0%
- Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Capaian Kinerja: 0%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis Capaian Kinerja 0%

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV) Capaian Kinerja 0%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria Capaian Kinerja 0%
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Capaian Kinerja 0%
- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Capaian Kinerja 0%
- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Capaian Kinerja 0%

Realisasi yang TELAH MEMENUHI Target Kinerja Minimal

Program yang Memenuhi Target Kinerja Hasil:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Kinerja : 81,32 %
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Capaian Kinerja : 100 %
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Capaian Kinerja : 100 %

Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Hasil:

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota — Capaian Kinerja: 80,00%
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah – Capaian Kinerja 100%
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – Capaian Kinerja 100%
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 %
- Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya — Capaian Kinerja: 100 %
- Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah – Capaian Kinerja 100%
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah — Capaian Kinerja: 100%
- Penyelenggaraan sistem informasi Kesehatan secara terintegrasi – Capaian Kinerja 100%

- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten kota – Capaian Kinerja 100%
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota – Capaian Kinerja 100%
- Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT SebagaiI izin Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh rumah tangga – Capaian Kinerja 100%
- Penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makanan/restoran dan depot air minum (DAM) – Capaian Kinerja 100%

Sub-Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Keluaran:

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD — Capaian Kinerja: 100%
- Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya — Capaian Kinerja: 100 %
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD — Capaian Kinerja: 100%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah — Capaian Kinerja: 100%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD – Capaian Kinerja 100%
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah – Capaian Kinerja 100 %
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN — Capaian Kinerja: 100%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD – Capaian Kinerja 100%
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan – Capaian Kinerja 100%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP - Capaian Kinerja 100 %
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD – Capaian Kinerja 100%
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor – Capaian Kinerja 100 %
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor — Capaian Kinerja: 100%
- Fasilitasi Kunjungan Tamu – Capaian Kinerja 100 %

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan – Capaian Kinerja 100%
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya – Capaian Kinerja 100%
- Penyediaan Jasa surat Menyurat — Capaian Kinerja: 100%
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik — Capaian Kinerja: 100%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor — Capaian Kinerja: 100%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan – Capaian Kinerja 100 %
- Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya – Capaian Kinerja 100%
- Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan – Capaian Kinerja 100%
- Pengembangan Puskesmas – Capaian KKinerja 100 %
- Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya – Capaian Kinerja 100 %
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan — Capaian Kinerja: 100%
- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan – Capaian Kinerja 100 %
- Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan – Capaian Kinerja 100%
- Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan – Capaian Kinerja 100%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin – Capaian Kinerja 100%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir – Capaian Kinerja 100%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita – Capaian Kinerja 100%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif – Capaian Kinerja 100%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut — Capaian Kinerja: 100%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat – Capaian Kinerja 100%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan – Capaian Kinerja 100%
- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan – Capaian Kinerja 100%
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan – Capaian Kinerja 100%

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) – Capaian Kinerja 100%
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular – Capaian Kinerja 100%
- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat – Capaian Kinerja 100%
- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional – Capaian Kinerja 100%
- Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat – Capaian Kinerja 100%
- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota – Capaian Kinerja 100%
- Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya — Capaian Kinerja: 100 %
- Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak – Capaian Kinerja 100%
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi – Capaian Kinerja 100%
- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan – Capaian Kinerja 100%
- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar – Capaian Kinerja 100%
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota – Capaian Kinerja 100%
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga – Capaian Kinerja 100%
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) – Capaian Kinerja 100%
- Operasional Pelayanan Puskesmas/Rumah Sakit — Capaian Kinerja: 100%

Realisasi yang MELEBIHI Target Kinerja Hasil atau Keluaran Yang Direncanakan Tidak Terdapat Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang memiliki realisasi Kinerja melebihi 100%

II. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Faktor Pendorong

- Tingginya komitmen manajemen RSUD dalam percepatan pelayanan dasar kesehatan masyarakat, khususnya pada klaster kesehatan ibu, anak, dan pemenuhan obat-obatan esensial rujukan.
- Dukungan anggaran belanja operasional rutin (gaji, logistik, penyusunan dokumen perencanaan) yang terserap secara terstruktur pada SIPD dalev.
- Respons cepat tim rujukan dalam penanganan penyeberan penyakit darurat dan pengiriman spesimen klinis ke laboratorium rujukan nasional.

Faktor Penghambat

- Adanya keterbatasan infrastruktur teknologi informasi yang menghambat implementasi pelayanan konsultasi jarak jauh melalui Telemedicine terintegrasi.
- Kendala administratif dan teknis dalam proses e-purchasing katalog elektronik yang menyebabkan pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) medik vital mengalami gagal salur sehingga Capaian Kinerja (0%).
- Kurangnya sinergitas pelacakan kasus dan pendataan jemput bola untuk pelayanan kesehatan khusus seperti penderita hipertensi, diabetes melitus, dan ODGJ berat di lingkungan rujukan daerah.

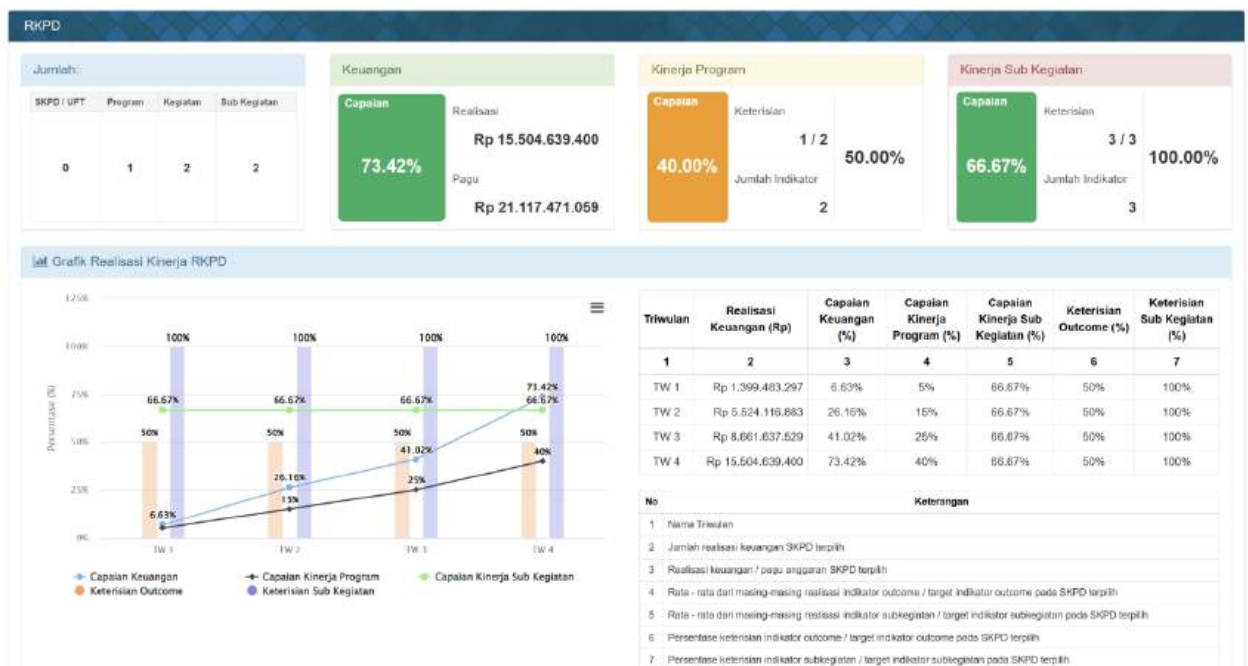
III. Rekomendasi Tindak Lanjut

- Melakukan evaluasi berkala terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa, khususnya untuk Alat Kesehatan, dengan mempersiapkan spesifikasi teknis alternatif jauh sebelum jadwal e-purchasing dilaksanakan guna menghindari realisasi 0%.
- Meningkatkan integrasi sistem informasi rumah sakit (SIMRS) dengan jaringan Sistem Informasi Kesehatan Nasional untuk mendukung aktivasi penuh subkegiatan Telemedicine.
- Mengoptimalkan penyerapan dan pelaksanaan operasional pada subkegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang masih di bawah

standar minimal 70% (seperti pelayanan balita, usia lanjut, serta penanganan penyakit menular/tidak menular) melalui program kemitraan lapangan.

- Melakukan restrukturisasi dan percepatan verifikasi aset dalam rangka meningkatkan kinerja Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) RSUD yang saat ini masih di bawah target minimal.

3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKULU TENGAH



Berdasarkan hasil evaluasi Renja SKPD RSUD Bengkulu Tengah Tahun 2025, kinerja program hanya mencapai 40%, sementara tingkat capaian realisasi anggaran secara umum telah mencapai 73,42%. Uraian analisis berikut disusun mengikuti format contoh kerangka analisis.

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target

- Program yang belum memenuhi target:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (capaian 0%)
 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan realisasi anggaran 66,67%.
- Kegiatan yang belum memenuhi target:
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (0%).
 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (0%).
- Subkegiatan yang belum memenuhi target:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (0%).
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (0%).

2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target

• Program:

- Tidak ada program yang telah memenuhi target

• Kegiatan:

- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 100%.
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mencapai kinerja 100%

• Subkegiatan:.

- Operasional Pelayanan Rumah Sakit mencapai kinerja 100 %
- Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar mencapai kinerja 100% .

3. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang melebihi target

Pada dokumen evaluasi tidak terdapat program, kegiatan maupun subkegiatan yang dilaporkan melebihi target kinerja yang direncanakan.

4. Faktor pendorong dan penghambat

Faktor pendorong:

- Komitmen pegawai RSUD dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- Dukungan pendanaan dari APBD dan BLUD.
- Pelaksanaan operasional pelayanan rumah sakit yang berjalan sesuai rencana.

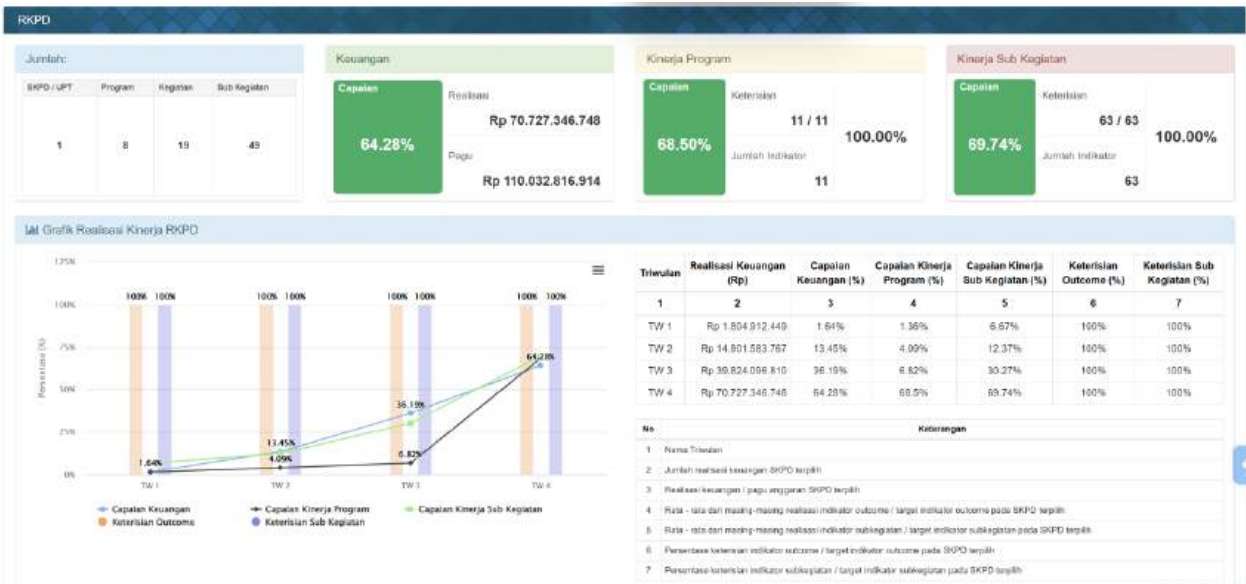
Faktor penghambat:

- Penyerapan belanja pada beberapa komponen belum optimal, khususnya pengadaan alat kesehatan dan administrasi tertentu.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada SKPD RSUD Bengkulu Tengah belum memenuhi target dengan capaian 0% karena sudah teralihkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah

5. Rekomendasi tindak lanjut

- Mengoptimalkan capaian kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan realisasi anggaran
- Merencanakan sub kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi pada Program Penunjang
- Mempertahankan capaian kegiatan dan sub kegiatan yang telah berada di atas 70%.
- Memperkuat monitoring dan evaluasi berkala agar seluruh Program, kegiatan, dan subkegiatan mencapai target pada periode berikutnya.
- Meningkatkan efektivitas perencanaan belanja sehingga realisasi anggaran lebih merata sepanjang tahun.

4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mencapai Rp 70.727.346.748 atau sebesar 64,28% dari total pagu Rp 110.032.816.914. Secara umum, capaian kinerja Program berada pada angka 68,50%, menunjukkan pelaksanaan program berjalan cukup baik meskipun terdapat beberapa kegiatan yang belum memenuhi target.

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan capaian 43,81%

- Program Penyelenggaraan Jalan, dengan capaian 40,38%
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan capaian 65,85%
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan capaian 25%
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan capaian 25%
- Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, , dengan capaian 56,25%
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 50%
 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, dengan capaian 20%
 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
- Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian 2%
 - Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan capaian 8,33%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan capaian 25%
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan capaian 50%
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan capaian 25%
 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi, dengan capaian 0%
 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan capaian 0%

- Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang, dengan capaian 0%
2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 70%
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan capaian 99,69%
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan capaian 75%
 - Program Penataan Bangunan Gedung, dengan capaian 100%
 - Program Penyelenggaraan Jalan, dengan capaian 100%
 - Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian 71,48%
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian 75%
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan capaian 100%
 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 99,62%
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 75%
 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dengan capaian 100%
 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%

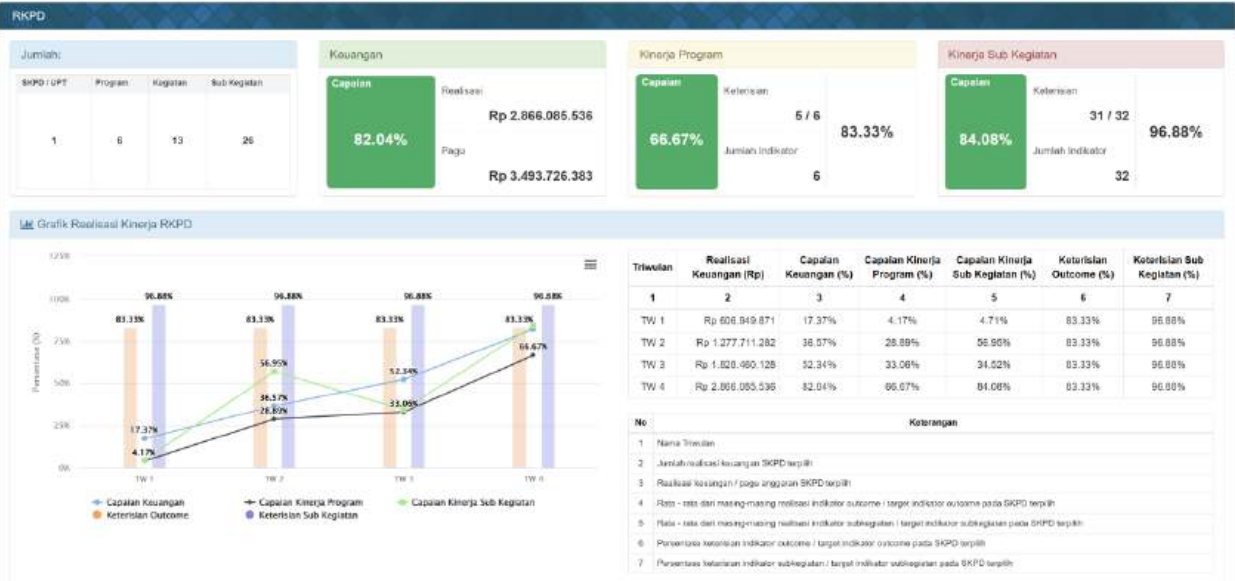
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan capaian 100%
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan capaian 100%
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan capaian 83,33%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan capaian 91,67%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian 90%
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar, dengan capaian 100%
 - Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, dengan capaian 98,9%
 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, dengan capaian 99,26%
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, dengan capaian 100%

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) , dengan capaian 100%
 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, dengan capaian 100%
 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, dengan capaian 100%
 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat, dengan capaian 100%
 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, dengan capaian 100%
 - Pembangunan Jalan, dengan capaian 100%
 - Rekonstruksi Jalan, dengan capaian 100%
 - Rehabilitasi Jembatan, dengan capaian 100%
 - Pembangunan Jembatan, dengan capaian 100%
 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan, dengan capaian 100%
 - Rehabilitasi Jalan, dengan capaian 100%
 - Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
 - Penyusunan Peta Dasar, dengan capaian 100%
 - Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang, dengan capaian 100%
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang melebihi target kinerja hasil:
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan capaian 110%
 - Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian 108,18%

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 110%
- Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian 124,53%
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan capaian 200%
 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, dengan capaian 100,31%
 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman, dengan capaian 120%
- 4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan.
 - Faktor Pendorong
 - Capaian tinggi pada program pengelolaan sumber daya air, pembangunan jaringan irigasi, serta penyediaan sistem air minum menjadi faktor utama yang mendorong keberhasilan Dinas PUPR. Dukungan anggaran yang memadai, partisipasi masyarakat dalam program berbasis lingkungan, serta koordinasi teknis yang baik antar perangkat daerah memperkuat pencapaian ini. Selain itu, keberhasilan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan yang mencapai target 100% menunjukkan adanya komitmen kuat dalam penyediaan infrastruktur dasar yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
 - Faktor Penghambat
 - Beberapa kegiatan strategis tidak terlaksana, khususnya pada aspek penataan ruang seperti penetapan RTRW, evaluasi RTRW, dan koordinasi pemanfaatan ruang yang masih stagnan di angka 0%. Hal ini menghambat integrasi pembangunan wilayah secara menyeluruh. Selain itu, kegiatan administrasi kepegawaian, pengadaan sarana penunjang, serta pengawasan jasa konstruksi juga belum optimal, dengan capaian rendah antara 0–25%. Keterbatasan sarana pendukung administrasi dan lemahnya pengendalian sektor konstruksi menjadi hambatan signifikan dalam pencapaian target kinerja.
- 5. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan

Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Dinas PUPR perlu segera mengoptimalkan program penataan ruang melalui percepatan penetapan RTRW dan penguatan forum koordinasi lintas OPD agar kebijakan pembangunan lebih terarah. Pengadaan sarana penunjang kantor dan administrasi kepegawaian harus diprioritaskan untuk mendukung kelancaran operasional. Selain itu, pengawasan jasa konstruksi perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih ketat dan monitoring berkala. Keberhasilan program irigasi, SPAM, dan pembangunan jalan harus terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya, sehingga capaian kinerja tidak hanya terfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada tata kelola ruang dan layanan penunjang pemerintahan yang lebih komprehensif.

5. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mencapai Rp 2.866.085.536 atau sebesar 82,04% dari total pagu Rp 3.493.726.383. Secara umum, capaian kinerja rata-rata menunjukkan pelaksanaan program berjalan cukup baik meskipun terdapat beberapa kegiatan yang belum memenuhi target.

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :

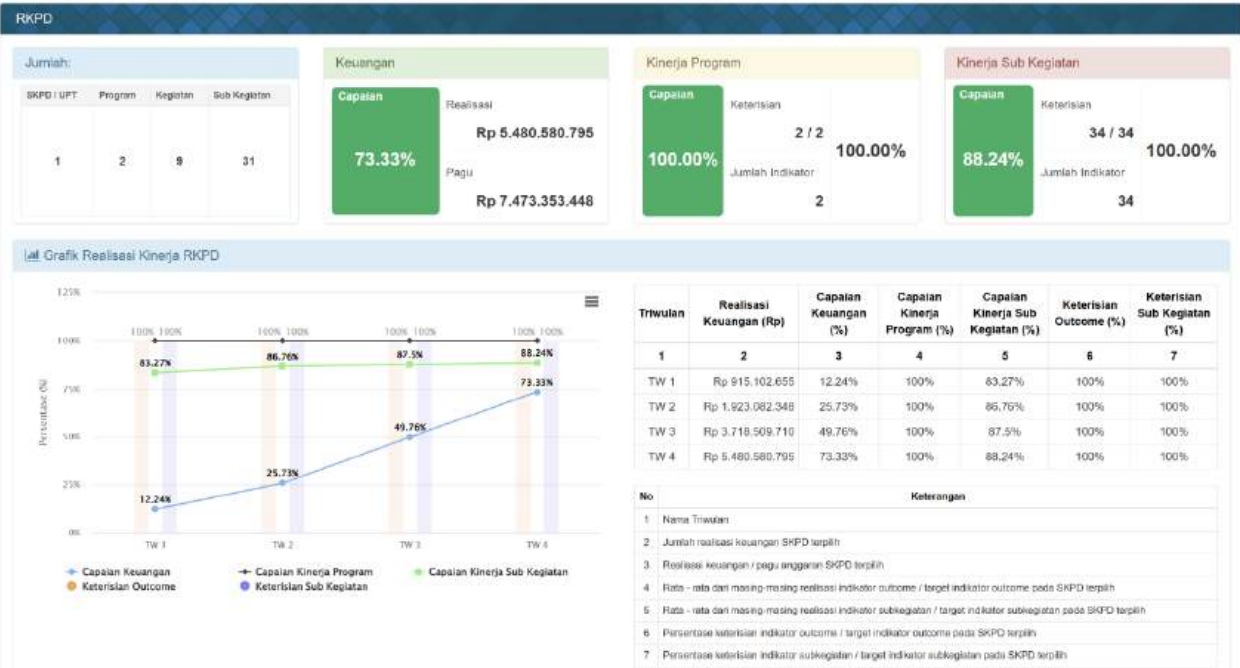
- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, dengan capaian 0%
 - Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, dengan capaian 0%
 - Program Penatagunaan Tanah, dengan capaian 33,33%
 - Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian 0%
 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 33,33%
 - Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan capaian 53,49%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian 0%
 - Pengadaan Mebel, dengan capaian 0%
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian 25%
 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
 - Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 99,57%
 - Program Kawasan Permukiman, dengan capaian 100%

- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), dengan capaian 100%
- Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian 90,7%
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 75%
 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, dengan capaian 100%
 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, dengan capaian 100%
 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, dengan capaian 100%
- Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan capaian 100%
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan capaian 100%
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, dengan capaian 100%
 - Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan, dengan capaian 100%
- 3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang melebihi target kinerja hasil:
 - Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian 104%

- Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian 116,67%
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 200%
- Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian 112%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan capaian 200%
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan capaian 200%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan capaian 200%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan capaian 200%
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan capaian 200%
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan capaian 200%
 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP, dengan capaian 200%
- 4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan .
 - Faktor Pendorong
 - Optimalisasi administrasi keuangan dan kepegawaian. Kegiatan administrasi keuangan dan kepegawaian berjalan baik dengan capaian tinggi (98,04%–104%), menunjukkan tata kelola internal yang mendukung kelancaran program.
 - Keberhasilan program permukiman dan PSU perumahan. Program Kawasan Permukiman dan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan mencapai 100%, menandakan adanya komitmen kuat dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
 - Faktor Penghambat
 - Kegiatan penyelesaian sengketa dan kasus pertanahan tidak berjalan. Penyelesaian sengketa tanah garapan, mediasi, inventarisasi kasus pertanahan, serta koordinasi ganti kerugian tanah tidak terlaksana (0%), sehingga menimbulkan hambatan dalam kepastian hukum dan pelayanan masyarakat.

5. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah adalah mengembangkan model partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan sarana permukiman agar dapat meningkatkan dan melanjutkan keberhasilan penataan kawasan permukiman kumuh dan PSU perumahan sebagai program unggulan dengan dampak langsung pada masyarakat. Tidak lupa untuk menetapkan mekanisme antisipasi terhadap perubahan prioritas kegiatan agar tidak menghambat pencapaian target serta mengintegrasikan analisis risiko dalam perencanaan program untuk mengurangi potensi kegiatan yang tidak terlaksana.

6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Berdasarkan hasil Evaluasi RKPD, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki total pagu anggaran sebesar Rp7.473.353.448 dengan realisasi keuangan sebesar Rp5.480.580.795 atau mencapai 73,33% dari total anggaran yang tersedia.

Dari sisi kinerja, realisasi kinerja pada program mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target program dan kegiatan telah terlaksana dengan baik. Namun demikian, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara capaian kinerja (85,71%) dan realisasi keuangan (73,33%), yang mengindikasikan adanya efisiensi anggaran pada beberapa

kegiatan atau adanya kegiatan yang mencapai target dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari perencanaan.

Ringkasan Kinerja dan Keuangan

Uraian	Nilai
Total Pagu Anggaran	Rp7.473.353.448
Total Realisasi Keuangan	Rp5.480.580.795
Persentase Realisasi Keuangan	73,33%
Rata-rata Capaian Kinerja	85,71%

Secara umum, kinerja Satpol PP berada dalam kategori baik, karena capaian kinerja telah melampaui 80%. Namun, realisasi anggaran yang masih berada pada kisaran 73% menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, terutama pada program penunjang.

I. Analisis Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program penunjang merupakan program yang mendukung operasional organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Total anggaran program penunjang mencapai Rp7.061.942.948 atau sekitar 94,49% dari total anggaran Satpol PP, menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi anggaran digunakan untuk mendukung operasional dan administrasi perangkat daerah.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp2.100.000	100,00%	100,00%

Kegiatan ini menunjukkan capaian yang sangat baik, dimana seluruh target kinerja berhasil dicapai dan seluruh anggaran terserap.

Kesimpulan

- Pelaksanaan kegiatan sangat efektif.
- Perencanaan dan evaluasi berjalan sesuai target.
- Tidak terdapat deviasi antara target dan realisasi.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu	Kinerja	Realisasi

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp5.232.637.448	100,00%	80,86%

Kegiatan ini merupakan komponen anggaran terbesar dengan kontribusi sekitar 70% terhadap total anggaran Satpol PP. Capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 80,86%.

Kondisi ini menunjukkan:

- Seluruh target administrasi keuangan telah tercapai.
- Terdapat efisiensi penggunaan anggaran.
- Pengelolaan keuangan organisasi berjalan baik.

Kegiatan tergolong efektif karena target tercapai dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp17.000.000	0,00%	0,00%

Kegiatan tidak terlaksana selama periode evaluasi.

Dampak

Tidak terlaksananya administrasi kepegawaian berpotensi menghambat:

- Pengembangan kompetensi aparatur.
- Pembinaan sumber daya manusia.
- Peningkatan profesionalisme personel Satpol PP.

Kesimpulan

Perlu menjadi perhatian dalam perencanaan tahun berikutnya.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp36.596.000	85,71%	72,67%

Capaian kinerja dan realisasi keuangan menunjukkan kondisi yang cukup baik. Terdapat hubungan yang proporsional antara output yang dihasilkan dengan penggunaan anggaran. Pelaksanaan kegiatan tergolong cukup efektif meskipun masih terdapat target yang belum sepenuhnya tercapai.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp1.485.869.500	100,00%	38,31%

Kegiatan ini menunjukkan fenomena yang cukup menarik. Meskipun capaian kinerja mencapai 100%, realisasi anggaran hanya sebesar 38,31%.

Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh:

- Efisiensi penggunaan anggaran yang sangat tinggi.
- Sebagian kebutuhan jasa penunjang tidak jadi dilaksanakan.
- Adanya penghematan atau penyesuaian belanja.
- Target kinerja dapat dicapai dengan sumber daya yang lebih sedikit.

Catatan

Perlu dilakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran karena terdapat selisih yang sangat besar antara pagu dan realisasi.

Kesimpulan

Sangat efektif dari sisi output, tetapi menunjukkan kemungkinan over-estimasi anggaran pada tahap perencanaan.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp287.740.000	100,00%	99,77%

Kegiatan berjalan sangat baik dengan tingkat realisasi hampir sempurna.

Kesimpulan

- Seluruh target tercapai.
- Penyerapan anggaran optimal.
- Sarana dan prasarana organisasi terpelihara dengan baik.

II. Analisis Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini merupakan program inti Satpol PP dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, menjaga ketertiban umum, serta menciptakan ketenteraman masyarakat.

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pagu	Kinerja	Realisasi

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp373.328.500	66,67%	87,90%

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan utama Satpol PP. Namun terdapat ketidaksesuaian antara capaian kinerja dan realisasi keuangan.

Interpretasi

- Anggaran telah terserap cukup tinggi.
- Target kinerja belum tercapai secara optimal.
- Masih terdapat gangguan ketertiban yang belum tertangani sesuai target.

Kemungkinan Penyebab

- Tingginya kompleksitas permasalahan ketertiban umum.
- Keterbatasan personel operasional.
- Meningkatnya jumlah kasus yang harus ditangani.

Kesimpulan

Efektivitas kegiatan masih perlu ditingkatkan.

2. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp19.590.000	100,00%	100,00%

Kegiatan terlaksana secara optimal dengan capaian dan realisasi yang sama-sama mencapai 100%.

Kesimpulan

- Kinerja sangat baik.
- Penegakan Perda berjalan sesuai target.
- Tidak terdapat kendala signifikan dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp18.492.000	100,00%	91,50%

Kegiatan pembinaan PPNS berjalan baik dengan seluruh target kinerja tercapai. Tingkat realisasi keuangan yang mencapai 91,50% menunjukkan

penggunaan anggaran yang efisien. Pembinaan aparatur penegak Perda terlaksana secara efektif.

III. Analisis Efektivitas Program dan Kegiatan

Sangat Efektif

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- Pembinaan PPNS.

Cukup Efektif

- Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kurang Efektif

- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Tidak Terlaksana

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

IV. Permasalahan Strategis yang Teridentifikasi

1. Rendahnya Realisasi Keuangan Dibanding Capaian Kinerja

Perbedaan yang cukup besar antara capaian kinerja (85,71%) dan realisasi keuangan (73,33%) menunjukkan bahwa beberapa kegiatan belum memanfaatkan anggaran secara optimal.

2. Belum Terlaksananya Administrasi Kepegawaian

Kegiatan administrasi kepegawaian yang tidak berjalan dapat berdampak pada pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur Satpol PP.

3. Kinerja Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Belum Optimal

Sebagai fungsi utama Satpol PP, capaian kinerja sebesar 66,67% pada kegiatan ini masih perlu ditingkatkan agar pelayanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat lebih optimal.

4. Perencanaan Anggaran Perlu Disempurnakan

Terdapat selisih yang cukup besar antara pagu dan realisasi pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang mengindikasikan perlunya penyusunan anggaran yang lebih akurat.

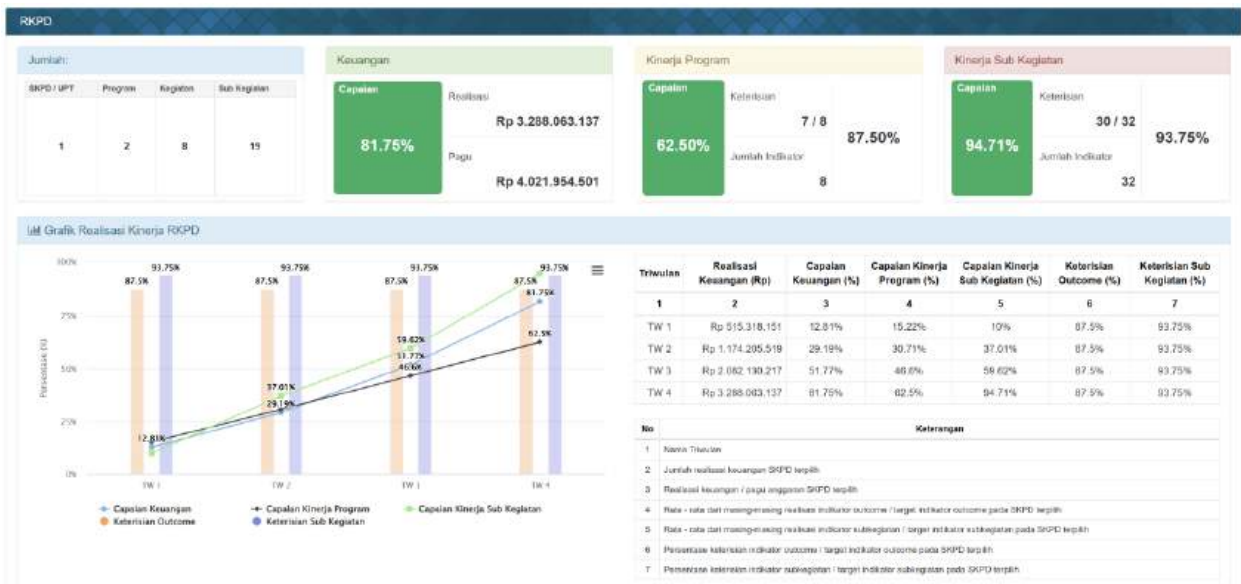
V. Rekomendasi dan Tindaklanjut

Secara keseluruhan, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dikategorikan “Baik”, dengan capaian kinerja sebesar 85,71% dan realisasi keuangan sebesar 73,33%.

Keberhasilan utama terlihat pada pelaksanaan kegiatan administrasi, pemeliharaan sarana prasarana, penegakan Peraturan Daerah, dan pembinaan PPNS yang mampu mencapai target secara optimal. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian, terutama pada kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang merupakan tugas inti Satpol PP, serta belum terlaksananya administrasi kepegawaian.

Untuk periode berikutnya, Satpol PP perlu meningkatkan efektivitas kegiatan operasional lapangan, memperkuat pembinaan sumber daya manusia, melakukan evaluasi terhadap akurasi perencanaan anggaran, serta memastikan bahwa program inti penegakan ketertiban umum memperoleh perhatian yang lebih besar agar tujuan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Berdasarkan data evaluasi hasil RKPD, BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki total pagu anggaran sebesar Rp4.021.954.501 dengan realisasi keuangan sebesar Rp3.288.063.137 atau mencapai 81,75% dari pagu yang tersedia.

Dari sisi kinerja, rata-rata capaian kinerja seluruh program mencapai 62,50%, yang menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana secara optimal.

1. Analisis Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini merupakan program utama pendukung operasional BPBD dengan total pagu sekitar Rp3,87 miliar atau sekitar 96% dari total anggaran BPBD.

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp9.500.000	0%	0%

Kegiatan ini tidak terealisasi baik dari sisi fisik maupun keuangan.

Kemungkinan penyebab:

- Kegiatan tidak dilaksanakan.
- Adanya efisiensi atau refocusing anggaran.
- Pelaksanaan evaluasi dan perencanaan dilakukan melalui kegiatan lain.

Dampak

Tidak tersediannya anggaran kegiatan ini berpotensi mengurangi kualitas proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi program pada tahun berjalan meski dilakukan melalui anggaran kegiatan lain.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp3.124.458.501	433,33%	79,64%

Kegiatan ini merupakan komponen terbesar dalam struktur anggaran BPBD.

Tingkat realisasi keuangan mencapai 79,64%, namun capaian kinerja mencapai 433,33%.

Hal ini menunjukkan:

- Seluruh indikator administrasi keuangan kemungkinan telah dilaksanakan bahkan melampaui target.
- Target kinerja yang ditetapkan relatif rendah dibanding realisasi yang dicapai.
- Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sehingga output yang dihasilkan lebih besar dibanding sumber daya yang digunakan.

Catatan

Capaian kinerja yang sangat tinggi perlu dievaluasi kembali karena dapat menunjukkan:

1. Penetapan target yang kurang realistis.

- 2. Formula pengukuran indikator yang menyebabkan capaian melebihi 100%.
- 3. Kebutuhan penyempurnaan metode pengukuran kinerja agar lebih proporsional.

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp25.000.000	50%	100%

Seluruh anggaran terserap sempurna, namun capaian kinerja hanya mencapai 50%.

Kondisi ini mengindikasikan:

- Terdapat kegiatan yang telah dibelanjakan tetapi output belum seluruhnya tercapai.
- Kemungkinan sebagian target pelatihan, peningkatan kompetensi, atau pembinaan pegawai belum terlaksana.

Catatan

Perlu dilakukan evaluasi efektivitas penggunaan anggaran agar penyerapan keuangan sejalan dengan capaian kinerja.

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp107.610.300	85,71%	88,75%

Kegiatan ini menunjukkan hubungan yang cukup baik antara capaian kinerja dan realisasi anggaran.

Artinya:

- Pelaksanaan administrasi umum berjalan efektif.
- Sebagian besar target telah dicapai.
- Efisiensi anggaran masih dapat dilakukan tanpa mengurangi output.

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp0	0%	0%

Tidak terdapat alokasi anggaran maupun pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp264.425.500	100%	98,09%

Merupakan salah satu kegiatan dengan kinerja terbaik.

Indikator menunjukkan:

- Seluruh target kinerja tercapai.
- Penyerapan anggaran sangat tinggi.
- Kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kondisi ini mencerminkan pengelolaan operasional yang baik.

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp335.087.200	190,48%	95,42%

Capaian kinerja mencapai hampir dua kali lipat target yang ditetapkan dengan realisasi keuangan mencapai 95,42%.

Hal ini menunjukkan:

- Kegiatan pemeliharaan aset berjalan sangat baik.
- Target yang ditetapkan kemungkinan terlalu rendah.
- Efektivitas penggunaan anggaran cukup tinggi.

Catatan

Perlu peninjauan kembali target indikator agar lebih mencerminkan kapasitas dan kebutuhan riil organisasi.

2. Analisis Program Penanggulangan Bencana

Program ini merupakan fungsi utama BPBD dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan.

A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Pagu	Kinerja	Realisasi
Tidak tersedia	-	0%

Kegiatan tidak dilaksanakan pada tahun berjalan.

Dampak

Berpotensi mengurangi kualitas penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat serta menghambat upaya mitigasi risiko bencana.

B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp0	0%	0%

Belum terdapat pelaksanaan kegiatan.

Dampak

Aspek pencegahan dan kesiapsiagaan merupakan bagian penting dalam siklus penanggulangan bencana. Tidak terlaksananya kegiatan ini dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap ancaman bencana.

C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp137.373.000	29,67%	59,56%

Merupakan kegiatan dengan capaian terendah.

Kondisi menunjukkan:

- Realisasi anggaran hanya 59,56%.
- Capaian kinerja hanya 29,67%.

Kemungkinan penyebab:

1. Frekuensi kejadian bencana lebih rendah dari perkiraan.
2. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi tidak terlaksana sesuai target.
3. Keterbatasan SDM, sarana-prasarana, atau dukungan operasional.
4. Adanya kendala administratif dalam pelaksanaan kegiatan.

Dampak

Rendahnya capaian pada kegiatan inti BPBD dapat memengaruhi tingkat kesiapsiagaan dan respons terhadap kejadian bencana.

D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp18.500.000	33,33%	99,16%

Terdapat ketidaksesuaian antara realisasi keuangan dan capaian kinerja.

Hampir seluruh anggaran terserap, tetapi capaian kinerja hanya 33,33%.

Hal ini menunjukkan:

- Output kegiatan belum sepenuhnya tercapai.
- Terdapat permasalahan dalam efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- Diperlukan evaluasi terhadap kualitas hasil kegiatan.

4. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program

Berdasarkan hubungan antara capaian kinerja dan realisasi keuangan:

Sangat Efektif

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Cukup Efektif

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kurang Efektif

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Tidak Efektif

- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja.
- Pelayanan Informasi Rawan Bencana.
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian

Faktor Pendukung

- Dukungan anggaran operasional yang memadai.
- Pengelolaan administrasi dan keuangan yang cukup baik.
- Pemeliharaan sarana-prasarana berjalan optimal.
- Tingkat penyerapan belanja operasional relatif tinggi.

Faktor Penghambat

- Beberapa kegiatan strategis belum terlaksana.
- Ketidaksesuaian antara target dan indikator kinerja.

- Rendahnya capaian pada urusan teknis kebencanaan.
- Kemungkinan adanya refocusing atau penyesuaian anggaran.
- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Secara umum, kinerja BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun evaluasi menunjukkan kategori "Baik", dengan capaian kinerja rata-rata 86,59% dan realisasi keuangan 81,75%.

Keberhasilan utama terlihat pada aspek administrasi, operasional perkantoran, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan aset daerah. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada pelaksanaan program inti kebencanaan, khususnya kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan informasi rawan bencana, serta kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

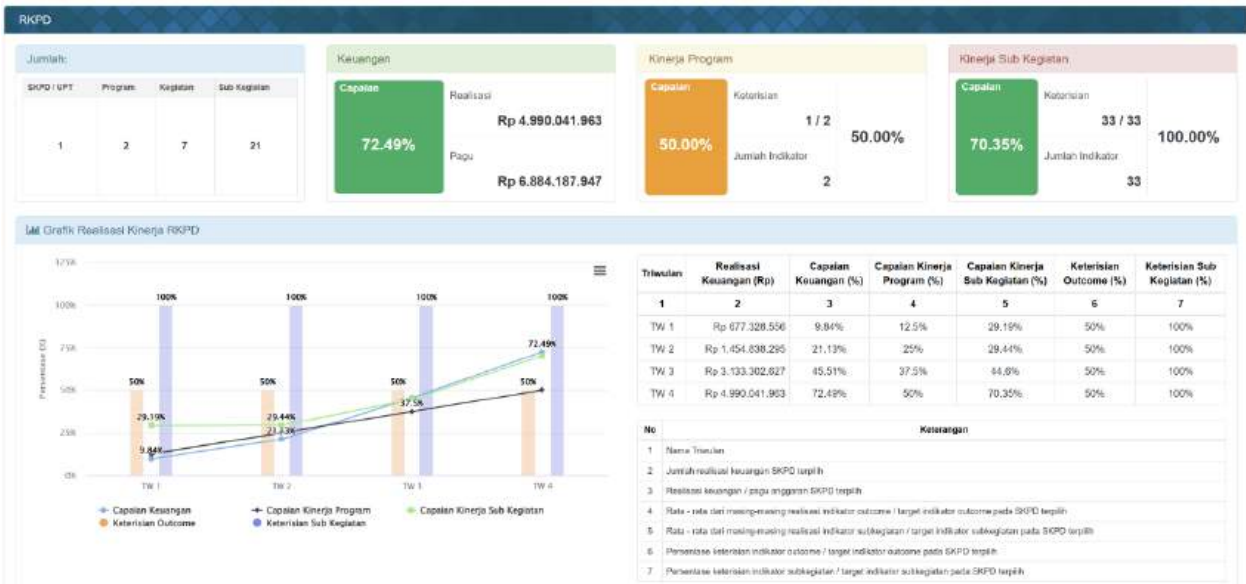
Untuk meningkatkan kualitas kinerja pada periode berikutnya, BPBD perlu memfokuskan perhatian pada penguatan program teknis kebencanaan, penyempurnaan indikator kinerja, peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan keseimbangan antara capaian administrasi dan capaian pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana.

Ringkasan Kinerja dan Keuangan

Uraian	Nilai
Total Pagu Anggaran	Rp4.021.954.501
Total Realisasi Keuangan	Rp3.288.063.137
Persentase Realisasi Keuangan	81,75%
Rata-rata Capaian Kinerja	86,59%

Secara keseluruhan, terdapat kesesuaian yang cukup baik antara capaian kinerja dan penyerapan anggaran. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kegiatan yang belum mencapai target baik dari sisi kinerja maupun keuangan

8. DINAS PEMADAM KEBAKARAN



Berdasarkan Rekapitulasi Capaian SKPD, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki total pagu anggaran sebesar Rp 6.884.187.947 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 4.990.041.963 atau mencapai 72,49% dari total anggaran yang dialokasikan.

Sementara itu, capaian kinerja program hanya mencapai 50%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan standar capaian kinerja pemerintah daerah yang ideal (minimal 80%), maka kinerja Dinas Pemadam Kebakaran masih memerlukan peningkatan baik dari aspek pelaksanaan program maupun efektivitas penggunaan anggaran.

Ringkasan Capaian

Uraian	Nilai
Total Pagu Anggaran	Rp6.884.187.947
Realisasi Keuangan	Rp4.990.041.963
Persentase Realisasi Keuangan	72,49%
Rata-rata Capaian Kinerja	68,28%

Kondisi ini menunjukkan bahwa:

- Penyerapan anggaran berada pada kategori sedang.
- Capaian kinerja lebih rendah dibanding realisasi keuangan.

- Masih terdapat sejumlah kegiatan strategis yang belum terlaksana atau belum mencapai target.
- Efektivitas pelaksanaan program inti pelayanan kebakaran dan penyelamatan masih perlu ditingkatkan.

Analisis Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program penunjang merupakan program yang mendukung operasional organisasi dan menjadi fondasi bagi pelaksanaan tugas utama Dinas Pemadam Kebakaran.

Total pagu program penunjang mencapai sekitar Rp 4,88 miliar atau sekitar 71% dari total anggaran perangkat daerah.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp3.102.000	100,00%	80,50%

Kegiatan ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik karena seluruh target berhasil dicapai.

Namun demikian, realisasi keuangan hanya mencapai 80,50%, yang mengindikasikan adanya efisiensi penggunaan anggaran.

Kesimpulan

- Kinerja sangat efektif.
- Anggaran digunakan secara efisien.
- Fungsi perencanaan dan evaluasi berjalan baik.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp4.535.134.747	216,67%	81,83%

Kegiatan ini merupakan komponen anggaran terbesar dalam Dinas Pemadam Kebakaran.

Capaian kinerja sebesar 216,67% menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah terlampaui lebih dari dua kali lipat.

Sedangkan realisasi keuangan mencapai 81,83%.

Kondisi ini menunjukkan:

- Pelaksanaan administrasi keuangan berjalan sangat baik.

- Terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran.
- Kemungkinan target indikator yang ditetapkan terlalu rendah dibanding kemampuan organisasi.

Perlu dilakukan review indikator kinerja agar lebih realistis dan mencerminkan kinerja sesungguhnya.

3. Administrasi Barang Milik Daerah

Pagu	Kinerja	Realisasi
Tidak tersedia	100%	0%

Walaupun tidak terdapat alokasi anggaran, target kinerja tercatat tercapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan administrasi aset dilaksanakan melalui sumber daya yang sudah tersedia atau terintegrasi dengan kegiatan lain. Efisiensi cukup baik, namun perlu penjelasan dalam laporan kinerja terkait metode pengukurannya.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pagu	Kinerja	Realisasi
0	0%	0%

Tidak terdapat kegiatan maupun anggaran yang dialokasikan pada tahun berjalan. Kurangnya kegiatan pengembangan sumber daya manusia dapat berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi petugas pemadam kebakaran di masa mendatang.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp38.260.000	33,33%	66,73%

Capaian kinerja relatif rendah dibanding realisasi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian anggaran telah digunakan, namun output yang dihasilkan belum sesuai target.

Kemungkinan Penyebab

- Sebagian kegiatan administrasi belum selesai.
- Keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
- Target output belum tercapai seluruhnya.

Kesimpulan

Efektivitas pelaksanaan masih rendah.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pagu	Kinerja	Realisasi
0	0%	0%

Tidak terdapat kegiatan pengadaan pada tahun berjalan.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp91.710.000	69,44%	75,99%

Kegiatan berjalan cukup baik namun belum optimal. Terdapat kesesuaian antara tingkat kinerja dan realisasi keuangan yang menunjukkan hubungan yang cukup proporsional. Kategori cukup efektif.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp216.531.200	79,17%	69,04%

Kegiatan pemeliharaan aset menunjukkan capaian yang cukup baik. Namun realisasi keuangan masih berada di bawah 70%, mengindikasikan masih terdapat kegiatan pemeliharaan yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Jika berlanjut, kondisi ini dapat mempengaruhi kesiapan armada dan peralatan pemadam kebakaran.

Analisis Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini merupakan tugas pokok dan fungsi utama Dinas Pemadam Kebakaran.

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp23.000.000	25,00%	77,70%

Terjadi ketimpangan antara realisasi keuangan dan capaian kinerja. Meskipun sebagian besar anggaran telah digunakan, capaian kinerja hanya mencapai 25%.

Indikasi

- Output kegiatan belum tercapai sesuai target.
- Efektivitas penggunaan anggaran masih rendah.
- Perlu evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan.

Kesimpulan

Kegiatan kurang efektif.

2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Pagu	Kinerja	Realisasi
0	0%	0%

Tidak terdapat pelaksanaan kegiatan inspeksi. Ketiadaan inspeksi proteksi kebakaran dapat meningkatkan risiko ketidaksiapan sistem keselamatan kebakaran pada bangunan dan fasilitas publik.

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Pagu	Kinerja	Realisasi
Rp1.976.450.000	40,00%	51,29%

Kegiatan ini merupakan program teknis terbesar setelah belanja administrasi. Namun capaian kinerja hanya mencapai 40%. Realisasi keuangan juga masih rendah yaitu 51,29%.

Hal ini menunjukkan bahwa:

- Program sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat belum terlaksana secara optimal.
- Target jumlah masyarakat, desa, atau kelompok yang dibina belum tercapai.
- Potensi manfaat program bagi masyarakat belum maksimal.

Dampak

Rendahnya pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran akibat kurangnya pengetahuan dan kesiapsiagaan warga.

4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Pagu	Kinerja	Realisasi
Tidak tersedia	-	0%

Kegiatan belum dilaksanakan pada tahun berjalan. Kemampuan pelayanan penyelamatan non kebakaran menjadi kurang optimal apabila kegiatan ini tidak didukung dengan program yang memadai.

Analisis Efektivitas Program

Berdasarkan hubungan antara capaian kinerja dan realisasi keuangan:

Sangat Efektif

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Administrasi Barang Milik Daerah.

Cukup Efektif

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Kurang Efektif

- Administrasi Umum.
- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Penanganan B3 Kebakaran.
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

Tidak Efektif/Tidak Terlaksana

- Administrasi Kepegawaian.
- Pengadaan Barang Milik Daerah.
- Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.
- Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Permasalahan Strategis yang Teridentifikasi

1. Rendahnya Kinerja Program Inti

Program yang berkaitan langsung dengan pelayanan kebakaran dan penyelamatan memiliki capaian yang relatif rendah dibanding program administrasi.

2. Ketimpangan Kinerja dan Keuangan

Beberapa kegiatan menunjukkan realisasi anggaran yang cukup tinggi tetapi capaian kinerja masih rendah, mengindikasikan belum optimalnya efektivitas pelaksanaan program.

3. Belum Berjalannya Beberapa Kegiatan Strategis

Beberapa kegiatan penting belum terlaksana seperti:

- Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;
- Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- Administrasi Kepegawaian;

4. Dominasi Belanja Penunjang

Sekitar 71% anggaran masih terkonsentrasi pada program penunjang, sementara program teknis pelayanan publik memiliki porsi yang lebih kecil.

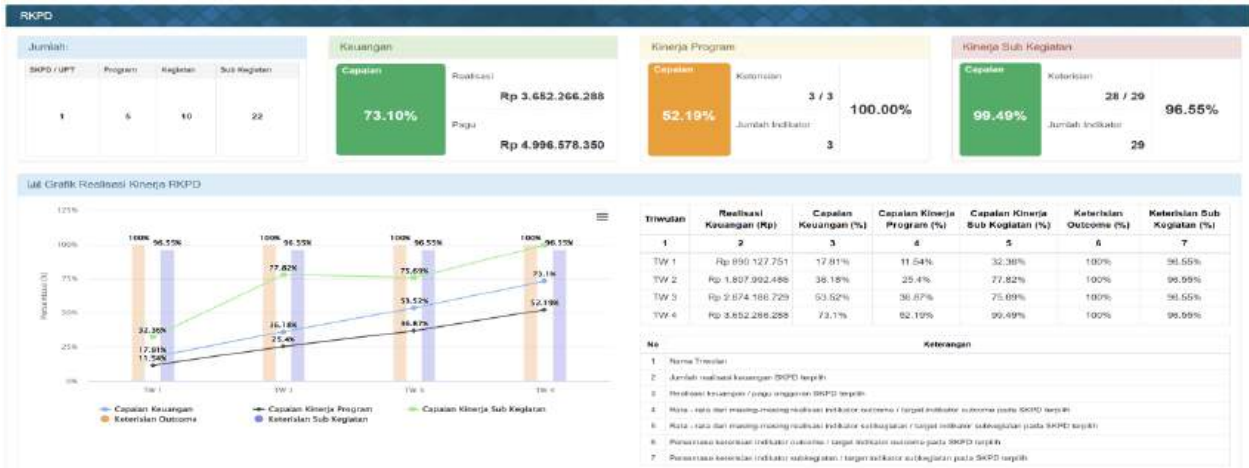
Kesimpulan

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Tengah berada pada kategori “Cukup”, dengan capaian kinerja sebesar 68,28% dan realisasi keuangan sebesar 72,49%.

Dari hasil evaluasi terlihat bahwa keberhasilan lebih banyak terjadi pada aspek administrasi dan pengelolaan internal organisasi. Sementara itu, program inti yang berkaitan langsung dengan pelayanan kebakaran, pencegahan kebakaran, pemberdayaan masyarakat, inspeksi proteksi kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran masih menunjukkan capaian yang relatif rendah.

Untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, Dinas Pemadam Kebakaran perlu memprioritaskan peningkatan pelaksanaan program teknis, memperkuat kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, mengoptimalkan inspeksi proteksi kebakaran, meningkatkan kualitas perencanaan program, serta memastikan bahwa penyerapan anggaran berbanding lurus dengan pencapaian output dan outcome pelayanan kepada masyarakat. Dengan perbaikan tersebut, efektivitas penyelenggaraan urusan kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah dapat meningkat secara signifikan.

9. DINAS SOSIAL



Berdasarkan hasil Evaluasi RKPD, Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki total pagu anggaran sebesar Rp4.996.578.350 dengan realisasi keuangan sebesar Rp3.652.266.288 atau mencapai 73,10% dari total anggaran yang tersedia. Dari sisi kinerja, capaian program hanya mencapai 50%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target program dan kegiatan tidak mencapai target.

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :

- Program Pemberdayaan Sosial, dengan capaian 0 %
- Program Rehabilitasi Sosial, dengan capaian 6,6 %.
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan capaian sebesar 0 %.
- Program Penanganan Bencana dengan capaian sebesar 0 %.

Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 0,00 %
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 0,00 %
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian kinerja 66,67%
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian kinerja 60,00%
- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja 25,00%
- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar 50,00 %.
- Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar 0 %

- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar 56,00 %
- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar 53,33 %
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar 0 %

2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

Program yang memenuhi target kinerja hasil :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 74,98%

Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100 %.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

Program yang melebihi target kinerja hasil:

- -

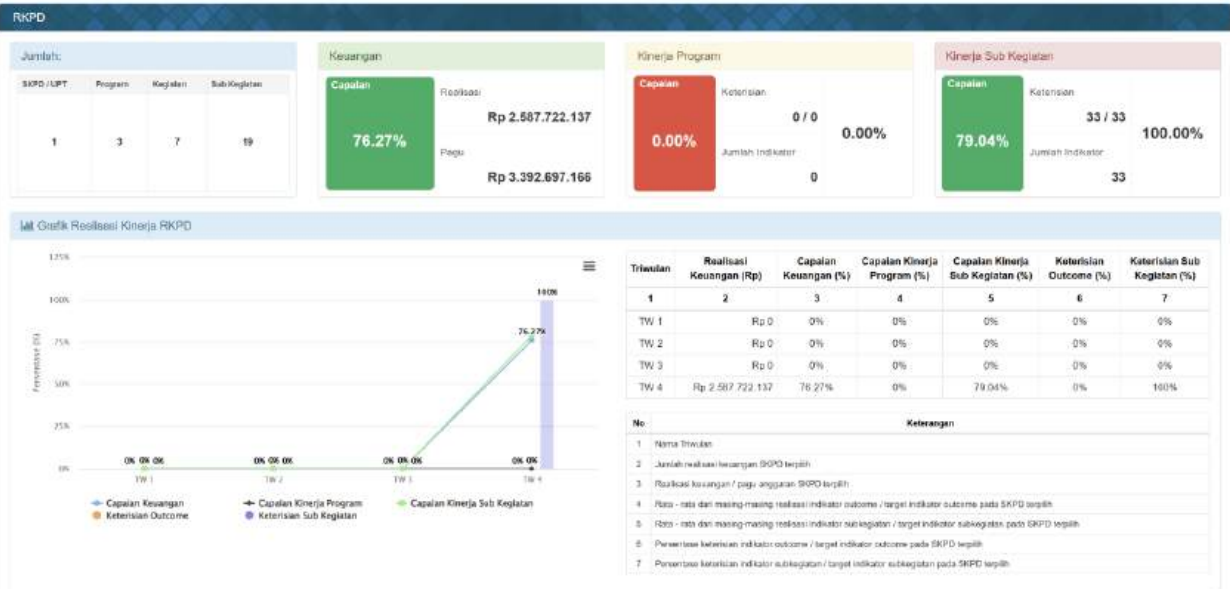
Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:

- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rata-rata capaian mencapai 200%.

4. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Sosial adalah:

1. Perhatikan target kinerja program.kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan realita sehingga tidak ada capaian yang melebihi batas target
2. Perhatikan saat melaksanakan pengisian evdal, nilai capaian tidak terhitung karena salah memilih status data

10. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mencapai Rp. 2.587.722.137 atau sebesar 76,27 % dari total pagu Rp. 3.392.697.166 dengan status predikat capaian kinerja berkategori sedang dan realisasi anggaran berkategori tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berjalan cukup baik, terutama pada rata-rata capaian indikator sub-kegiatan yang menyentuh angka 69,96 %.

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :

- Tidak ada target dalam program sehingga realisasi 0%

Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 0,00 %
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 0,00 %
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 0,00%
- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), dengan capaian kinerja 0,00%

- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja 33,33%
- Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar 62,50 %.

Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan capaian kinerja sebesar 0,00 %
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan capaian kinerja sebesar 0,00 %
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan capaian kinerja sebesar 0,00 %.
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan capaian kinerja sebesar 0,00 %.
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan capaian kinerja sebesar 0,00 %.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan capaian kinerja sebesar 0,00 %.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan capaian kinerja sebesar 0,00 %.
- Pengadaan Mebel, dengan capaian kinerja sebesar 0,00 %.
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan capaian kinerja fisik indikator sebesar 0,00 %.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan capaian kinerja fisik indikator sebesar 0,00 %.
- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro, dengan capaian kinerja sebesar 0,00 %.
- Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro, dengan capaian kinerja sebesar 0,00 %.

- Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja sebesar 0,00 %.
- Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja sebesar 0,00 %.
- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan, dengan capaian kinerja fisik indikator sebesar 33,33 %.
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja fisik indikator sebesar 41,67 %.
- Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi, dengan capaian kinerja fisik indikator sebesar 25,00 %.

2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

Program yang memenuhi target kinerja hasil :

- -

Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100 %.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja mencapai 86,88 %
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian kinerja mencapai 95,83 %
- Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja 80%
- Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dengan capaian kinerja 100%
- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dengan capaian kinerja mencapai 116,67 %

- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi 70,83 %.

Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %.
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Capaian 100,00%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %.
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian kinerja mencapai 75,00 %
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %.

- Penyediaan Bahan/Material, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 % dan realisasi anggaran sebesar 100,00 %.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %.
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 % dan realisasi anggaran sebesar 100,00 %.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 % dan realisasi anggaran sebesar 100,00 %.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %
- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, dengan capaian kinerja mencapai 250,00 %.
- Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %.
- Perluasan Kesempatan Kerja, dengan capaian kinerja fisik mencapai 80,00 %.
- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %.
- Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dengan capaian kinerja fisik mencapai 100,00 %.
- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %.

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

Program yang melebihi target kinerja hasil:

- -
- Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dengan capaian target keluaran fisik pelatihan bagi pencari kerja mencapai 116,67 %.

Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, dengan capaian target fisik peserta latih yang terealisasi sebanyak 250 orang dari target awal.

4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan .

- Faktor Pendorong
- Program Kemitraan Internasional: Seperti kerja sama Disnakertrans Bengkulu Tengah dengan perusahaan Jepang untuk pelatihan bahasa dan magang luar negeri.
- Pemberdayaan Sektor Informal: Pelatihan lebih difokuskan pada keterampilan praktis (montir, menjahit, las) untuk menciptakan kemandirian usaha, bukan untuk mengisi posisi di perusahaan besar.
- Peningkatan Anggaran & Sarana: Saat ini, faktor pendorong utamanya adalah upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki anggaran dan fasilitas pelatihan yang sebelumnya dinilai sangat minim.
- Kesejahteraan & Kompensasi: Sistem upah yang adil menjadi motivasi utama pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga keharmonisan hubungan kerja.
- Regulasi Pemerintah: Undang-undang ketenagakerjaan memaksa perusahaan untuk menyediakan standar pelatihan dan perlindungan hak pekerja yang jelas.

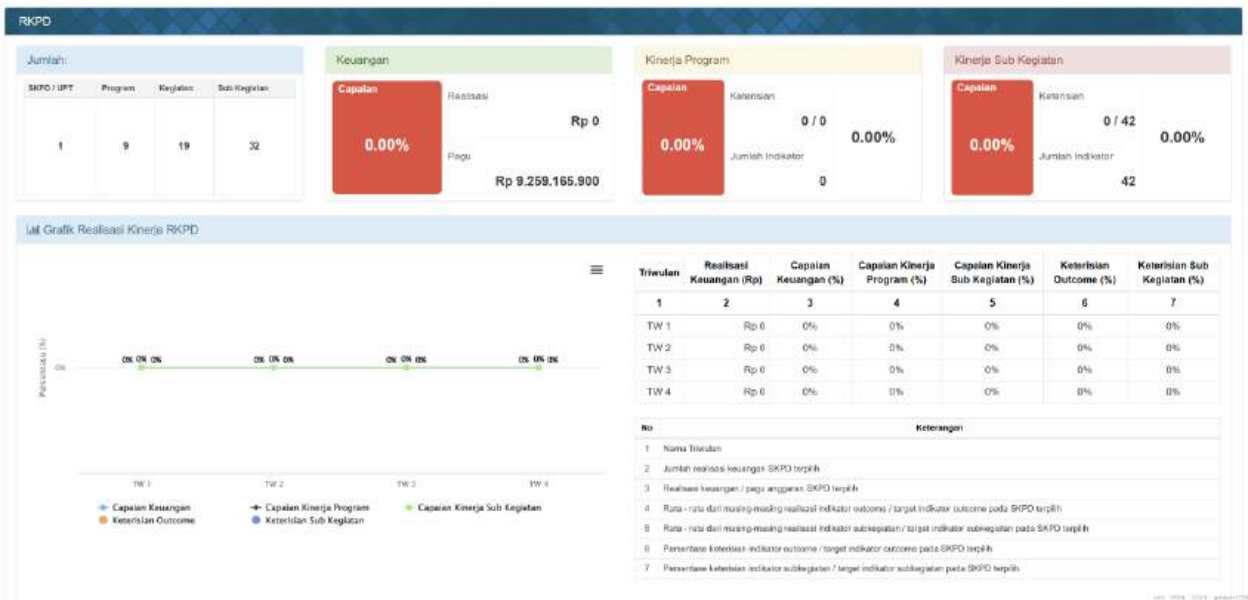
- Komunikasi Bipartit: Dialog yang terbuka antara pengusaha dan serikat pekerja mencegah konflik dan menciptakan lingkungan kerja yang stabil.
- Faktor Penghambat
- Keterbatasan Anggaran & Fasilitas: Minimnya dana daerah mengakibatkan sarana pelatihan (seperti BLK) kurang memadai dan alat praktik sudah tertinggal zaman.
- Rendahnya Serapan Industri Lokal: Terbatasnya jumlah perusahaan besar di wilayah ini membuat lulusan pelatihan sulit mendapatkan tempat penempatan kerja yang pasti.
- Kesenjangan Keterampilan: Kurikulum pelatihan sering kali tidak sinkron dengan kebutuhan riil pasar kerja, ditambah dominasi pekerja di sektor pertanian tradisional.
- Masalah Hubungan Kerja: Masih sering terjadi konflik internal perusahaan, seperti sengketa PHK sepihak dan ketidakjelasan status kontrak pekerja.

5. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah:

- Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
 1. Audit Fasilitas: Pendataan alat pelatihan yang rusak dan peminjaman sarana ke SMK/BLK Provinsi.
 2. Sinkronisasi Data: Pertemuan rutin dengan HRD perusahaan sawit/batubara untuk pemutakhiran data lowongan kerja.
 3. Pelatihan Cepat (Short Course): Pelaksanaan pelatihan keterampilan praktis yang paling dibutuhkan pasar lokal (contoh: las atau montir).
 4. Jemput Bola Mediasi: Kunjungan lapangan ke perusahaan yang sedang konflik untuk pencegahan PHK massal.
- Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya:
 1. Revitalisasi Sarana: Pengalokasian dana (APBD/DAK) untuk renovasi gedung dan pengadaan alat praktik modern.

- 2. Perda Penyerapan Lokal: Penyusunan regulasi yang mewajibkan perusahaan di Bengkulu Tengah memprioritaskan tenaga kerja lokal.
- 3. Program Link and Match: Peresmian kurikulum pelatihan yang disusun bersama industri agar lulusan langsung terserap.
- 4. Penguatan Pengawasan: Peningkatan anggaran untuk tim pengawas ketenagakerjaan guna memastikan kepatuhan hak-hak pekerja.

11. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 secara umum realisasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar 0,00%. Total pagu anggaran sebesar Rp9.259.165.900 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 0,00% dan predikat kinerja Sangat Rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

- 1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%

- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan capaian 0%
- Program Perlindungan Perempuan, dengan capaian 0%
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan capaian 0%
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, dengan capaian 0%
- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan capaian 0%
- Program Perlindungan Khusus Anak, dengan capaian 0%
- Program Pengendalian Penduduk, dengan capaian 0%
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dengan capaian 0%
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan capaian 0%
- Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian 0%
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian 0%
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan capaian 0%
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan capaian 0%
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian 0%
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 0%
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 0%
 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan, dengan capaian 0%

- Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan, dengan capaian 0%
- Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak, dengan capaian 0%
- Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak, dengan capaian 0%
- Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak, dengan capaian 0%
- Perlindungan Khusus Anak, dengan capaian 0%
- Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk, dengan capaian 0%
- Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk, dengan capaian 0%
- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB, dengan capaian 0%
- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan capaian 0%
- Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan capaian 0%
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian 0%
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan capaian 0%
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan capaian 0%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan capaian 0%

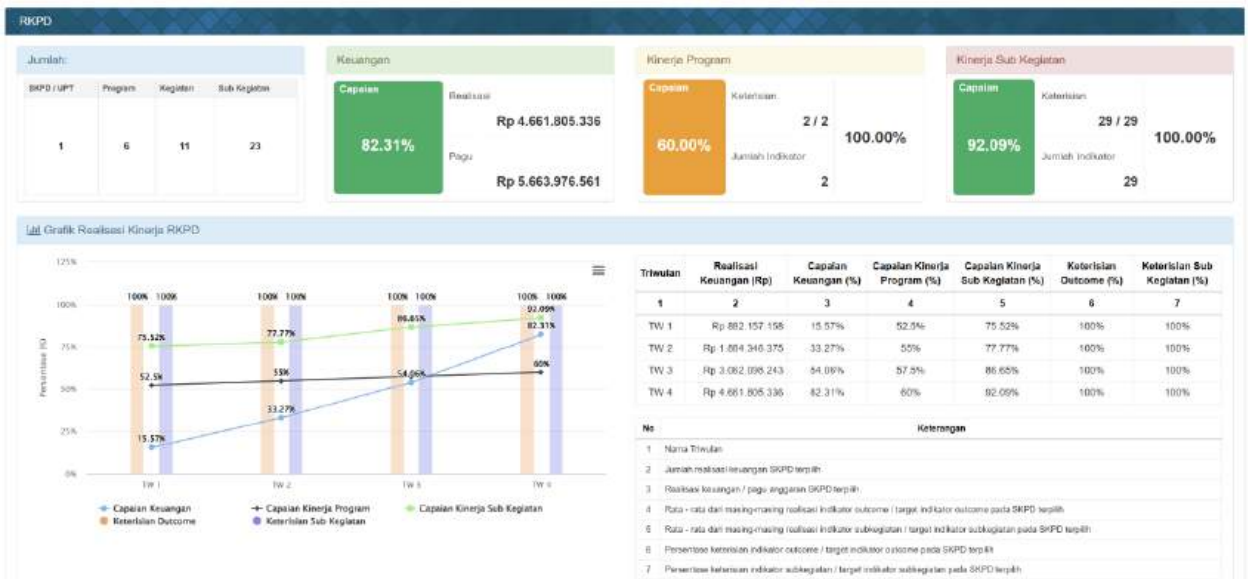
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan capaian 0%
 - Pengadaan Mebel, dengan capaian 0%
 - Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, dengan capaian 0%
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, dengan capaian 0%
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan capaian 0%
 - Seluruh sub kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang tercantum dalam Evaluasi RENJA SKPD Tahun 2025, dengan capaian 0%
2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Tidak terdapat program yang memenuhi target kinerja hasil.
 - Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Tidak terdapat kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil.
 - Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Tidak terdapat sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang melebihi target kinerja hasil :
 - Tidak terdapat program yang melebihi target kinerja hasil.
 - Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil :
 - Tidak terdapat kegiatan yang melebihi target kinerja hasil.
 - Sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil :
 - Tidak terdapat sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil.
4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan
- Faktor Pendorong

- Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan.
- Adanya struktur organisasi serta pembagian tugas dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- Tersedianya alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah.
- Faktor Penghambat
 - Belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan sehingga rata-rata capaian kinerja masih berada pada angka 0%.
 - Belum terlaksananya sebagian besar kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dalam RENJA SKPD Tahun 2025.
 - Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan teknis pada bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 - Keterbatasan pelaksanaan kegiatan menyebabkan indikator kinerja program belum terealisasi.
 - Perlunya peningkatan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar target yang direncanakan dapat tercapai.

5. Rekomendasi Tindak Lanjut

Rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antar bidang, melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan efektif dan mencapai target yang telah direncanakan.

12. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mencapai Rp. 4.661.805.336 atau sebesar 82,31 % dari total pagu Rp. 5.663.976.561 dengan status predikat capaian kinerja dan realisasi anggaran berkategori tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah berjalan cukup baik, terutama pada rata-rata capaian indikator sub-kegiatan yang menyentuh angka 92.09 %. Namun untuk capaian Program hanya mencapai 60%.

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :

- Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan capaian indikator program sebesar 0,00 % dan capaian indikator sub-kegiatan sebesar 0,00 %.
- Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan capaian indikator program 50,05 %.

Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 9,52 %
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 0,00 %
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 0,00 %

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 66,67%
- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar 66,67 %.
- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja indikator keluaran sebesar 0,00 %.
- Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, capaian 0.1%
- Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi anggaran sebesar 43,45 %.

Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 0,00 %
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian kinerja 9.52%
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan capaian kinerja sebesar 0,00 %
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan capaian kinerja sebesar 0,00 %
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan capaian 0,00 %
- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dengan capaian kinerja sebesar 0,00 %
- Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 0,00%
- Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja indikator sebesar 0,1 %

2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

Program yang memenuhi target kinerja hasil :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan rata-rata kinerja indikator program mencapai 81,69 %.
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan capaian 140%
- Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan capaian 100,00 %.
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan capaian 100,00 %.
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan capaian 100 %.

Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %.
- Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar 180,43 %.
- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, capaian 250%
- Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %.
- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, capaian 100%
- Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, capaian 100%
- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %
- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %

Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan capaian 200 %
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan capaian kinerja mencapai 100,00%
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian kinerja mencapai 100,00%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian kinerja mencapai 100,00%
- Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan capaian kinerja 100,00%
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian kinerja 100,00%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan capaian kinerja 100,00%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan capaian kinerja 260,87 %
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %
- Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %
- Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %
- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Loka, dengan capaian kinerja 400 %

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %.
- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, dengan capaian kinerja fisik pembinaan nelayan mencapai 100,00 %.
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 %
- Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko, dengan capaian kinerja mencapai 100,00 % dan realisasi anggaran sebesar 100,00 %.

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

Program yang melebihi target kinerja hasil:

- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan capaian akumulasi 140,00 %.

Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 180,43 %.
- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, capaian 250%

Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan capaian output fisik laporan mencapai 200,00 %.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan capaian kinerja fisik unit kendaraan dipelihara mencapai 260,87 %.

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dengan capaian kinerja kelompok masyarakat terbina mencapai 400,00 %.

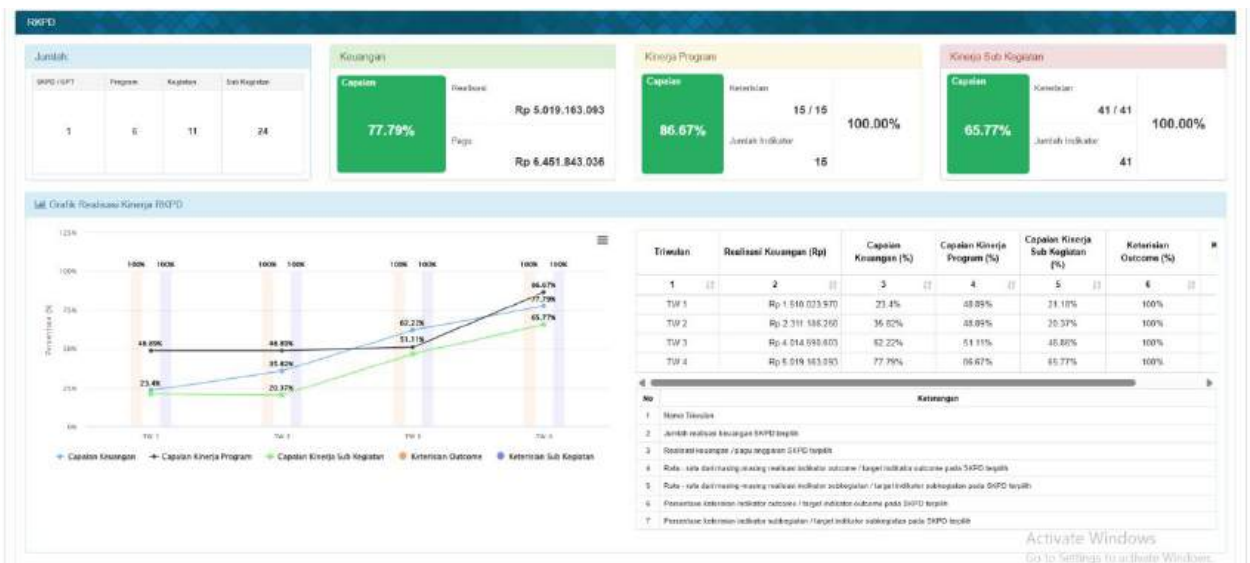
4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan .

- Faktor Pendorong
- Terlaksananya urusan administrasi umum perkantoran secara masif yang ditandai dengan lonjakan volume penyediaan barang cetakan, penggandaan, serta bahan bacaan kedinasan guna menunjang kelancaran operasional OPD.
- Optimalnya pelaksanaan program pembinaan, penyediaan prasarana, serta pemantauan pembudidayaan ikan di darat dengan capaian fisik 100 % dan realisasi keuangan yang sangat presisi mendekati pagu anggaran.
- Tingginya efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan pemberdayaan nelayan kecil, di mana target fisik pembinaan 50 orang nelayan berhasil dipenuhi 100 % dengan menghemat pengeluaran belanja hingga hanya menyerap 43,45 % dari total pagu yang disediakan.
- Efektifnya program pemberdayaan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang berhasil memicu over-achievement capaian fisik hingga 400 %.
- Faktor Penghambat
- Masih terdapat beberapa sub-kegiatan strategis yang belum berjalan atau tidak memiliki realisasi anggaran sama sekali, khususnya pada urusan administrasi kepegawaian perangkat daerah (diklat/bimtek) serta pengadaan sarana prasarana gedung kantor.
- Adanya ketidakselarasan penyerapan keuangan yang sangat ekstrem pada urusan pengawasan keamanan pangan segar, di mana anggaran terserap melonjak hingga 263,16 % namun laporan capaian fisik tertulis belum terealisasi secara optimal (0 %) di dalam sistem pelaporan.
- Rendahnya rata-rata capaian indikator makro hasil pada tingkat program di urusan kelautan dan perikanan, serta terhambatnya sub-kegiatan penyediaan bahan logistik kantor yang penyerapannya di bawah standar minimal triwulanan.

5. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

melakukan evaluasi dan penyesuaian target perencanaan anggaran pada kegiatan yang mengalami deviasi capaian ekstrem (over-budgeting ataupun under-target), mengaktifkan kembali realisasi fisik kediklatan pegawai dan pengadaan sarpras kantor yang terhambat, serta meningkatkan pemantauan pelaporan indikator kinerja makro bidang perikanan agar selaras antara keuangan yang dikeluarkan dengan output fisik yang dilaporkan di akhir tahun anggaran

13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mencapai Rp. 5.019.163.093 atau sebesar 77,79 % dari total pagu Rp. 6.451.843.036 dengan status sesuai target triwulan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup telah berjalan cukup baik, terutama pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

- 1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - ☐ Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja hanya 20%.
 - ☐ Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan capaian sebesar 40%.

- ☐ Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan capaian sebesar 7%.
- ☐ Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH dengan caain sebesar 0%.
- ☐ Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat dengan capaian 0%.
- ☐ Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan capaian 0%.
- ☐ Program Pengelolaan Persampahan dengan capaian 2,73%.
- ☐ Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dengan capai kinerja sebesar 33,33%.
- Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - ☐ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 38,33%
 - ☐ Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 0%.
 - ☐ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian 66,67%.
 - ☐ Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan capain sebesar 0%.
 - ☐ Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sebesar 50%.
 - ☐ Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sebesar 0%.
 - ☐ Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 7%.
 - ☐ Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH sebsar 0%.
 - ☐ Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar 0%.
 - ☐ Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota sebesar 0%.
 - ☐ Pengelolaan sampah sebesar 5,45%

- ☐ Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta sebesar 0%.
- Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - ☐ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan capaian 38,33%.
 - ☐ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian 53,33%.
 - ☐ Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan capaian sebesar 21%.
 - ☐ Penanganan sampah melalui pengangkutan dengan capaian 5,45%.
- 2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 - ☐ Tidak ada Program yang memenuhi target kinerja hasil.
 - Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:
 - ☐ Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan capaian 100%.
 - Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - ☐ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sebesar 100%.
 - ☐ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sebesar 100%.
 - ☐ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar 100%.
 - ☐ Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar 100%.
 - ☐ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar 100%.
 - ☐ Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar 100%.
 - ☐ Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar 100%.
 - ☐ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar 100%.

- ☐ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar 100%.
 - ☐ Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota sebesar 100%.
 - ☐ Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut sebesar 100%.
 - ☐ Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah sebesar 100%.
 - ☐ Perencanaan Pengelolaan TAHURA sebesar 100%.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang melebihi target kinerja hasil:
 - ☐ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 103,18%.
 - Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 - ☐ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 133,33 %.
 - ☐ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 125%.
 - ☐ Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 114,29%.
 - ☐ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 200%.
 - Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 - ☐ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar 133,33%.
 - ☐ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 150%.
 - ☐ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar 200%.
 - ☐ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar 200%.
 - ☐ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 200%.
 - ☐ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar 300%.
4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan:

- Faktor Pendorong

- Perencanaan Matang: Adanya kesesuaian antara rencana awal dengan dokumen pelaksanaan (DPA), serta pemahaman yang baik dari PPTK terkait teknis kegiatan.
- Optimalisasi Anggaran: Ketersediaan dan pencairan anggaran yang tepat waktu serta didukung oleh tertibnya administrasi.
- Koordinasi yang Baik: Komunikasi internal yang solid dan sinergi antar bidang/instansi terkait dalam menyelesaikan tahapan program.
- Pengawasan Melekat: Dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga kendala teknis di lapangan dapat segera diatasi

Faktor Penghambat

- Perubahan Kebijakan/Aturan: Adanya perubahan regulasi atau perundang-undangan yang mengharuskan penyesuaian ulang terhadap program.
- Kendala Anggaran: Terlambatnya pengesahan anggaran (DPA) atau adanya rasionalisasi (pemotongan/refocusing) anggaran di tengah tahun.
- Faktor Eksternal/Bencana: Terjadinya bencana alam, kondisi cuaca ekstrem, atau krisis ekonomi yang mengganggu proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan fisik.
- Sumber Daya Manusia (SDM): Kurangnya kapasitas, kompetensi, atau jumlah pegawai/tenaga ahli yang mengelola dan mengeksekusi kegiatan.
- Keterlambatan Pihak Ketiga: Molornya proses lelang (pengadaan barang/jasa) atau wanprestasi dari penyedia/kontraktor.

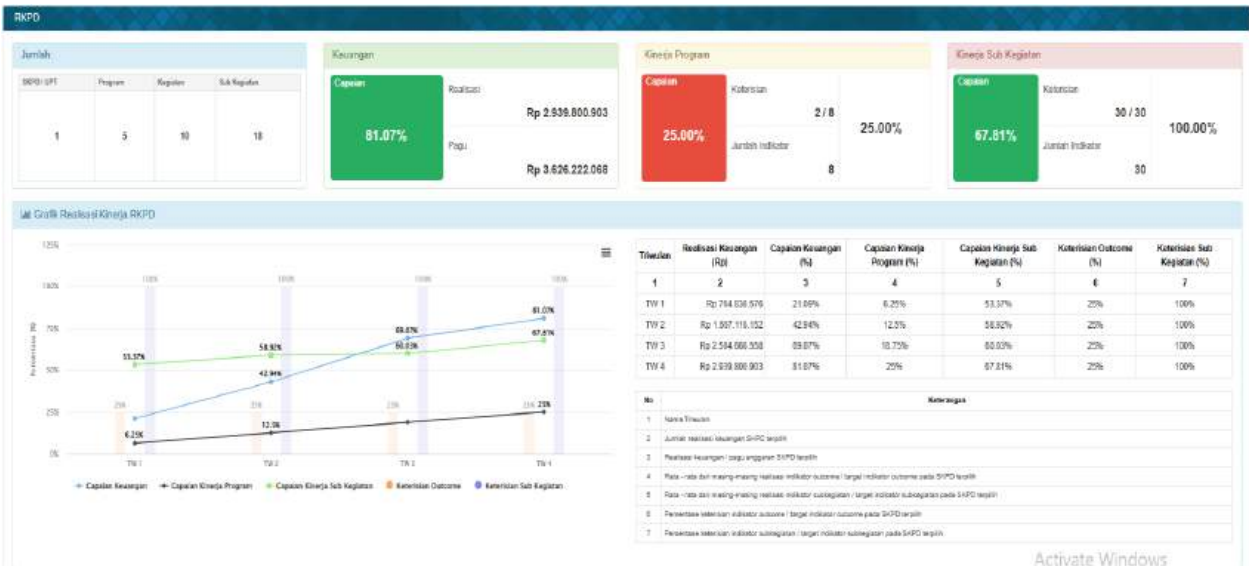
5. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- Perubahan Regulasi: Lakukan penyesuaian dokumen perencanaan (seperti revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA), percepat penyusunan aturan turunan internal, dan lakukan konsultasi berkala dengan instansi vertikal atau biro hukum agar program tetap mematuhi hukum.
- Kendala Anggaran: Buat skala prioritas program (fokus pada kegiatan kritis), lakukan pergeseran atau realokasi antar-

- kegiatan, dan susun perencanaan anggaran yang matang di awal tahun agar pengesahan dokumen tidak molor.
- Faktor Eksternal/Bencana: Susun dokumen Mitigasi Risiko (analisis dampak bencana), lakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan (adendum waktu), dan alokasikan anggaran cadangan untuk kondisi darurat atau tanggap bencana.
 - Kapasitas SDM: Adakan pelatihan peningkatan kompetensi, lakukan pendampingan (asistensi) oleh tenaga ahli profesional, dan lakukan redistribusi tugas pegawai agar beban kerja lebih seimbang.

14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



GAMBAR 1.1

Diagram Capaian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Sumber : SIPD dalev (<https://sipd.kemendagri.go.id/dalev>)

Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mencapai Rp. 712.360.345.403,- atau sebesar 79,46% dari total pagu Rp. 896.480.694.107,- dengan status Sedang. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berjalan cukup baik, terutama pada Program Pencatatan Sipil.

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :

- ☐ Program Pendaftaran Penduduk dengan capaian kinerja 0%.
 - ☐ Program Pencatatan Sipil dengan capaian kinerja 0%.
 - ☐ Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian kinerja 0%.
 - Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - ☐ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 44,44%.
 - ☐ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 0%.
 - ☐ Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian 42,86%.
 - ☐ Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebesar 0%.
 - ☐ Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sebesar 0%.
 - Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - ☐ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian 0%.
 - ☐ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian 33,33%.
2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 - ☐ Program Pencatatan Sipil dengan capaian kinerja sebesar 100%.
 - Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:
 - ☐ Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan capaian 100%.
 - ☐ Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan capaian 100%.
 - ☐ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian 100%.
 - ☐ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 98%.
 - ☐ Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dengan capaian 100%.
 - ☐ Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian 100%
 - ☐ Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian 100%

- ☐ Penyusunan Profil Kependudukan dengan capaian sebesar 100%.
- Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - ☐ Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain sebesar 100%.
 - ☐ Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar 100%.
 - ☐ Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar 100%.
 - ☐ Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat sebesar 100%.
 - ☐ Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan sebesar 100%.
 - ☐ Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil sebesar 100%.
 - ☐ Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting sebesar 100%.
 - ☐ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar 100%.
 - ☐ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar 100%.
 - ☐ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 100%.
 - ☐ Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar 100%.
 - ☐ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100%.
 - ☐ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar 100%.
 - ☐ Fasilitasi Kunjungan Tamu sebesar 100%.
 - ☐ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar 100%.
 - ☐ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar 100%.
 - ☐ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 96%.
 - ☐ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100%.
- 3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang melebihi target kinerja hasil:

- ☐ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 103,18%.
 - Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 - ☐ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 133,33 %.
 - ☐ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 125%.
 - ☐ Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 114,29%.
 - ☐ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 200%.
 - Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 - ☐ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar 400%.
4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan:
- Faktor Pendorong
 - Perencanaan Matang: Adanya kesesuaian antara rencana awal dengan dokumen pelaksanaan (DPA), serta pemahaman yang baik dari PPTK terkait teknis kegiatan.
 - Optimalisasi Anggaran: Ketersediaan dan pencairan anggaran yang tepat waktu serta didukung oleh tertibnya administrasi.
 - Koordinasi yang Baik: Komunikasi internal yang solid dan sinergi antar bidang/instansi terkait dalam menyelesaikan tahapan program.
 - Pengawasan Melekat: Dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga kendala teknis di lapangan dapat segera diatasi
 - Faktor Penghambat
 - Perubahan Kebijakan/Aturan: Adanya perubahan regulasi atau perundang-undangan yang mengharuskan penyesuaian ulang terhadap program.
 - Kendala Anggaran: Terlambatnya pengesahan anggaran (DPA) atau adanya rasionalisasi (pemotongan/refocusing) anggaran di tengah tahun.

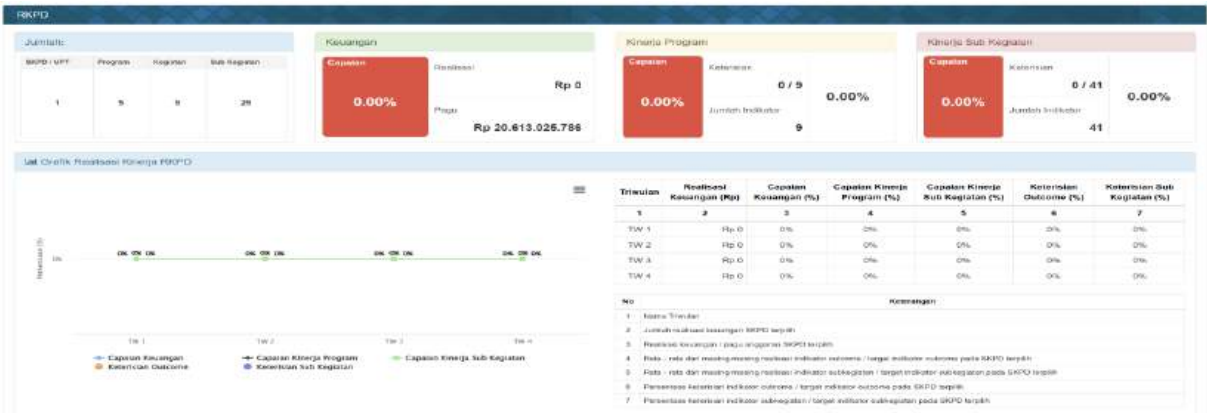
- Faktor Eksternal/Bencana: Terjadinya bencana alam, kondisi cuaca ekstrem, atau krisis ekonomi yang mengganggu proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan fisik.
- Sumber Daya Manusia (SDM): Kurangnya kapasitas, kompetensi, atau jumlah pegawai/tenaga ahli yang mengelola dan mengeksekusi kegiatan.
- Keterlambatan Pihak Ketiga: Molornya proses lelang (pengadaan barang/jasa) atau wanprestasi dari penyedia/kontraktor.

5. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- Perubahan Regulasi: Lakukan penyesuaian dokumen perencanaan (seperti revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA), percepat penyusunan aturan turunan internal, dan lakukan konsultasi berkala dengan instansi vertikal atau biro hukum agar program tetap mematuhi hukum.
- Kendala Anggaran: Buat skala prioritas program (fokus pada kegiatan kritikal), lakukan pergeseran atau realokasi antar-kegiatan, dan susun perencanaan anggaran yang matang di awal tahun agar pengesahan dokumen tidak molor.
- Faktor Eksternal/Bencana: Susun dokumen Mitigasi Risiko (analisis dampak bencana), lakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan (adendum waktu), dan alokasikan anggaran cadangan untuk kondisi darurat atau tanggap bencana.

15. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 secara umum realisasi capaian kinerja program, kegiatan dan

sub kegiatan sebesar 0,00%. Total pagu anggaran sebesar Rp20.613.025.786 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 0,00% dan predikat kinerja Sangat Rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

- Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
 - Program Penataan Desa dengan capaian 0%
 - Program Peningkatan Kerjasama Desa, dengan capaian 0%
 - Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan capaian 0%
 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dengan capaian 0%
- Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Seluruh Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa capaiannya 0%
- Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Seluruh Sub Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa capaiannya 0%

3. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

- Program yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Tidak terdapat program yang memenuhi target kinerja hasil.
- Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Tidak terdapat kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil.
- Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Tidak terdapat sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil.

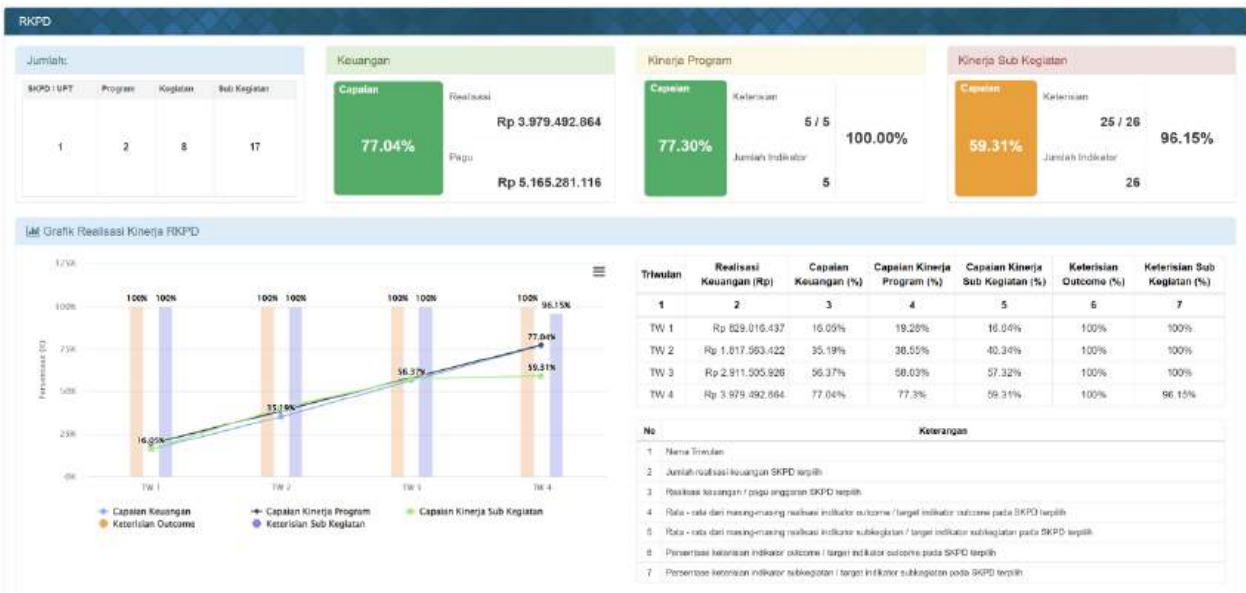
4. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

- Program yang melebihi target kinerja hasil :

- Tidak terdapat program yang melebihi target kinerja hasil.
 - Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil :
 - Tidak terdapat kegiatan yang melebihi target kinerja hasil.
 - Sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil :
 - Tidak terdapat sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil.
5. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan
- Faktor Pendorong
 - Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan.
 - Adanya struktur organisasi serta pembagian tugas dalam pelaksanaan urusan pemerintah desa
 - Tersedianya alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah.
 - Faktor Penghambat
 - Belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan sehingga rata-rata capaian kinerja masih berada pada angka 0%.
 - Belum terlaksananya sebagian besar kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dalam RENJA SKPD Tahun 2025.
 - Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan teknis pada bidang pemberdayaan masyarakat desa.
 - Perlunya peningkatan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar target yang direncanakan dapat tercapai.
6. Rekomendasi Tindak Lanjut

Rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antar bidang, melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan efektif dan mencapai target yang telah direncanakan. Selanjutnya yang terpenting adalah OPD harus mengisi isian evaluasi pada SIPD.

16. DINAS PERHUBUNGAN



Berdasarkan Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Bengkulu Tengah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, secara umum realisasi keuangan mencapai Rp3.979.492.864 atau sebesar 77% dari total pagu Rp 5.165.281.116 dengan status tidak memenuhi target triwulan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada akhir tahun telah berjalan cukup baik. Meskipun rata-rata kinerja capaian sub kegiatan hanya 59,31%, namun demikian rata-rata capaian kinerja program sudah mencapai 77,30%.

1) Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

Program:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 80,50%
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) dengan capaian 75,17%

Kegiatan :

- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rata-rata capaian 69,05
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rata-rata capaian 83,33%
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rata-rata capaian 55,56%
- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan rata-rata capaian 50%

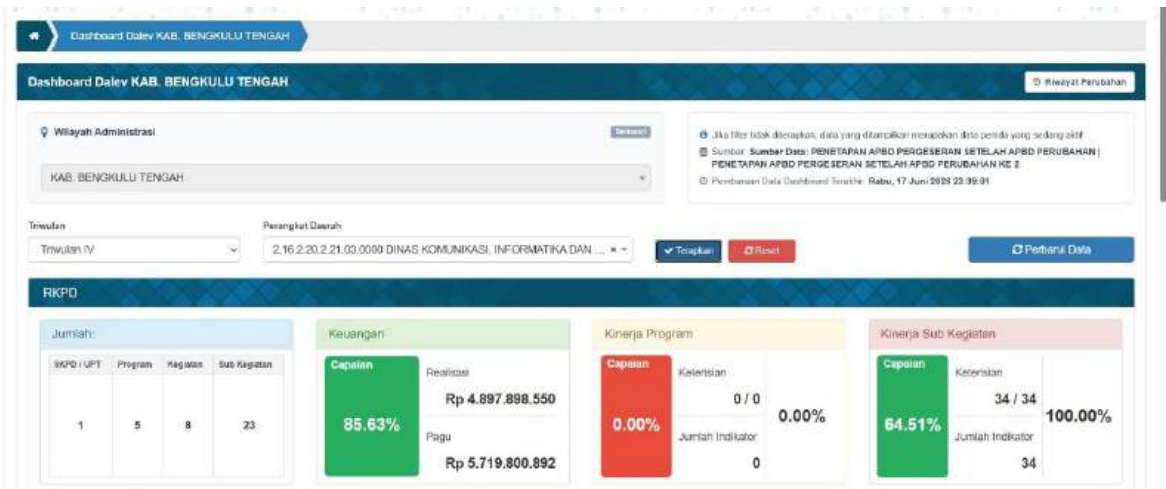
- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan rata-rata capaian 50%
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota; Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan rata-rata capaian 0%
- 2) Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program:
- -
- Kegiatan :
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rata-rata capaian 100%
 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan rata-rata capaian 100%
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program:
- -
- Kegiatan :
- -

Penilaian Realisasi Kinerja

URAIAN	REALISASI KINERJA	PREDIKAT
Program	77,3	Tinggi
Sub Kegiatan	55,08	Rendah
Anggaran	77,04	Tinggi
TOTAL RATA-RATA	69,81	Rendah

Ketercapaian yang rendah ini disebabkan oleh capaian sub kegiatan yang tidak memenuhi target dikarenakan keadaan keterbatasan anggaran kabupaten yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan seluruh sub kegiatan yang telah terencana pada Renja Dinas Perhubungan. Selain itu keadaan fiskal kabupaten yang tidak memungkinkan untuk membayar semua sub kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD sehingga beberapa sub kegiatan tidak bisa direalisasikan anggaran dan target kinerjanya.

17. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mencapai Rp. 4.897.898.550 atau sebesar 85,63 % dari total pagu Rp. 5.719.800.892 dengan status sesuai target triwulan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik telah berjalan cukup baik, pada Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

- 1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 62,95%
 - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, dengan capaian 46,11%
 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan capaian 50%
 - Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan capaian 0%
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian 40,74%
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 50%
 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 46,11%

- Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 50%
- Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan capaian 57,14%
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan capaian 0%
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan capaian 25%
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian 50%
 - Penyediaan Bahan/Material, dengan capaian 0%
 - Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan capaian 25%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan capaian 66,67%
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan capaian 0%
 - Relasi Media, dengan capaian 60%
 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat, dengan capaian 0%
 - Pelayanan Informasi Publik, dengan capaian 16,67%
 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik, dengan capaian 0%
 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional, dengan capaian 0%
 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE, dengan capaian 0%
 - Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, dengan capaian 0%
 - Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas, dengan capaian 0%

2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

- Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan capaian 100%
 - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dengan capaian 100%
- Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian 78,57%
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 87,5%
 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian 100%

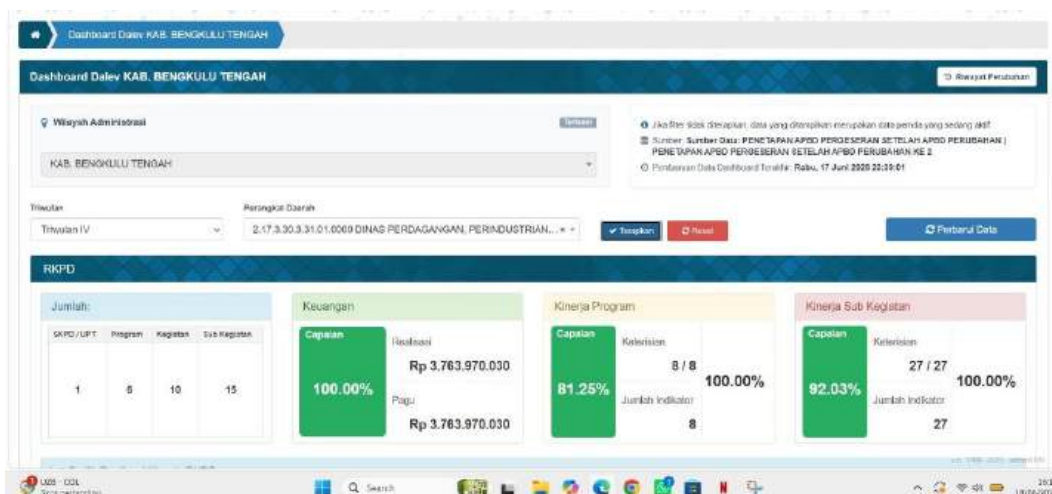
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian 75%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan capaian 75%
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan capaian 100%
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik, dengan capaian 100%
 - Penyusunan Konten, dengan capaian 100%
 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda, dengan capaian 100%
 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE, dengan capaian 100%
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral, dengan capaian 100%
 - Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral, dengan capaian 100%
 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang melebihi target kinerja hasil:
 - Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 - Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan .
- Faktor Pendorong
 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral mencapai kinerja 100% melalui peningkatan kapasitas kelembagaan statistik,

penyediaan metadata statistik sektoral, dan penerapan prinsip Satu Data Indonesia.

- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi mencapai kinerja dan realisasi anggaran 100%, yang menunjukkan terselenggaranya layanan keamanan informasi pada seluruh perangkat daerah.
- Penyediaan akses internet untuk perangkat daerah dalam rangka SPBE mencapai target 100% dengan cakupan 24 perangkat daerah.
- Pengelolaan media komunikasi publik dan penyusunan konten informasi publik berhasil mencapai target kinerja 100%.
- Faktor Penghambat
 - Program Administrasi Kepegawaian belum terlaksana sehingga capaian kinerja pengadaan pakaian dinas dan pendidikan serta pelatihan pegawai masih 0%.
 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat belum terlaksana dengan capaian kinerja 0%.
 - Beberapa indikator SPBE belum tercapai, seperti pemanfaatan Pusat Data Nasional, koordinasi manajemen SPBE, dan pembangunan aplikasi khusus pemerintah daerah yang masih 0%.
 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik belum terlaksana sehingga capaian kinerja masih 0%.
 - Pelayanan Informasi Publik baru mencapai 16,67% dari target yang ditetapkan.

5. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik adalah Mengoptimalkan implementasi SPBE melalui penyusunan dokumen manajemen SPBE, pengembangan aplikasi pemerintahan, dan pemanfaatan Pusat Data Nasional, dan Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi ASN bidang komunikasi publik, statistik, persandian, dan teknologi informasi, serta Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang belum terlaksana terutama administrasi kepegawaian, penguatan kapasitas SDM komunikasi publik, dan kemitraan dengan komunitas informasi masyarakat.

18. DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mencapai Rp. 3.763.970.030 atau sebesar 100 % dari total pagu Rp. 3.763.970.030 dengan status sesuai target triwulan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah telah berjalan cukup baik pada setiap program.

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan capaian 33,33%
 - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan capaian 0%
 - Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 0%
 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan capaian 33,33%

- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
- Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan capaian 0%
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan capaian 40%
 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan capaian 33,33%
 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dengan capaian 0%
- 2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, dengan capaian 100%
 - Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, dengan capaian 100%
 - Program Pengembangan UMKM, dengan capaian 100%
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN) , dengan capaian 96,97%
 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, dengan capaian 100%
 - Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, dengan capaian 100%
 - Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, dengan capaian 100%
 - Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan capaian 100%

- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dengan capaian 100%
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian 70%
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 100%
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 100%
- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan capaian 100%
- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan capaian 100%
- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, dengan capaian 100%
 - Pengembangan Usaha Mikro, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian 100%

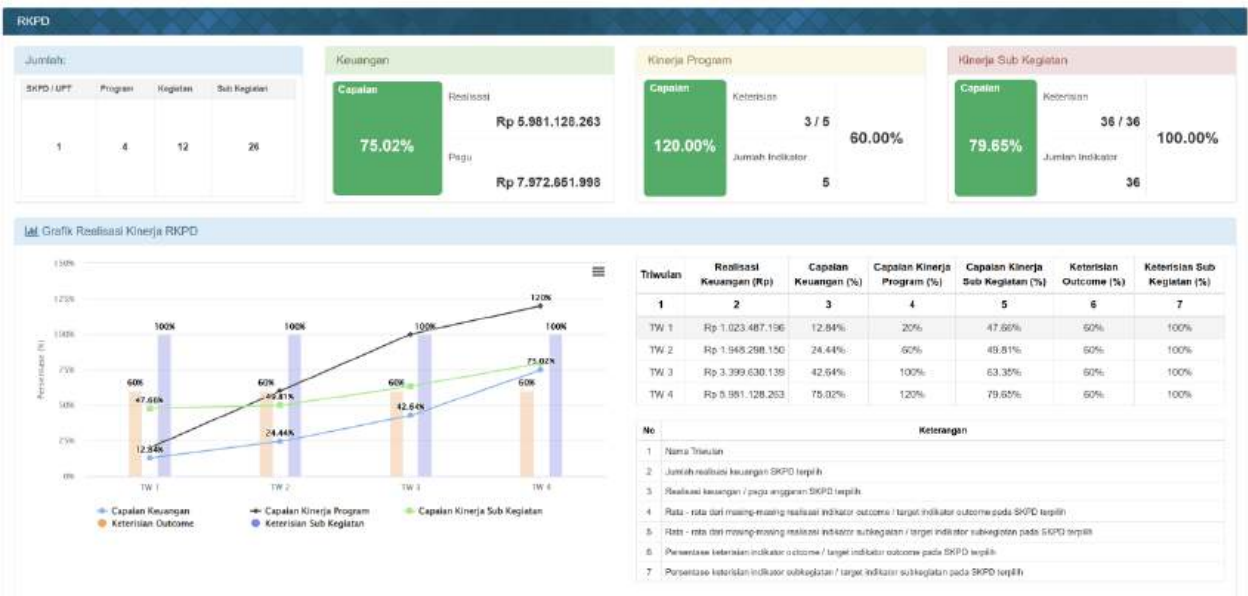
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian 100%
 - Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan capaian 100%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, dengan capaian 100%
 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dengan capaian 100%
 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal, dengan capaian 100%
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, dengan capaian 100%
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, dengan capaian 100%
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang melebihi target kinerja hasil:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 113,36%

- Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian 105,77%
 - Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian 111,54%
4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan .
- Faktor Pendorong
 - Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mencapai kinerja 100% melalui pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan terhadap koperasi di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.
 - Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian berhasil mencapai target 100% dengan peningkatan pemahaman dan kompetensi SDM koperasi sebanyak 150 orang.
 - Program Pengembangan UMKM mencapai kinerja 100% melalui fasilitasi usaha mikro untuk peningkatan skala usaha, kemitraan, akses pembiayaan, dan pengembangan SDM.
 - Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menunjukkan capaian 100% melalui pelaksanaan tera, tera ulang, serta pembinaan pelaku usaha di bidang metrologi legal.
 - Faktor Penghambat
 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan hanya mencapai 33,33% karena pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan belum terlaksana secara optimal.
 - Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ditargetkan sebanyak 3 unit baru terealisasi 1 unit sehingga target belum tercapai sepenuhnya.
 - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) belum mencapai target dengan capaian kinerja 0%, sehingga pengumpulan, pengolahan, dan analisis data industri belum berjalan optimal.
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah baru mencapai 40% dari target yang ditetapkan.
 - Masih terdapat beberapa indikator outcome yang belum terukur secara optimal, khususnya terkait peningkatan pemanfaatan

informasi industri dan pengembangan sarana distribusi perdagangan.

5. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah adalah Meningkatkan kapasitas SDM aparatur, pelaku koperasi, UMKM, dan industri melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, dan Memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM guna meningkatkan daya saing usaha.

19. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mencapai Rp. 5.981.128.263 atau sebesar 75,02 % dari total pagu Rp. 7.972.651.998 dengan status sesuai target triwulan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga telah berjalan cukup baik, terutama pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan.

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil:
 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dengan capaian 51,67%

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dengan capaian 47,06%
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, dengan capaian 50%
- Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian 66,86%
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian 63,18%
 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, dengan capaian 66,43%
 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 50%
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 33,33%
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, dengan capaian 30%
 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, dengan capaian 50%
 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, dengan capaian 50%
- Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan capaian 50%
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian 22,22%
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan capaian 13,04%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan capaian 3,33%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian 50%

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota, dengan capaian 33,33%
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota, dengan capaian 0%
- Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota, dengan capaian 0%
- Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota, dengan capaian 0%
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
- Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota, dengan capaian 0%
- Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota, dengan capaian 50%
- Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota, dengan capaian 0%
- Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, dengan capaian 0%
- Seleksi Atlet Daerah, dengan capaian 50%
- Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga, dengan capaian 0%
- Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science), dengan capaian 0%
- Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota, dengan capaian 0%
- Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota, dengan capaian 0%

- Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional, dengan capaian 0%
 - Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah, dengan capaian 0%
2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 81,06%
 - Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 100%
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 100%
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, dengan capaian 75%
 - Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan capaian 100%
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian 83,72%
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan capaian 100%

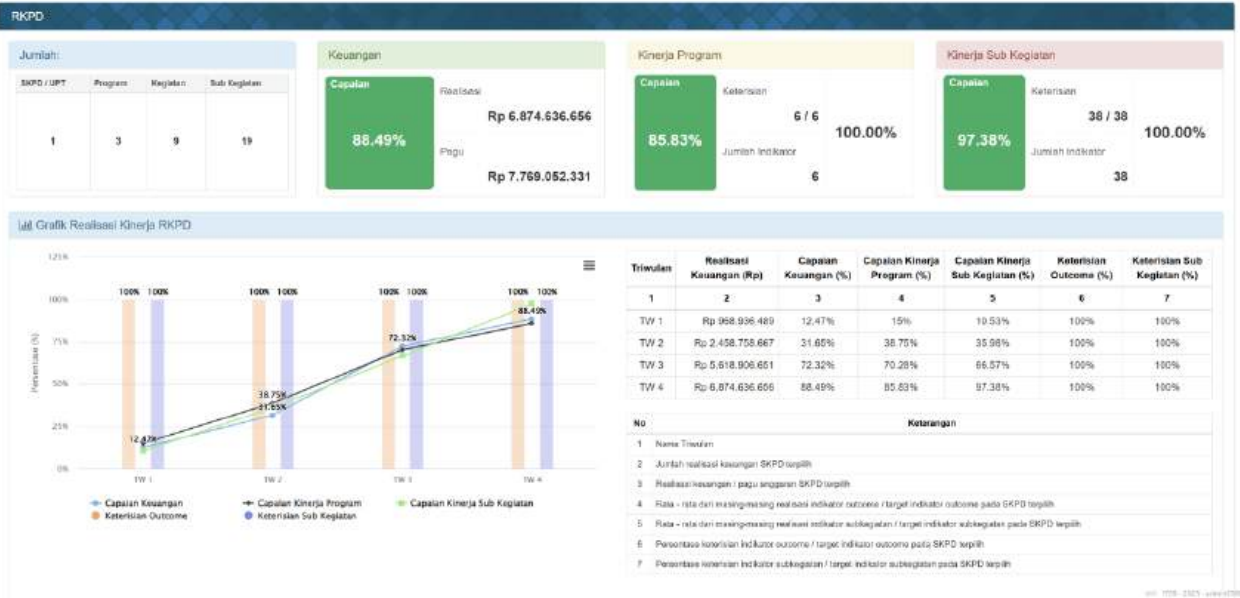
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan capaian 80%
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian 100%
- Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan capaian 100%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan capaian 100%
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan capaian 100%
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan capaian 100%
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian 100%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan capaian 100%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan capaian 100%
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dengan capaian 100%
- Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota, dengan capaian 100%
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota, dengan capaian 100%
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar, dengan capaian 100%
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota, dengan capaian 100%
- Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, dengan capaian 100%
- Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi, dengan capaian 100%

- Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan, dengan capaian 100%
 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat, dengan capaian 100%
 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah, dengan capaian 100%
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang melebihi memenuhi target kinerja hasil:
 - Kegiatan yang melebihi memenuhi target kinerja hasil:
 - Sub Kegiatan yang melebihi memenuhi target kinerja hasil:
 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda, dengan capaian 125%
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota, dengan capaian 106,67%
4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan .
- Faktor Pendorong
 - Adanya komitmen dan koordinasi yang baik antarbidang dalam pelaksanaan program kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
 - Dukungan pemangku kepentingan, organisasi kepemudaan, organisasi olahraga, dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan serta olahraga.
 - Tersedianya dukungan anggaran pada sebagian besar program dan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan strategis dapat berjalan sesuai rencana.
 - Faktor Penghambat
 - Masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana atau belum terealisasi anggarannya sehingga capaian kinerja rendah bahkan 0%.

- Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan maupun olahraga yang menyebabkan target indikator belum tercapai.
- Kegiatan pengembangan organisasi kepemudaan dan organisasi keolahragaan belum berjalan optimal sehingga beberapa indikator tidak tercapai.
- Adanya keterlambatan pelaksanaan sebagian kegiatan yang terpusat pada akhir tahun anggaran sehingga realisasi kinerja tidak maksimal.
- Keterbatasan SDM pelaksana dan kapasitas teknis pada beberapa bidang yang mempengaruhi percepatan pelaksanaan kegiatan.

5. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah melakukan identifikasi dini terhadap hambatan administrasi, pengadaan, dan pelaksanaan kegiatan agar dapat segera ditangani, kemudian memprioritaskan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah.

20. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mencapai Rp. 6.874.636.656 atau sebesar 88,49 % dari total pagu Rp. 7.769.052.331 dengan status sesuai target triwulan. Capaian tersebut menunjukkan

bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah berjalan cukup baik, terutama pada Program Pembinaan Perpustakaan.

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip, dengan capaian 0%
 - Program Pembinaan Perpustakaan, dengan capaian 60,7%
 - Program Pengelolaan Arsip, dengan capaian 20%
 - Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan capaian 0%
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian 0%
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 40%
 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 54,26%
 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 68,75%
 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, dengan capaian 0%
 - Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan capaian 0%
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan capaian 0%

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian 0%
 - Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan capaian 0%
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan capaian 0%
 - Pengadaan Mebel, dengan capaian 0%
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan capaian 0%
 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial, dengan capaian 0%
 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN, dengan capaian 0%
 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, dengan capaian 0%
2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 -
 - Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian 98,04%
- Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 80%
- Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian 94,12%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan capaian 80%
 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan, dengan capaian 86,67%
 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, dengan capaian 84,62%
 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik, dengan capaian 100%
 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca, dengan capaian 90%

- Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat, dengan capaian 85%
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang melebihi target kinerja hasil:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 113,36%
 - Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian 180%
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan capaian 200%
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian 125%
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 125%
 - Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan capaian 400%
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan capaian 200%
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan capaian 400%
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan capaian 400%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian 200%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan capaian 200%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian 200%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan capaian 200%
4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan .

- Faktor Pendorong
 - Optimalnya pelaksanaan Program Pembinaan Perpustakaan dengan realisasi anggaran mencapai 97,84% dan sebagian besar indikator kegiatan mencapai target yang ditetapkan.
 - Terlaksananya pembangunan sarana perpustakaan, pengembangan koleksi perpustakaan daerah, layanan perpustakaan elektronik, serta kegiatan pembudayaan gemar membaca yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja perangkat daerah.
 - Tingginya partisipasi masyarakat dan satuan pendidikan dalam kegiatan literasi dan budaya gemar membaca.
- Faktor Penghambat
 - Masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana atau belum mencapai target kinerja, khususnya pada urusan kearsipan.
 - Pengembangan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan belum sepenuhnya terlaksana sehingga target jumlah perpustakaan yang dikembangkan belum tercapai.
 - Kegiatan pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial belum terealisasi secara optimal.
 - Beberapa kegiatan pengelolaan arsip statis, layanan JIKN, pemberdayaan kapasitas unit kearsipan, serta pemusnahan arsip belum dapat dilaksanakan sehingga capaian kinerja masih rendah.
 - Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan arsip digital dan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi.
 - Perubahan prioritas kegiatan dan penyesuaian pelaksanaan program yang menyebabkan beberapa target belum tercapai secara maksimal.

5. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah mengoptimalkan pelaksanaan program kearsipan, khususnya pengelolaan arsip statis, layanan JIKN, dan pemberdayaan kapasitas unit kearsipan, kemudian mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan yang telah tersedia agar

memberikan dampak lebih besar terhadap peningkatan minat baca masyarakat.

21. DINAS PARIWISATA



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mencapai Rp. 2.382.323.605 atau sebesar 60, 03 % dari total pagu Rp. 3.968.847.931 dengan status sesuai target triwulan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata telah berjalan tidak cukup baik, terutama pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :

-

• Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :

-

• Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :

- Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, dengan capaian 0%

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan capaian 0%

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, dengan capaian 50%

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan capaian 33,33%

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan capaian 60%

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan capaian 50%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian 10%
 - Pengadaan Mebel, dengan capaian 40%
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan capaian 28,57%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan capaian 41,67%
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dengan capaian 66,67%
 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota, dengan capaian 66,67%
 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota, dengan capaian 66,67%
 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota, dengan capaian 50%
 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan capaian 60%
 - Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota, dengan capaian 66,67%
 - Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi), dengan capaian 60%
 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata, dengan capaian 66,67%
 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif), dengan capaian 50%
2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 88,59%
 - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan capaian 89,63%
 - Program Pemasaran Pariwisata, dengan capaian 100%

- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan capaian 97,22%
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, dengan capaian 90,14%
- Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian 89,23%
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian 86,25%
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan capaian 89,39%
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian 81,82%
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian 73,71%
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 85,42%
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 89,33%
 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, dengan capaian 76,67%
 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan capaian 93,33%
 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 84,58%
 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%

- Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dengan capaian 97,06%
 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, dengan capaian 90,28%
 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dengan capaian 90%
- Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan capaian 100%
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah, dengan capaian 100%
 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD, dengan capaian 80%
 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu, dengan capaian 80%

- Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan, dengan capaian 100%
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian 90%
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan capaian 100%
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan capaian 100%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan capaian 100%
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan capaian 100%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan capaian 100%
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan capaian 100%
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan capaian 100%
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan capaian 100%
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan capaian 100%
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan capaian 100%
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan capaian 100%
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan capaian 100%
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan capaian 100%
- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah, dengan capaian 100%
- Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah, dengan capaian 100%
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah, dengan capaian 100%
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, dengan capaian 100%
- Pengolahan Data Retribusi Daerah, dengan capaian 100%

- Penetapan Wajib Retribusi Daerah, dengan capaian 100%
- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah, dengan capaian 100%
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan capaian 100%
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan capaian 100%
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan capaian 100%
- Pemulangan Pegawai yang Pensiun, dengan capaian 100%
- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas, dengan capaian 100%
- Pemindahan Tugas ASN, dengan capaian 100%
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan capaian 100%
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan capaian 100%
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan capaian 100%
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan capaian 100%
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian 100%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian 100%
- Penyediaan Bahan/Material, dengan capaian 80%
- Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan capaian 100%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan capaian 100%
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan capaian 100%
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan capaian 100%
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan capaian 100%
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan capaian 100%
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan capaian 100%

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan capaian 100%
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian 100%
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian 100%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan capaian 100%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan capaian 100%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, dengan capaian 100%
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan capaian 80%
- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%

- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya, dengan capaian 100%
- Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota, dengan capaian 70%
- Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota, dengan capaian 80%
- Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota, dengan capaian 100%
- Kesiadaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota, dengan capaian 100%
- Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi), dengan capaian 100%
- Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri, dengan capaian 100%
- Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, dengan capaian 100%
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan capaian 100%
- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, dengan capaian 100%

- Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif, dengan capaian 100%
- Pengembangan Pendidikan, dengan capaian 100%
- Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan, dengan capaian 100%
- Penyediaan Infrastruktur, dengan capaian 100%
- Pengembangan Sistem Pemasaran, dengan capaian 100%
- Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif, dengan capaian 100%
- Fasilitasi pemberian insentif, dengan capaian 75%
- Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah, dengan capaian 100%
- Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper) , dengan capaian 100%
- Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual, dengan capaian 100%
- Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual, dengan capaian 100%
- Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah, dengan capaian 100%
- Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif, dengan capaian 100%
- Penyusunan Skema Insentif Daerah, dengan capaian 100%
- Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah, dengan capaian 100%
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dengan capaian 100%
- Perlindungan Hasil Kreativitas, dengan capaian 100%
- Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual, dengan capaian 75%
- Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif, dengan capaian 100%
- Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, dengan capaian 100%
- Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI, dengan capaian 100%
- Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata, dengan capaian 75%
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan capaian 100%

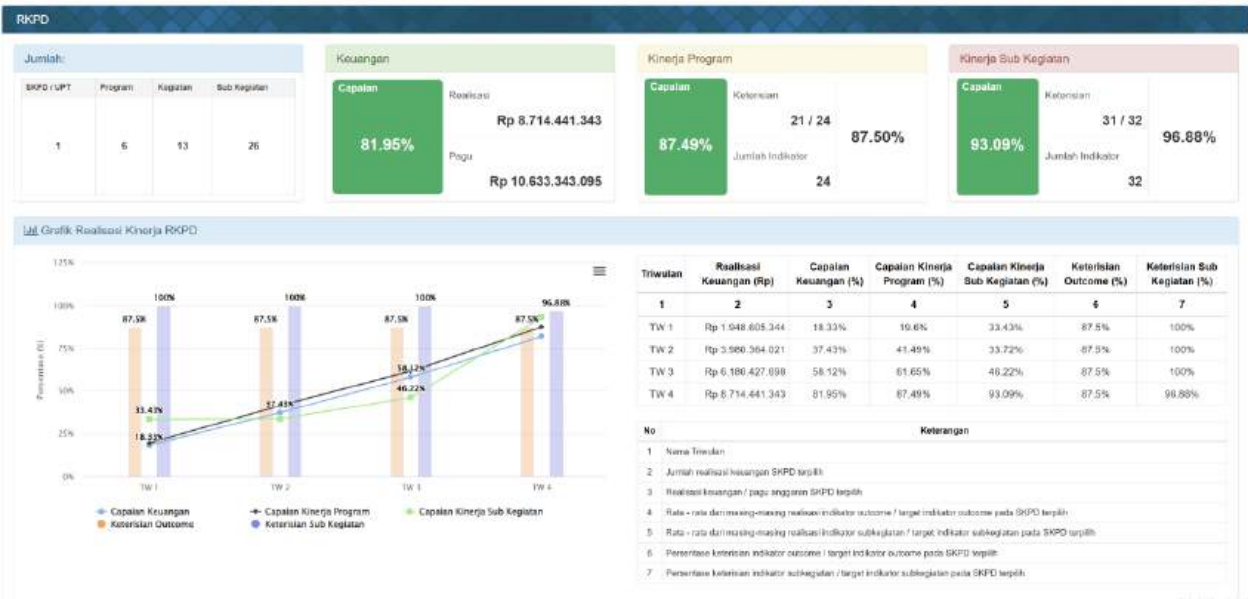
- Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, dengan capaian 100%
 - Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha, dengan capaian 100%
 - Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif, dengan capaian 100%
 - Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif, dengan capaian 90%
 - Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif, dengan capaian 100%
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang melebihi target kinerja hasil:
 -
 - Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 -
 - Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 -
4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan .
- Faktor Pendorong
 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota mencapai kinerja 93,33%, menunjukkan adanya peningkatan pengelolaan kawasan wisata strategis.
 - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata menunjukkan capaian yang tinggi dengan realisasi kinerja mencapai 89,63%.
 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota telah mencapai target 100% pada berbagai indikator pengembangan destinasi wisata.

- Faktor Penghambat

- Beberapa kegiatan pengembangan daya tarik wisata belum mencapai target optimal, seperti pengembangan daya tarik wisata unggulan yang baru mencapai 66,67%.
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola daya tarik wisata unggulan baru mencapai 50% dari target yang ditetapkan.
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan strategis pariwisata baru mencapai 60% sehingga masih diperlukan penguatan kompetensi pengelola wisata.
- Pengadaan mebel dan peralatan pendukung operasional belum mencapai target, masing-masing baru terealisasi 40% dan 28,57%.
- Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan pegawai masih rendah yaitu 33,33%, sedangkan peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai baru mencapai 50%.
- Beberapa kegiatan administrasi umum seperti penyediaan bahan logistik kantor dan barang cetakan/penggandaan belum mencapai target yang direncanakan.

5. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Pariwisata adalah meningkatkan program pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan bagi pengelola destinasi wisata serta kelompok sadar wisata (Pokdarwis), kemudian memperkuat promosi dan pemasaran destinasi wisata melalui media digital, event pariwisata, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa, komunitas wisata, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya dalam pengembangan destinasi wisata berkelanjutan dan memprioritaskan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

22. DINAS PERTANIAN



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mencapai Rp. 8.711.441.343 atau sebesar 81,93 % dari total pagu Rp. 10.633.343.095 dengan status sesuai target triwulan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian telah berjalan cukup baik, terutama pada Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 61,76%
 - Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan capaian 0%
 - Program Penyuluhan Pertanian, dengan capaian 42,99%
 - Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian 62,5%
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian 66,67%
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 33,33%
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 41,67%

- Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 0%
 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan capaian 42,99%
 - Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan capaian 25%
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan capaian 25%
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan capaian 0%
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, dengan capaian 0%
 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan, dengan capaian 0%
 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian, dengan capaian 0%
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, dengan capaian 1,69%
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, dengan capaian 27,27%
2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan capaian 100%

- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan capaian 85,71%
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan capaian 275%
- Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan capaian 100%
- Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan capaian 100%
 - Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, dengan capaian 100%
 - Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan capaian 100%
 - Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan capaian 83,33%
 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 450%
 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
- Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan capaian 100%
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan capaian 100%
 - Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan capaian 100%

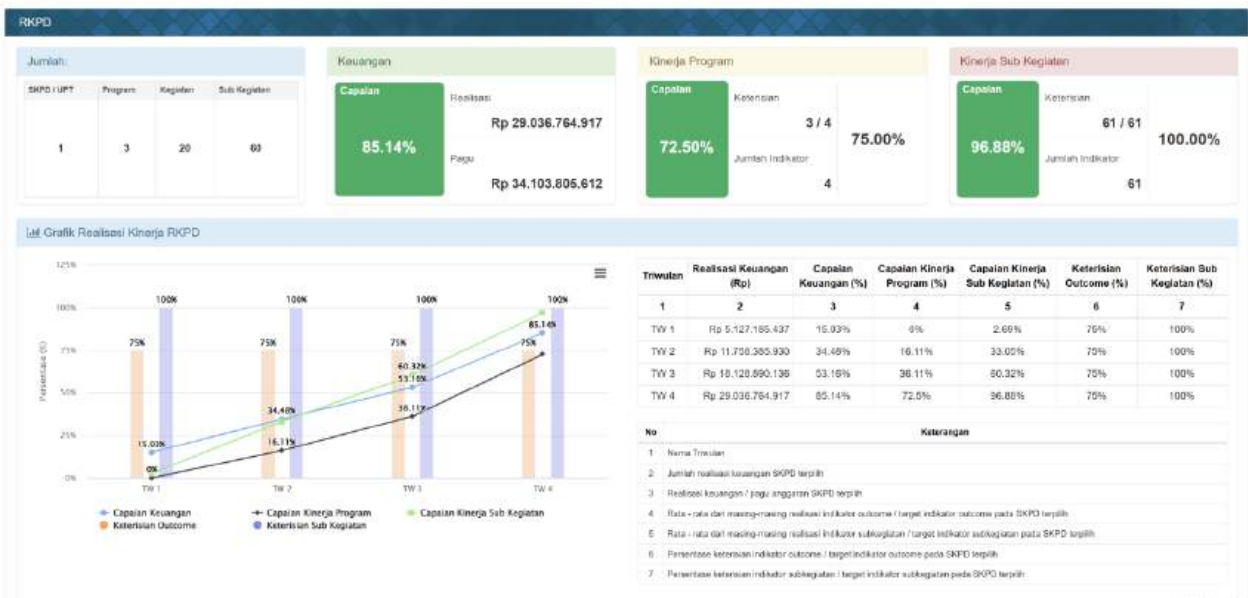
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan capaian 100%
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian 100%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan capaian 100%
- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, dengan capaian 100%
- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, dengan capaian 100%
- Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya, dengan capaian 100%
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, dengan capaian 100%
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit, dengan capaian 100%
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya, dengan capaian 100%
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, dengan capaian 100%
- Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak, dengan capaian 100%
- Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 900%
- Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium, dengan capaian 100%
- Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dengan capaian 100%
- Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dengan capaian 100%
- Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis, dengan capaian 100%
- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, dengan capaian 100%

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 450%
 - Sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil :
 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 900%
4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan .
 - Faktor Pendorong
 - Optimalnya pelaksanaan Program Pembinaan Perpustakaan dengan realisasi anggaran mencapai 97,84% dan sebagian besar indikator kegiatan mencapai target yang ditetapkan.
 - Terlaksananya pembangunan sarana perpustakaan, pengembangan koleksi perpustakaan daerah, layanan perpustakaan elektronik, serta kegiatan pembudayaan gemar membaca yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja perangkat daerah.
 - Tingginya partisipasi masyarakat dan satuan pendidikan dalam kegiatan literasi dan budaya gemar membaca.
 - Faktor Penghambat
 - Masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana atau belum mencapai target kinerja, khususnya pada urusan kearsipan.
 - Pengembangan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan belum sepenuhnya terlaksana sehingga target jumlah perpustakaan yang dikembangkan belum tercapai.
 - Kegiatan pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial belum terealisasi secara optimal.

- Beberapa kegiatan pengelolaan arsip statis, layanan JIKN, pemberdayaan kapasitas unit kearsipan, serta pemusnahan arsip belum dapat dilaksanakan sehingga capaian kinerja masih rendah.
- Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan arsip digital dan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi.
- Perubahan prioritas kegiatan dan penyesuaian pelaksanaan program yang menyebabkan beberapa target belum tercapai secara maksimal.

5. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Pertanian adalah mengoptimalkan pelaksanaan program kearsipan, khususnya pengelolaan arsip statis, layanan JIKN, dan pemberdayaan kapasitas unit kearsipan, kemudian mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan yang telah tersedia agar memberikan dampak lebih besar terhadap peningkatan minat baca masyarakat.

23. SEKRETARIAT DAERAH



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mencapai Rp. 29.036.764.917 atau sebesar 85,14 % dari total pagu Rp. 34.103.805.612 dengan status sesuai target triwulan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan

kegiatan pada Sekretariat Daerah telah berjalan cukup baik, terutama pada Program Perekonomian Dan Pembangunan.

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 -
 - Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 -
 - Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan capaian 66,67%
 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan capaian 57,14%
 - Fasilitasi Bantuan Hukum, dengan capaian 60%
2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 97,84%
 - Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, dengan capaian 90,81%
 - Program Perekonomian Dan Pembangunan, dengan capaian 99%
 - Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian 100%

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 94,44%
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 83,4%
 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan capaian 100%
 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dengan capaian 100%
 - Penataan Organisasi, dengan capaian 95,83%
 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dengan capaian 100%
 - Administrasi Tata Pemerintahan, dengan capaian 85,71%
 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, dengan capaian 100%
 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan capaian 83,67%
 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah, dengan capaian 100%
 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dengan capaian 100%
 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, dengan capaian 100%
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan capaian 96,67%
 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, dengan capaian 100%
- Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan capaian 100%
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian 100%
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan capaian 100%

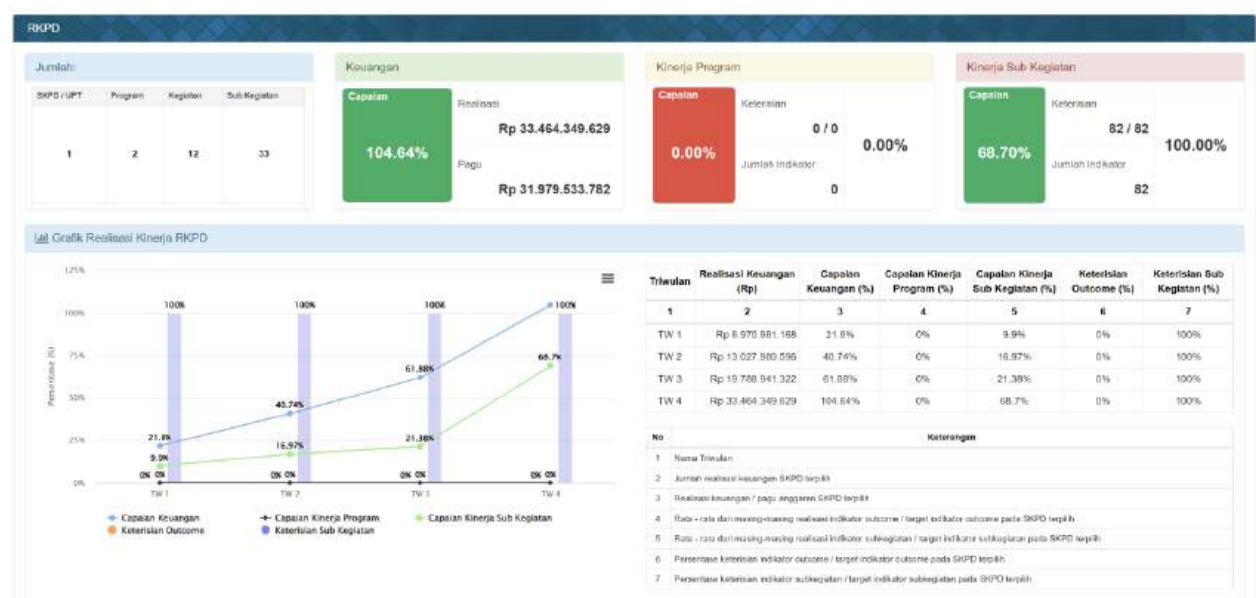
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan capaian 100%
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan capaian 80%
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan capaian 100%
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan capaian 100%
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan capaian 100%
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan capaian 100%
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan capaian 100%
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian 100%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian 100%
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan capaian 100%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan capaian 100%
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan capaian 100%
- Pengadaan Mebel, dengan capaian 100%
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan capaian 77,78%
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian 100%
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian 100%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan capaian 100%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan capaian 96,25%
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan capaian 87,27%
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan capaian 100%

- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan capaian 100%
- Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan capaian 100%
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, dengan capaian 100%
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, dengan capaian 100%
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, dengan capaian 100%
- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dengan capaian 83,33%
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dengan capaian 100%
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, dengan capaian 100%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan capaian 100%
- Fasilitasi Keprotokolan, dengan capaian 100%
- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dengan capaian 100%
- Pendokumentasian Tugas Pimpinan, dengan capaian 100%
- Penataan Administrasi Pemerintahan, dengan capaian 100%
- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, dengan capaian 100%
- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, dengan capaian 100%
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, dengan capaian 100%
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat, dengan capaian 100%
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, dengan capaian 91%
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, dengan capaian 100%
- Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri, dengan capaian 100%
- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, dengan capaian 100%
- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dengan capaian 100%

- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil, dengan capaian 100%
 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, dengan capaian 100%
 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, dengan capaian 100%
 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, dengan capaian 100%
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan capaian 100%
 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dengan capaian 100%
 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan capaian 90%
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup, dengan capaian 100%
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang melebihi target kinerja hasil:
 -
 - Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 -
 - Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 -
4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan .
- Faktor Pendorong
 - Pelaksanaan fungsi administrasi umum, administrasi keuangan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan pimpinan berjalan efektif dengan capaian kinerja rata-rata sangat tinggi.
 - Optimalnya pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan dengan capaian kinerja 99% dan realisasi anggaran 98,27%.

- Koordinasi dan sinergi yang baik antarbagian di lingkungan Sekretariat Daerah serta dengan perangkat daerah lainnya.
 - Faktor Penghambat
 - Beberapa kegiatan memiliki realisasi anggaran yang masih relatif rendah dibandingkan pagu yang tersedia, sehingga efektivitas penggunaan anggaran belum sepenuhnya optimal.
 - Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor serta bangunan lainnya baru mencapai 66,67% dari target kinerja.
 - Masih terdapat beberapa indikator kegiatan yang belum mencapai target 100%, terutama pada fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah yang baru mencapai 57,14%.
 - Fasilitasi bantuan hukum baru mencapai 60% dari target kasus yang direncanakan.
 - Penyediaan jasa surat menyurat hanya mencapai 77,78% dari target yang ditetapkan.
 - Penjadwalan pelaksanaan sebagian kegiatan yang terkonsentrasi pada akhir tahun menyebabkan realisasi kinerja dan anggaran belum merata pada setiap triwulan.
5. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah adalah mengoptimalkan pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum, fasilitasi otonomi daerah, serta pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran, kemudian memastikan seluruh dokumen perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban kegiatan terselesaikan tepat waktu. Serta menyusun target kinerja yang lebih terukur dan realistis berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya dan memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko pada setiap program dan kegiatan.

24. SEKRETARIAT DPRD



Berdasarkan data Evaluasi Hasil RKPD, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki pagu anggaran sebesar Rp 31.979.533.782 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 33.464.349.629 atau 104,64%. Sementara itu, rata-rata capaian kinerja hanya mencapai 68,70%.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara capaian kinerja dan realisasi keuangan, dimana penyerapan anggaran telah melampaui target yang ditetapkan, namun tingkat pencapaian kinerja masih berada pada kategori sedang dan belum optimal. Secara umum, hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran belum sepenuhnya berbanding lurus dengan hasil atau output yang dihasilkan.

I. Analisis Kinerja dan Keuangan Secara Umum

Uraian	Nilai
Pagu RKPD	Rp31.979.533.782
Realisasi Keuangan	Rp33.464.349.629
Persentase Realisasi Keuangan	104,64%
Rata-rata Capaian Kinerja	68,70%

Temuan Utama

1. Realisasi keuangan melebihi pagu anggaran sebesar Rp 1.484.815.847.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang menunjukkan realisasi keuangan sangat tinggi bahkan melampaui pagu yang direncanakan.

- 3. Banyak sub kegiatan memiliki capaian kinerja rendah (<50%) meskipun realisasi keuangannya sangat tinggi.
- 4. Beberapa kegiatan memiliki capaian kinerja 100% namun tidak tercatat memiliki pagu maupun realisasi keuangan.
- 5. Efektivitas pelaksanaan program secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan karena tingkat serapan anggaran tidak diikuti peningkatan capaian kinerja yang sebanding.

II. Analisis Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini merupakan program utama dengan alokasi anggaran terbesar.

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja	Keuangan
68,57%	0%

Analisis

- Kinerja berada pada kategori sedang.
- Tidak terdapat realisasi keuangan meskipun terdapat pagu Rp 2,5 juta.
- Menunjukkan kegiatan belum dilaksanakan secara optimal atau realisasi belum tercatat.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja	Keuangan
90,63%	164,82%

Analisis

- Kinerja sangat baik.
- Realisasi mencapai Rp 7,64 miliar dari pagu Rp 4,63 miliar.
- Terjadi kelebihan realisasi sebesar sekitar Rp 3 miliar.

Perlu dilakukan evaluasi terhadap:

- Perubahan anggaran.
- Pergeseran kegiatan.

- Ketepatan pencatatan dan penganggaran.

Karena secara prinsip realisasi keuangan tidak seharusnya melebihi pagu tanpa adanya perubahan anggaran yang sah.

3. Administrasi Barang Milik Daerah

Kinerja	Keuangan
81,25%	0%

Analisis

- Kinerja cukup baik.
- Tidak terdapat pagu maupun realisasi keuangan.
- Kemungkinan indikator kinerja dihitung dari aktivitas administrasi non-belanja.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kinerja	Keuangan
31,00%	672,46%

Ini merupakan anomali terbesar dalam laporan.

- Kinerja sangat rendah.
- Realisasi mencapai Rp 974 juta dari pagu hanya Rp144 juta.

Tingkat realisasi mencapai: 672,46% Artinya realisasi hampir tujuh kali lipat dari pagu.

Implikasi

Menunjukkan:

- Kemungkinan adanya perubahan anggaran.
- Ketidaksesuaian antara penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai.
- Potensi kelemahan dalam perencanaan kegiatan.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kinerja	Keuangan

Kinerja	Keuangan
100%	99,68%

Analisis

Merupakan salah satu kegiatan paling ideal.

- Target kinerja tercapai sepenuhnya.
- Realisasi keuangan mendekati pagu.
- Menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang baik.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah

Kinerja	Keuangan
50%	0%

Analisis

- Kegiatan belum berjalan optimal.
- Tidak terdapat realisasi anggaran.
- Memerlukan evaluasi terhadap proses pengadaan.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja	Keuangan
100%	91,25%

Sangat baik. Target tercapai penuh dengan penggunaan anggaran yang masih efisien.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Kinerja	Keuangan
66,67%	99,23%

Analisis

- Serapan anggaran hampir sempurna.
- Namun capaian kinerja baru dua pertiga target.

Menunjukkan efisiensi pelaksanaan masih perlu ditingkatkan.

9. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kinerja	Keuangan
100%	0%

Target kinerja tercapai penuh, namun tidak terdapat realisasi keuangan.

Kemungkinan:

- Kegiatan dilaksanakan melalui dukungan kegiatan lain.
- Kesalahan pencatatan data.

10. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Kinerja	Keuangan
66,67%	86,13%

Merupakan kegiatan dengan pagu terbesar.

- Anggaran Rp12,88 miliar.
- Realisasi Rp11,09 miliar.

Walaupun penyerapan cukup tinggi, capaian kinerja masih belum optimal.

11. Layanan Administrasi DPRD

Kinerja	Keuangan
100%	0%

Perlu klarifikasi lebih lanjut karena tidak terdapat pagu maupun realisasi.

III. Analisis Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini berkaitan langsung dengan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Kinerja	Keuangan
7,50%	96,47%

Merupakan kegiatan dengan tingkat efektivitas paling rendah.

- Anggaran terserap hampir seluruhnya.
- Kinerja hanya mencapai 7,50%.

Hal ini menunjukkan target pembentukan produk hukum belum tercapai sesuai rencana.

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Kinerja	Keuangan
50%	0%

Perlu peningkatan koordinasi agar target pembahasan anggaran dapat tercapai secara penuh.

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kinerja	Keuangan
100%	0%

Target kinerja tercapai sepenuhnya.

4. Peningkatan Kapasitas DPRD

Kinerja	Keuangan
35,24%	97,85%

Analisis

- Realisasi keuangan hampir sempurna.
- Kinerja masih rendah.

Menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas belum memberikan hasil sesuai target.

5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Kinerja	Keuangan
33,33%	0%

Capaian masih rendah. Perlu peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan reses dan penjaringan aspirasi masyarakat.

6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Kinerja	Keuangan
50%	0%

Masih memerlukan peningkatan pelaksanaan kegiatan.

7. Pembahasan Kerja Sama Daerah

Kinerja	Keuangan
50%	0%

Pelaksanaan baru mencapai separuh target.

8. Fasilitasi Tugas DPRD

Kinerja	Keuangan
66,67%	99,92%

Analisis

- Serapan anggaran hampir sempurna.
- Kinerja belum mencapai target maksimal.

Menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas DPRD.

IV. Identifikasi Permasalahan Utama

1. Ketidakseimbangan Kinerja dan Keuangan

Terdapat sejumlah kegiatan yang menunjukkan serapan anggaran sangat tinggi namun capaian kinerja rendah, antara lain:

Kegiatan	Kinerja	Keuangan
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	7,50%	96,47%
Peningkatan Kapasitas DPRD	35,24%	97,85%
Administrasi Kepegawaian	31,00%	672,46%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	66,67%	99,23%

Kondisi ini mengindikasikan rendahnya efektivitas pelaksanaan kegiatan.

2. Adanya Realisasi Melebihi Pagu

Terjadi pada:

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (164,82%)
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (672,46%)

Kondisi tersebut perlu diverifikasi melalui dokumen perubahan anggaran dan laporan keuangan.

3. Banyak Kegiatan Tanpa Realisasi Keuangan

Beberapa kegiatan menunjukkan capaian kinerja namun tidak terdapat realisasi anggaran.

Hal ini dapat disebabkan oleh:

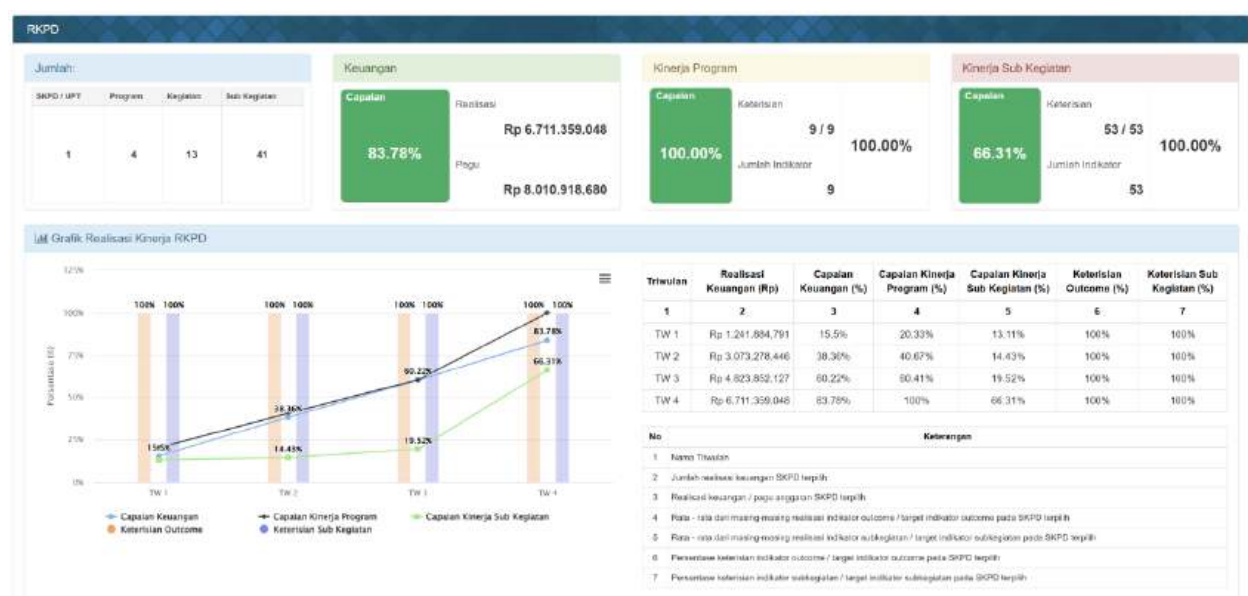
- Kesalahan input data.
- Kegiatan dilaksanakan melalui kegiatan lain.
- Perbedaan metode pengukuran kinerja dan keuangan.

Kesimpulan

1. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 68,70% masih berada pada kategori cukup dan belum optimal.
2. Realisasi keuangan mencapai 104,64%, melampaui pagu yang direncanakan, sehingga perlu dilakukan verifikasi terhadap perubahan anggaran dan pencatatan realisasi.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menunjukkan kinerja relatif lebih baik dibanding Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
4. Kegiatan yang berkaitan dengan fungsi legislasi DPRD, terutama Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, memerlukan perhatian serius karena capaian kinerjanya sangat rendah (7,50%) meskipun anggaran hampir seluruhnya terserap.
5. Diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi agar penggunaan anggaran dapat menghasilkan output dan outcome yang lebih optimal.

6. Secara keseluruhan, tantangan utama Sekretariat DPRD bukan pada penyerapan anggaran, melainkan pada peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar capaian kinerja sejalan dengan besarnya anggaran yang telah digunakan.

25. BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH



Total pagu anggaran sebesar Rp 8.010.918.680 dengan realisasi keuangan mencapai Rp 6.711.359.048 atau 83,78%. Sementara itu, rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan tercatat sebesar 58,57%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum penyerapan anggaran tergolong tinggi, namun capaian kinerja belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat realisasi keuangan. Terdapat beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya tinggi tetapi capaian kinerjanya masih rendah.

Analisis per Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (5.01.01)

Program ini memiliki alokasi anggaran terbesar dan secara umum menunjukkan kinerja yang baik.

Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	100%

Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	77,36%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	86,97%
Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75%	99,48%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	83,99%
Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	97,49%

Temuan

- Sebagian besar sub kegiatan telah mencapai target kinerja 100%.
- Realisasi keuangan cukup tinggi (77%-100%).
- Pada sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah, terdapat ketidaksesuaian antara capaian kinerja (75%) dengan realisasi keuangan yang hampir habis (99,48%). Hal ini perlu dievaluasi untuk mengetahui penyebab belum tercapainya target output.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
(5.01.02)

Program ini menunjukkan variasi capaian kinerja yang cukup besar.

Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	62,43%	93,78%
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	3,74%	99,61%
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	100%	74,25%

Temuan

- Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah menunjukkan kondisi yang kurang ideal karena capaian kinerja hanya 3,74%, tetapi realisasi anggaran mencapai 99,61%.

- Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan juga menunjukkan capaian kinerja relatif rendah (62,43%) dibandingkan realisasi keuangan yang tinggi (93,78%).
- Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian output kegiatan.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (5.01.03)

Program ini memperlihatkan realisasi keuangan yang cukup baik, namun capaian kinerja masih rendah.

Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan
Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	7,50%	99,70%
Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA	53,57%	86,43%
Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	17,27%	79,31%

Temuan

- Terdapat kesenjangan cukup besar antara capaian kinerja dan realisasi keuangan.
- Sub kegiatan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia hanya mencapai kinerja 7,50%, namun anggaran terserap 99,70%.
- Kondisi ini mengindikasikan bahwa indikator kinerja belum tercapai meskipun anggaran telah digunakan hampir seluruhnya.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (5.05.02)

Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	50%	99,80%

Temuan

- Realisasi keuangan sangat tinggi (99,80%), tetapi capaian kinerja baru mencapai 50%.
- Perlu dilakukan evaluasi terhadap output penelitian, kualitas hasil kajian, dan penyelesaian target kegiatan.

5. Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)

- Tidak terdapat pagu maupun realisasi anggaran.
- Capaian kinerja tercatat 0%.
- Program belum dilaksanakan atau belum dialokasikan anggaran pada tahun berjalan.

Permasalahan Utama

1. Terdapat ketidaksesuaian antara capaian kinerja dan realisasi keuangan pada beberapa kegiatan.
2. Beberapa kegiatan memiliki penyerapan anggaran sangat tinggi (>95%), tetapi capaian kinerja masih rendah bahkan di bawah 10%.
3. Beberapa sub kegiatan belum memperoleh alokasi anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan.
4. Indikator kinerja kemungkinan belum menggambarkan output yang telah dihasilkan atau terdapat keterlambatan pelaporan capaian.

Secara keseluruhan, perangkat daerah berhasil merealisasikan anggaran sebesar 83,78%, yang menunjukkan kinerja penyerapan keuangan cukup baik. Namun, rata-rata capaian kinerja baru mencapai 58,57%, sehingga efektivitas penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan.

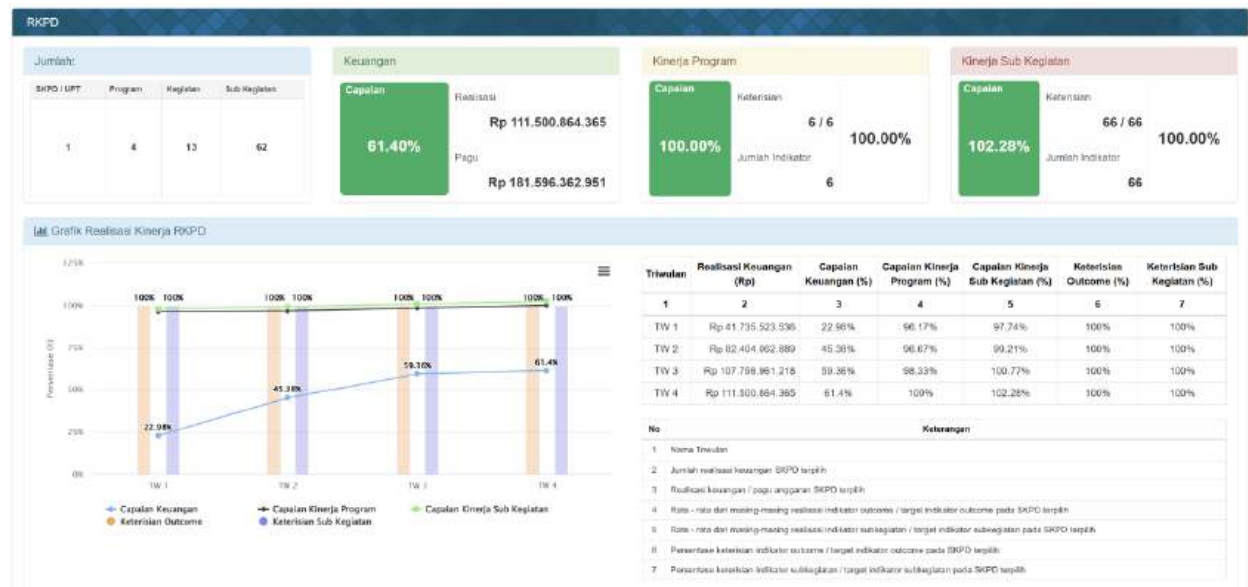
Perhatian khusus perlu diberikan pada:

- Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah.
- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan realisasi keuangan yang tinggi tetapi capaian kinerja relatif rendah, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, indikator kinerja, serta mekanisme monitoring dan

pelaporan agar anggaran yang digunakan dapat menghasilkan output dan outcome yang lebih optimal.

26. BADAN KEUANGAN DAERAH



Pada Tahun Anggaran berjalan, total pagu anggaran sebesar Rp181.596.362.951 dengan realisasi keuangan sebesar Rp111.500.864.365 atau 61,40%. Sementara itu, rata-rata capaian kinerja mencapai 111,04%.

Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, namun tingkat penyerapan anggaran masih tergolong sedang. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan, di mana target kinerja dapat dicapai bahkan melebihi target tanpa harus menghabiskan seluruh alokasi anggaran.

Analisis per Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (5.02.01)

Program ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dengan sebagian besar sub kegiatan mencapai target 100%.

Kegiatan	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	43,32%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	70,88%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75,21%	99,41%

Kegiatan	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	98,55%
Pengadaan Barang Milik Daerah	400%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	92,60%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	57,95%

Temuan

- Capaian kinerja rata-rata sangat baik dan sebagian besar mencapai target.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah mencapai kinerja 400%, menunjukkan output yang dihasilkan jauh melampaui target awal.
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencapai target 100% dengan realisasi anggaran hanya 43,32%, yang menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran.
- Sebaliknya, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki realisasi keuangan sangat tinggi (99,41%) namun capaian kinerja baru 75,21%, sehingga perlu evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (5.02.02)

Program ini merupakan program dengan alokasi anggaran terbesar.

Kegiatan	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	76,92%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	87,50%	99,84%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	142,86%	93,06%

Kegiatan	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	59,46%

Temuan

- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian 142,86% dan realisasi keuangan 93,06%.
- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah memiliki penyerapan anggaran hampir sempurna (99,84%), namun capaian kinerja baru 87,50%.
- Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pagu terbesar yaitu Rp164,48 miliar dengan realisasi 59,46%. Rendahnya penyerapan pada kegiatan ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi rendahnya realisasi keuangan perangkat daerah secara keseluruhan.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (5.02.03)

Kegiatan	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan
Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	91,01%

Temuan

- Program ini menunjukkan kinerja yang baik.
- Target kinerja tercapai sepenuhnya dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi.
- Pelaksanaan program dapat dikategorikan efektif dan efisien.

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (5.02.04)

Kegiatan	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan
Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	84,00%

Temuan

- Target kinerja tercapai sepenuhnya.

- Tingkat realisasi keuangan mencapai 84%, menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan cukup optimal.
- Program ini telah mendukung pencapaian target pendapatan daerah secara efektif.

Faktor Pendukung

1. Sebagian besar kegiatan mencapai target kinerja 100% atau lebih.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang mampu menghasilkan capaian melebihi target dengan penggunaan anggaran yang relatif efisien.
3. Program pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan pendapatan daerah menunjukkan pelaksanaan yang cukup baik.

Faktor yang Perlu Mendapat Perhatian

1. Realisasi keuangan secara keseluruhan masih relatif rendah, yaitu 61,40%.
2. Penyerapan anggaran pada sub kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah baru mencapai 59,46%, padahal memiliki porsi anggaran terbesar.
3. Terdapat beberapa kegiatan dengan realisasi keuangan sangat tinggi tetapi capaian kinerja belum optimal, seperti:
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (75,21%; 99,41%).
 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (87,50%; 99,84%).
4. Perlu dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya serapan anggaran pada kegiatan strategis dengan pagu besar.

Berdasarkan hasil evaluasi, perangkat daerah berhasil mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 111,04%, yang menunjukkan bahwa target kinerja secara umum telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, realisasi keuangan baru mencapai 61,40% dari total pagu anggaran yang tersedia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan secara umum telah berjalan efektif dari sisi pencapaian output, namun masih

diperlukan upaya percepatan penyerapan anggaran terutama pada kegiatan dengan alokasi dana besar, khususnya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, agar keseimbangan antara capaian kinerja dan realisasi keuangan dapat tercapai secara lebih optimal pada akhir tahun anggaran.

27. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Total pagu anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp 6.353.508.253 dengan realisasi keuangan mencapai Rp 4.899.607.580 atau 77,12%. Sementara itu, rata-rata capaian kinerja mencapai 62,96%.

Secara umum, tingkat penyerapan anggaran sudah cukup baik karena telah melampaui 75%, namun capaian kinerja masih berada pada kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian kegiatan telah berjalan sesuai rencana, tetapi masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target kinerja secara optimal.

Analisis per Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (5.03.01)

Program ini merupakan program dengan alokasi anggaran terbesar dalam perangkat daerah.

Kegiatan	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42,86%	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	78,70%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	93,33%	95,17%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77,78%	77,57%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	53,13%	88,43%

Temuan

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian 100% dan realisasi keuangan 78,70%.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah juga menunjukkan pelaksanaan yang efektif dengan capaian kinerja 93,33% dan penyerapan anggaran 95,17%.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah memiliki ketidakseimbangan antara capaian kinerja dan realisasi keuangan. Meskipun anggaran telah terserap 88,43%, capaian kinerja baru mencapai 53,13%.
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah belum memiliki realisasi keuangan meskipun capaian kinerja tercatat 42,86%, yang mengindikasikan adanya pelaksanaan kegiatan yang belum memerlukan penggunaan anggaran atau belum dilakukan pencatatan realisasi keuangan.

2. Program Kepegawaian Daerah (5.03.02)

Program ini bertujuan mendukung pengelolaan dan pengembangan aparatur sipil negara.

Kegiatan	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	66,67%	99,94%
Mutasi dan Promosi ASN	83,33%	80,61%
Pengembangan Kompetensi ASN	50,00%	100,00%
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	77,53%	77,17%

Temuan

- Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN menunjukkan keseimbangan yang cukup baik antara capaian kinerja dan realisasi anggaran.
- Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN memiliki penyerapan anggaran hampir sempurna (99,94%), namun capaian kinerja baru mencapai 66,67%.

- Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN menunjukkan capaian kinerja 50% dengan realisasi anggaran 100%, sehingga perlu evaluasi terhadap pencapaian output atau target yang belum terpenuhi.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (5.04.02)

Kegiatan	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	50,00%	34,25%

Temuan

- Capaian kinerja masih berada pada angka 50%.
- Realisasi keuangan baru mencapai 34,25%.
- Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih berlangsung atau terdapat beberapa tahapan kegiatan yang belum terlaksana sepenuhnya.

Analisis Permasalahan

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain:

1. Ketidaksesuaian antara Kinerja dan Realisasi Keuangan

Terdapat beberapa kegiatan yang menunjukkan realisasi anggaran tinggi namun capaian kinerja masih relatif rendah, seperti:

Kegiatan	Kinerja	Keuangan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	53,13%	88,43%
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	66,67%	99,94%
Pengembangan Kompetensi ASN	50,00%	100,00%

Kondisi ini memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran telah menghasilkan output sesuai target yang ditetapkan.

2. Kegiatan Belum Optimal

Beberapa kegiatan masih memiliki capaian kinerja di bawah 60%, yaitu:

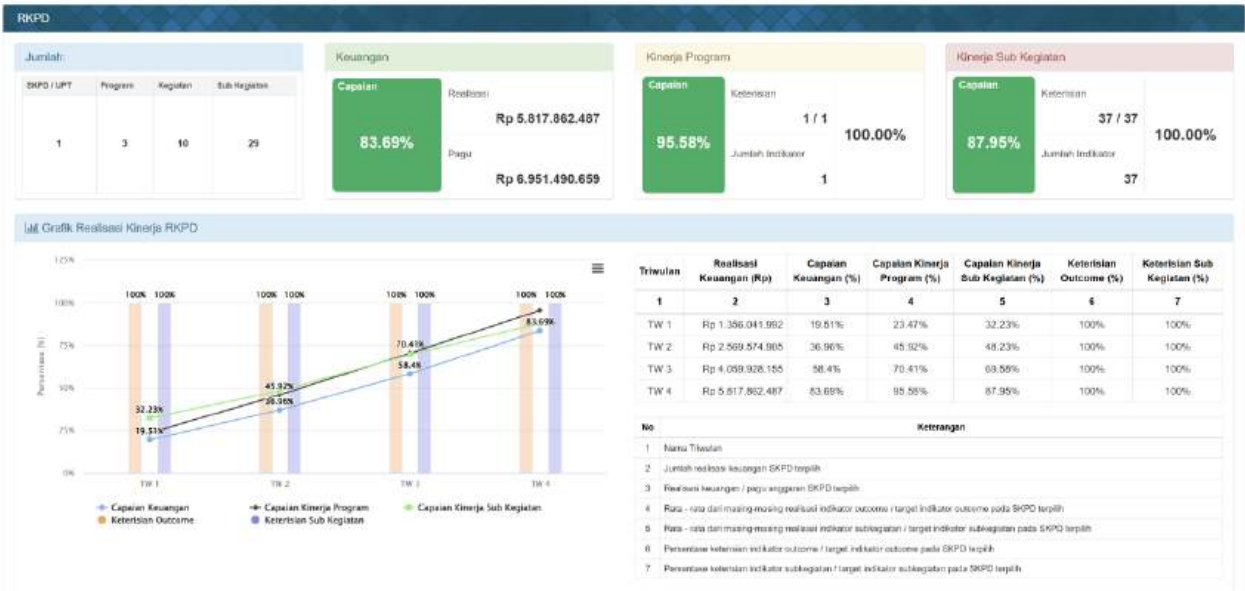
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (42,86%).

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah (53,13%).
- Pengembangan Kompetensi ASN (50,00%).
- Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (50,00%).

Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi keuangan mencapai 77,12% dari total pagu anggaran sebesar Rp6.353.508.253, sedangkan rata-rata capaian kinerja mencapai 62,96%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran telah berjalan cukup baik, namun pencapaian target kinerja masih perlu ditingkatkan.

Beberapa kegiatan telah menunjukkan hasil yang baik, terutama Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, serta Mutasi dan Promosi ASN. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kegiatan yang memperlihatkan ketidakseimbangan antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja, sehingga diperlukan penguatan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar efektivitas penggunaan anggaran dapat lebih optimal serta target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal pada akhir tahun anggaran.

28. INSPEKTORAT DAERAH



Berdasarkan data Evaluasi Hasil RKPD, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki pagu anggaran sebesar Rp 6.951.490.659 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 5.817.862.487 atau 83,69%. Sementara itu, rata-rata capaian kinerja mencapai 83,44%.

Secara umum, capaian kinerja dan realisasi keuangan menunjukkan hasil yang cukup baik karena keduanya berada pada kisaran di atas 80%. Hal

ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan relatif sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara capaian kinerja (83,44%) dan realisasi keuangan (83,69%) juga menunjukkan adanya hubungan yang cukup proporsional antara penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai.

Analisis Kinerja dan Keuangan Secara Umum

Uraian	Nilai
Pagu RKPD	Rp 6.951.490.659
Realisasi Keuangan	Rp 5.817.862.487
Persentase Realisasi Keuangan	83,69%
Rata-rata Capaian Kinerja	83,44%

Interpretasi

- Tingkat penyerapan anggaran sebesar 83,69% menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan.
- Capaian kinerja sebesar 83,44% mengindikasikan target program dan kegiatan secara umum telah tercapai dengan baik.
- Selisih antara capaian kinerja dan realisasi keuangan hanya 0,25%, yang menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan program relatif baik.
- Masih terdapat ruang perbaikan sekitar 16% baik dari aspek kinerja maupun keuangan untuk mencapai target optimal.

Analisis Berdasarkan Program

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan program dengan alokasi anggaran terbesar, yaitu sekitar 92,4% dari total pagu Inspektorat.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja	Keuangan
33,33%	99,50%

Kegiatan ini menunjukkan ketidakseimbangan yang cukup signifikan.

- Realisasi keuangan hampir seluruhnya terserap.
- Namun capaian kinerja hanya mencapai 33,33%.

Hal ini mengindikasikan bahwa:

- Target kinerja belum tercapai secara optimal.
- Pelaksanaan kegiatan belum menghasilkan output sesuai yang direncanakan.
- Perlu evaluasi terhadap indikator kinerja dan mekanisme pelaksanaan kegiatan perencanaan serta evaluasi kinerja.

Kegiatan ini menjadi salah satu titik perhatian utama karena tingkat efektivitasnya relatif rendah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja	Keuangan
129,17%	81,24%

Kegiatan ini menunjukkan kinerja yang sangat baik.

- Target kinerja terlampaui hingga 129,17%.
- Penyerapan anggaran hanya 81,24%.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran karena target berhasil dicapai bahkan melebihi sasaran dengan penggunaan dana yang lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai salah satu kegiatan dengan efektivitas dan efisiensi tertinggi.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kinerja	Keuangan
92,14%	99,97%

Analisis

- Kinerja sangat baik.
- Realisasi keuangan hampir sempurna.
- Menunjukkan bahwa kegiatan administrasi kepegawaian telah berjalan sesuai perencanaan.

Kegiatan ini termasuk kategori efektif karena tingkat pencapaian kinerja mendekati target maksimal.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kinerja	Keuangan
100%	88,19%

Analisis

- Seluruh target kinerja tercapai.
- Realisasi keuangan tidak sampai 100%.

Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sekitar 11,81% tanpa mengurangi capaian target yang telah ditetapkan.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja	Keuangan
100%	75,95%

Analisis

Kegiatan ini menunjukkan efisiensi yang sangat baik.

- Seluruh target tercapai.
- Penyerapan anggaran hanya 75,95%.

Artinya terdapat penghematan anggaran sekitar 24,05% dengan hasil yang tetap maksimal.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja	Keuangan
100%	97,72%

Analisis

- Target kinerja tercapai sepenuhnya.
- Penyerapan anggaran hampir sesuai dengan perencanaan.

Kegiatan ini menunjukkan efektivitas yang baik dan perencanaan anggaran yang cukup akurat.

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini merupakan fungsi utama Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kinerja	Keuangan
84,23%	99,78%

Analisis

- Kinerja tergolong baik.
- Realisasi keuangan hampir sempurna.

Walaupun belum mencapai target maksimal, kegiatan ini telah memberikan hasil yang cukup baik mengingat fungsi pengawasan merupakan tugas inti Inspektorat.

2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Kinerja	Keuangan
35,71%	100%

Analisis

Ini merupakan kegiatan dengan tingkat efektivitas terendah.

- Seluruh anggaran terserap.
- Namun capaian kinerja hanya 35,71%.

Kondisi tersebut mengindikasikan:

- Target pengawasan khusus belum tercapai.
- Kemungkinan terdapat kendala pelaksanaan di lapangan.
- Perlu evaluasi terhadap metode pengawasan, penjadwalan kegiatan, dan indikator kinerja.

Kegiatan ini menjadi prioritas utama untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini menunjukkan performa terbaik dibanding program lainnya.

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Kinerja	Keuangan
100%	100%

Analisis

Seluruh target dan anggaran terealisasi secara sempurna.

Menunjukkan:

- Perencanaan yang baik.
- Pelaksanaan yang efektif.
- Pengendalian kegiatan berjalan optimal.

2. Pendampingan dan Asistensi

Kinerja	Keuangan
100%	100%

Analisis

Merupakan kegiatan yang sangat berhasil.

Seluruh target kinerja tercapai sesuai dengan penggunaan anggaran yang telah direncanakan.

Kegiatan Sangat Efektif dan Efisien

Kegiatan	Kinerja	Keuangan
Administrasi Keuangan	129,17%	81,24%
Administrasi Umum	100%	88,19%
Penyediaan Jasa Penunjang	100%	75,95%
Perumusan Kebijakan Teknis	100%	100%
Pendampingan dan Asistensi	100%	100%

Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan hasil yang optimal dengan penggunaan anggaran yang terkendali.

Kegiatan yang Memerlukan Perhatian

Kegiatan	Kinerja	Keuangan
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	33,33%	99,50%
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	35,71%	100%

Kedua kegiatan ini menunjukkan ketidakseimbangan antara output yang dihasilkan dan besarnya anggaran yang telah digunakan.

Faktor Pendukung dan Hambatan

Faktor Pendukung

1. Dukungan anggaran yang cukup memadai.
2. Pelaksanaan administrasi organisasi berjalan baik.
3. Fungsi pendampingan dan asistensi terlaksana secara optimal.
4. Koordinasi internal organisasi relatif efektif.

Faktor Hambatan

1. Beberapa kegiatan pengawasan belum mencapai target yang ditetapkan.
2. Efektivitas kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja masih rendah.
3. Terdapat kegiatan yang menyerap anggaran tinggi tetapi belum menghasilkan capaian kinerja yang optimal.
4. Kemungkinan adanya kendala teknis dalam pelaksanaan pengawasan khusus.

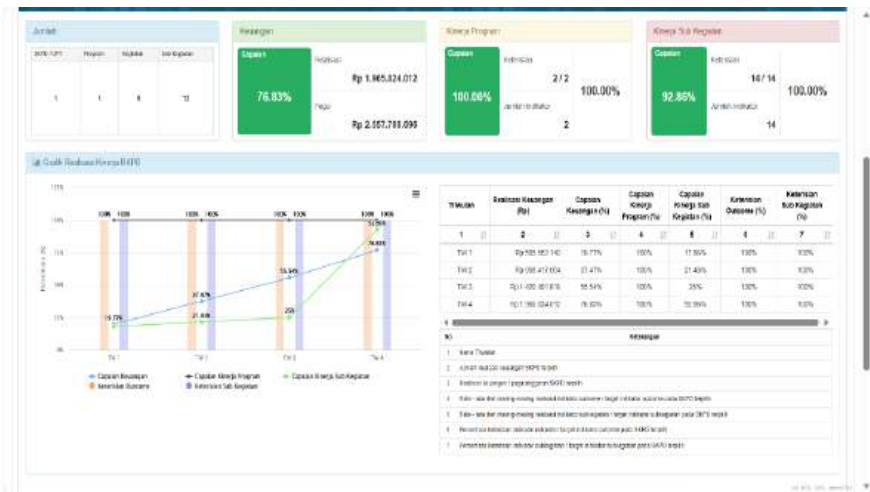
Kesimpulan

1. Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah secara umum berada pada kategori baik, dengan capaian kinerja 83,44% dan realisasi keuangan 83,69%.
2. Terdapat kesesuaian yang cukup baik antara capaian kinerja dan penyerapan anggaran, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan program secara keseluruhan.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi merupakan program dengan kinerja terbaik, karena seluruh target dan anggaran terealisasi 100%.
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah menjadi kegiatan paling efisien, dengan capaian kinerja 129,17% namun hanya menggunakan 81,24% anggaran.
5. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu menjadi kegiatan yang memerlukan perhatian khusus, karena capaian kinerjanya masih rendah meskipun anggaran hampir seluruhnya telah terserap.

6. Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dinilai cukup efektif, efisien, dan mendukung pencapaian tujuan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun tetap diperlukan penguatan pada aspek perencanaan, monitoring, dan evaluasi agar capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih optimal.

"Secara umum, kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan hasil yang baik dengan capaian kinerja sebesar 83,44% dan realisasi keuangan sebesar 83,69%. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah terlaksana sesuai perencanaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang memerlukan perhatian khusus karena belum optimalnya capaian kinerja dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya."

29. KECAMATAN PONDOK KELAPA



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja kecamatan pondok kelapa kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mecapai 1.965.024.012 atau sebesar 76,83 % dari total pagu Rp2.557.788.696 dengan status sesuai target triwulan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Pondok Kelapa telah berjalan cukup baik, terutama pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

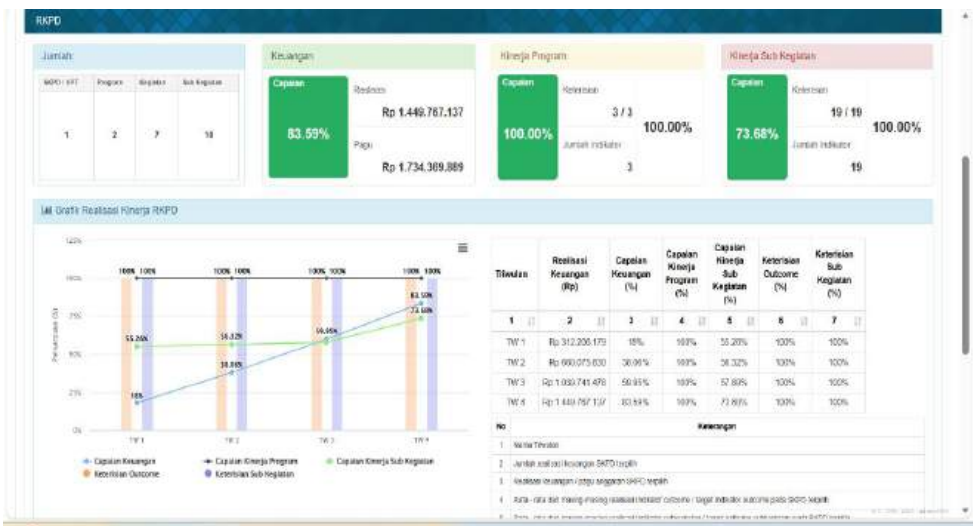
Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 1
 - Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 1
 - SubKegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 1
2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 93%.
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 100%
 - Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian 100%
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 85%
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 %
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100%
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100%
 - Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100%
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 100%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100%
 - Fasilitas Kunjungan Tamu 100%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100%
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100%
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100%
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100%
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100%
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang melebihi target kinerja hasil :
 - Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil :
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 200%
 - Sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 200%
4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan .
- Faktor Pendorong
 - Telah dilaksanakannya perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dan tidak mengalami banyak perubahan dari tahun sebelumnya , Konsistensi dalam melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
 - Adanya koordinasi yang baik antara kecamatan, perangkat desa dan perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut.

- Kesiadaan anggaran yang memadai serta partisipasi Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
- Faktor Penghambat
 - Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik serta adanya kendala teknis di lapangan yang menyebabkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
Tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- 5. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan pada kecamatan pondok kelapa Adalah dengan memenuhi sarana dan prasarana pendukung pelayanan public.

30. KECAMATAN PAGAR JATI



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja kecamatan pagar jati kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mecapai 1.449.767.137 atau sebesar 83,59 % dari total pagu Rp 1.734.369.889 dengan status sesuai target triwulan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Pagar Jati telah berjalan cukup baik, terutama pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

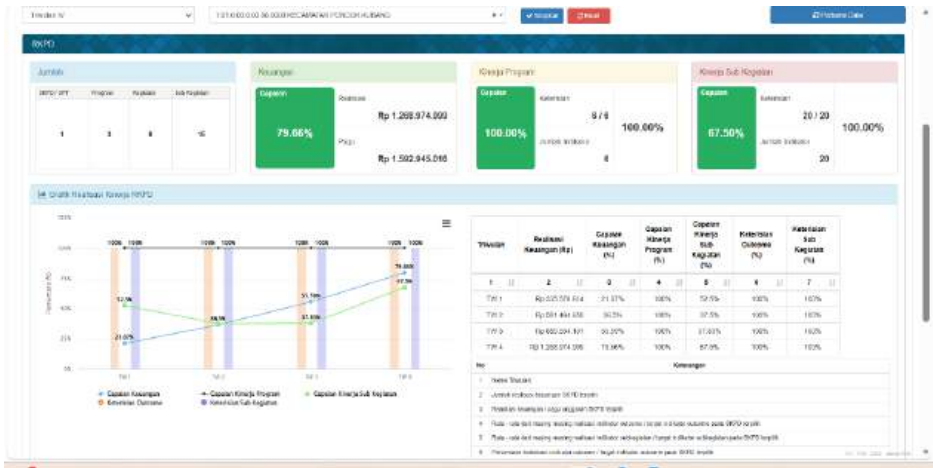
- Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 0
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50%
 - SubKegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0
2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 78%.
 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100%
 - Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian 100%
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 71%
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100%
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100%
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100%
 - Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100%
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 100%

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100%
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100%
 - Fasilitas Kunjungan Tamu 100%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100%
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100%
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100%
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100%
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100%
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 100%
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 100%
 - asilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 100%
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Tidak ada Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan untuk tahun anggaran 2025 pada Kecamatan Pagar Jati .
4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan .
- Faktor Pendorong
 - Capaian kinerja Kecamatan Pagar Jati hingga Triwulan IV Tahun 2025 didukung oleh komitmen dan koordinasi yang baik.
 - adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan membantu memastikan bahwa sebagian besar target program dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan
 - Faktor Penghambat

adanya perubahan kebutuhan dan kondisi di lapangan yang menyebabkan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga beberapa target belum dapat dicapai secara optimal pada tahun berjalan.

- 5. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan pada kecamatan pondok kelapa Adalah dengan memenuhi kebutuhan dan kondisi di lapangan yang menyebabkan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai.

31. KECAMATAN PONDOK KUBANG



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja kecamatan Pondok Kubang kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mecapai Rp. 1.268.974.999 atau sebesar 79,66 % dari total pagu Rp 1.592.945.016 dengan status sesuai target triwulan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Pondok Kubang telah berjalan cukup baik, terutama pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- 1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 69%
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 0
 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 0
 - Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :

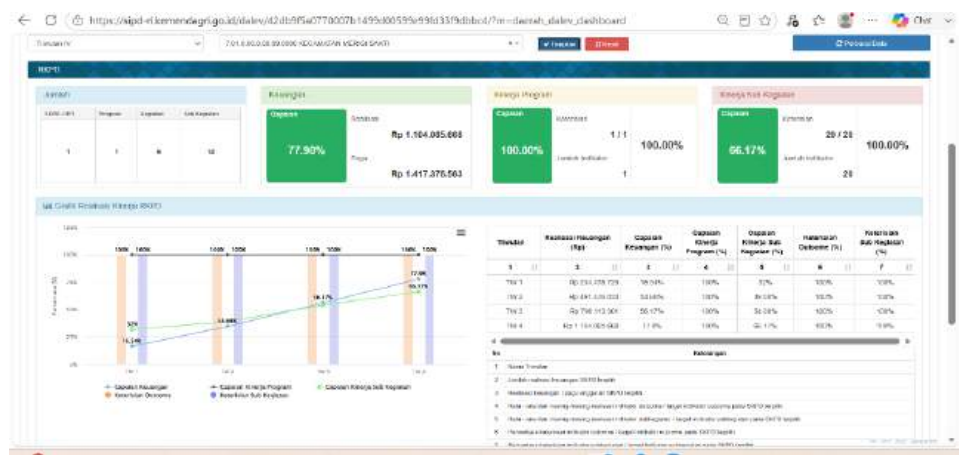
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 46%
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33%
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 0
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 0
 - SubKegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 50%
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0
2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100%.
 - Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian 100%
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 78%
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100%
 - Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 93%
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100%

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 100%
 - Fasilitas Kunjungan Tamu 100%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100%
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100%
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100%
 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 100%
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang melebihi target kinerja hasil :
 - Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil :
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 106%
 - SubKegiatan yang melebihi target kinerja hasil :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 106%
4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan .
- Faktor Pendorong
 - Adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Pondok Kubang.
 - adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan membantu memastikan bahwa sebagian besar target program dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan
 - Faktor Penghambat

adanya perubahan kebutuhan dan kondisi di lapangan yang menyebabkan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga beberapa target belum dapat dicapai secara optimal pada tahun berjalan.

5. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan pada kecamatan pondok kelapa Adalah dengan memenuhi kebutuhan dan kondisi di lapangan yang menyebabkan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai.

32. KECAMATAN MERIGI SAKTI



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja kecamatan pagar jati kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mencapai Rp. 1.104.065.668 atau sebesar 77,90 % dari total pagu Rp 1.417.376.563 dengan status sesuai target triwulan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Merigi Sakti telah berjalan cukup baik, terutama pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

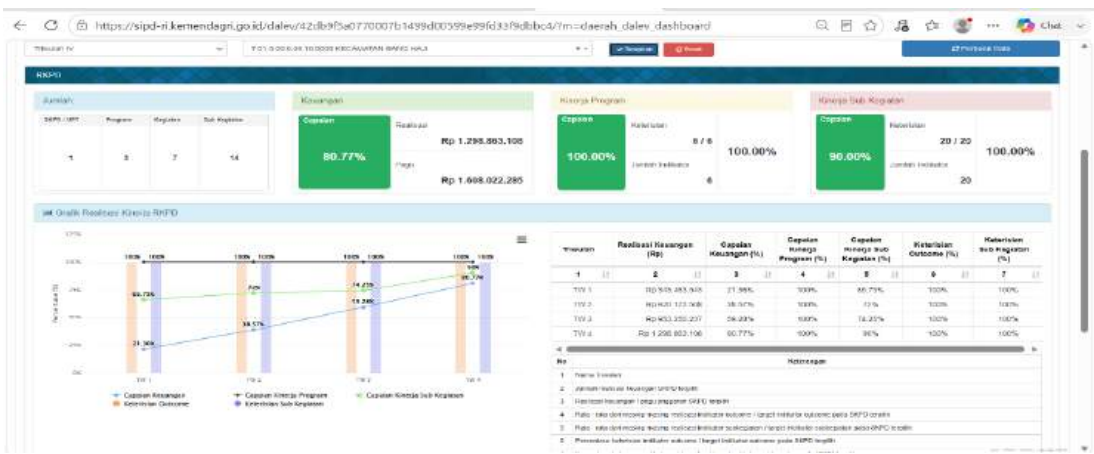
1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 69%
 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 25%
 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6%
 - Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8%
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50%
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44%

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66%
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 25%
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 6%
 - SubKegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8%
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25%
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 25%
 - asilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6%
2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80%
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 91%
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 %
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 99%
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100%
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 84%
 - Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 100%

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100%
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 100%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100%
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100%
 - Fasilitas Kunjungan Tamu 100%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100%
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100%
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100%
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 100%
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Tidak ada Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan untuk tahun anggaran 2025 pada Kecamatan Merigi Sakti .
4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan .
- Faktor Pendorong
 - Konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan sehingga sebagian besar program dan sub kegiatan dapat mencapai target kinerja 100%.
 - Komitmen perangkat kecamatan dalam pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Faktor Penghambat

Pencairan anggaran tidak sesuai jadwal dalam RKA/DPA Perubahan, sehingga pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dan berdampak pada capaian kinerja.
5. Mempercepat proses administrasi dan pencairan anggaran agar pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

33. KECAMATAN BANG HAJI



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja kecamatan Bang Haji kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mencapai 1.298.863.108 atau sebesar 80,77 % dari total pagu Rp 1.608.022.285 dengan status sesuai target triwulan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Bang Haji telah berjalan cukup baik, terutama pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0%
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50
 - SubKegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
 - Pengadaan Mebel 0
 - Pemeliharaan Mebel 0

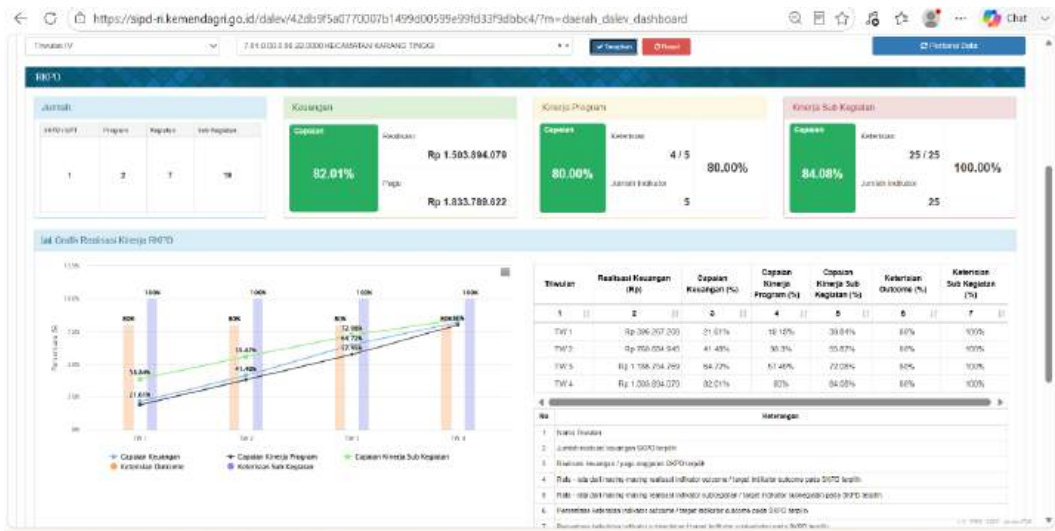
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
- 2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 85%
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 100%
 - Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 100%
 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100%
 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100%
 - Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100%
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100%
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100%
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah 100%
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100%
 - Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100%
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 100%
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 100%
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 100%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100%
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100%
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100%

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100%
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100%
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya 100%
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 100%
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 100%
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 100%
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 100%
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang melebihi target kinerja hasil:
 - Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 128%
 - Subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil :
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 400%
4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan .
- Faktor Pendorong
 - Perencanaan program dan kegiatan telah disusun secara sistematis serta selaras dengan target kinerja tahunan.
 - Sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik sehingga sebagian besar target dapat tercapai.
 - Faktor Penghambat

Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan beberapa sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai target yang telah direncanakan.

5. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan pada kecamatan pondok kelapa Adalah menetapkan **target kinerja dan target anggaran per triwulan** yang lebih rinci dan terukur agar pelaksanaan kegiatan dapat dipantau secara lebih efektif

34. KECAMATAN KARANG TINGGI



- Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja kecamatan pagar jati kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mecapai 1.503.894.079 atau sebesar 82,01 % dari total pagu Rp 1.833.789.622 dengan status sesuai target triwulan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Karang Tinggi telah berjalan cukup baik, terutama pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 0
 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 0
 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0
 - Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15%
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 0

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 0
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 0
- SubKegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 50%
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 5%
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25%
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 0
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5%
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33%
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0
- 2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 95 %.
 - Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian 90%
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 76%
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77 %
 - Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 100%
 - koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 100%
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100%
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang melebihi target kinerja hasil :
 - Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil :
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 125%
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 201%
 - SubKegiatan yang melebihi target kinerja hasil :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 150%
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 400%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 300%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 300%
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200%
4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan .
- Faktor Pendorong

Capaian kinerja Kecamatan Karang Tinggi sampai Triwulan IV Tahun 2025 didukung oleh komitmen perangkat kecamatan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang berhasil mencapai target kinerja 100%, seperti Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, serta Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Selain itu, koordinasi yang baik antara kecamatan, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya turut mendukung kelancaran pelaksanaan program sehingga sebagian

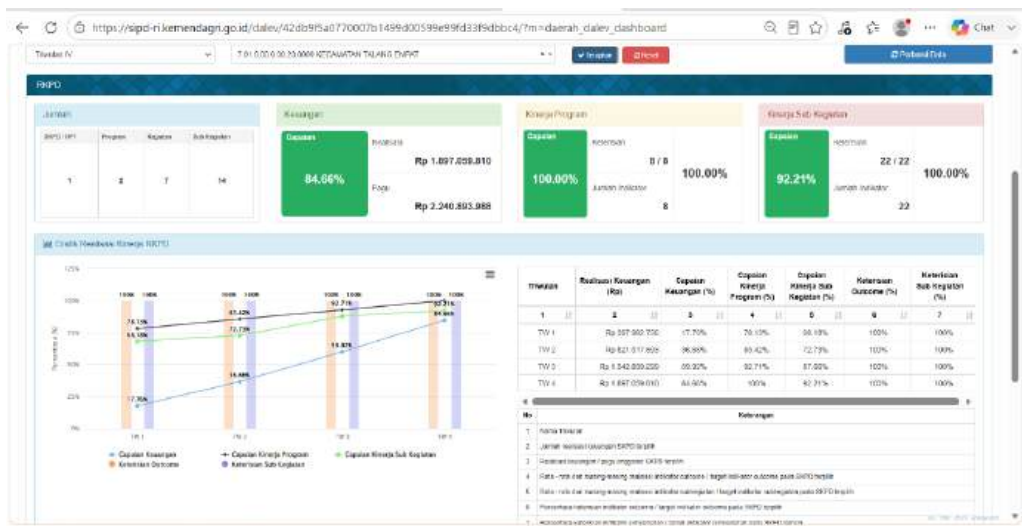
besar target kinerja dapat tercapai dengan baik. Kemampuan pengelolaan administrasi dan keuangan yang cukup efektif juga menjadi faktor pendorong dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi..

- **Faktor Penghambat**

Meskipun secara umum capaian kinerja tergolong baik, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Beberapa sub kegiatan menunjukkan capaian kinerja dan realisasi keuangan yang belum maksimal, seperti Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang belum memiliki realisasi anggaran sehingga kontribusinya terhadap pencapaian program belum optimal. Keterbatasan sumber daya, penyesuaian prioritas kegiatan selama tahun berjalan, serta belum optimalnya pelaksanaan beberapa kegiatan juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat serapan anggaran dan capaian kinerja secara keseluruhan.

5. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk Kecamatan Karang Tinggi akan memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan target yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara berkala, khususnya terhadap kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah, sehingga kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah desa dan perangkat daerah terkait akan terus ditingkatkan guna mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Evaluasi terhadap kegiatan yang belum terealisasi juga akan dilakukan sebagai dasar penyempurnaan program dan penganggaran pada tahun berikutnya, sehingga capaian kinerja dan realisasi keuangan dapat lebih optimal.

35. KECAMATAN TALANG EMPAT



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja kecamatan Talang Empat kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mecapai 1.897.059.810 atau sebesar 84,66 % dari total pagu Rp 2.240.893.988 dengan status sesuai target triwulan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Talang Empat telah berjalan cukup baik, terutama pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50%
 - SubKegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0
2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 84,60 %.
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 100%

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 100%
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100%
- Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian 100%
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 85%
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100%
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%
 - penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Perangkat Daerah Kecamatan Lainnya 100%
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100%
 - asilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100%
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100%
- Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 100%
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 100%
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100%
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100%
 - Fasilitas Kunjungan Tamu 100%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100%
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100%
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100%
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100%

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100%
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100%
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100%
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 100%
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 100%
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 100%
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang melebihi target kinerja hasil :
 -
 - Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil :
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 114%
 - SubKegiatan yang melebihi target kinerja hasil :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 128%
4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan .
- Faktor Pendorong

Capaian kinerja Kecamatan Talang Empat sampai Triwulan IV Tahun 2025 didukung oleh komitmen perangkat kecamatan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang berhasil mencapai target kinerja 100%, seperti Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, serta Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Selain itu, koordinasi yang baik antara kecamatan, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya turut mendukung kelancaran pelaksanaan program sehingga sebagian besar target kinerja dapat tercapai dengan baik. Kemampuan pengelolaan administrasi dan keuangan yang cukup efektif juga

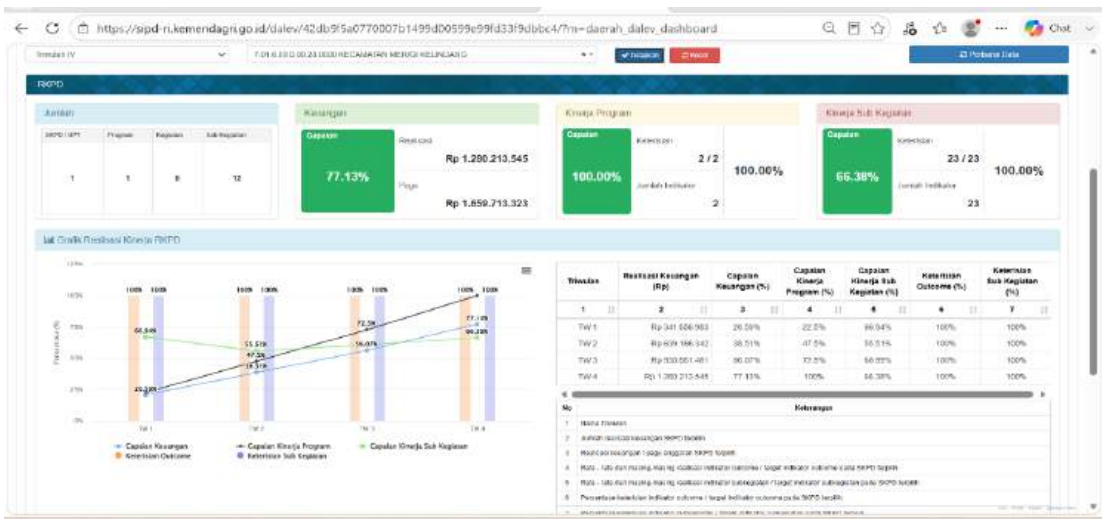
menjadi faktor pendorong dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi..

- **Faktor Penghambat**

Meskipun secara umum capaian kinerja tergolong baik, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Beberapa sub kegiatan menunjukkan capaian kinerja dan realisasi keuangan yang belum maksimal, seperti Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang belum memiliki realisasi anggaran sehingga kontribusinya terhadap pencapaian program belum optimal. Keterbatasan sumber daya, penyesuaian prioritas kegiatan selama tahun berjalan, serta belum optimalnya pelaksanaan beberapa kegiatan juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat serapan anggaran dan capaian kinerja secara keseluruhan.

5. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk Kecamatan Talang Empat akan memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan target yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara berkala, khususnya terhadap kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah, sehingga kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah desa dan perangkat daerah terkait akan terus ditingkatkan guna mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Evaluasi terhadap kegiatan yang belum terealisasi juga akan dilakukan sebagai dasar penyempurnaan program dan penganggaran pada tahun berikutnya, sehingga capaian kinerja dan realisasi keuangan dapat lebih optimal.

36. KECAMATAN MERIGI KELINDANG



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja kecamatan merigi kelindang kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mencapai 1.280.213.545 atau sebesar 77,13 % dari total pagu Rp1.659.713.323 dengan status sesuai target triwulan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Merigi Kelindang telah berjalan cukup baik, terutama pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

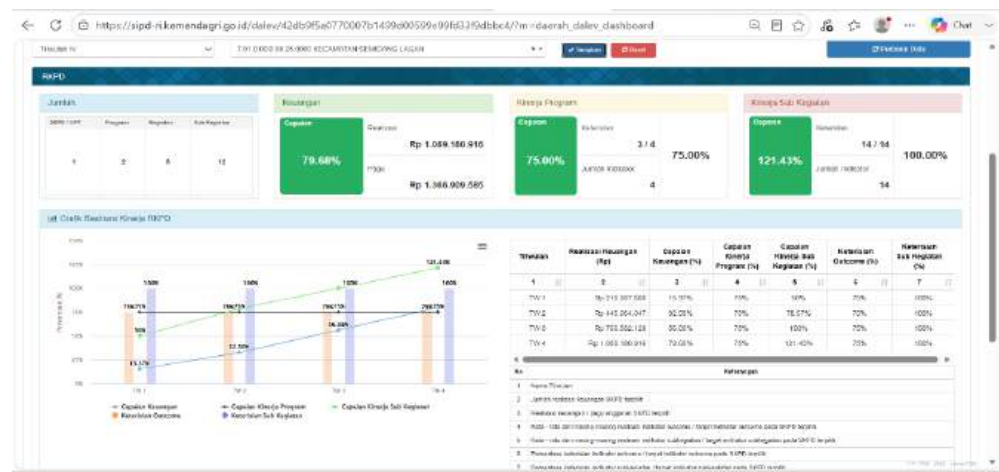
1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 62%
 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 20%
 - Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33%
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51%
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50%

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 20%
- SubKegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 0
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 20%
- 2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 80%
 - Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100%
 - koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100%
 - oordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD 100%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100%
 - Fasilitas Kunjungan Tamu 100%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100%

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100%
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100%
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang melebihi target kinerja hasil:
 - Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 200%
 - Subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 400%
4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan .
- Faktor Pendorong
 - Komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pemerintahan kecamatan.
 - Konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.
 - Faktor Penghambat

Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan beberapa sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai target yang telah direncanakan.
5. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan pada kecamatan pondok kelapa Adalah Mengoptimalkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang belum terealisasi.dan Menyusun strategi percepatan pelaksanaan kegiatan yang memiliki capaian kinerja rendah.

37. KECAMATAN SEMIDANG LAGAN



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja kecamatan Semidang Lagan kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mencapai 1.089.180.916 atau sebesar 79,68% dari total pagu Rp 1.366.909.585 dengan status sesuai target triwulan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Semidang Lagani telah berjalan cukup baik, terutama pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

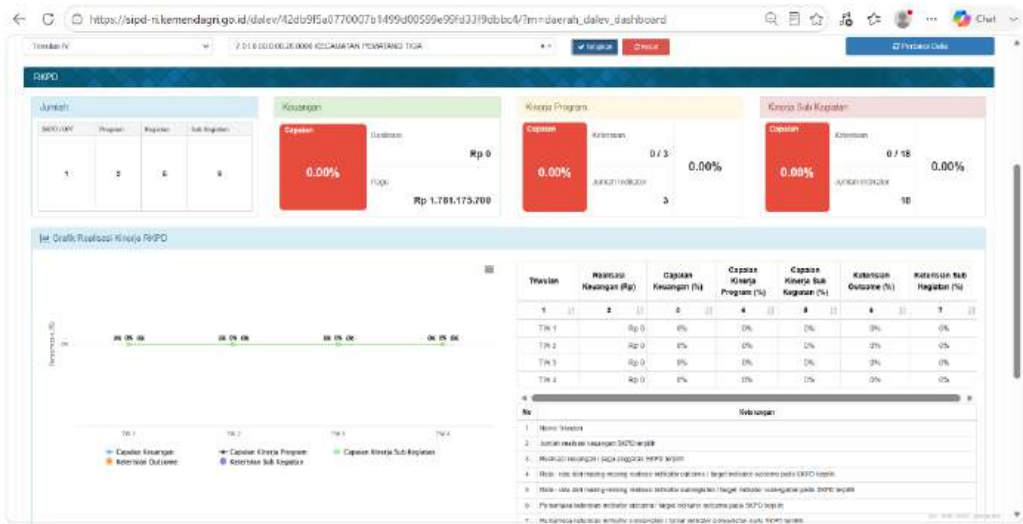
1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 0
 - Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50%
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 50 %
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66%
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 0

- SubKegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0
 - Fasilitas Kunjungan Tamu 0
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0
- 2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 100%
 - Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100%
 - Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 100%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100%
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 100%
- 3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang melebihi target kinerja hasil:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 106%
 - Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1000%
 - Subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1000%
4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan .
- Faktor Pendorong
 - Sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik sehingga sebagian besar target dapat tercapai.
 - Faktor Penghambat

Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan beberapa sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai target yang telah direncanakan.
5. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan pada kecamatan pondok kelapa Adalah menetapkan target kinerja dan target anggaran per triwulan yang lebih rinci dan terukur agar pelaksanaan kegiatan dapat dipantau secara lebih efektif

38. KECAMATAN PEMATANG TIGA



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja kecamatan Pematang Tiga kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mencapai 1.298.863.108 atau sebesar

80,77 % dari total pagu Rp 1.608.022.285 dengan status sesuai target triwulan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Pematang Tiga telah berjalan cukup baik, terutama pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

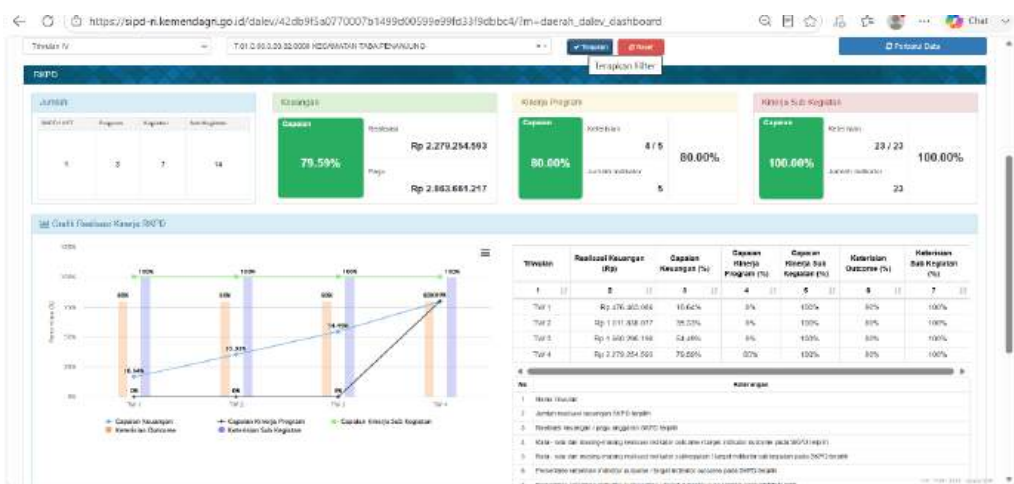
1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

- Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 0
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 0
 - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 0
 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 0
- Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 0
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 0
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 0
- SubKegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 0
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0
 - Fasilitas Kunjungan Tamu 0
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0
2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang melebihi target kinerja hasil:
 - Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 - Subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil :
4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan .
- Faktor Pendorong

- Perencanaan program dan kegiatan telah disusun secara sistematis berdasarkan kebutuhan organisasi serta mengacu pada target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.
- Faktor Penghambat
 - Belum optimalnya pemantauan capaian kinerja secara periodik pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan sehingga diperlukan penguatan pengendalian internal.
- 5. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan pada kecamatan pondok kelapa Adalah Melakukan penyusunan target kinerja dan target anggaran secara lebih rinci per triwulan agar pelaksanaan kegiatan dapat dipantau dan dikendalikan secara efektif.

39. KECAMATAN TABA PENANJUNG



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja kecamatan Taba Penanjung kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mencapai 2.279.254.593 atau sebesar 79,59 % dari total pagu Rp 2.863.661.217 dengan status sesuai target triwulan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Taba Penanjung telah berjalan cukup baik, terutama pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :

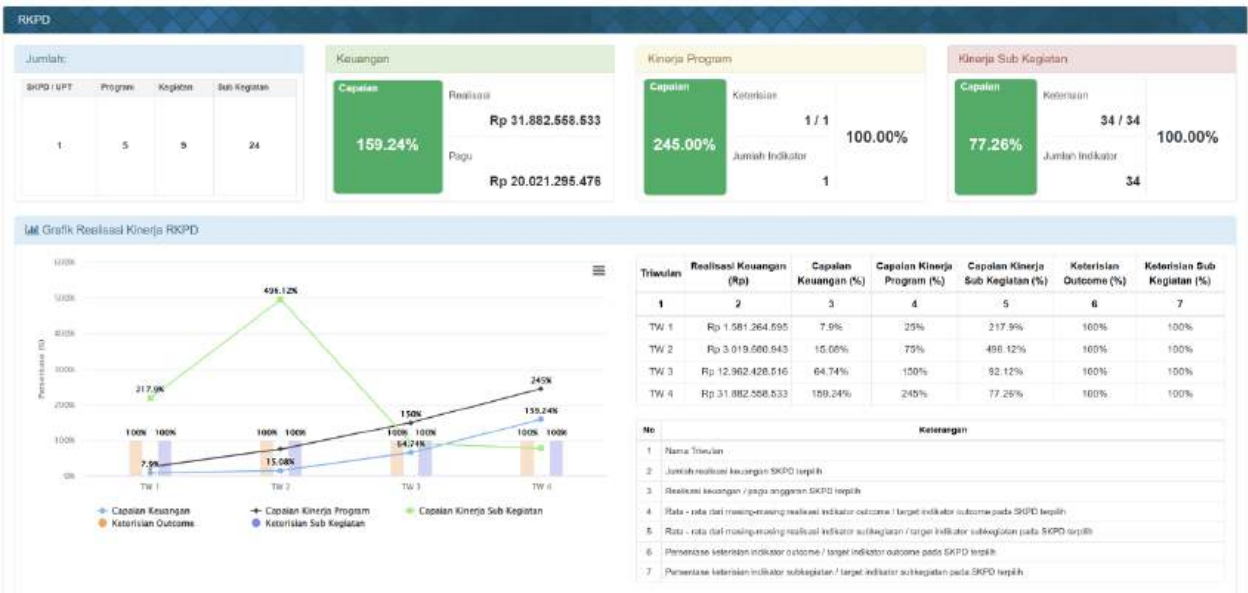
- Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - SubKegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100%
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 100%
 - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 100%
 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100%
 - Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100%
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100%
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 100%
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100%
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100%
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100%
 - Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100%
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 100%
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100%

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100%
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 100%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100%
 - Fasilitas Kunjungan Tamu 100%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100%
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100%
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100%
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100%
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 100%
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 100%
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 100%
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang melebihi target kinerja hasil:
 - Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 - Subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil :
4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan .
- Faktor Pendorong
 - Adanya koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan pihak terkait dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan.
 - Komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
 - Faktor Penghambat

Keterbatasan ketersediaan anggaran pada beberapa sub kegiatan yang menyebabkan realisasi keuangan belum mencapai target.

5. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan pada kecamatan pondok kelapa Adalah Mengoptimalkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam proses pengadaan dan pengelolaan anggaran.

40. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 secara umum realisasi keuangan mencapai Rp. 31.882.558.533 atau sebesar 159,24 % dari total pagu Rp. 20.021.295.476 dengan status sesuai target triwulan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik telah berjalan cukup baik, terutama pada Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Dan Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 67,85 %

- Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan capaian 62,5 %
 - Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, dengan capaian 33,33 %
 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan capaian 61,67 %
- Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian 3,57%
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian 0%
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 13,33%
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 62,5%
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 33,33 %
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan capaian 61,67%
 - Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil :
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan capaian 0%
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan capaian 0%
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian 0%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan capaian 0%

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian 0%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian 25 %
- Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan capaian 0%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan capaian 0%
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan capaian 0%
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan capaian 0%
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian 16,67%
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian 0%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan capaian 40%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan capaian 0%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan capaian 0%
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, dengan capaian 0%
- Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka, dengan capaian 0%
- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan capaian 0%
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan capaian 0%

- Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan capaian 0%
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan capaian 0%
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan capaian 30%
 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 16,67%
2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, dengan capaian 100%
 - Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan capaian 100%
 - Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian 75%
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan capaian 100%
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan capaian 100%
 - Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan capaian 100%

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan capaian 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan capaian 100%
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, dengan capaian 100%
 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, dengan capaian 100%
 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan capaian 100%
 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan capaian 100%
 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan capaian 100%
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Program yang melebihi target kinerja hasil:
 -
 - Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 311,11%
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 204,17%

- Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian 311,11%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan capaian 800%
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, dengan capaian 200%
 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, dengan capaian 200%
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 187,5%
- 4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan .
 - Faktor Pendorong
 - Optimalnya pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, khususnya pada kegiatan administrasi keuangan, administrasi umum, dan penyediaan jasa penunjang yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah dengan tingkat realisasi anggaran yang cukup tinggi.
 - Terlaksananya koordinasi dan sinergi yang baik dengan instansi vertikal, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, partai politik, serta unsur masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Kesbangpol.
 - Tingginya capaian pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, terutama kegiatan koordinasi serta pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga yang melampaui target kinerja yang ditetapkan.
 - Faktor Penghambat
 - Masih terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang belum terlaksana atau belum mencapai target kinerja, seperti pengadaan

pakaian dinas, bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, pengadaan peralatan dan mesin, serta beberapa kegiatan pembinaan kepaskibrakaan.

- Beberapa indikator pada program pendidikan politik, ketahanan ekonomi sosial budaya, dan kewaspadaan nasional belum mencapai target karena keterbatasan pelaksanaan kegiatan dan jumlah peserta yang terlibat.
- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas sektor dan keterlibatan banyak pihak sehingga mempengaruhi capaian kinerja pada beberapa indikator.
- Adanya keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja yang cukup tinggi sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai target yang direncanakan.
- Proses administrasi, pengadaan barang/jasa, serta penyesuaian jadwal kegiatan menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat direalisasikan atau mengalami keterlambatan pelaksanaan.
- Perubahan prioritas kebijakan dan kebutuhan daerah selama tahun berjalan menyebabkan sebagian kegiatan mengalami penyesuaian pelaksanaan sehingga target kinerja belum dapat dicapai secara optimal.
- Masih terdapat kegiatan pemeliharaan sarana prasarana, pengadaan barang milik daerah, serta pelaksanaan kebijakan pada beberapa bidang yang belum terealisasi sehingga berdampak pada rendahnya capaian kinerja kegiatan terkait

5. Rekomendasi Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten adalah mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang belum mencapai target melalui peningkatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, percepatan penyelesaian kegiatan yang tertunda, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran dan peningkatan partisipasi masyarakat agar target kinerja dan realisasi program dapat tercapai secara lebih efektif.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Perumusan isu strategis yang relevan dan berdampak nyata, perlu keterkaitan antara potensi dan permasalahan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan isu-isu lingkungan dinamis (KLHS, Global, Nasional dan Provinsi Bengkulu). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi tolok ukur dalam isu-isu lingkungan hidup, serta memperhatikan dinamika isu global, nasional, dan provinsi Bengkulu, guna memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya adaptif terhadap tantangan eksternal, tetapi juga berkelanjutan dan berakar pada kekuatan lokal. Perumusan isu strategis yang kontekstual dan terarah, penting untuk memahami keterkaitan antara potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, serta dinamika isu lingkungan pada berbagai level mulai dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), hingga isu global, nasional, dan Provinsi Bengkulu.

1. Kurangnya Kualitas dan Pemeliharaan Infrastruktur serta Konektivitas yang Optimal untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Isu strategis yang muncul dari kondisi ini adalah perlunya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur serta pengembangan sistem transportasi publik yang terjangkau, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pengembangan ini bukan hanya akan mempermudah aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, tetapi juga menurunkan beban ekonomi rumah tangga dan membuka peluang investasi di sektor jasa transportasi dan logistik. Di sisi lain, penerapan moda transportasi berbasis energi bersih seperti bus listrik atau kendaraan rendah emisi sejalan dengan tren global pembangunan hijau dan agenda perubahan iklim.

Kemitraan dengan sektor swasta melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP), kerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan lembaga internasional untuk mendapatkan bantuan teknis dan pendanaan hijau, serta edukasi public tentang pentingnya beralih ke transportasi umum, merupakan langkah-langkah penting untuk mewujudkan sistem konektivitas yang inklusif dan modern. Pembenahan infrastruktur dan pengoptimalan peran sebagai penyangga Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya dalam sistem wilayah provinsi, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.

2. Terbatasnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, serta Teknologi dalam Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing

Data sektor pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah stagnan dan masih berada di bawah target nasional. Harapan lama sekolah juga menunjukkan peningkatan yang sangat lambat dalam lima tahun terakhir. Keterbatasan jumlah dan distribusi guru berkualitas, serta masih minimnya fasilitas sekolah di wilayah terpencil, menjadi kendala utama dalam peningkatan mutu pendidikan secara merata.

Di bidang kesehatan, meskipun terjadi penurunan angka stunting secara bertahap, namun persentase balita gizi buruk dan rendahnya indeks keluarga sehat menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, terutama di desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi. Selain itu, rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk masih di bawah standar, dan fasilitas kesehatan di beberapa kecamatan masih belum memadai dalam memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas. Hal ini diperburuk oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan rujukan yang terbatas.

Aspek teknologi dan digitalisasi, meskipun akses jaringan internet telah menjangkau sebagian besar wilayah kecamatan, namun pemanfaatannya untuk pendidikan, layanan publik, dan produktivitas ekonomi masih terbatas. Literasi digital masyarakat terutama di kalangan UMKM, pelajar, dan perangkat desa masih rendah, dan belum ada ekosistem inovasi teknologi yang dapat mendorong digitalisasi layanan pemerintahan maupun ekonomi lokal secara signifikan.

3. Kurangnya Daya Saing SDM dan Perlunya Peningkatan Kualitas untuk Menghadapai Perkembangan Industri dan Teknologi

Rendahnya kompetensi dan keterampilan kerja juga menjadi persoalan utama dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Sebagian besar angkatan kerja hanya berpendidikan sampai jenjang sekolah menengah pertama atau setara, dan sangat terbatas yang memiliki sertifikasi keahlian atau pernah mengikuti pelatihan kerja formal. Ini menyebabkan tenaga kerja lokal sulit bersaing, baik di pasar kerja regional maupun dalam menghadapi masuknya tenaga kerja dari luar daerah yang lebih terampil.

Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan infrastruktur pelatihan vokasi dan minimnya kolaborasi antara lembaga pendidikan dan dunia industri. Padahal, potensi wilayah Bengkulu Tengah sebagai hinterland Kota Bengkulu dan kawasan pengembangan industri membuka peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja lokal yang lebih produktif apabila kualitas SDM dapat ditingkatkan secara sistematis.

Untuk menjawab permasalahan ini, perlu didorong upaya peningkatan sumber daya manusia yang produktif dan adaptif terhadap perkembangan industri dan teknologi. Langkah strategis yang dapat dilakukan mencakup penguatan pendidikan vokasi yang berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), peningkatan akses pelatihan

kerja berbasis kompetensi, serta penyediaan inkubasi kewirausahaan bagi pemuda dan perempuan. Pemerintah daerah juga perlu memperluas kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK), perguruan tinggi, dan pelaku industri untuk mendorong link and match dunia pendidikan dan dunia kerja.

4. Perlunya Peningkatan DIversifikasi Ekonomi dan Daya Tarik Investasi dalam Mendukung Pertumbuhan Dan Kesejahteraan Daerah
5. Belum Optimalnya Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal, Budaya, Dan Religuitas Dalam Keidupan Msyarakat Yang Berdampak Pada Melemahnya Indentitas Dan Kohesi Sosial Daerah

BAB III

KERANGKA EKONOMI PEMERINTAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Proyeksi dan arah pembangunan ekonomi Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2027 tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi global dan nasional. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah merupakan pedoman guna mengembangkan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program-program prioritas dan kegiatan pembangunan, yang menggambarkan kondisi dan analisis perekonomian daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah 2025-2029 Tema yang diusung pada tahun 2027 adalah “*Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik dan Digitalisasi Sektor Strategis*”. Sedangkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 berfokus pada:

1. Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung mobilitas dan konektivitas wilayah.
2. Penguatan akses dan mutu pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur telekomunikasi.
3. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi.
4. Meningkatkan kesadaran budaya dan kearifan lokal melalui pendidikan dan festival budaya.
5. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan investasi dan pengembangan sektor unggulan berbasis potensi daerah.
7. Memastikan Keberlanjutan lingkungan dengan tata ruang berbasis daya dukung dan mitigasi bencana.

Pada tahun 2027 diharapkan kondisi perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah dapat semakin membaik, berdasarkan kondisi perekonomian saat ini dan memperhatikan tantangan dan peluang, maka perkembangan indikator makro Kabupaten Bengkulu Tengah pada Tahun Kerangka Ekonomi Pemerintah Dan Keuangan Daerah

2024-2025 dan proyeksi indikator makro Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024-2025

No	INDIKATOR	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025 (Provinsi Bengkulu)	Tahun 2025 (Nasional)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persen (%)	3,97	4,01	4,80	5,1
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	Persen (%)	10,14	9,74	252,97	23,9
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen (%)	2,56	2,86	3,41	4,9
4	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	71,67	72,48	75,68	75,9
5	Indeks Gini	Nilai	-	0,25	0,34	0,36

(Sumber: *Bengkulu Tengah Dalam Angka 2026*; *Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2026*; *Statistik Indonesia 2026*)

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027

No	INDIKATOR	Satuan	Tahun 2027 (Kabupaten Bengkulu Tengah)	Tahun 2027 (Provinsi Bengkulu)	Tahun 2027 (Nasional)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persen (%)	4,44 – 4,84	6,2 - 6,5	6,3 – 7,5
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	Persen (%)	9,33	10,69 – 11,30	6,0 – 6,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen (%)	2,05	2,84 – 3,27	4,30 -4,87
4	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	0,55	0,55	0,58
5	Indeks Gini	Nilai	0,24	0,319 – 0,321	0,375 – 0,378

(Sumber: *RPJMD Bengkulu Tengah 2025-2029*; *Bappeda Provinsi 2026*; *Bappenas 2026*)

Memperhatikan kondisi perekonomian dan arah kebijakan nasional, Provinsi Bengkulu, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 pada **“Digitalisasi Pelayanan Publik dan Optimalisasi Kualitas Sektor Strategis Daerah”**. Tema ini ditetapkan untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029.

Pengelolaan belanja daerah dilakukan dengan kebijakan belanja daerah yang ditekankan pada upaya penghematan biaya dan belanja dengan Penataan anggaran berbasis kinerja melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara efisien, efektif dan berkesinambungan sehingga memberikan hasil yang baik dengan biaya yang rendah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2027 diprioritaskan untuk membiayai program-program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 dengan tetap mendukung komitmen pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Hal ini terlihat dalam arah kebijakan pembangunan pada tahap ini, salah satunya dengan Peningkatan peningkatan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan masyarakat, hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah kurun waktu 2025-2029 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2027, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Beberapa kebijakan yang ditetapkan guna mendorong peningkatan pendapatan daerah antara lain :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

- 2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah.
- 3. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
- 4. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- 5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat.
- 6. Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Adapun gambaran sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2026 dan Rancangan RKPD Tahun 2027

Kode	Uraian	Jumlah APBD 2026	Rancangan RKPD 2027	Proyeksi +/-
4	Pendapatan Daerah	684.897.011.681	708.143.622.064	23.246.610.383
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	52.261.425.087	52.649.376.598	387.951.511
4.1.1	Pajak Daerah	34.527.985.087	34.915.936.598	387.951.511
4.1.2	Retribusi Daerah	817.700.000	817.700.000	0
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.820.000.000	1.820.000.000	0
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	15.095.740.000	15.095.740.000	0
4.2	PENDAPATAN TRANFER	623.247.344.797	648.568.245.466	25.118.658.872
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	567.247.344.797	631.566.906.332	64.319.561.535
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	56.202.241.797	17.001.339.134	-39.200.902.663
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.186.000.000	6.926.000.000	-2.260.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.000.000.000	0	-2.000.000.000
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.186.000.000	6.926.000.000	260.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		684.694.769.884	708.143.622.064	74.688.508.136

Sumber : Bappeda dan BKD Kabupaten Bengkulu Tengah

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah untuk tahun 2027 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Untuk tahun 2026, struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Struktur belanja daerah tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri-dari :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat.
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.

3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi :
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Desa). Belanja transfer tahun 2027 dirinci atas jenis :
- a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Desa;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Kebijakan-kebijakan belanja daerah pada tahun 2027 diarahkan sebagai berikut:

- a. Mengalokasikan alokasi belanja daerah untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah sesuai dengan amanat UUD 1945 amandemen IV dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- b. Alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja daerah sesuai amanat Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c. Alokasi belanja daerah untuk pembiayaan infrastruktur strategis dalam rangka memenuhi ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas untuk menunjang pelayanan konektivitas, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.
- d. Belanja daerah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien berdasarkan pendekatan kinerja.
- e. Memberikan penguatan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan untuk pengembangan potensi unggulan daerah.
- f. Memberikan tambahan penghasilan bagi PNS berbasis kinerja guna lebih mendorong peningkatan kinerja.
- g. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha.
- h. Peningkatan skills calon tenaga kerja dan calon wira usaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- i. Mendorong pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan daerah.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2027 sebesar Rp. 686.294.769.884,00 terdiri dari Belanja Operasi Rp. 524.978.556.691,00, Belanja Modal sebesar 66.080.778.218,00, Belanja Tidak Terduga Rp. 500.000.000,00, serta Belanja Tranfer sebesar Rp. 94.735.434.975,00. Jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2026 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2027 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri-dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Anggaran Belanja Daerah Tahun 2027

5	BELANJA DAERAH	2027
5.1	BELANJA OPERASI	539.224.210.855
5.2	BELANJA MODAL	7.3583.958.234
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000
5.4	BELANJA TRANFER	94.835.452.975
JUMLAH BELANJA		708.143.622.064

Sumber : Bappeda dan BKD Kabupaten Bengkulu Tengah

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya merupakan istilah dari pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), dan pemanfaatan penerimaan kembali pemberian pinjaman. SiLPA merupakan pemanfaatan utama dalam perhitungan anggaran. Besar kecilnya SiLPA di lain sisi sebagai kurang maksimalnya pemanfaatan anggaran tahun sebelumnya, akan tetapi bagi tahun berikutnya merupakan peluang akan adanya tambahan besarnya tambahan. Defisit anggaran tentu berimplikasi pada keharusan untuk berupaya meningkatkan kapasitas keuangan daerah, agar mampu menutup defisit belanja daerah. Defisit belanja daerah dapat ditutup dengan SiLPA, namun SiLPA yang kecil justru menjadi salah satu indikasi penyusunan perencanaan dan penganggaran yang tepat dan akurat atau capaian pelaksanaan program kegiatan dapat terwujud secara optimal.

Strategi pembiayaan daerah tahun 2027 yaitu :

1. Optimalisasi jenis-jenis pendapatan asli daerah dan lebih melakukan penghematan terhadap belanja daerah, sehingga SiLPA yang diperoleh dalam penerimaan pembiayaan betul-betul SiLPA murni.
2. Pelaksanaan program kegiatan dengan menggunakan produk barang dan jasa berkualitas dengan biaya yang murah dalam rangka penghematan dan efisiensi.
3. Memperhitungkan kembali penyertaan modal untuk alokasi APBD murni dan perubahan APBD.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mulai tahun 2026 telah melakukan investasi dengan melakukan penyertaan modal ke Bank Kerangka Ekonomi Pemerintah Dan Keuangan Daerah

Pembangunan Daerah (BPD) Bank Bengkulu.Hal ini terus dilanjutkan pada tahun berikutnya hingga tahun 2027. Selain itu, Kabupaten Bengkulu Tengah juga telah memiliki BLUD PDAM Tirta Raflesia.

Tabel 3.5
Jumlah Pembiayaan Tahun 2027

6	PEMBIAYAAN DAERAH	2027
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya	0
6.1.01.05	Penghematan Belanja	0
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	0
6.1.01.05.001.00008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	0
6.1.01.05.001.00009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	0
6.1.01.05.001.00010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	0
6.1.01.05.002	Penghematan Belanja-Belanja Modal	0
6.1.01.05.002.00021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0
6.1.01.05.002.00025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0
6.1.01.05.002.00035	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		0
Pembiayaan Netto		0

Sumber : Bappeda dan BKD Kabupaten Bengkulu Tengah

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029. Pada saat ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah memasuki tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029. Di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 tertuang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi serta Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah. Selain itu perumusan Program Prioritas Kabupaten Bengkulu Tengah juga memperhatikan Janji Kerja Kepala Daerah, Asta Cita dan Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu.

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program unggulan daerah yang dilaksanakan untuk memajukan daerah. Secara operasional, program prioritas pembangunan daerah tersebut tertuang dalam program-program unggulan OPD yang memiliki hubungan paling tinggi relasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan program prioritas daerah ini, beberapa hal perlu menjadi perhatian, antara lain korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta sinkronisasi dengan program prioritas Provinsi Bengkulu, pencapaian target SDGs (*Sustainable Development Goals*), standar pelayanan minimal, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, serta memperhatikan isu-isu strategis daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan target pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Hal ini berkaitan erat dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2027 dilakukan atas dasar kajian terhadap perkembangan permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah, serta dengan tetap mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah, RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah, RKPD

Provinsi Bengkulu, RTRW Provinsi Bengkulu, RPJMD Provinsi Bengkulu, RKP Nasional, dan RPJM Nasional.

Berdasarkan dokumen RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bengkulu Tengah dijelaskan bahwa Visi Kabupaten Bengkulu Tengah adalah “Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan”. Dari visi tersebut kemudian dituangkan kembali menjadi Misi, Tujuan hingga Sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan.	1. Percepatan Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur	Meningkatkan konektivitas, dan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas
			Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
	2. Pemenuhan Kebutuhan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Teknologi	Menciptakan pembangunan kebutuhan dasar manusia melalui pendidikan, kesehatan masyarakat, dan teknologi	Meningkatnya kualitas pembangunan kebutuhan pendidikan
			Meningkatnya kualitas pembangunan kebutuhan kesehatan
			Wilayah tanpa blank spot
	3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya intelegualitas dan karakter anak usia sekolah
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			Kualitas ekonomi masyarakat meningkat
			Pengentasan kemiskinan
			Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga
	4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Investasi	Meningkatnya Proporsi sektor unggulan
			Meningkatnya jumlah investasi
			Meningkatnya daya saing industri dan Perdagangan
			Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa
			Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
	5. Penanaman Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Budaya		ekonomi kreatif
		Meningkatkan kesempatan kerja dan ekonomi masyarakat	Meningkatnya kesempatan kerja
		Meningkatkan nilai budaya yang inklusif dan berkeadilan gender	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak
			Terwujudnya keluarga yang berkualitas
		Terciptanya Tata kelola pemerintahan yang baik dengan ASN profesional	Meningkatnya kualitas Tata kelola pemerintahan daerah
			Meningkatnya pengetahuan, keahlian dan profesionalitas ASN
			Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan
		Terciptanya kehidupan masyarakat yang demokratis, aman, dan tertib	Menurunnya angka kriminalitas di masyarakat
		Meningkatkan kapasitas dan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah yang berkeadilan, efisien, dan berbasis potensi lokal.	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal
	7. Pelestarian Lingkungan dan Tata Ruang	Menciptakan lingkungan hidup berkualitas	Terciptanya lingkungan hidup berkualitas
			Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan
			Meningkatnya kualitas penanganan bencana

Sumber: Dokumen RPJMD 2025-2045 Kab Bengkulu Tengah

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, dan Strategi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan		
Misi 1: Percepatan Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur		
Meningkatkan konektivitas, dan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Meningkatkan mutu jalan strategis untuk mendukung konektivitas antarwilayah
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan kabupaten serta jalan desa.
		Penguatan infrastruktur transportasi umum untuk meningkatkan mobilitas masyarakat
		Meningkatkan pengawasan terhadap proyek pembangunan infrastruktur guna memastikan kualitas dan keberlanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan		
		Melakukan inventarisasi dan penilaian kondisi infrastruktur secara berkala (jalan dan jembatan)
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Peningkatan kapasitas pengolahan air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri.
		Pengembangan dan rehabilitasi sistem penyediaan air bersih (SPAM).
		Perluasan jaringan listrik dan penerangan jalan umum melalui kerja sama dengan PLN
	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Penyediaan infrastruktur pengolahan limbah rumah tangga dan air limbah domestik
		Penyediaan infrastruktur pengolahan limbah rumah tangga dan air limbah domestik
		Menyusun dan melaksanakan rencana tata ruang berbasis hunian terjangkau yang terintegrasi dengan pusat kegiatan masyarakat
Misi 2: Pemenuhan Kebutuhan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Teknologi		
Menciptakan pembangunan kebutuhan dasar manusia melalui pendidikan, kesehatan masyarakat, dan teknologi	Meningkatnya kualitas pembangunan kebutuhan pendidikan	Peningkatan akses pendidikan dengan membangun dan merehabilitasi fasilitas sekolah.
	Meningkatnya kualitas pembangunan kebutuhan kesehatan	Pembangunan dan peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat.
	Wilayah tanpa blank spot	Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah dengan blank spot.
		Kemitraan dengan penyedia layanan internet untuk perluasan jaringan.
Misi 3: Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing		
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Program beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu.
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kampanye kesadaran kesehatan masyarakat
	Kualitas ekonomi masyarakat meningkat	Pemberdayaan UMKM dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif.
	Pengentasan kemiskinan	Program bantuan sosial berbasis pemberdayaan
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Meningkatkan fasilitas dan sarana olahraga di tingkat desa dan kecamatan
		Menyelenggarakan kompetisi olahraga rutin dari tingkat lokal hingga regional untuk menjaring bibit atlet muda
Misi 4: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi		
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Investasi berkelanjutan	Meningkatnya Proporsi sektor unggulan	Penguatan sektor unggulan berbasis potensi daerah
	Meningkatnya jumlah investasi	Penyederhanaan regulasi dan perizinan bagi investor
	Meningkatnya daya saing	Mendorong pengembangan kawasan

Tujuan	Sasaran	Strategi
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan		
	industri dan Perdagangan	industri dan fasilitasi UMKM untuk peningkatan akses pasar dan daya saing produk
	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Mengembangkan sistem pertanian terpadu dan memperkuat rantai pasok serta cadangan pangan daerah
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Meningkatkan kapasitas desa dan penguatan BUMDes berbasis potensi lokal
	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengembangkan destinasi wisata tematik dan produk ekonomi kreatif melalui promosi digital dan pelibatan masyarakat
Meningkatkan kesempatan kerja menciptakan ekonomi masyarakat	Meningkatnya kesempatan kerja menciptakan ekonomi masyarakat	Program padat karya untuk meningkatkan serapan tenaga kerja.
Misi 5: Penanaman Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Budaya		
Meningkatkan nilai budaya yang inklusif dan berkeadilan gender	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Mendorong edukasi berbasis komunitas dan tokoh adat untuk memperkuat peran perempuan dan perlindungan anak
		Menguatkan nilai budaya lokal dalam pengasuhan, pendidikan karakter, dan ketahanan keluarga.
	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Penyediaan fasilitas dan layanan ramah anak di ruang publik
Misi 6: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		
Terciptanya Tata kelola pemerintahan yang baik dengan ASN profesional	Meningkatnya kualitas Tata kelola pemerintahan daerah	Reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang cepat dan transparan
Terciptanya kehidupan masyarakatan yang demokratis, aman, dan tertib	Menurunnya angka kriminalitas di masyarakat	Peningkatan keamanan melalui kerja sama dengan aparat hukum dan masyarakat.
Meningkatkan kapasitas dan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah yang berkeadilan, efisien, dan berbasis potensi lokal.	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal	Mengoptimalkan pemetaan potensi lokal dan digitalisasi layanan perpajakan daerah untuk meningkatkan efisiensi pemungutan dan memperluas basis penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Misi 7: Pelestarian Lingkungan dan Tata Ruang		
Menciptakan lingkungan hidup berkualitas	Terciptanya lingkungan hidup berkualitas	Penguatan kebijakan tata ruang yang berbasis daya dukung lingkungan
	Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan	Mengembangkan program hutan desa dan agroforestri, memperkuat kelembagaan masyarakat adat/lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan		
		dalam pengelolaan hutan, serta meningkatkan patroli dan rehabilitasi kawasan hutan kritis secara terpadu
	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Penguatan sistem mitigasi bencana berbasis teknologi dan komunitas

Sumber: Dokumen RPJMD 2025-2045 Kab Bengkulu Tengah

Tabel 4.3
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027

Transformasi	Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Keterangan
Sosial	Percepatan Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur	Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung mobilitas dan konektivitas wilayah	
	Pemenuhan Kebutuhan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Teknologi	Penguatan akses dan mutu pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur telekomunikasi	
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi	
Ekonomi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi	Meningkatkan investasi dan pengembangan sektor unggulan berbasis potensi daerah	
Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia	Menanamkan Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Budaya	Meningkatkan kesadaran budaya dan kearifan lokal melalui pendidikan dan festival budaya	
Tata Kelola	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien	
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pelestarian Lingkungan	Memastikan keberlanjutan	

Transformasi	Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Keterangan
	dan Tata Ruang	lingkungan dengan tata ruang berbasis daya dukung dan mitigasi bencana	

Sumber: Dokumen RPJMD 2025-2045 Kab Bengkulu Tengah

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

Penyusunan program prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Periode 2025-2029, serta dilakukan dengan melalui proses musrenbang. Selain itu, arah pembangunan dan program prioritas nasional dan Provinsi Bengkulu juga dijadikan acuan untuk menjamin sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan rancangan RKP Nasional Tahun 2027, arah pembangunan pada tahun bersangkutan yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”. Adapun Arah Kebijakan RKP Nasional Tahun 2027 mengacu pada Dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029 adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional



Gambar 4.1 Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029 (Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025)

2. Fokus Pembangunan Memuat: • IKU; • Direktif Presiden; • Isu Penting; • Prioritas Pembangunan high-impact sesuai dengan sub-tema: ✓ Produktivitas ✓ Investasi ✓ Industri; • Kerangka Regulasi dan Kelembagaan.

3. Intervensi Kewilayahan



Gambar 4.2 Kerangka Pikir Arah Kabujakan Wilayah Tahun 2027(Sumber: Bappenas.go.id 2027)

Tema RKPDP Provinsi Bengkulu Tahun 2027 adalah “Akselerasi Pemerataan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Peningkatan Infrastruktur, Penguatan Pemberdayaan Masyarakat, serta Pengembangan Daya Saing Daerah”. Arah Kebijakan RKPDP Provinsi Bengkulu Tahun 2027 adalah “Pemerataan dan Pemberdayaan Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan dengan didorong oleh pembangunan SDM yang berdaya saing” . Sedangkan Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, dengan prinsip tata kelola pemerintah yang transparan, bersih, berkeadilan, dan berlandaskan nilai religious.
2. Mewujudkan rasa aman dan keseimbangan kehidupan yang harmonis antara lingkungan, alam, dan budaya, serta memperkuat kerukunan antar umat beragama untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.
3. Meningkatkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan strategis, serta memperkuat konektivitas antar wilayah.
4. Mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan inklusif, serta menjamin kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas.

- 5. Meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal dan inovasi yang berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi dalam jaringan ekonomi lokal.
- 6. Memperkuat sektor ekonomi lokal dengan mewujudkan ketahanan pangan mandiri melalui hilirisasi dan industrialisasi produk pangan unggulan.
- 7. Mendorong pengembangan wisata hijau sebagai langkah strategis dalam pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta berketahanan iklim.

Sejalan dengan agenda nasional dan Provinsi Bengkulu tersebut, serta dengan mempedomani tujuan daerah dan sasaran daerah pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, maka tema RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2027 adalah: **“Digitalisasi Pelayanan Publik dan Optimalisasi Kualitas Sektor Strategis Daerah”**.

Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung mobilitas dan konektivitas wilayah.
- 2. Penguatan akses dan mutu pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur telekomunikasi.
- 3. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi.
- 4. Meningkatkan kesadaran budaya dan kearifan lokal melalui pendidikan dan festival budaya.
- 5. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien.
- 6. Meningkatkan investasi dan pengembangan sektor unggulan berbasis potensi daerah.
- 7. Memastikan Keberlanjutan lingkungan dengan tata ruang berbasis daya dukung dan mitigasi bencana.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan yang terintegrasi untuk memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru.
2. Memastikan akses pendidikan dasar yang merata melalui penyediaan bantuan seragam serta peralatan sekolah gratis bagi seluruh siswa kurang mampu.
3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menyediakan layanan pengobatan gratis yang merata dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Mengembangkan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah serta hilirisasi komoditas unggulan daerah.
5. Mewujudkan ketahanan pangan daerah secara mandiri dan berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
6. Membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis melalui penguatan nilai-nilai sosial, budaya, serta tata kehidupan yang rukun dan bersahabat.
7. Meningkatkan kinerja dan kemandirian Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pembinaan ASN berdikari yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
8. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) berbasis inovasi dan digitalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah.
9. Penguatan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang wilayah yang berkelanjutan guna menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mendukung pembangunan daerah.

Tabel 4.4
Daftar Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027

Janji Kerja Kepala Daerah	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2027	Satuan	Program Pembangunan Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
▪ Program Jalan Mulus	Prioritas 1 : Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan yang terintegrasi untuk memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru	Meningkatnya kualitas layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio jalan mantab	58,27	Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PUPR
						PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	DISHUB
▪ Ibu Kota Modern		Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Persentase rumah tangga memiliki akses air bersih layak	90,06	Persen	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PUPR
			Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	62,2	Persen	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PUPR

Janji Kerja Kepala Daerah	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2027	Satuan	Program Pembangunan Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERKIMTA
						PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH
						PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERKIMTA
		Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang teraliri listrik	99,55	Persen	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINAS PERKIMTA
			Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak	63,26	Persen	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL
▪ Program Bantuan Seragam & Peralatan Sekolah Gratis	Prioritas 2 : Memastikan akses pendidikan dasar yang merata melalui penyediaan bantuan seragam serta peralatan sekolah	Meningkatnya kualitas pembangunan kebutuhan pendidikan	APM SD	98,75	Persen	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
						PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	

Janji Kerja Kepala Daerah	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2027	Satuan	Program Pembangunan Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
	gratis bagi seluruh siswa kurang mampu		APM SMP	82,78	Persen	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	107,31	Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	106,26	Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah	94	Desa/Kelurahan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
						PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
		Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Rata-rata lama sekolah	8,19	Tahun	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,86	Tahun	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	56,90	Angka/Indeks	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
		Wilayah tanpa blank spot	Jumlah blank spot (lemah Sinyal & Tidak ada Sinyal)	7	Titik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
▪ Program Penanganan Wilayah Blank Spot	Prioritas 3 :	Meningkatnya kualitas	Jumlah Desa/Kelurahan	34	Desa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	
▪ Program Berobat Gratis							

Janji Kerja Kepala Daerah	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2027	Satuan	Program Pembangunan Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menyediakan layanan pengobatan gratis yang merata dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat	pembangunan kebutuhan kesehatan	Yang Memiliki Sarana Kesehatan			PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
			Rasio Tenaga Kesehatan per Kecamatan	72	Persen	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Angka kematian Bayi/ 100 per kelahiran bayi	16	Bayi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Angka Kematian Ibu/ 100.00 kelahiran Hidup	3	Ibu		
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	73,15	Tahun	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
- Benteng Kalamambu (Kalamansi dan Bambu) - Ketahanan Pangan (Bantuan Pupuk Gratis)	Prioritas 4 : Mengembangkan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah serta hilirisasi komoditas unggulan daerah	Meningkatnya Proporsi sektor unggulan	Proporsi distribusi PDRB unggulan (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan)	43,7	Persen	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
						PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	

Janji Kerja Kepala Daerah	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2027	Satuan	Program Pembangunan Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
						PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
						PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
		Meningkatnya jumlah investasi	Jumlah penanaman modal asing	386.803 (Juta)	Angka	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA
						PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
						PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	

Janji Kerja Kepala Daerah	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2027	Satuan	Program Pembangunan Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
						PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Jumlah penanaman modal dalam negeri	3.933.440	Angka	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
			Indeks Daya Saing Daerah	3,93	Angka	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BAPPEDA
						PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
		Meningkatnya daya saing industri dan Perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	14,3	Persen	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DISPERINDAGKOP
						PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
						PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	8,56	Persen	PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
		Meningkatnya pemberdayaan	Indeks Desa Membangun	0,7104	Angka	PROGRAM PENATAAN DESA	DPMD

Janji Kerja Kepala Daerah	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2027	Satuan	Program Pembangunan Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
		masyarakat dan kemandirian desa				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	
						PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
		Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	0,83	Persen	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA
						PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.05	Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PUPR
						PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DISNAKERTRANS

Janji Kerja Kepala Daerah	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2027	Satuan	Program Pembangunan Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
						PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
		Kualitas ekonomi masyarakat meningkat	Pendapatan per kapita (Juta Rupiah)	63,31-69.97	Rupiah (Rp) per tahun	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DISPERINDAGKOP
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
						PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
		Pengentasan kemiskinan	Angka Kemiskinan	9,33	Peenrstase	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL
						PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DKPPP
						PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
						PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	

Janji Kerja Kepala Daerah	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2027	Satuan	Program Pembangunan Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
						PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	DISNAKERTRANS
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PUPR
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
						PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DISPERKIMTA
						PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
						PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
						PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DISDUKCAPIL
						PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	59,37	Angka	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Indeks Partisipasi Olahraga	38,24	Angka	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
▪ Benteng Kalamambu	Prioritas 5 :	Meningkatnya ketersediaan	Indeks Ketahanan	66,5	Angka	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	DKPP

Janji Kerja Kepala Daerah	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2027	Satuan	Program Pembangunan Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
(Kalamansi dan Bambu) ▪ Ketahanan Pangan (Bantuan Pupuk Gratis)	Mewujudkan ketahanan pangan daerah secara mandiri dan berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat	dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Pangan			KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
						PROGRAM PENGAWASANA KEAMANAN PANGAN	
						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
						PROGRAM PERIKANAN BUDIDAYA	
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
						PROGRAM PENYEDIAANDAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
						PROGRAM PENYEDIAANDAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
						PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
▪ Program Benteng Bersahabat ▪ Gerakan Cinta Batik Sungai Lemau	Prioritas 6 : Membangun masyarakat yang inklusif dan	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59,1	Angka	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN

Janji Kerja Kepala Daerah	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2027	Satuan	Program Pembangunan Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
	harmonis melalui penguatan nilai-nilai sosial, budaya, serta tata kehidupan yang rukun dan bersahabat					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DP3AP2KB
						PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
		Menurunnya Angka Kriminalitas di Masyarakat	Jumlah Kriminalitas	259	Kasus	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	KESBANGPOL
		Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	87,969	Angka	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN;	DP3AP2KB
			Indeks Pemberdayaan Gender	76,9	Angka	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK;	DP3AP2KB
			Indeks Ketimpangan Gender	0,512	Angka	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DP3AP2KB
			Indeks Perlindungan	62,5	Angka	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DP3AP2KB

Janji Kerja Kepala Daerah	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2027	Satuan	Program Pembangunan Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
- ASN Berdikari - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah - Benteng <i>Command Center</i>	Prioritas 7 : Meningkatkan kinerja dan kemandirian Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pembinaan asn berdikari yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Anak (IPA)			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
			Nilai SAKIP	67,00	Nilai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SELURUH OPD
						PROGRAM PERENCANAAN PENGANDALIAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA
						PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH
			Opini BPK	WTP	Predikat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SELURUH OPD
						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH
						PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	

Janji Kerja Kepala Daerah	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2027	Satuan	Program Pembangunan Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Nilai SPBE	3,42	Nilai	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
						PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatnya pengetahuan, keahlian dan profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	77,5	Angka	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,85	Angka	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	Prioritas 8 : Meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) berbasis inovasi dan digitalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi local	Laju Pertumbuhan PAD	5,08- 35	Persen	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN KUANGAN DAERAH
						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KUANGAN DAERAH

Janji Kerja Kepala Daerah	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2027	Satuan	Program Pembangunan Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
▪ Program Benteng Bersih dan Bersinar (Berbinar)	Prioritas 9 : Penguatan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang wilayah yang berkelanjutan guna menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mendukung pembangunan daerah	Terciptanya lingkungan hidup berkualitas	Indeks Kualitas Air	70,99	Nilai	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Indeks Kualitas Udara	91,97	Nilai		
			Indeks Kualitas Lahan	28,37	Nilai	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
						PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
						PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan	Persentase Tutupan Lahan	46.5	Persen	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Indeks Resiko Bencana	65	Nilai	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
			Indeks Ketahanan Energi	61.5	Nilai	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
						PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN	

Janji Kerja Kepala Daerah	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2027	Satuan	Program Pembangunan Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
						HAYATI	DINAS PUPR
			Indeks Ketahanan Air	64	Nilai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SYSTEM PENYEDIAN AIR MINUM	
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DRAINASE	

Tabel 4.5
Rumusan Usulan Program dan Kegiatan Hasil Penelahaan Pokok Pokok Pikiran DPRD pada RKPD Tahun 2027 Berdasarkan Aplikasi SIPD RI

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Usul Ke	Status
1	20-01-2026	FERI HARYADI	Rehabilitasi Jalan	Jalan rusak berat, jalan desa harapan siderejo	jalan Desa harapan siderejo kab. bengkulu tengah kec. pondok kelapa, Kab. Bengkulu Tengah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
2	22-01-2026	FERI HARYADI	Rehabilitasi Jalan	Rehab jalan nelayan teluk pering pasar pedati gang koko, kecamatan pondok kelapa	pasar pedati gang koko, kecamatan pondok kelapa kab. bengkulu tengah, Kab. Bengkulu Tengah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
3	22-01-2026	FERI HARYADI	Rehabilitasi Jalan	Peningkatan jalan rusak	peningkatan jalan ijal metro pasar pedati, Kab. Bengkulu Tengah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
4	09-02-2026	FEPI SUHERI	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tan	Pembangunan jalan usaha tani	Dusun Baru II, Kab. Bengkulu Tengah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
5	09-02-2026	FEPI SUHERI	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rehab bendungan irigasi	Dusun Baru II, Kab. Bengkulu Tengah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
6	09-02-2026	FEPI SUHERI	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tan	Penyambungan jalan yang belum selesai	Dusun Baru II, Kab. Bengkulu Tengah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
7	09-02-2026	FEPI SUHERI	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tan	Belum adanya sarana jalan yang tembus dari karang tinggi ke Dusun Baru II ,Durian Demang	Dusun Baru II, Kab. Bengkulu Tengah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
8	09-02-2026	FEPI SUHERI	Rehabilitasi Jalan	Akses jalan rusak membahayakan pengguna jalan	Taba Lagan, Kab. Bengkulu Tengah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
9	09-02-2026	FEPI SUHERI	Rekonstruksi Jalan	Perlunya peningkatan/pembangunan jalan hotmix untuk penghubung desa pagar gunung dan desa kota niur	kota niur, Kab. Bengkulu Tengah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Usul Ke	Status
10	09-02-2026	FEPI SUHERI	Rehabilitasi Jalan	Perlunya perbaikan jalan hotmix untuk aktifitas masyarakat	Desa Tengah padang, Kab. Bengkulu Tengah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
11	09-02-2026	ROMLI, S.P.	Rehabilitasi Jembatan	Pembangunan Jembatan	Desa Surau Kecamatan Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
12	09-02-2026	ROMLI, S.P.	Rehabilitasi Jalan	Pembangunan jalan Rabat Beton	Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
13	09-02-2026	ROMLI, S.P.	Rehabilitasi Jalan	Jalan Penghubung Antar desa Mengalami Rusak Total	Desa Susup Kecamatan Merigi Sakti , Kab. Bengkulu Tengah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
14	09-02-2026	ROMLI, S.P.	Rehabilitasi Jalan	Jalan Desa Karang Tengah Rusak Berat	Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
15	09-02-2026	ROMLI, S.P.	Rehabilitasi Jalan	Jalan Mengalami Rusak Berat	Desa Bajak 1 Kecamatan Taba Penanjung , Kab. Bengkulu Tengah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
16	10-02-2026	JON KARNEDI	Rehabilitasi Jalan	Peningkatan jalan lapen rusak parah menjadi jalan hotmix	talang donok, Kab. Bengkulu Tengah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
17	10-02-2026	JON KARNEDI	Rehabilitasi Jalan	Jalan sekayun mudik /sekayun/bang haji jalan hotmix	sekayun mudik, Kab. Bengkulu Tengah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
18	10-02-2026	JON KARNEDI	Rehabilitasi Jalan	Jalan lubuk langkap peningkatan jalan lapen menjadi hotmix	lubuk langkap, Kab. Bengkulu Tengah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
19	10-02-2026	JON KARNEDI	Rehabilitasi Jalan	Pembuatan jalan hot mix	Karang Are , Kab. Bengkulu Tengah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
20	10-02-2026	JON KARNEDI	Rehabilitasi Jalan	Jalan air kotok hotmix	air kotok, Kab. Bengkulu Tengah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

Tabel 4.6
Rumusan Usulan Aspirasi Masyarakat pada RKPD Tahun 2027 Berdasarkan Aplikasi SIPD RI

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
1	22-01-2026	Hendri Irawan	Rehabilitasi Jalan	Jalan telah dibangun pada tahun 2013, kondisi jalan rusak dan berlubang menimbulkan genangan air sehingga licin dan mengganggu pengguna jalan.	Desa Sidorejo, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Sidorejo	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
2	22-01-2026	Hendri Irawan	Rekonstruksi Jalan	Jalan masih di koral, ketika hujan tiba jalan licin dan berlumpur dikarenakan koral sudah rusak.sehingga perlu peningaktan jalan aspal.	Desa Sidorejo Dusun 02, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Sidorejo	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
3	22-01-2026	Hendri Irawan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Ada beberapa titik Jalan rusak dan berlubang sehingga sering terjadi kecelakaan dan mengganggu pengguna jalan.	Desa Sidorejo, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Sidorejo	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
4	22-01-2026	Hendri Irawan	Pembangunan sarana air bersih desa	Warga kekurangan air bersih jika musim kemarau tiba.	Desa Sidorejo Dusun 03, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Sidorejo	Kabupaten / Kota	Verifikasi Kecamatan
5	22-01-2026	Hendri Irawan	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Banyak beberapa tanah yg curam dan jika hujan tergerus air yg dapat terjadi longsor.	Desa Sidorejo, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Sidorejo	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
6	22-01-2026	Hendri Irawan	Pelatihan ekonomi perempuan	Terdapat ipal di desa yg bisa di manfaatkan untuk biogas/meningkatkan SDM	Desa Sidorejo, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Sidorejo	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
7	22-01-2026	Hendri Irawan	Pelatihan ekonomi perempuan	Limbah Rumah Tangga yang bisa di manfaatkan/diolah Untuk meningkatkan SDM di Desa	Desa Sidorejo, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Sidorejo	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
8	24-01-2026	ROMADHAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	JALAN RUSAK BECEK MENGGANGGU AKTIFITAS PETANI	DESA SRI KUNCORO DUSUN 2, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Sri Kuncoro	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
9	27-01-2026	Bambang Setiawan	Pembangunan Jembatan	Lantai jembatan sudah hampir terputus dari coran tiang penyangga jembatan dan tidak adanya pagar pengaman / loneng jembatan sehingga sering terjadi kecelakaan. Bahkan sudah beberapa kali mobil terjatuh ke sungai karena tidak adanya pagar pengaman /loneng jembatan.	Dusun 1 Tanjung Dalam, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kubang	Tanjung Dalam	Kabupaten / Kota	Verifikasi Kecamatan
10	27-01-2026	Bambang Setiawan	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pada saat musim hujan air akan menggenangi jalan jalan dikarenakan tidak adanya drainase/siring.Bahkan air akan membanjiri rumah warga karena air hujan dari jalan langsung mengalir kehalaman bahkan masuk kedalam rumah warga.	Dusun 1,2, dan 3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kubang	Tanjung Dalam	Kabupaten / Kota	Dikembalikan

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
11	27-01-2026	Bambang Setiawan	Pembangunan sarana air bersih desa	Dikarenakan pemerintah Desa dibatasi oleh aturan yang ada maka pemerintah Desa tidak bisa membangun sumur bor di SDN 44 yang ada di Desa Tanjung Dalam. Yang mana di Sekolah Dasar ini tidak sangat kesulitan dengan air bersih yang ada hanya sumur galian namun sudah tidak ada airnya.	Dusun 3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kubang	Tanjung Dalam	Kabupaten / Kota	Verifikasi Kecamatan
12	27-01-2026	SARIPUDIN	Rehabilitasi Jembatan	Jembatan Sukarami - Tanjung Raman sangat perlu di rehab	Dusun I Desa Sukarami , Kab. Bengkulu Tengah	Taba Penanjung	Sukarami	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
13	27-01-2026	SARIPUDIN	Peningkatan kapasitas aparaturnya desa	Perlu nya pelatihan aparaturnya desa karena desa sukarami akan melakukan pemilihan dan penjarangan perangkat desa yang baru	Desa Sukarami , Kab. Bengkulu Tengah	Taba Penanjung	Sukarami	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
14	29-01-2026	Syaifurohman	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terjadina erosi badan jalan kabupaten yang menyebabkan jalan menjadi longsor dan membahayakan pengguna jalan	Rt.01,Rt03,Rt04,Rt06, Rt07,Rt08, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kubang	Margo Mulyo	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
15	29-01-2026	Syaifurohman	Pembangunan Drainase Lingkungan	Sumbatnya gorong gorong dan draenase sehingga menyebabkan genangan air yang begitu banyak sehingga menimbulkan jentik nyamuk yang dikhawatirkan membawa wabah nyamuk demam berdarah sehinnga membahayakan warga sekitar	Rt01 Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kubang	Margo Mulyo	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
16	29-01-2026	Syaifurohman	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Aksess jalan Usaha Tani yang berada di Rt 9 Sangat Tidak layak sehingga apabila taerjadi hujan petani margo mulyo tidak bisa beraktivitas mengambil rezeki dari hasil pertaniannya,dan susah untuk mengeluarkan hasil produksi pertanian ,kalo ini di biarkan akan berdampak pada perekonomian warga masyarakat margo mulyo menjadi menurun	Rt09 Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kubang	Margo Mulyo	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
17	29-01-2026	Syaifurohman	Rehabilitasi Jalan	Adanya jalan Kabupaten yang rusak parah dan belubang mengakibatkan pengguna jalan menjadi tidak nyaman dan sering terjadi kecelakaan di sebabkan ja;an yang memadai sehingga di perlukan peningkatan menjadi ASPAL HOTMIX, yang sangat di impikan warga kami sejak 42 Tahun.	Dari Rt 01.Rt02.Rt03 ,Rt04,Rt05, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kubang	Margo Mulyo	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
18	30-01-2026	LISTIMEWA	Pembangunan Drainase Lingkungan	Kondisi saluran drainase sudah rusak parah	kembang ayun, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Kembang Ayun	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
19	30-01-2026	LISTIMEWA	Pembangunan Jembatan	sulitnya akses warga desa untuk mengangkut hasil pertaniannya	Kembang ayun, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Kembang Ayun	Kabupaten / Kota	Verifikasi Kecamatan
20	30-01-2026	LISTIMEWA	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	beberapa rumah warga terancam longsor dan banjir	kembang ayun , Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Kembang Ayun	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
21	30-01-2026	LISTIMEWA	Bantuan alat dan mesin pertanian	masih minimnya mesin pertanian	kembang ayun, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Kembang Ayun	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
22	30-01-2026	LISTIMEWA	Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni	adanya rumah warga yang tidak layak huni dan tidak tercover dalam dana desa	kembang ayun, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Kembang Ayun	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
23	30-01-2026	LISTIMEWA	Kegiatan pendidikan nonformal (PAUD/PKBM)	masih kurangnya sarana PAUD seperti meja dan kurisi banyak yang rusak/patah	KEMBANG AYUN, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Kembang Ayun	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
24	30-01-2026	LISTIMEWA	Pelatihan ekonomi perempuan	Masih Kurangya Pengetahuan Masyarakat Tentang Ekonomi Sehingga Belum Mandiri Secara Finansial	kembang ayun, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Kembang Ayun	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
25	30-01-2026	LISTIMEWA	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Arga Kesulitan Membawa Hasil Usaha Tani Karena Kondisi Jalan Yang Rusak Parah	kembang ayun, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Kembang Ayun	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
26	30-01-2026	LISTIMEWA	Sarana dan Prasarana Olah Raga Tingkat Desa (HIBAH)	Beberapa Sarana Dan Prasarana Olahraga Di Desa Rusak	kembang ayun, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Kembang Ayun	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
27	31-01-2026	DWI AGUS WIRATMO	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Tebing Rawan Longsor Dan Mengganggu Mobilitas Warga	DESA PANCA MUKTI DUSUN 2 MAGELANG, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Panca Mukti	Kabupaten / Kota	Verifikasi Kecamatan
28	31-01-2026	DWI AGUS WIRATMO	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Tebing Rawan Longsor	DEDSA PANCA MUKTI DUSUN 2 PATI, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Panca Mukti	Kabupaten / Kota	Verifikasi Kecamatan
29	31-01-2026	DWI AGUS WIRATMO	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jalan Rusak Dan Rawan Kecelakaan	DESA PANCA MUKTI DUSUN 2 MAGELANG, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Panca Mukti	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
30	01-02-2026	M. ZUL	Rekonstruksi Jalan	Berdasarkan latar belakang diatas bahwa Desa taba jambu memiliki luas wilayah kurang lebih dari 400 ha dan memiliki penduduk yang padat dan tersebar dalam tiga wilayah dusun diantaranya Dusun 1, 2 dan dusun 3, Desa Taba Jambu berdiri atau mekar pada tahun 2012 dari Desa Dusun Baru I, Selama dalam kurun waktu tersebut terdapat Jalan Padat Karya yang masih perlu di adakannya pembangunan	Jalan Padat Karya Dusun 3 Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah , Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kubang	Taba Jambu	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
31	01-02-2026	M. ZUL	Rekonstruksi Jalan	Berdasarkan latar belakang diatas bahwa Desa taba jambu memiliki luas wilayah kurang lebih dari 400 ha dan memiliki penduduk yang padat dan tersebar dalam tiga wilayah dusun diantaranya Dusun 1, 2 dan dusun 3, Desa Taba Jambu berdiri atau mekar pada tahun 2012 dari Desa Dusun Baru 1. Jalan di Perumahan Saiyo, Selama dalam kurun waktu tersebut	Jalan di Perumahan Saiyo Desa Taba Jambu Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kubang	Taba Jambu	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
				terdapat jalan sepanjang 1000 Meter yang masih perlu di adakannya pengaspalan					
32	01-02-2026	M. ZUL	Rekonstruksi Jalan	Berdasarkan latar belakang diatas bahwa Desa taba jambu memiliki luas wilayah kurang lebih dari 400 ha dan memiliki penduduk yang padat dan tersebar dalam tiga wilayah dusun antaranya Dusun 1, 2 dan dusun 3, Desa Taba Jambu berdiri atau mekar pada tahun 2012 dari Desa Dusun Baru 1, Selama dalam kurun waktu tersebut terdapat jalan sepanjang 1000 Meter yang masih perlu di adakannya pengaspalan	Perumahan Tebat Rapak Dusun 1 Desa Taba Jambu Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kubang	Taba Jambu	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
33	01-02-2026	M. ZUL	Rekonstruksi Jalan	Berdasarkan latar belakang diatas bahwa Desa taba jambu memiliki luas wilayah kurang lebih dari 400 ha dan memiliki penduduk yang padat dan tersebar dalam tiga wilayah dusun antaranya Dusun 1, 2 dan dusun 3, Desa Taba Jambu berdiri atau mekar pada tahun 2012	Jalan Jati Dusun 1 Desa Tab Jambu Kec Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kubang	Taba Jambu	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
				dari Desa Dusun Baru I, Selama dalam kurun waktu tersebut terdapat Gapura yang masih perlu di adakannya pembangunan					
34	03-02-2026	Anggi Syaputra S.I.K	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	sudah rusak	Dusun Baru II, Dusun 3, Kab. Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	Dusun Baru II	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
35	04-02-2026	M. ZUL	Bangunan Gedung, Kantor, Ruangan	Berdasarkan latar belakang diatas bahwa Desa taba jambu memiliki luas wilayah kurang lebih dari 400 ha dan memiliki penduduk yang padat dan tersebar dalam tiga wilayah dusun antaranya Dusun 1, 2 dan dusun 3, Desa Taba Jambu berdiri atau mekar pada tahun 2012 dari Desa Dusun Baru I, Selama dalam kurun waktu tersebut terdapat Kantor Desa yang masih perlu di adakannya pembangunan.	Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kubang	Taba Jambu	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
36	04-02-2026	Iksan Hermuna, S.Sos	Pembangunan Jembatan	Akses ke daerah perkebunan terputus	Desa Kancing , Kab. Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	Kancing	Kabupaten / Kota	Dibatalkan

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
37	05-02-2026	GUNADI	Rehabilitasi Jalan	Kondisi Rusak Parah dan Jalan tersebut digunakan warga sebagai jalan menuju ke sekolah dan kekebun, di jalan tersebut juga sering terjadi kecelakaan karna kondisi jalan yang rusak parah.	Dusun Sungai Kotong Luar, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Sunda Kelapa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
38	05-02-2026	GUNADI	Pembangunan Drainase Lingkungan	Kondisi drainase mendingkal karena dampak banjir dan jika hujan lebat maka sekolah SMP N 14 Bengkulu Tengah akan tergenang air.	Dusun Kampung Tengah, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Sunda Kelapa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
39	05-02-2026	GUNADI	Pembangunan Drainase Lingkungan	Kondisi Drainase rusak, jika hujan lebat mengakibatkan rumah warga tergenang air	Dusun Kampung Tengah, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Sunda Kelapa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
40	05-02-2026	IRIANTO, S.E	Bangunan Gedung, Kantor, Ruangan	Kerusakan Sebagian Gedung	DUSUN 2, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Harapan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
41	05-02-2026	GUNADI	Pembangunan Drainase Lingkungan	Kondisi Rusak Parah perlu pembuatan drainase pasang dan gorong-gorong.	Dusun Kampung Tengah, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Sunda Kelapa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
42	05-02-2026	IRIANTO, S.E	Bantuan sosial berbasis masyarakat	Masih Adanya Rumah Tidak Layak Huni	DUSUN 1,2,3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Harapan	Kabupaten / Kota	Dibatalkan
43	05-02-2026	IRIANTO, S.E	Penataan objek wisata desa	Belum Pernah Adanya Revitalisasi Pantai Desa Harapan	DUSUN 3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Harapan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
44	05-02-2026	GUNADI	Rehabilitasi Jalan	Kondisi jalan rusak parah, jalan tersebut adalah jalan akses menuju jalan utama (jalan provinsi). saat hujan jalan licin dan banyak pengendara motor yang jatuh.	Dusun Sugai kotong dalam, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Sunda Kelapa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
45	05-02-2026	IRIANTO, S.E	Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni	Masih Adanya Rumah Warga Yg Belum Layak Huni	DUSUN 1,2,3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Harapan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
46	05-02-2026	IRIANTO, S.E	Alat tangkap Nelayan (Hibah atau Bantuan)	Adanya Kelompok Nelayan Yang Tidak Pernah Dapat Bantuan Alat Tangkap	DUSUN 2, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Harapan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
47	05-02-2026	IRIANTO, S.E	Bantuan pangan bagi warga rentan	Bantuan Yang Ada Dari Desa Belum Bisa Mencakup Seluruh Warga Yang Rentan Permasalahan Ekonomi Dikarenakan Keterbatasan Anggaran	DUSUN 1,2,3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Harapan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
48	05-02-2026	IRIANTO, S.E	Pelatihan ekonomi perempuan	Masih Minimnya Pengetahuan Tentang Penunjang Ekonomi Keluarga	DUSUN 1,2,3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Harapan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
49	05-02-2026	IRIANTO, S.E	Bantuan sarana budidaya ikan	Untuk Menambah Gizi Keluarga Masyarakat	DUSUN 1,2,3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Harapan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
50	05-02-2026	IRIANTO, S.E	Pembangunan Drainase Lingkungan	Penyempitan Dan Pendangkalan Drainase	DUSUN 1,2,3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Harapan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
51	05-02-2026	Nurul Ikhsan	Rehabilitasi Jalan	jalan lingkungan belum memiliki bahu jalan sehingga badan jalan tinggi dan terasa sempit	Dusun 2 Desa Pulau Panggung, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Pulau Panggung	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
52	05-02-2026	Nurul Ikhsan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	perbaikan jalan lingkusangan yang menembus jalan usahatani ini sangat rusak parah dan tidak bisa dilewati kendaraan	Dusun 2 Desa Pulau Panggung, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Pulau Panggung	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
53	05-02-2026	IRIANTO, S.E	Pemeliharaan Rutin Jalan	JALAN KABUPATEN ANTAR DESA HARAPAN DAN DESA SIDOREJO BANYAK YANG RUSAK	DUSUN 2,3 HARAPAN MENUJU DESA SIDOREJO, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Harapan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
54	05-02-2026	IRIANTO, S.E	Pelatihan kader kesehatan desa	MASIH ADANYA KADER YANG BELUM MEMAHAMI TUPOKSI	DUSUN 1,2,3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Harapan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
55	05-02-2026	IRIANTO, S.E	Pelatihan keterampilan pemuda	UNTUK MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA	DUSUN 1,2,3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Harapan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
56	05-02-2026	IRIANTO, S.E	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	JALAN MASIH TANAH LIAT, SERING TERGERUS AIR HUJAN , PERLU ADANYA PENGGERASAN	DUSUN 1,2,3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Harapan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
57	05-02-2026	IRIANTO, S.E	Pencegahan stunting	MASIH ADA ANAK STANTING	DUSUN 1,2,3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Harapan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
58	05-02-2026	IRIANTO, S.E	Promosi desa wisata	FASILITAS YANG BELUM MEMADAI	DUSUN 3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Harapan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
59	05-02-2026	IRIANTO, S.E	Dana Hibah Pembangunan dan Rehabilitasi Masjid di Wilayah Kabupaten	TEMPAT WUDHU ANTARA LAKI2 DAN PEREMPUAN MASIH BELUM TERPISAH	DUSUN 2, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Harapan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
			Bengkulu Tengah						
60	05-02-2026	IRIANTO, S.E	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	ABRASI JALAN LINGKUNGAN	DUSUN 3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Harapan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
61	05-02-2026	Titin Sumarni	Penataan objek wisata desa	Belum maksimal pengelolaan lahannya	Dusun 2, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Air Sebakul	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
62	05-02-2026	IRIANTO, S.E	Sarana dan Prasarana Olah Raga Tingkat Desa (HIBAH)	BANYAK SARANA OLAH RAGA YANG PERLU DIREVITILASI	DUSUN 1,2,3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Harapan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
63	05-02-2026	IRIANTO, S.E	Rehabilitasi Jalan	JALAN KABUPATEN ANTAR DESA YANG SUDAH RUSAK	DUSUN 2,3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Harapan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
64	05-02-2026	Titin Sumarni	Rehabilitasi Jembatan	Rusak berat	Dusun 1, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Air Sebakul	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
65	05-02-2026	Titin Sumarni	Rehabilitasi Jalan	Rusak Berat,jalan antar Desa Air Sebakul arah ke Desa Air Putih tembus Desa Jayakarta	Dusun 2, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Air Sebakul	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
66	05-02-2026	Arsandi	Pembangunan Jaringan irigasi Primer Atau Sekunder	belum adanya siring induk di Desa membuat beberapa titik jalan tergenang air hujan karena belum adanya tempat pembuangan air seperti irigasi	Desa Tengah Padang, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Tengah Padang	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
67	05-02-2026	Arsandi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha	perlunya pengerasan jalan menjadi hotmix untuk menunjang mobilitas masyarakat	Desa Tengah Padang, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Tengah Padang	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
			Tani						
68	05-02-2026	Arsandi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	perlunya peningkatan kapasitas jalan menjadi lebih baik lagi untuk kelancaran mobilitas masyarakat	Desa Tengah Padang, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Tengah Padang	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
69	05-02-2026	Raki""in	Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni	masih terdapat beberapa rumah warga dengan kondisi tidak layak huni karena kondisi ekonomi dan tidak berpenghasilan tetap	Jalan Raya Kembang Seri Taba Lagan Km. 7 Kode Pos 38385, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Jum'at	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
70	05-02-2026	Raki""in	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	belum adanya prasarana jalan usaha tani yang memadai dalam pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan	Jalan Raya Kembang Seri - Taba Lagan Km. 7 Kode Pos 38385, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Jum'at	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
71	05-02-2026	Raki""in	Sarana dan Prasarana Olah Raga Tingkat Desa (HIBAH)	belum adanya tempat bermain anak-anak dan warga Desa Jum'at, serta melihat kondisi fasos fasum yang tidak layak untuk dijadikan tempat bermain	Jalan Raya Kembang Seri - Taba Lagan Km. 7 Kode Pos 38385, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Jum'at	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
72	05-02-2026	Abdu Rani, S.Sos. MM	Pembangunan Jaringan irigasi Primer Atau Sekunder	volume air tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga hasil pertanian tidak merata	Dusun 2 Gang Depan Masjid Al Anshor Desa Padang Ulak Tanjung, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Padang Ulak Tanjung	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
73	05-02-2026	Abdu Rani, S.Sos. MM	Rekonstruksi Jalan	jalan rusak sehingga menghambat aktivitas warga setempat dan sering terjadi kecelakaan (jatuh)	gang beringin jaya dusun 2 desa padang ulak tanjung, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Padang Ulak Tanjung	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
74	05-02-2026	Abdu Rani, S.Sos. MM	Rekonstruksi Jalan	hasil produksi pertanian tidak bisa di keluarkan oleh warga masyarakat karena akses jalan rusak berat dan masih tanah	gang beringin jaya dusun 2 desa padang ulak tanjung, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Padang Ulak Tanjung	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
75	05-02-2026	Abdu Rani, S.Sos. MM	Rehabilitasi Jalan	agar setiap desa mengetahui wilayah masing-masing	Desa Padang Ulak Tanjung kecamatan talang empat, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Padang Ulak Tanjung	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
76	05-02-2026	PURNAWARMAN	Bantuan Sarana Posyandu, PMT	Gedung posyandu sudah bnyak yang rusak,dan kurangnya peralatanposyandu	dusun 2 desa padang betuah, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Padang Betuah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
77	05-02-2026	PURNAWARMAN	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan jalan wisata danau gedang yang saat ini sudah sangat rusak	Dusun 2 DesavPdang Betuah, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Padang Betuah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
78	05-02-2026	PURNAWARMAN	Sosialisasi peluang investasi desa	perlu diadakannya sosialisasi tentang investasi didesa krn sudah bnyak anak muda yang memulai usaha sendiri tapi blm mengetahui tentang investasi peluang usaha	desa padang betuah, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Padang Betuah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
79	06-02-2026	ERPAN	Rehabilitasi Jalan	Pinggiran jalan menuju pemakaman umum longsor, untuk itu dibutuhkan rehabilitasi jalan pembuatan bronjong pinggiran jalan agar tidak longsor dan akses menuju pemakaman umum tidak terputus.	DESA TABA MUTUNG, Kab. Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	Taba Mutung	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
80	06-02-2026	Bushari	Pembangunan Jembatan	Jembatan sungai Bengkulu sudah tidak layak pakai dengan kondisi rusak berat akibat bencana banjir setiap tahunnya.Menyebabkan aktivitas warga sangat terganggu,sehingga sangat diperlukan pembangunan jembatan permanen sungai Bengkulu dengan volume 70 m.	Dusun II Desa Taba Pasmah arah masuk gang kuburan penghubung Desa Taba Pasmah dengan Desa Harapan Makmur., Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Taba Pasmah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
81	06-02-2026	TUSIM	Pembangunan Jembatan	Jembatan Putus Akibat Banjir	Desa Penanding, Kab. Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	Penanding	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
82	06-02-2026	Bushari	Rekonstruksi Jalan	Aktivitas warga yang menggunakan akses jalan di Dusun III terganggu apalagi saat musim hujan tiba, jalan menjadi tergenang air sehingga sulit untuk dilalui,maka dari itu sangat diperlukan pembuatan jalan lapen dengan volume 1 km.	Dusun III Desa Taba Pasmah dekat Masjid, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Taba Pasmah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
83	06-02-2026	Bushari	Pembangunan Drainase Lingkungan	Saluran air tersumbat dikarenakan tidak adanya tempat pembuangan akhir limbah yang menyebabkan banjir saat musim hujan tiba,sehingga sangat dibutuhkan	Dusun II Desa Taba Pasmah dekat jembatan Kuburan Cina., Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Taba Pasmah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
				pembangunan drainase atau siring induk dengan volume 1000 m x 3 m.					
84	06-02-2026	ERPAN	Pembangunan Drainase Lingkungan	Diperlukan drainase sepanjang jalan agar air tidak masuk ke rumah warga	Desa Taba Mutung, Kab. Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	Taba Mutung	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
85	06-02-2026	TUSIM	Pembangunan Drainase Lingkungan	Drainase Sudah Rusak para karna sudah lama tidak dibangun	Desa Penanding, Kab. Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	Penanding	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
86	06-02-2026	Iksan Hermuna, S.Sos	Rehabilitasi Jembatan	mayoritas masyarakat mengambil hasil perkebunan melewati air sungai sehingga sangat dibutuhkan adanya jembatan gantung untuk menunjang hasil pertanian masyarakat	Dusun 1, Kab. Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	Kancing	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
87	06-02-2026	TUSIM	Rehabilitasi Jalan	Jalan Rusak parah , akses terganggu	Desa Penanding, Kab. Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	Penanding	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
88	06-02-2026	SAMSIR	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kegiatan sebagian besar masyarakat Desa Talang Empat Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah sehari-harinya menggunakan jalan tersebut untuk menuju perkebunan, persawahan dan lainnya. Karena memang tidak ada jalan alternative lain. Sehubungan jalan	Desa Talang Empat , Kab. Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	Talang Empat	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
				tersebut masih berupa tanah, maka permasalahan muncul apabila musim penghujan. serta jalan ini juga digunakan sebagai penghubung antara Kecamatan Karang Tiggi dan Kecamatan Pondok Kubang.					
89	06-02-2026	TUSIM	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Belum ada jalan untuk Akses para Petani	Desa Penanding, Kab. Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	Penanding	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
90	06-02-2026	ERPAN	Penambahan Tiang Listrik	diperlukan untuk penerangan desa	Desa Taba Mutung, Kab. Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	Taba Mutung	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
91	06-02-2026	ZAINAL ARIFIN, S.IP	Penambahan Tiang Listrik	Mengenai permasalahan yang dilihat dari latar belakang bahwasanya desa Durian Demang membutuhkan pengadaan tiang dan penerangan ataupun lampu jalan di dalam gang-gang yang ada di rumah warga agar mendapatkan akses penerangan dan mempermudah masyarakat dan mengurangi pencurian di sekitar gang tersebut.	Desa Durian Demang , Kab. Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	Durian Demang	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
92	06-02-2026	ZAINAL ARIFIN, S.IP	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Mengenai permasalahan yang dilihat dari latar belakang bahwanya sekolah SDN 46 Bengkulu Tengah membutuhkan penanganan cepat berupa pelapis tebing untuk mengurangi longsor di belakang gedung SDN 46 Bengkulu Tengah tersebut.	Desa Durian Demang , Kab. Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	Durian Demang	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
93	06-02-2026	ZAINAL ARIFIN, S.IP	Pemeliharaan Rutin Jalan	Mengenai Permasalahan Diatas yang dilihat dari latar belakang dapat di simpulkan bahwasanya bangunan drainase ini membutuhkan penahan tanah atau pagar pengaman agar tidak merusak kawasan bangunan drainase tersebut.	Desa Durian Demang, Kab. Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	Durian Demang	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
94	06-02-2026	Anggi Syaputra S.I.K	Penambahan Tiang Listrik	Masih ada titik lokasi jalan gelap jika malam hari dan mengganggu aktifitas	Dusun Baru II, Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	Dusun Baru II	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
95	06-02-2026	Anggi Syaputra S.I.K	Pembangunan Jaringan irigasi Primer Atau Sekunder	Bendungan irigasi yang rusak	Dusun Baru II, Dusun 1, Kab. Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	Dusun Baru II	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
96	06-02-2026	Ujang Supran	Pembangunan Drainase Lingkungan	sistem drainase yang kurang memadai, sehingga sering terjadi banjir	Desa pelajau, kecamatan karang tinggi, kabupaten bengkulu tengah., Kab. Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	Pelajau	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
97	06-02-2026	Taswin	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Masih Tanah masyarakat susah untuk mengeluarkan hasil perkebunan	desa ujung karang, Kab. Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	Ujung Karang	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
98	06-02-2026	Taswin	Penambahan Tiang Listrik	Masyarakat susah untuk beraktifitas di malam hari karena jalan gang yang gelap	desa ujung karang, Kab. Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	Ujung Karang	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
99	07-02-2026	Jamidan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Masih banyak jalan usaha tani yang belum bisa di lewati kendaraan bermotor	BINTANG SELATAN, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Bintang Selatan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
100	07-02-2026	Jamidan	Pembangunan Drainase Lingkungan	Banyak saluran pembuangan air dan limbah warga yang belum ada, masih melimpah kajalan	BINTANG SELATAN, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Bintang Selatan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
101	07-02-2026	Jamidan	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Banyak jalan kabupaten yang rawan longsor.	BINTANG SELATAN, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Bintang Selatan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
102	07-02-2026	Jamidan	Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni	Masih banyak rumah tidak layak huni	BINTANG SELATAN, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Bintang Selatan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
103	07-02-2026	Jamidan	Pengadaan sarana belajar	Masih belum ada Alat untuk permainan anak paud	BINTANG SELATAN, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Bintang Selatan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
104	07-02-2026	Jamidan	Bantuan Sarana Posyandu, PMT	masih banyak sarana prasarana posyandu yang belum ada	BINTANG SELATAN, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Bintang Selatan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
105	07-02-2026	Jamidan	Dana Hibah Pembangunan dan Rehabilitasi Masjid di Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah	masih membutuhkan dana perbaikan masjid	BINTANG SELATAN, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Bintang Selatan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
106	07-02-2026	Jamidan	Pelatihan kader kesehatan desa	kader masih sangat membutuhkan pelatihan	BINTANG SELATAN, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Bintang Selatan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
107	07-02-2026	Jamidan	Sarana dan Prasarana Olah Raga Tingkat Desa (HIBAH)	masih sangat membutuhkan sarana prasarana olahraga	BINTANG SELATAN, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Bintang Selatan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
108	07-02-2026	Jamidan	Bantuan (Hibah) Alat pertanian, benih	masih membutuhkan bantuan bibit sawit berkualitas dan baik	BINTANG SELATAN, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Bintang Selatan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
109	07-02-2026	Jamidan	Bantuan sosial berbasis masyarakat	masih banyak warga yang membutuhkan bantuan sosial	BINTANG SELATAN, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Bintang Selatan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
110	07-02-2026	Jamidan	Pemeliharaan Rutin Jalan	jalan desa dan kabupaten masih sangat membutuhkan pemeliharaan rutin	BINTANG SELATAN, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Bintang Selatan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
111	07-02-2026	Jamidan	Pelayanan dan penyuluhan KB	masyarakat masih sangat membutuhkan pendidikan dan penyuluhan tentang kb	BINTANG SELATAN, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Bintang Selatan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
112	07-02-2026	Jamidan	Bantuan alat dan mesin pertanian	petani masih sangat membutuhkan alat dan mesin untuk pertanian	BINTANG SELATAN, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Bintang Selatan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
113	07-02-2026	Jamidan	Pencegahan kekerasan terhadap anak	masih sangat membutuhkan pelatihan tentang perlindungan anak dan perempuan	BINTANG SELATAN, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Bintang Selatan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
114	07-02-2026	Jamidan	Pemeriksaan kesehatan gratis	masih banyak warga yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan gratis	BINTANG SELATAN, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Bintang Selatan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
115	08-02-2026	SRI PURWANTI	Penataan objek wisata desa	Belum dikelolanya dengan maksimal Potensi Wisata yang ada di desa karena kurangnya anggaran.	Dusun 2 & 3 Desa Jayakarta Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Jayakarta	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
116	08-02-2026	SRI PURWANTI	Rehabilitasi Jalan	Rusaknya Jalan Kabupaten Penghubung Desa Jayakarta-Desa Air Putih yang mengakibatkan susah dilalui jalan tersebut sehingga sering terjadi kecelakaan (Jatuh Karena Jalan buruk dan licin).	Jalan Dusun 3 Desa Jayakarta menuju Desa Air Putih sampai dengan Desa Air Putih, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Jayakarta	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
117	08-02-2026	SRI PURWANTI	Rehabilitasi Jembatan	Jembatan Penghubung di Jalan Lintas Desa Jayakarta-Desa Pulau Panggung yang ukurannya kurang maksimal sehingga ketika musim hujan tiba dan debit air tinggi sering terjadinya banjir di daerah sekitar dan air meluap ke jalan sehingga jalan tidak bisa dilewati.	Jembatan di dusun 1 Desa Jayakarta berbatasan dengan Desa Pulau Panggung (ujung Desa Jayakarta dekat PT. RoteK), Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Jayakarta	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
118	08-02-2026	SRI PURWANTI	Penambahan Tiang Listrik	Tidak adanya Lampu Penerangan Jalan pada malam hari sehingga berpotensi adanya tindakan kriminal yang terjadi.	Dusun 1,2,dan 3 Desa Jayakarta, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Jayakarta	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
119	08-02-2026	Asnaun	Rekonstruksi Jalan	Jalan yang ada di dusun 1 dan 2 desa air putih sudah sangat rusak sehingga mengganggu aktivitas masyarakat apa lagi saat musim hujan. Sering terjadi kecelakaan karena jalan sudah berbentuk tanah kuning.	Dusun 1 dan 2 Desa Air Putih, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Air Putih	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
120	08-02-2026	NOVAL ANANTA, MH	Alat tangkap Nelayan (Hibah atau Bantuan)	Minimnya kesejahteraan nelayan	Desa Pekik Nyaring dusun 5 kecamatan Pondok Kelapa Kab Benkulu Tengah, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Pekik Nyaring	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
121	08-02-2026	NOVAL ANANTA, MH	Rehabilitasi Jalan	Kondisi jalan sudah rusak dan susah untuk dilewati	Jalan dusun 1 samping gang kantor pos tembus ke dusun 2 dan jalan gang dusun 3 gang sekolah TK RA Habibillah, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Pekik Nyaring	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
122	08-02-2026	NOVAL ANANTA, MH	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kurangnya air di area persawahan pada musim tanam dan jalan menuju lahan pertanian yang belum di bangun	Dusun 1v dusun 2 dan Dusun 4, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Pekik Nyaring	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
123	08-02-2026	NOVAL ANANTA, MH	Penambahan Tiang Listrik	Minimnya Penerangan jalan	Dusun 1 sampai Dusun 5, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Pekik Nyaring	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
124	08-02-2026	NOVAL ANANTA, MH	Rehabilitasi Jalan	Kondisin jalan sudah rusak dan susah untuk dilewati	dusun 5 (jalan pariwisata pantai Dusun 5), Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Pekik Nyaring	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
125	08-02-2026	Arsandi	Penambahan Tiang Listrik	masih kurangnya tiang listrik tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk di desa menyebabkan beberapa rumah masih kesulitan mengakses listrik karena jarak rumah dan tiang jauh.	Desa Tengah Padang, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Tengah Padang	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
126	08-02-2026	Arsandi	Penambahan Tiang Listrik	kurangnya lampu jalan masih menjadi kendala aktifitas masyarakat di malam hari, ruang gerak masyarakat menjadi kurang leluasa dan rawan resiko kejahatan di beberapa titik jalan yang tidak memiliki lampu jalan	Desa Tengah Padang, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Tengah Padang	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
127	08-02-2026	Arsandi	Penambahan Tiang Listrik	rusaknya lampu jalan di beberapa titik di desa memerlukan perbaikan secepatnya untuk penerangan utama jalan desa bagi masyarakat	Desa Tengah Padang, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Tengah Padang	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
128	08-02-2026	Arsandi	Pembangunan Drainase Lingkungan	belum adanya plat dueker yang memadai membuat tersumbatnya aliran air ketika turunnya hujan dengan intensitas tinggi, sehingga meluapnya air tersebut membuat beberapa titik menjadi tergenang	Desa Tengah Padang, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Tengah Padang	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
129	09-02-2026	ALAMSYAH	Rehabilitasi Jalan	Peningkatan jalan desa antar permukiman	Dusun 1 Pall VIII Desa Pondok Kelapa, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Pondok Kelapa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
130	09-02-2026	ALAMSYAH	Rehabilitasi Jalan	Peningkatan jalan desa antar permukiman	Dusun Tanjung Sakti, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Pondok Kelapa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
131	09-02-2026	ALAMSYAH	Bantuan Sarana Posyandu, PMT	Perehapan gedung pustu wilayah kerja Puskesmas Pekik Nyaring	Dusun Sp Bliben, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Pondok Kelapa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
132	09-02-2026	ALAMSYAH	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pembangunan drainase di permukiman masyarakat desa, Tidak Ada Pembuangan Air Limbah Perumahan Dan Sering Terjadi Luapan Air Ketika Hujan Lebat	Dusun Sp Bliben, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Pondok Kelapa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
133	09-02-2026	EDI SUSANTO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Sulitnya akses masyarakat untuk mengangkut hasil tani	Desa Kelindang Kadun 1, Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Kelindang	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
134	09-02-2026	MULYANTONI	Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni	Masih ada beberapa rumah tidak layak huni	Desa Abu Sakim, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Abu Sakim	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
135	09-02-2026	MULYANTONI	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	kondisi jalan yang hancur, berlumpur dan menghambat proses pengangkutan hasil panen masyarakat.	Desa Abu Sakim, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Abu Sakim	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
136	09-02-2026	SAHRI	Rehabilitasi Jembatan	akses jalan kurang memadai	Desa Ulak Lebar , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Ulak Lebar	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
137	09-02-2026	MULYANTONI	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Talut Tebing Jalan yang tergerus air yang tidak ada tembok Penahan	Desa Abu Sakim, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Abu Sakim	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
138	09-02-2026	SAHRI	Rehabilitasi Jalan	Akses jalan sudah Mulai Rusak	Desa Ulak Lebar , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Ulak Lebar	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
139	09-02-2026	EDI SUSANTO	Rehabilitasi Jalan	Akses jalan Mulai Rusak	Kelindang , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Kelindang	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
140	09-02-2026	Arsandi	Sarana dan Prasarana Olah Raga Tingkat Desa (HIBAH)	perlunya perlengkapan olahraga untuk menambah produktifitas pemuda dan masyarakat yang ada di Desa	Desa Tengah Padang, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Tengah Padang	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
141	09-02-2026	EDI SUSANTO	Pembangunan Drainase Lingkungan	Belum ada Drainase sehingga banyak genangan air	Kelindang , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Kelindang	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
142	09-02-2026	MULYANTONI	Penambahan Tiang Listrik	beberapa Titik Belum ada Tiang Listrik	Desa Abu Sakim, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Abu Sakim	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
143	09-02-2026	ASMADI	Pembangunan Drainase Lingkungan	Dikarenakan gorong-gorong dan siring Jalan Kabupaten sudah Layak di perbaiki	Desa Pagar Dewa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terletak di Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Pagar Dewa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
144	09-02-2026	WIRAHADI,S.Sos	Rehabilitasi Jalan	Jalan Banyak bebatuan sehingga akses jalan sulit dilalui	Desa Lubuk Unen Baru , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Lubuk Unen Baru	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
145	09-02-2026	HERU SUSANTO. S.Pd.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Tanah berpotensi longsor maka diperlukan lapis tebing dan wilayah tersebut Pasar Kalangan Milik Aset Pemda	Desa Sidodadi RT. 03 Dusun 01 Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah., Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Sidodadi	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
146	09-02-2026	ASMADI	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Karena Rawan Longsor sehingga perluh Pembangunan Pelapis Tebing	Desa Pagar Dewa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terletak di Dusun I, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Pagar Dewa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
147	09-02-2026	WIRAHADI,S.Sos	Sarana dan Prasarana Olah Raga Tingkat Desa (HIBAH)	Tidak Ada sarana olahraga tingkat Desa	Desa Lubuk Unen Baru , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Lubuk Unen Baru	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
148	09-02-2026	ASMADI	Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni	Masih ada Rumah Warga yang Rumah nya Tidak layak Huni	Desa Pagar Dewa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terletak di Dusun I, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Pagar Dewa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
149	09-02-2026	MULYANTONI	Pelatihan kesiapsiagaan bencana desa	Kondisi Gedung BPBD tidak terawat dan belum bisa dimanfaatkan.	Desa Abu Sakim, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Abu Sakim	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
150	09-02-2026	IRIANTO, S.E	Pelatihan kesiapsiagaan bencana desa	LOKASI DESA BERBATASAN LANGSUNG DENGAN SAMUDRA HINDIA YANG RAWAN AKAN GEMPA DAN SUNAMI	DUSUN 3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Harapan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
151	09-02-2026	WIRAHADI,S.Sos	Pengadaan sarana bank sampah	Banyak sampah yang berserahkan sehingga lingkungan Kotor	Desa Lubuk Unen Baru , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Lubuk Unen Baru	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
152	09-02-2026	DEDI DARMAWAN	Pembangunan Drainase Lingkungan	Sempitnya jalan sehingga akses jalan terkendala	Desa Jambu , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Jambu	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
153	09-02-2026	DEDI DARMAWAN	Pembangunan Jaringan irigasi Primer Atau Sekunder	Irgasi banyak yang jobol	Desa Jambu , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Jambu	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
154	09-02-2026	DEDI DARMAWAN	Rehabilitasi Jembatan	Akibatnya akan longsor	Desa Jambu , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Jambu	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
155	09-02-2026	ASMADI	Penguatan perpustakaan desa	Karena Belum ada Gedung Perpustakaan di Desa	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Pagar Dewa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
156	09-02-2026	MULYANTONI	Rekonstruksi Jalan	kondisi jalan yang Rusak Berat dan berlobang yang berlokasi di Dusun III Desa Abu Sakim	Dusun III Desa Abu Sakim, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Abu Sakim	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
157	09-02-2026	ISKANDAR	Pembangunan Drainase Lingkungan	Rusak berat air tidak bisa mengalir dengan baik	dusun 3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Talang Boseng	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
158	09-02-2026	ISKANDAR	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	saat hujan Tanah mengalir kejalan menjadi jalan licin	dusun 1 dan 3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Talang Boseng	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
159	09-02-2026	MULYANTONI	Pelatihan literasi digital masyarakat	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bengkulu Tengah	Desa Abu Sakim, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Abu Sakim	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
160	09-02-2026	DARLIZ	Rehabilitasi Jalan	Jalan Banyak bebatuan sehingga jalan sulit untuk dilalui	Taba Durian Sebakul , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Taba Durian Sebakul	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
161	09-02-2026	DARLIZ	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Masyarakat banyak membutuhkan Irigasi	Taba Durian Sebakul , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Taba Durian Sebakul	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
162	09-02-2026	HENDERA. A	Bangunan Gedung, Kantor, Ruangan	Tidak ada tempat kalau ada Acara/ Kegiatan	Desa Talang Ambung , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Talang Ambung	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
163	09-02-2026	H. IDIL FITRI, S.Ag	Rekonstruksi Jalan	JALAN RUSAK DAN BECEK	DESA TALANG PAUH DUSUN 1, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Talang Pauh	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
164	09-02-2026	HENDERA. A	Rehabilitasi Jalan	Akses jalan yang dibutuhkan Masyarakat dalam mengangkut Hasil Panen	Desa Talang Ambung , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelintang	Talang Ambung	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
165	09-02-2026	MULYANTONI	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	hasil tanah gusuran membutuhkan bangunan penguat tebing	Desa Abu Sakim Dusun 1, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Abu Sakim	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
166	09-02-2026	H. IDIL FITRI, S.Ag	Rekonstruksi Jalan	JALAN RUSAK DAN BECEK	DESA TALANG PAUH DUSUN III, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Talang Pauh	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
167	09-02-2026	HENDERA. A	Pembangunan Jembatan	Sulitnya akses masyarakat	Desa Talang Ambung , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelintang	Talang Ambung	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
168	09-02-2026	GUNADI	Peningkatan sarana Posyandu	Bangunan Polindes rusak parah dan perlu perbaikan	Dusun 3 Sungai Kotong Dalam, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Sunda Kelapa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
169	09-02-2026	HENDERA. A	Pembangunan Drainase Lingkungan	Banyak genangan air jika terjadi hujan	Desa Talang Ambung , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelintang	Talang Ambung	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
170	09-02-2026	GUNADI	Rehabilitasi Jalan	Akses Jalan Menuju SMPN 14 Bengkulu Tengah Rusak parah, apabila hujan deras jalan tersebut becek dan tergenang air sehingga susah dilewati anak sekolah.	Dusun Kampung Tengah, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Sunda Kelapa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
171	09-02-2026	H. IDIL FITRI, S.Ag	Penguatan perpustakaan desa	meubler belum ada,buku belum ada,komputer belum ada	desa talang pauh dusun II, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Talang Pauh	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
172	09-02-2026	H. IDIL FITRI, S.Ag	Rekonstruksi Jalan	JALAN LAPEN RUSAK DAN HANCUR	DESA TALANG PAUH DUSUN 1, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Talang Pauh	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
173	09-02-2026	SUDIRJONO	Bangunan Gedung, Kantor, Ruangan	Sarana tidak memadai jika ada kegiatan atau acara tingkat desa karna kantor desa tidak ada	Desa Padang Kedeper , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Padang Kedeper	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
174	09-02-2026	SUDIRJONO	Pembangunan Jaringan irigasi Primer Atau Sekunder	jika terjadi hujan banyak genangan air	Desa Padang Kedeper , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Padang Kedeper	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
175	09-02-2026	SUDIRJONO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Masyarakat kesulitan membawa hasil panen	Desa Padang Kedeper , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Padang Kedeper	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
176	09-02-2026	SUDIRJONO	Dana Hibah Pembangunan dan Rehabilitasi Masjid di Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah	Keterbatasan lahan sehingga Lokasi Sempit serta sulitnya akses sholat berjemaah.	Desa Padang Kedeper , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Padang Kedeper	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
177	09-02-2026	M. SARJONI	Pembangunan Drainase Lingkungan	DRAINASE RUSAK BERAT SEPANJANG 1000 M	DUSUN 1 DUSUN 2 DAN DUSUN 3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Srikaton	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
178	09-02-2026	M. SARJONI	Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni	MASIH ADA RUMAH MASYARAKAT YANG TIDAK LAYAK HUNI	DUSUN 1,2 DAN 3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Srikaton	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
179	09-02-2026	M. SARJONI	Rehabilitasi Jalan	JALAN RUSAK SEPANJANG 1000 M	DUSUN 2 DAN DUSUN 3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Srikaton	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
180	09-02-2026	UJANG J	Rehabilitasi Jalan	Susahnya akses yang dilalui masyarakat	Desa Pungguk Beringin , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Pungguk Beringin	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
181	09-02-2026	UJANG J	Pembangunan Drainase Lingkungan	Banyak Genangan air jika hujan turun	Desa Pungguk Berignin , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Pungguk Beringin	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
182	09-02-2026	ABDUL SYAHRI	Rehabilitasi Jalan	Akses Jalan Rusak Berat Sekitar 1 Km sehingga sulit di lalui	Desa Pungguk Ketupak , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Pungguk Ketupak	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
183	09-02-2026	BAHARUDIN	Rehabilitasi ruang kelas sekolah	Kondisi gedung paud masi kurang efisien	Desa Lubuk Unen , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Lubuk Unen	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
184	09-02-2026	BAHARUDIN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Akses jalan sulit untuk dilalui	Desa Lubuk Unen , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Lubuk Unen	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
185	09-02-2026	Arsandi	Penambahan Tiang Listrik	beberapa rumah masyarakat masih belum memiliki meteran listrik sendiri	Desa Tengah Padang, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Tengah Padang	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
186	09-02-2026	BAHARUDIN	Pembangunan Drainase Lingkungan	Banyak genangan air yang merusak pemukiman warga	Desa Lubuk Unen , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Lubuk Unen	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
187	09-02-2026	MARDIANA, S.Pd	Pemeliharaan Rutin Jalan	Akses jalan kurang memadai sehingga masyarakat kesulitan untuk Lewat.	Desa Kelindang Atas , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Kelindang Atas	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
188	09-02-2026	MARDIANA, S.Pd	Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni	Keterbatasan Pendapatan Masyarakat	Desa Kelindang Atas , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Kelindang Atas	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
189	09-02-2026	MARDIANA, S.Pd	Bantuan (Hibah) Alat pertanian, benih	Susahnya mendapatkan bibit yang berkualitas	Desa Kelindang Atas , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Kelindang Atas	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
190	09-02-2026	MARDIANA, S.Pd	Penambahan Tiang Listrik	Masyarakat perlu penerangan Jalan	Desa Kelindang Atas , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Kelindang Atas	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
191	09-02-2026	SUANDI	Rehabilitasi Jalan	Akses Kurang sehingga masyarakat kesulitan membawa hasil pertanian sehingga akses ekonomi menurun	Desa Penembang , Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Penembang	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
192	09-02-2026	EDI SUSANTO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Akses jalan antar desa Kelindang menuju Bajak II rusak berat, berlubang, dan digenangi air sehingga masyarakat sangat kesulitan mengakses dan mendistribusi hasil panen mereka.	jalan Desa Kelindang dan menuju jalan Desa Bajak II, Kab. Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Kelindang	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
193	10-02-2026	RAMADAN S	Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni	Masih terdapatnya Rumah Yang Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Pasar Pedati Dusun 01, dusun 02, dusun 03, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Pasar Pedati	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
194	10-02-2026	RAMADAN S	Pemeliharaan Rutin Jalan	Peningkatan jalan hotmix dikarenakan jalan mulai adanya kerusakan dan butuh perbaikan	Desa Pasar Pedati Gang Coko - Gang Sungai Suci , Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Pasar Pedati	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
195	10-02-2026	RAMADAN S	Pemeliharaan Rutin Jalan	Peningkatan Jalan Hotmix dikarenakan Jalan mulai adanya kerusakan dan butuh perbaikan	Desa Pasar Pedati Gang Teluk Pering Dusun 01 dan Dusun 02, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Pasar Pedati	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
196	10-02-2026	RAMADAN S	Bantuan sarana budidaya ikan	Banyaknya nelayan belum adanya tempat pelelangan ikan sebagai tempat menjual hasil tangkapan nya	Desa Pasar Pedati Dusun 02, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Pasar Pedati	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
197	10-02-2026	RAMADAN S	Penambahan Tiang Listrik	Masih kurangnya lampu penerangan jalan karena masih terdapat beberapa titik nkekurangan penerangan	Desa Pasar Pedati Dusun 01, Dusun 02, Dusun 03, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Pasar Pedati	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
198	10-02-2026	RAMADAN S	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	semakin banyaknya abrasi di lingkungan pinggir pantai	Desa Pasar Pedati Dusun 01 dan Dusun 02, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Pasar Pedati	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
199	10-02-2026	RAMADAN S	Pembangunan MCK dan septic tank komunal	Fasilitas umum pariwisata dikarenakan masih kurangnya fasilitas umum MCK	Desa Pasar Pedati Dusun 01 dan Dusun 02, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Pasar Pedati	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
200	10-02-2026	Raki""in	Penambahan Tiang Listrik	tiang listrik yang tersedia di dusun I (satu) Desa Jum'at tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Jaringan listrik yang ada dan digunakan oleh masyarakat saat ini masih memakai sistem estafet sehingga sering terjadi konsleting listrik yang akan menimbulkan gangguan dan bahaya.	Jalan Raya Kembang Seri - Taba Lagan Km. 7 Kode Pos 38385, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Jum'at	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
201	10-02-2026	ENDRI RUPIYAN	Penambahan Tiang Listrik	masih minimnya penerangan dijalan raya	desa kembang seri, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Kembang Seri	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
202	10-02-2026	ENDRI RUPIYAN	Bangunan Gedung, Kantor, Ruangan	masih buruknya jalan penghubung (+-200m)	dusun 4 desa kembang seri, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Kembang Seri	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
203	10-02-2026	Raki""in	Penambahan Tiang Listrik	masyarakat sangat membutuhkan pemasangan penerangan jalan, agar memberikan rasa aman dan nyaman serta dapat mendukung aktifitas masyarakat pada malam hari	Jalan Raya Kembang Seri - Taba Lagan Km. 7 Kode Pos 38385, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Jum'at	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
204	10-02-2026	ENDRI RUPIYAN	Penataan kawasan permukiman kumuh	masih tersumbatnya aliran sungai kabu desa kembang seri	dusun 2,4 desa kembang seri, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Kembang Seri	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
205	10-02-2026	Elvi Febriyanti	Pembangunan Jaringan irigasi Primer Atau Sekunder	Kondisi siring pembuangan akhir desa belum dapat dibangun melalui dana desa, belum lagi pada musim penghujan kapasitas penampungan yang di alirkan ke pembuangan akhir desa tersebut sudah tidak bisa tertampung lagi serta kondisinya yang harus segera mendapatkan perhatian.	Desa Nakau Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Nakau	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
206	10-02-2026	Elvi Febriyanti	Rehabilitasi Jalan	1. Kondisi bahu jalan yang belum di Semenisasi sehingga menjadi penurunan pada timbunan bahu jalan. 2. Pengikisan atau erosi yang berkepanjangan akan mengakibatkan keretakan pada aspal jalan.	Desa Nakau , Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Nakau	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
207	10-02-2026	Elvi Febriyanti	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1. Jalan usaha tani merupakan jalur transportasi yang digunakan oleh masyarakat Desa Nakau dalam hal menyangkut hasil bumi atau pertanian. 2. Jalan tersebut merupakan jalur para Petani Desa Nakau. 3. Kondisi Jalan yang sempit dan masih berupa jalan koral dan tanah	Desa Nakau Dusun 4, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Nakau	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
208	10-02-2026	Elvi Febriyanti	Rekonstruksi Jalan	Masih ada jalan yang belum di tingkatkan ke HOTMIC sepanjang 850 m jalan ini merupakan jalan yang dibangun oleh kabupaten	Desa Nakau Dusun 3, Kab. Bengkulu Tengah	Talang Empat	Nakau	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
209	13-02-2026	Fauzi	Rekonstruksi Jalan	Rusak Berat	Jl. Transos 40 Desa Dusun Baru I, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kubang	Dusun Baru I	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
210	20-02-2026	ISKANDAR	Penambahan Tiang Listrik	penambahan lampu jalan tiap tikungan yang rawan kecelakaan	dusun 1,dan 3, Kab. Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Talang Boseng	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
211	24-02-2026	Anggi Syaputra S.I.K	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	belum adanya sarana jalan yang tembus dari karang tinggi, ke Dusun Baru II, Durian Demang	Dusun Baru II, Kab. Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	Dusun Baru II	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
212	25-02-2026	LENA NINGSIH. AZ	Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni	Rumah Masih Lantai Tanah Dinding papan Kamar mandi Dan Kamar Belum Ada	Desa Pagar jati Kecamatan Pagar Jati Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu , Kab. Bengkulu Tengah	Pagar Jati	Pagar Jati	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
213	25-02-2026	LENA NINGSIH. AZ	Bangunan Gedung, Kantor, Ruangan	Di Desa kami Belum Ada Sarana olahraga Anak Anak Remaja Dan Dewasa Sejak Dulu ,Supaya Bisa Menjadi Desa Aktif dan Berkembang	Desa Pagar jati Kecamatan pagar jati Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, Kab. Bengkulu Tengah	Pagar Jati	Pagar Jati	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
214	25-02-2026	LENA NINGSIH. AZ	Penataan objek wisata desa	Untuk Desa Berkembang Dan Desa Terkenal Supaya Desa kami Ada Wisata Dan Tempat Wisata Alam Dengan Sungai air Yg bagus Dapat Di Nikmati Masyarakat Dan Para Pengunjung	Desa Pagar jati Kecamatan pagar Jati Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu , Kab. Bengkulu Tengah	Pagar Jati	Pagar Jati	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
215	25-02-2026	ARPEN WAHYUDI	Penanganan pencemaran lingkungan desa	Saluran tidak bisa menampung debit air hujan sehingga air kejalan	DESA DATAR PENOKOT, Kab. Bengkulu Tengah	Pagar Jati	Datar Penokat	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
216	25-02-2026	MERI SUSANTO	Bangunan Gedung, Kantor, Ruangan	Kantor Desa Karang Are sudah sangat rusak dan belum memiliki WC sendiri dan atap sudah banyak bocor dan tidak mempunyai ruang rapat	Desa Karang Are Kecamatan Pagar jati kabupaten Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Tengah	Pagar Jati	Karang Are	Kabupaten / Kota	Dibatalkan
217	25-02-2026	MERI SUSANTO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Dalam Desa karang Are sudah sangat rusak dan banyak batu yang berserkan sehingga apabila ada kendaraan yang melintas mengakibatkan batu terpental kerumah warga dan sering mengakibatkan pengendara jatuh	Karang Are, Kec, Pagar Jati, Kab, Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Tengah	Pagar Jati	Karang Are	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
218	25-02-2026	MERI SUSANTO	Bangunan Gedung, Kantor, Ruangan	Kantor Desa Karang Are sudah Banyak atap yang bocor dan belum memiliki Wc sendiri dan harus menumpang rumah warga dan belum memiliki ruang rapat	Karang Are, Kec, Pagar Jati, Kab, Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Tengah	Pagar Jati	Karang Are	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
219	25-02-2026	MERI SUSANTO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan penghubung antar Ddesa yaitu Desa Karang Are dan Desa Raja Besi,jalan tersebut belum pernah tersentuh oleh pembangunan, dan merupakan jalan alternatif bagi petani unutm mengeluarkan hasil pertanian	Karang Are, Kec, Pagar Jati, Kab, Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Tengah	Pagar Jati	Karang Are	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
220	26-02-2026	RINTO HARAHAHAP	Rekonstruksi Jalan	Jalan rusak	Jl.Penghubung Desa Padang Siring dan Karang Nanding, Kab. Bengkulu Tengah	Semidang Lagan	Padang Siring	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
221	26-02-2026	HARDI ERYANJAYA	Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni	Masih ada warga yang tinggal di rumah yang cukup memprihatinkan	Desa Taba Renah, Kab. Bengkulu Tengah	Pagar Jati	Taba Renah	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
222	26-02-2026	HARDI ERYANJAYA	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Rawan Longsor	Desa Taba Renah, Kab. Bengkulu Tengah	Pagar Jati	Taba Renah	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
223	26-02-2026	Mawardi	Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni	Masih banyaknya rumah yang sangat membutuhkan bantuan untuk di rehab.	Desa Keroya, Kab. Bengkulu Tengah	Pagar Jati	Keroya	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
224	26-02-2026	REKI SAPUTRA	Penambahan Tiang Listrik	Tidak terkaper oleh dana desa sedangkan penerangan jalan desa sangat d butuhkan	Desa arga indah 1, Kab. Bengkulu Tengah	Pagar Jati	Arga Indah I	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
225	26-02-2026	REKI SAPUTRA	Rehabilitasi Jalan	Tidak terkaper oleh dana desa sedangkan jalan lingkungan yg d gunakan oleh warga suda sangat rusak	Desa arga indah 1, Kab. Bengkulu Tengah	Pagar Jati	Arga Indah I	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
226	26-02-2026	TAHIDIN	Pembangunan Jembatan	Pada beberapa waktu tahun yang lalu terjadi bencana besar hingga menyebabkan jembatan penghubung usaha pertanian warga desa tumbuk dan sekitarnya. Saat ini warga tersebut sangat membutuhkan pembagunan jembatan tesebut sehingga ketika	Desa Tumbuk kec pagar jati kabupaten Bengkulu Tengah provinsi Bengkulu kadun 2 , Kab. Bengkulu Tengah	Pagar Jati	Tumbuk	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
				air sungai naik masyarakat desa tumbuk dan sekitarnya tidak menunggu lama air surut kembali.					
227	26-02-2026	TAHIDIN	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Didesa tumbuk ada beberapa titik rawan longsor 1. Dikadun 1 yang berada di dekat rumah warga An ibu melni drainase tempat air mengalir ketika air hujan lebat 2. Dikadun 2 tempatnya di belakang rumah bapak tardiono 3. Dll Kami sangat membutuhkan atau secepatnya untuk pembagunan pelapis tebing atau yang lainnya guna untuk mencegah adanya bencana longsor dan lainnya.	Desa Tumbuk kec pagar jati kabupaten Bengkulu Tengah provinsi Bengkulu kadun 2 dan 3, Kab. Bengkulu Tengah	Pagar Jati	Tumbuk	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
228	26-02-2026	PAIZAL ASUWAN	Pembangunan Drainase Lingkungan	Jika turun hujan aliran air menggerus bahu jalan	Desa Pagar Jati, Kab. Bengkulu Tengah	Semidang Lagan	Pagar Jati	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
229	26-02-2026	PAIZAL ASUWAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan utama menuju perkebunan warga apabila hujan susah untuk dilalui oleh kendaraan	Dusun 3 Desa Pagar Jati, Kab. Bengkulu Tengah	Semidang Lagan	Pagar Jati	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
230	26-02-2026	PAIZAL ASUWAN	Bantuan (Hibah) Alat pertanian, benih	Belum adanya bibit buah-buahan unggul untuk masyarakat desa Pagar Jati	Desa Pagar Jati, Kab. Bengkulu Tengah	Semidang Lagan	Pagar Jati	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
231	26-02-2026	Nasrun	Rehabilitasi Jalan	banyaknya jalan kabupaten di desa genting yang rusak parah serta berlobang , ada juga jalan yang menuju Koperasi desa merah putih desa genting yang saat ini jalanya rusak dan tidak layak dengan panjang kurang lebih 3km	jl. desa genting, kecamatan bang haji, kab. bengkulu tengah, prov. bengkulu, Kab. Bengkulu Tengah	Bang Haji	Genting	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
232	26-02-2026	AKOMAINI	Rehabilitasi Jalan	Banyaknya jalan kabupaten di desa air napal yang saat ini rusak parah di dekat pemukiman desa maupun jalan kabupaten yang menuju lokasi kebun warga. dengan panjang jalan kurang lebih 3km	jl. Desa Air Napal, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, Prov Bengkulu, Kab. Bengkulu Tengah	Bang Haji	Air Napal	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
233	26-02-2026	Nasrun	Rehabilitasi Jalan	banyaknya jalan kabupaten di desa genting yang rusak parah serta berlobang , ada juga jalan yang menuju Koperasi desa merah putih desa genting yang saat ini jalanya rusak dan tidak layak dengan panjang kurang lebih 3km	jl. Desa Genting, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Kab. Bengkulu Tengah	Bang Haji	Genting	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
234	27-02-2026	Edi Yanto	Pembangunan Drainase Lingkungan	Ruas jalan desa masih sering terjadi genangan air saat musim hujan karena belum tersedianya drainase di kiri kanan jalan kabupaten	jalan lintas kabupaten desa padang burnai , Kab. Bengkulu Tengah	Bang Haji	Padang Berunai	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
235	27-02-2026	Edi Yanto	Penambahan Tiang Listrik	terdapat beberapa wilayah pemukiman yang belum terjangkau jaringan listrik secara optimal	jalan desa padang burnai, Kab. Bengkulu Tengah	Bang Haji	Padang Berunai	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
236	27-02-2026	Edi Yanto	Dana Hibah Pembangunan dan Rehabilitasi Masjid di Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah	Pembangunan Masjid yang kurang anggaran hingga memperlambat pembangunan saat ini sudah mencapai 60% namun tertahan anggaran yang belum ada.	Desa Padang Burnai, Kec. Bang Haji, Kab. Bengkulu Tengah, Prov. Bengkulu, Kab. Bengkulu Tengah	Bang Haji	Padang Berunai	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
237	27-02-2026	Mujib	Rehabilitasi Jalan	Banyaknya jalan kabupaten di wilayah desa talang panjang rusak parah terkhususnya jalan dari wilayah desa kota titik genting menuju desa talang panjang yang menghubungkan antar desa tetangga dengan panjang kurang lebih km, serta pengajuan jalan dari simpang bliben pondok kelapa Menuju Desa Talang Panjang Dengan	Desa Talang Panjang, Kec. Bang Haji, Kab. Bengkulu Tengah. Prov. Bengkulu, Kab. Bengkulu Tengah	Bang Haji	Talang Panjang	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
				Panjang kurang lebih 8km					
238	27-02-2026	Mujib	Pembangunan Drainase Lingkungan	Siring Jalan Kabupaten di wilayah pemukiman sudah banyak yang rusak serta tertimbun oleh tanah yang membuat aliran air saat musim penghujan menjadi lambat, sehingga menciptakan banjir dan genangan air yang cukup lama kering sehingga membuat jalan kabupaten semakin cepat rusak dengan panjang siring kurang 2km	Desa Talang Panjang, Kec. Bang Haji, Kab. Bengkulu Tengah. Prov. Bengkulu, Kab. Bengkulu Tengah	Bang Haji	Talang Panjang	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
239	27-02-2026	Edi Aryanto	Bangunan Gedung, Kantor, Ruangan	kantor desa kurang memadai,	Kadun 2,Desa Renah Kandis, Kab. Bengkulu Tengah	Pagar Jati	Rena Kandis	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
240	01-03-2026	ELMAN SAPUTRA	Pemeliharaan Rutin Jalan	Perbaikan jalan lintas kabupaten dari simpang pasar pedati kecamatan Pondok Kelapa menuju ke Kecamatan Bang Haji yang mana jalan saat ini banyak yang rusak berlobang	jl. Sekayun Mudik-Pasar Pedati, Kab. Bengkulu Tengah	Bang Haji	Sekayun Mudik	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
241	01-03-2026	ELMAN SAPUTRA	Rehabilitasi Jalan	Pembangunan jalan hotmix dan Siring aset kabupaten di lingkungan 3 desa (desa Sekayun mudik, Sekayun dan bang haji), panjang 750 meter lebar	Desa Sekayun Mudik, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Kab.	Bang Haji	Sekayun Mudik	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
				5 meyer	Bengkulu Tengah				
242	01-03-2026	Mulyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Banyaknya Jalan Usaha Tani di desa Sungkai Berayun yang rusak Parah kurang lebih 5KM yang mana menghambat distribusi sawit dari lahan masyarakat keluar jalan utama	Jl. Desa Sungkai Berayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah , provinsi Bengkulu, Kab. Bengkulu Tengah	Bang Haji	Sungkai Berayun	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
243	01-03-2026	Mulyono	Penataan objek wisata desa	Adanya Objek Wisata Ngungup di Desa Sungkai Berayun yang saat ini kurang terawat di karenakan sulitnya akses jalan menuju lokasi Wisata, dan juga adanya akses jalan yang tidak bisa terhubung, Harapan dari kami pemerintah desa untuk bantuan Kabupaten agar dapat melakukan Perbaikan serta melengkapi fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di wisata Ngungup Desa Sungkai Berayun	jl. Desa Sungkai Berayun , Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Kab. Bengkulu Tengah	Bang Haji	Sungkai Berayun	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
244	02-03-2026	RINTO HARAHAHAP	Rekonstruksi Jalan	Belum ada siring	Jalan Penghubung Desa Padang Siring - Karang Nanding, Kab. Bengkulu Tengah	Semidang Lagan	Padang Siring	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perencanaan program yang akan dilaksanakan tahun 2027 diselaraskan dengan RPJMD Tahun 2025-2029 pelaksanaan tahun 2027, dan hasil kesepakatan rakortekbang tahun 2026 atas keselarasan asta cita dengan RKPD 2027 serta keselarasan ProSN/Tematik Pembangunan dengan RKPD 2027. Adapun keselarasan program RKPD Tahun 2027 dengan RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Konsistensi Program Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2027

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2027	JUMLAH PROGRAM RKPD TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	6	6	1.01.2.22.0.00.02.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	1.02.0.00.0.00.12.000 0 - DINAS KESEHATAN	
3	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9	9	1.03.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
4	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	6	1.04.2.10.0.00.13.000 0 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Penambahan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh mendukung Asta Cita
5	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	2	1.05.0.00.0.00.01.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
6	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	2	1.05.0.00.0.00.14.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2027	JUMLAH PROGRAM RKPD TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
7	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	2	1.05.0.00.0.00.15.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
8	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5	5	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
9	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4	4	2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
10	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	7	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
11	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	5	2.09.3.25.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
12	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2	2	1.04.2.10.0.00.13.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
13	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	11	11	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
14	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	2.12.0.00.0.00.16.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
15	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	5	2.13.0.00.0.00.17.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
16	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	3	3	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,	

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2027	JUMLAH PROGRAM RKPD TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	BERENCANA			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
17	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2	2	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	
18	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	2.16.2.20.2.21.03.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
19	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7	6	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH	Program Penilaian Kesehatan/usp koperasi tidak diakomodir karena keterbatasan anggaran
20	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	5	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
21	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	4	2.19.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
22	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	2.16.2.20.2.21.03.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
23	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	2.16.2.20.2.21.03.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
24	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5	3	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Program Pembinaan Sejarah, dan Program Pengelolaan Permuseuman tidak diakomodir
25	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	2	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
26	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	1	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip tidak

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2027	JUMLAH PROGRAM RKPD TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
					diakomodir karena keterbatasan anggaran
27	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	3	2.09.3.25.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
28	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5	5	3.26.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PARIWISATA	
29	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	7	7	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN	
30	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1	1	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
31	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7	3	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Pengembangan Ekspor, dan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri tidak diakomodir
32	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH	
33	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	2	1	2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi tidak diakomodir karena keterbatasan anggaran
34	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	3	3	4.01.0.00.0.00.18.0000 - SEKRETARIAT DAERAH	

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2027	JUMLAH PROGRAM RKPD TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
35	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	2	2	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD	
36	5.01 - PERENCANAAN	3	3	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
37	5.02 - KEUANGAN	4	4	5.02.0.00.0.00.19.0000 - BADAN KEUANGAN DAERAH	
38	5.03 - KEPEGAWAIAN	2	2	5.03.5.04.0.00.20.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
39	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	5.03.5.04.0.00.20.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
40	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2	2	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
41	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	3	3	6.01.0.00.0.00.21.0000 - INSPEKTORAT DAERAH	
42	7.01 - KECAMATAN	4	2	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN PONDOK KELAPA	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tidak diakomodir karena keterbatasan anggaran
43	7.01 - KECAMATAN	5	5	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN PAGAR JATI	
44	7.01 - KECAMATAN	5	5	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PONDOK KUBANG	
45	7.01 - KECAMATAN	5	5	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN MERIGI SAKTI	

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2027	JUMLAH PROGRAM RKPDTAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
46	7.01 - KECAMATAN	4	4	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN BANG HAJI	
47	7.01 - KECAMATAN	5	5	7.01.0.00.0.00.22.0000 - KECAMATAN KARANG TINGGI	
48	7.01 - KECAMATAN	5	5	7.01.0.00.0.00.23.0000 - KECAMATAN TALANG EMPAT	
49	7.01 - KECAMATAN	5	5	7.01.0.00.0.00.24.0000 - KECAMATAN MERIGI KELINDANG	
50	7.01 - KECAMATAN	3	3	7.01.0.00.0.00.25.0000 - KECAMATAN SEMIDANG LAGAN	
51	7.01 - KECAMATAN	4	4	7.01.0.00.0.00.26.0000 - KECAMATAN PEMATANG TIGA	
52	7.01 - KECAMATAN	6	6	7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN TABA PENANJUNG	
53	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	5	8.01.0.00.0.00.27.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2027 merupakan turunan dari prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah disusun oleh pemerintah. Prioritas dan sasaran pembangunan tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang RKPDT yang melibatkan seluruh OPD dan komponen masyarakat. Rekapitulasi kebutuhan pendanaan terhadap upaya pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, rumusan program dan kegiatan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Rekapitulasi Rencana Kebutuhan Pendanaan Indikatif
Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2027

No	OPD	PAGU
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	197.342.080.433
2	DINAS KESEHATAN	98.175.318.504

No	OPD	PAGU
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKULU TENGAH	17.500.000.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	90.387.540.868
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.915.380.280
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.139.915.149
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.027.545.467
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	6.351.846.865
9	DINAS SOSIAL	3.680.418.259
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.361.841.244
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.072.071.520
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	3.986.134.865
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.226.968.324
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.611.467.644
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.522.108.046
16	DINAS PERHUBUNGAN	5.089.164.885
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	6.212.227.666
18	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH	3.352.911.518
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.983.987.309
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.129.156.314
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.905.719.774
22	DINAS PARIWISATA	3.643.213.534
23	DINAS PERTANIAN	9.650.021.646
24	SEKRETARIAT DAERAH	29.245.967.603
25	SEKRETARIAT DPRD	28.517.301.804
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.737.241.326
27	BADAN KEUANGAN DAERAH	105.979.503.696
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.616.627.266
29	INSPEKTORAT DAERAH	7.117.455.924
30	KECAMATAN PONDOK KELAPA	2.376.645.605
31	KECAMATAN PAGAR JATI	1.425.523.898
32	KECAMATAN PONDOK KUBANG	1.261.665.938

No	OPD	PAGU
33	KECAMATAN MERIGI SAKTI	1.206.857.430
34	KECAMATAN BANG HAJI	1.345.497.097
35	KECAMATAN KARANG TINGGI	1.479.895.390
36	KECAMATAN TALANG EMPAT	2.035.129.369
37	KECAMATAN MERIGI KELINDANG	1.668.916.355
38	KECAMATAN SEMIDANG LAGAN	1.328.466.218
39	KECAMATAN PEMATANG TIGA	1.651.108.514
40	KECAMATAN TABA PENANJUNG	2.371.239.613
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.511.538.904
TOTAL BIAYA		708.143.622.064

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.									
			Tercapainya Target realisasi Penanaman Modal								
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2.18.05.2.0 1.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100	Kegiatan Usaha	Rp 3.000.000,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					2.18.05.2.0 1.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan	8	Kegiatan Usaha	Rp 5.000.000,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				SATU PINTU
2.	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERDAGAN GAN	Melanjutka n hilirisasi dan mengemba ngkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkat kan nilai tambah di dalam negeri.									
			Meningkat nya Perdagang an melalui Integrasi Rantai Pasar								

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Domestik dan Global								
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							
					3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	1	Pelaku Usaha	Rp 3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI-UKM
3.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		negeri.									
			Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional								
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
					3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	Rp 12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI-UKM
					3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	1	Dokumen	Rp 115.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI-

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Peran Serta Masyarakat	Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				UKM
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							
					3.31.03.2.0 1.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota	1	Dokumen	Rp 1.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI-UKM

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang u				
					3.31.03.2.0 1.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/st andar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/s tandar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha	1	Dokume n	Rp 1.000.000,0 0	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI-UKM

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Menengah- Tinggi dan Tinggi,				
4.	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutka n hilirisasi dan mengemba ngkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkat kan nilai tambah di dalam negeri. Memantap kan sistem pertahana n keamanan negara dan									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru									
			Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan								
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM							

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				PENYEDIAAN AIR MINUM							
					1.03.03.2.0 1.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1	Dokumen	Rp 575.200.000 ,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.03.2.0 1.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400	SR	Rp 4.179.771.2 50,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM							

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				AIR LIMBAH							
					1.03.05.2.0 1.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1	Dokume n	Rp 486.500.000 ,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				PROGRAM PENYELENG GARAAN JALAN							
					1.03.10.2.0 1.0055	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1	KM	Rp 2.000.000.0 00,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.10.2.0 1.0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruks i	8,46	KM	Rp 21.123.864. 000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				PROGRAM PENGEMBAN GAN JASA KONSTRUKSI							
					1.03.11.2.0 4.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggara an Jasa Konstruksi Kabupaten/Ko ta	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Ko ta yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggara an	10	Paket Pekerjaa n	Rp 16.500.000, 00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.11.2.0 4.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara an, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara an, dan Tertib Pemanfaatan Produk	2	Lembaga	Rp 98.400.000, 00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERHUBU NGAN	Melanjutka n hilirisasi dan mengemba ngkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkat kan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutka n pengemba ngan infrastrukt ur dan meningkat kan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.									
			Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu								

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Lintas dan Angkutan Jalan								
				PROGRAM PENYELENG GARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
					2.15.02.2.0 2.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta yang Tersedia	80	Unit	Rp 205.000.000 ,00	DINAS PERHUBUNG AN
6.	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PANGAN	Memantap kan sistem pertahana n keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swasemba da pangan,									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru									
			Meningkat nya ketahanan pangan								
				PROGRAM PENINGKATA N DIVERSIFIKA SI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
					2.09.03.2.0 1.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50	Keluarga	Rp 3.200.000,0 0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2.09.03.2.0 1.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Ko ta	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Ko ta	1	laporan	Rp 3.410.000,0 0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
7.	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantap kan sistem pertahana n keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swasemba da pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		biru									
			Terwujudn ya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanju tan								
				PROGRAM PENGELOLAA N PERIKANAN BUDIDAYA							
					3.25.04.2.0 4.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Prasarana Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	1	Unit	Rp 300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8.	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERTANIAN	Memantap kan sistem pertahana n keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swasemba da pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru									
			Meningkat nya Produksi Pertanian								
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN SARANA							

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				PERTANIAN							
					3.27.02.2.0 1.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	Laporan	Rp 10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
					3.27.02.2.0 1.0003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	10	Ton	Rp 100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					3.27.03.2.0 1.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B yang dikelola	1	Dokumen	Rp 115.000.000 ,00	DINAS PERTANIAN
					3.27.03.2.0 1.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B	1	Dokumen	Rp 100.000.000 ,00	DINAS PERTANIAN

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Kabupaten/Kota					
9.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.									
			Menguatkan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah								
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANA N INFORMASI							

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2.21.02.2.0 1.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Laporan	Rp 10.000.000, 00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A DAN STATISTIK
1 0.	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG LINGKUNG AN HIDUP	Memantap kan sistem pertahana n keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swasemba da pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan , alam, dan budaya serta peningkata n toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyaraka t yang adil dan makmur.									
			Lingkunga n Hidup Berkualita								

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			s								
				PROGRAM PENGENDALI AN PENCEMARA N DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
					2.11.03.2.0 1.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	20	Lokasi	Rp 30.000.000, 00	DINAS LINGKUNGA N HIDUP

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

Tabel 5.3 Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027											
N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2.11.03.2.0 1.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1	Dokumen	Rp 10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
					2.11.06.2.0 1.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat	1	Dokumen	Rp 10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Kelayakan Operasi yang Diberikan				
					2.11.06.2.0 1.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	40	Badan Usaha	Rp 10.000.000, 00	DINAS LINGKUNGA N HIDUP

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.									
1.			Terpenuhi nya rumah layak, terjangkau , dan berkelanjutan								
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							
					1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak	Jumlah Rumah Tidak	120	Unit Rumah	Rp 100.000.000	DINAS PERUMAHAN

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Layak Huni	Layak Huni yang Diperbaiki			,00	KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
					1.04.05.2.0 1.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	5	Lokasi	Rp -	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataa	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		n ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.									
13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		(SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
			Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial								

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
					1.06.02.2.0 3.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Lembaga	Rp 10.000.000,00	DINAS SOSIAL
					1.06.02.2.0 3.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	100	Orang	Rp 10.000.000,00	DINAS SOSIAL
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN							

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				JAMINAN SOSIAL							
					1.06.05.2.0 2.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Usulan Penindaklayak an, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1000	Usulan	Rp 28.800.000, 00	DINAS SOSIAL
1 4.	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskina									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
<i>(1)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>
		n. Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan									

Tabel 5.3 Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027											
N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		penyandan g disabilitas.									
			Meningkat nya kinerja pembangu nan ketenagake rjaan								
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVIT AS TENAGA KERJA							

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2.07.03.2.0 1.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berdasarkan Kompetensi pada Tahun n	16	Orang	Rp 55.000.000, 00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI
1 5.	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEMBERD AYAAN MASYARAK AT DAN DESA	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskina n. Memperku at									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan , alam, dan budaya serta peningkata n toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyaraka t yang adil dan makmur.									
			Meningkat nya Kemandiri an Pedesaan yang Berkelanju tan yang								

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa								
				PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA							
					2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	Dokumen	Rp 35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
					2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	426	Orang	Rp 25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2.13.04.2.0 1.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		Dokume n	0	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA
1 6.	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG STATISTIK	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.									
			Tercapainy a kolaborasi,								

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			integrasi, dan standardis asi dalam penyelengg araan Sistem Statistik Nasional (SSN)								
				PROGRAM PENYELENG GARAAN STATISTIK SEKTORAL							
					2.20.02.2.0 1.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	37	%	Rp 10.000.000, 00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A DAN STATISTIK
					2.20.02.2.0 1.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah	29,17	%	Rp 5.000.000,0 0	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A DAN STATISTIK

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Statistik Nasional	mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah				
1 7.	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KOMUNIKA SI DAN INFORMATI KA	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Memperko koh									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).									
			Terakselerasinya transformasi pemerintahan digital di daerah								
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
					2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	40	Orang	Rp 136.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							
					2.16.03.2.0 2.0040	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	40	Titik	Rp 1.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
1 8.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan , alam, dan budaya serta peningkatan toleransi									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		antarumat beragama untuk mencapai masyaraka t yang adil dan makmur.									
			Meningkat nya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implement asi nilai- nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaa n, ketahanan ekonomi dan sosial budaya,								

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			serta kewaspadaan nasional								
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							
					8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	15	Orang	Rp 5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan				
					8.01.03.2.0 1.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan	15	Orang	Rp 5.000.000,0 0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Politik, Pemilihan Umum/Pemili han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemili han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol				
				PROGRAM PENINGKATA N KEWASPADA AN NASIONAL DAN PENINGKATA N KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANA N KONFLIK SOSIAL							

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					8.01.06.2.0 1.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga	25	Orang	Rp 5.000.000,0 0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					8.01.06.2.0 1.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	25	Orang	Rp 5.000.000,0 0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1 9.	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERTANAH AN	Melanjutka n pengemba ngan infrastrukt ur dan meningkat kan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausa haan, mengemba ngkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		koperasi.									
			Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkat									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	DAN MENENGA H	kan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausa haan, mengemba ngkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.									
			Meningkat nya Produktivit as Koperasi dan UMKM								

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				PROGRAM PEMBERDAY AAN DAN PERLINDUNG AN KOPERASI							
					2.17.06.2.0 1.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisas i Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha	55	Unit Usaha	Rp 2.000.000,0 0	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI- UKM
				PROGRAM PEMBERDAY AAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN							

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				USAHA MIKRO (UMKM)							
					2.17.07.2.0 1.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	55	Orang	Rp 14.000.000, 00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI- UKM
					2.17.07.2.0 1.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	1	Kegiatan	Rp 2.000.000,0 0	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI- UKM
2 1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausa haan, mengemba ngkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.									
			Meningkat nya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional								
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							
					3.26.03.2.0 1.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1	Kegiatan	Rp 25.000.000,00	DINAS PARIWISATA
					3.26.03.2.0 1.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik,	1	Promosi	Rp 5.000.000,00	DINAS PARIWISATA

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

Tabel 5.3 Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027											
N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Luar Negeri	dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							
					3.26.04.2.0 2.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	25	Kegiatan	Rp 25.000.000,00	DINAS PARIWISATA

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2 2.	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEBUDAYA AN	Melanjutka n pengemba ngan infrastrukt ur dan meningkat kan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausa haan, mengemba ngkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		koperasi. Memperku at penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan , alam, dan budaya serta peningkata n toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyaraka t yang adil dan makmur.									
			Peningkata n Indeks Pemajuan Kebudayaa n (IPK)								

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				PROGRAM PENGEMBAN GAN KEBUDAYAA N							
					2.22.02.2.0 1.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	30	Orang	Rp -	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N
					2.22.02.2.0 1.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Ko ta	Jumlah PPKD Kabupaten/Ko ta yang Disusun, Dimutakhirka n dan Ditetapkan	5	Dokume n	Rp 1.800.000.0 00,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N
				PROGRAM PELESTARIA N DAN PENGELOLAA N CAGAR BUDAYA							
					2.22.05.2.0	Pengusulan	Jumlah	10	Objek	Rp	DINAS

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					1.0003	Warisan Budaya Tak Benda	Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan			-	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N
2 3.	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PENDIDIKA N	Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milennial									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
			Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan								
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
					1.01.02.2.0 1.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	20	Orang	Rp 50.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Bidang Pendidikan	Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				
					1.01.02.2.0 2.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	Orang	Rp 50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N
					1.01.02.2.0 3.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan	50	Orang	Rp -	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				
					1.01.02.2.0 3.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	6	Paket	Rp -	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N
2 4.	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KESEHATA N	Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga,									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
			Kesehatan Untuk Semua								
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
					1.02.02.2.0 1.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas	1	Unit	Rp 15.000.000,	DINAS KESEHATAN

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			00	
					1.02.02.2.0 1.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	25	Paket	Rp 3.591.670.0 00,00	DINAS KESEHATAN
				PROGRAM PENINGKATA N KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					1.02.03.2.0 2.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	250	Orang	Rp 864.600.000 ,00	DINAS KESEHATAN
2 5.	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEMBERD AYAAN PEREMPUA N DAN PERLINDU NGAN ANAK	Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
			Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan								

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			perlakuan salah lainnya								
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
					2.08.03.2.0 2.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	12	Orang	Rp 15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
					2.08.03.2.0 3.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat	1	Lembaga	Rp 20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi				AN PENDUDUK DAN KB
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
					2.08.07.2.0 2.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	24	Orang	Rp 10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	1	Lembaga	Rp 10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	AN SIPIL	pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas.									
			Meningkat nya kualitas layanan kependudu kan dan pencatatan sipil, serta								

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			pemanfaat an data kependudu kan berbasis digital								
				PROGRAM PENDAFTARA N PENDUDUK							
					2.12.02.2.0 3.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1	Laporan	Rp 5.000.000,0 0	DINAS KEPENDUDU KAN DAN CATATAN SIPIIL
				PROGRAM PENCATATAN SIPIIL							
					2.12.03.2.0 2.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1	Laporan	Rp 5.000.000,0 0	DINAS KEPENDUDU KAN DAN CATATAN SIPIIL
2 7.	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PENGENDA LIAN	Memperku at pembangu nan sumber daya									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCAN A	manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas.									
			Terwujudn ya Penyelengg araan								

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Program Bangga Kencana yang Berkualita s								
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
					2.14.03.2.0 3.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampinga n Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	1	Kegiatan	Rp 25.000.000, 00	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN PERLINDUN GAN ANAK PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KB

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2.14.03.2.0 3.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	1	Laporan	Rp 25.000.000, 00	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN PERLINDUN GAN ANAK PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KB
				PROGRAM PEMBERDAY AAN DAN PENINGKATA N KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
					2.14.04.2.0 1.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat	1	Laporan / Dokume n	Rp 25.000.000, 00	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN PERLINDUN GAN ANAK

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Sejahtera (Satyagatra)	Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)				PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KB
					2.14.04.2.0 2.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	1	Laporan	Rp 25.000.000, 00	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN PERLINDUN GAN ANAK PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KB
2 8.	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEPEMUD AAN DAN OLAHRAGA	Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
			Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga								

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAA N							
					2.19.02.2.0 1.0020	Penyelenggara an Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Ko ta	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/ko ta yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	Orang	Rp 70.000.000, 00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
					2.19.02.2.0 2.0006	Penyelenggara an Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembanga n organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/ko ta	20	Organisa si	Rp 25.000.000, 00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						tingkat Kabupaten/Ko ta					
				PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAG AAN							
					2.19.03.2.0 3.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembang an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	20	Orang	Rp 50.000.000, 00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2.19.03.2.0 3.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kot a	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/ko ta yang Dibina dan Diberikan Pengembang an, termasuk olahraga disabilitas	20	Orang	Rp 20.000.000, 00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2 9.	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERPUSTA KAAN	Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan , alam, dan budaya serta peningkata n toleransi antarumat beragama									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.									
			Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat								
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5	Perpustakaan	Rp 5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelaras an kehidupan yang									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		armohnis dengan lingkungan , alam, dan budaya serta peningkata n toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyaraka t yang adil dan makmur.									
			Terwujudn ya manajeme n bencana yang terintegrasi , pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan								

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
<i>(1)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>
			pemadam kebakaran sesuai standar								
				PROGRAM PENANGGUL ANGAN BENCANA							
					1.05.03.2.0 1.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Ko ta (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Ko ta yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan	100	Orang	Rp 33.000.000, 00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				
					1.05.03.2.0 2.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1	Kegiatan	Rp -	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					1.05.03.2.0 2.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana	60	Orang	Rp -	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				
					1.05.03.2.0 2.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan	3	Kawasan	Rp -	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							menghadapi bencana				
			Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar								
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERA							

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				MAN DAN KETERTIBAN UMUM							
					1.05.02.2.0 2.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1	Laporan	Rp 10.000.000, 00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				PROGRAM PENCEGAHA N, PENANGGUL ANGAN, PENYELAMAT AN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT AN NON KEBAKARAN							

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					1.05.04.2.0 1.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	1	Laporan	Rp 50.000.000, 00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
3 1.	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperku at penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan , alam, dan budaya serta peningkata n toleransi antarumat									

Tabel 5.3
Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITA S	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB K EGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		beragama untuk mencapai masyaraka t yang adil dan makmur.									
			Meningkat nya Tertib Arsip dan Mengemba ngkan Memori Kolektif Bangsa								
				PROGRAM PENGELOLAA N ARSIP							
					2.24.02.2.0 1.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Ko ta	1	Laporan	Rp 65.345.000, 00	DINAS PERPUSTAK AAN DAN KEARSIPAN

Tabel 5.3 Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027											
N O	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2.24.02.2.0 3.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	40	Pengguna	Rp 45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Tabel 5.4 Keselarasan Pro-Sn/Tematik Pembangunan Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027										
NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET RKP D 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	DIGITALISASI PEMBELAJARAN									

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET RKPD 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran								
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	Orang	Rp 700.000.000,00	
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	6.00	Orang	Rp -	
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	Orang	Rp 50.000.000,00	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET RKPD 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	EKONOMI SYARIAH									
			4.01 SEKRETARIA T DAERAH	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	Laporan	Rp 265.980.000,00	
3.	IRIGASI YANG MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN									
	Ketahanan Pangan	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)								
			1.03 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1000	KM	Rp 104.500.000,00	
4.	JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)									
	Kesehatan untuk Semua	Jaminan Kesehatan Nasional								
			1.06 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1000	Usulan	Rp 28.800.000,00	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET RKPD 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.02 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Dokumen	Rp 9.895.200.000,00	
			2.12 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG ADMINISTRA SI KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1	Dokumen	Rp 5.000.000,00	
5.	KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH									
	Ketahanan Pangan	Kampung Nelayan Merah Putih								
			3.25 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	15	Kelompok	Rp -	
			3.25 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50	Orang	Rp 2.500.000,00	
6.	KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH									

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET RKPD 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pertumbuhan Ekonomi	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih								
			2.17 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	30	Unit Usaha	Rp 11.000.000,00	
7.	MAKAN BERGIZI GRATIS									
	Perluasan Akses Pendidikan	Makan Bergizi Gratis								
			1.02 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1.00	Dokumen	Rp 68.400.000,00	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET RKPD 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.01 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	20	Orang	Rp 50.400.000,00	
			2.09 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PANGAN	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1.00	Dokumen	Rp 30.200.000,00	
			3.25 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	1	Unit Usaha	Rp -	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET RKPD 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8.	MASYARAKAT ADAT									
			2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	142	Dokumen	Rp 25.000.000,00	
9.	MENCETAK DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN (SAWAH/LUMBUNG PANGAN/FOOD ESTATE)									
	Ketahanan Pangan	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)								

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET RKPD 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			3.27 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANIAN	3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1	Dokumen	Rp -	
			3.27 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANIAN	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	300	Ha	Rp -	
10.	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM		-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengentasan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	PANGAN AKUATIK									
	Ketahanan Pangan	Pangan Akuatik								
			3.25 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1	Unit	Rp -	
12.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT LENGKAP									

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET RKPD 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BERKUALITAS DI KABUPATEN/KOTA									
	Kesehatan untuk Semua	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota								
			1.02 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	250	Orang	Rp 864.600.000,00	
13.	PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH									
	Pengentasan Kemiskinan	Pembangunan 3 Juta Rumah								

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET RKPD 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.03 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	50	Dokumen	Rp -	
			1.04 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMA N	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	2.00	Unit Rumah	Rp 60.000.000,00	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET RKPD 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14.	PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS									
	Kesehatan untuk Semua	Pemeriksaan Kesehatan Gratis								
			1.02 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.00	Dokumen	Rp 9.895.200.000,00	
			1.02 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	12	Laporan	Rp 356.800.000,00	
			1.02 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1.00	Laporan	Rp 766.610.000,00	
			2.12 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG ADMINISTRA SI KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIIL	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1	Dokumen	Rp 5.000.000,00	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET RKPD 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15.	PENANGGULANGA N BENCANA									
			1.05 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KETENTERA MAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNG AN MASYARAKAT	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	Dokumen	Rp 25.000.000,00	
			1.05 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KETENTERA MAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNG AN MASYARAKAT	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.00	Dokumen	Rp -	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET RKPD 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.05 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KETENTERA MAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNG AN MASYARAKAT	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	10	Orang	Rp 5.000.000,00	
			1.05 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KETENTERA MAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNG AN MASYARAKAT	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1	Kegiatan	Rp 20.000.000,00	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET RKPD 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	Dokumen	Rp -	
16.	PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING									
	Kesehatan untuk Semua	Stunting								
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50	Keluarga	Rp 3.200.000,00	
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	Dokumen	Rp 2.333.872.000,00	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET RKPD 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.02 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	Dokumen	Rp 136.246.300,00	
			2.14 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pegantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pegantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1	laporan	Rp 5.000.000,00	
17.	PENDAYAGUNAAN PENYULUH PERTANIAN									
	Ketahanan Pangan	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian								
			3.27 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANIAN	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	11	Unit	Rp 50.000.000,00	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET RKPD 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18.	PENGARUSUTAMA AN GENDER									
			1.02 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	Dokumen	Rp 136.246.300,00	
			1.01 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	Orang	Rp 50.000.000,00	
			2.07 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	10	Orang	Rp -	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET RKPD 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			2.08 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	1	Lembaga	Rp 15.000.000,00	
19.	PENGENDALIAN INFLASI									
	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi								
			2.09 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1	laporan	Rp 3.410.000,00	
20.	PENUNTASAN TUBERKULOSIS (TBC)									
	Kesehatan untuk Semua	Penuntasan TBC								
			1.02 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1417	Orang	Rp 370.600.000,00	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET RKPD 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			2.12 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG ADMINISTRA SI KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1	Dokumen	Rp 5.000.000,00	
			1.02 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	63	Orang	Rp 15.000.000,00	
21.	PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH									

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET RKPD 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah								
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6	Dokumen	Rp 113.000.000,00	
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20	Dokumen	Rp 100.000.000,00	
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6	Dokumen	Rp 2.000.000.000,00	
22.	PERLINDUNGAN ANAK									

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET RKPD 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	2	Orang	Rp 25.000.000,00	
			5.01 PERENCANAAN	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	Berita Acara	Rp 91.260.000,00	
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2	Kegiatan	Rp 55.000.000,00	
23.	SEKOLAH RAKYAT									
	Pengentasan Kemiskinan	Sekolah Rakyat								

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET RKPD 2027	SATUAN	RENCANA ANGGARAN	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.06 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1000	Usulan	Rp 28.800.000,00	
			2.11 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	Dokumen	Rp 10.000.000,00	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2025-2029 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah yang menjadi acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2027. Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Target Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target IKU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Skor (0-100)	73,69	75,25
2	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,256	0,376
3	IMM (Indeks Modal Manusia)	Skor (0-1)	0,54	0,55
4	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Skor (0-100)	71,67	73,87
5	LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	Persen (%)	3,97	4,44 - 4,84
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen (%)	68,89	71,1
7	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Skor (0-100)	61,45	64,75
8	Indeks Demokrasi Indonesia	Skor (0-100)	72,2	75
9	Laju Pertumbuhan PAD	Persen (%)		5,08-35
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor (0-100)	76,8	78,9
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor (0-100)	65,91	70,49

Sumber : RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bengkulu Tengah

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.

Sebagai pedoman dalam mencapai target pembangunan, dilakukan pemetaan indikator tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD sesuai dengan perencanaan strategis Kabupaten Bengkulu Tengah. Berikut ini tabel penetapan indikator Daerah/ Tujuan Pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2027
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Pendapatan per kapita (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	55.28-55.28	63.31-69.97
2	Jumlah penanaman modal asing	Angka	348,881	386,803
3	Proporsi distribusi PDRB unggulan (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan)	%	42,8	43,7
4	Jumlah penanaman modal dalam negeri	Angka	3422939	3933440
5	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	80	86
6	Persentase Kontribusi pertanian, kehutanan dan perikananPDRB Ekonomi Kreatif	%	31,2	29,5
7	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,1	1,4
8	Tingkat Inflasi	%	3	2,8
9	Persentase Desa Mandiri	%	12	21
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,5	71
11	Persentase Kontribusi Akomodasi Makanan dan Minuman terhadap PDRB	%	1,9	2,2
12	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PBRD	%	12,3	13,1
13	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	102	104
14	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Persentase	101	104
15	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)		2,64	2,86
II	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI			
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persentase	56,52	63,26
2	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	50	65
3	Rasio Ketergantungan Penduduk	%	46,17	46,88
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	61	67
5	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,32	1,3
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	80	86
7	Indeks Risiko Bencana	Angka	125	110

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2027
8	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	61,5	67,5
9	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh/Kapi ta	900	990
10	Kepadatan Penduduk	Orang	101,81	105,27
III	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Indeks Infrastruktur	Angka	73,69	74,67
2	Angka Kemiskinan	%	10,14	9,33
3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,71	8,19
4	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	71,67	73,15
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,47	13,86
6	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	45,8	56,9
7	PDRB Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	55,5	63
8	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,40	0,37
9	Angka Literasi / Numerasi	Angka	88	91
10	Indeks Perlindungan Anak	Angka	63	69
11	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,256	0,376
12	Prevalensi Stunting	%	18	14,5
13	Tingkat Kemiskinan	%	9,9	8,6
14	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,25	71,9
15	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,6	70,3
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,5	2,35
17	Indeks Gini	Angka	0,27	0,24
18	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,1	4,7
19	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	30	39
20	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,4	8,7
21	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,3	13,6
22	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	5107991584	3949388865.03
24	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	15	45
25	Indeks Desa Membangun	Indeks	100	100
26	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	70	80
27	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	0	66
28	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Indeks	0,34	0,43
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,24	3,93
2	Persentase Penegakan Perda	%	100	100
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,10	3,18

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2027
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,65	2,95
5	Indeks Demokrasi Indonesia	%	72,2	75
6	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	100	100
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,8	78,9
8	Indeks Demokrasi Indonesia	(%)	72,2	75
19	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	76,09	77,87
10	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B	%	100	100
11	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan OPD Yang Tertib Arsip	%	76,09	76,09

Sumber : RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bengkulu Tengah

BAB VII

PENUTUP

RKPD Tahun 2027 merupakan tahun ketiga masa RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD, Rancangan APBD dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan partisipatif, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berupaya mengoptimalkan peran publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui masukan pokok-pokok pikiran DPRD, forum konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum tersebut merupakan wahana bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menghasilkan rumusan rencana kerja yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan Kabupaten Bengkulu Tengah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah sangat bergantung pada strategi berbagi peran antara Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya pencapaian tema pembangunan “*Digitalisasi Pelayanan Publik dan Optimalisasi Kualitas Sektor Strategis Daerah*”.

Secara umum, dokumen RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 merupakan acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bengkulu Tengah dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melaksanakan dan mengawasi program pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka disusun kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh OPD Kabupaten Bengkulu Tengah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk memperhatikan arah pembangunan

dan program-program yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 dalam rangka melaksanakan dan mendukung pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2027. Untuk mengupayakan konektivitas, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing OPD perlu membuat Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Tahun 2027 sebagai berikut :
 - a. Uraian rencana penggunaan APBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2027, merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir a diatas perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan sebagai tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau wewenang daerah;
3. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan, dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;
4. Dalam membuat Renja OPD, OPD wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik (*public hearing*), dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing;
5. Pada akhir tahun anggaran 2027, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta

kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;

6. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh elemen pelaksana pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini. Selain itu, perlu ditekankan bahwa pentingnya keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Oleh sebab itu harus ada kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan lintas instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung-jawab/tugas masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah bersama dengan masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2027 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak.


BUPATI BENGKULU TENGAH,
Drs. RACHMAT RIYANTO, S.ST., M.AP